

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAK**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE



Daftar Isi	Halaman / <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018		<i>Consolidated Financial Statements - For the years ended December 31, 2019 and 2018</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan ENTITAS ANAK/
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018 (AUDITED)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/Name | : | I Gusti Ngurah Putra |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Wirahyuda I/B-18, RT 001/007, Cipinang Melayu,
Makasar, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021- 8508501 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ Name | : | Haris Gunawan |
| Alamat kantor/Office Address | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 |
| Alamat domisili sesuai KTP/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Cibogo Atas, RT 001/003, Sukawarna, Sukajadi,
Bandung |
| Nomor Telepon/ Phone Number | : | 021- 8508510 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Keuangan/ <i>Director of Finance</i> |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak.

state that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The consolidated financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for internal control system within the Company and its subsidiaries.*

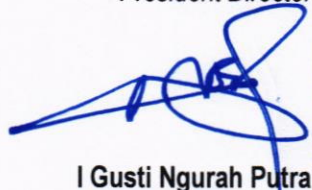
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

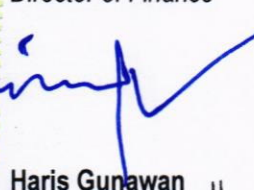
Jakarta, 21 April 2020/ April 21, 2020

Direktur Utama /
President Director

Direktur Keuangan/
Director of Finance


I Gusti Ngurah Putra




Haris Gunawan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSMIndonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00427/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/IV/2020

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019 and 2018, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 58 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang dampak dari wabah virus corona di Indonesia terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya. Terdapat suatu ketidakpastian material mengenai dampak dari situasi saat ini terhadap bisnis dan operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya di masa mendatang. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal - hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya No. 00143/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/VII/2020 bertanggal 17 Maret 2020 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan No.00040/2.1030/AU.1/03/0572-1/1/III/2019 bertanggal 20 Februari 2019 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dengan opini tanpa

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Empahasis of a matter

We draw attention to Note 58 for the accompanying consolidated financial statements that explain about the impact of the corona virus outbreak in Indonesia on the PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries. There is a material uncertainty about the impact of the current situation on the PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries business and operation in the future. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matters

Prior to this report, we have issued our independent auditors' report on consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries No. 00143/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/VII/2020 dated March 17, 2020 for the year ended December 31, 2019 and No. 00040/2.1030/AU.1/03/0572-1/1/III/2019 dated February 20, 2019 for the year ended December 31, 2018 with an unmodified opinion. With respect to the

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 59 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Laporan ini diterbitkan untuk dimasukkan ke dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dan tidak dimaksudkan dan digunakan untuk tujuan lain.

plan of the Company to conduct sustainable Shelf Registration Bonds Public Offering IV Waskita Karya Phase I Year 2020, the Company has reissued its financial statements as described in Note 59 to the accompanying consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with Shelf Registration Bonds Public Offering IV Waskita Karya Phase I Year 2020, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Rusli

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0572/
Public Accountant License Number: AP.0572

Jakarta, 21 April / April 21, 2020

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF
 FINANCIAL POSITION
 December 31, 2019 and 2018
 (In Full of Rupiah)**

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 51, 54	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka-Pendek	4	8.448.200.000	8.448.200.000	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih				Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	5, 54	1.085.899.931.009	2.242.057.577.361	Related Parties
Pihak Ketiga	5	2.469.994.551.718	1.526.131.112.293	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih				Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	7, 54	1.461.470.561.988	954.996.413.765	Related Parties
Pihak Ketiga	7	321.656.594.689	378.870.671.385	Third Parties
Piutang Lain-lain lancar - Bersih				Other Current Receivable - Net
Pihak Berelasi	8, 54	3.961.228.866.682	3.631.385.077.579	Related Parties
Pihak Ketiga	8	4.437.931.030.282	5.136.564.031.224	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	6	3.302.632.305.354	659.662.426.115	Joint Ventures Receivables
Persediaan	9	4.470.845.549.423	5.089.231.071.244	Inventories
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa				Gross Amount Due From Customers
Bagian Lancar				Current Portion
Pihak Berelasi	10, 54	11.475.684.609.873	24.937.285.230.226	Related Parties
Pihak Ketiga	10	2.695.490.949.143	7.413.447.932.876	Third Parties
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi				Financial Asset From Concession Project -
Bagian Lancar	20	13.129.339.111	13.129.339.111	Current Portion
Pajak Dibayar Dimuka	11	2.639.161.276.311	2.744.222.361.192	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	1.435.959.092.145	1.408.020.160.619	Advances and Prepayments
TOTAL ASET LANCAR		49.037.842.886.120	66.989.129.822.191	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	5.384.494.191.741	6.651.472.170.541	Investment in Associates and Joint Ventures
Piutang Lain-lain Tidak Lancar				Other Non-Current Receivable
Pihak Berelasi	8, 54	39.456.718.793	36.492.465.249	Related Parties
Pihak Ketiga	8	69.697.329.695	40.363.436.530	Third Parties
Properti Investasi	14	310.146.389.684	126.279.404.689	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	446.756.923.000	347.822.000.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap - Bersih	16	8.663.216.063.821	7.091.121.159.643	Fixed Assets - Net
Goodwill	17	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	Goodwill
Aset Tak Berwujud				Intangible Assets
Hak Pengusahaan Jalan Tol	19	55.378.833.829.251	40.233.245.160.591	Toll Road Concession Rights
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	20	339.019.791.333	381.622.115.538	Financial Assets from Concession Project
Aset Pajak Tangguhan	11	1.542.424.572	1.557.248.071	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	18	922.343.976.808	496.567.814.840	Other Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		73.551.416.464.451	57.402.451.801.445	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		122.589.259.350.571	124.391.581.623.636	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah Penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF
 FINANCIAL POSITION
 December 31, 2019 and 2018
 (In Full of Rupiah)**

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak Berelasi	21	202.384.052.499	162.642.716.514	Related Parties
Pihak Ketiga	21	12.178.793.774.334	14.743.190.282.452	Third Parties
Utang Bank Jangka Pendek				Short-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	22, 54	10.548.870.504.263	15.838.981.106.761	Related Parties
Pihak Ketiga	22	11.613.492.688.617	12.120.266.171.454	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank				Loan to Financial Institution Non-Bank
Bagian Jangka Pendek				Short-Term Portion
Pihak Berelasi	23, 54	--	392.616.610.781	Related Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek				Short-Term Gross Amount Due to Subcontractors
Pihak Berelasi	24, 54	71.292.255.619	28.608.708.105	Related Parties
Pihak Ketiga	24	2.617.607.394.787	6.447.912.789.870	Third Parties
Biaya yang Masih Harus Dibayar	26	720.628.410.360	695.785.978.311	Accrued Expenses
Utang Pajak Jangka Pendek	11	1.381.844.607.528	2.028.608.632.641	Short-Term Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek				Advances on Short-Term Contract
Pihak Berelasi	25, 54	48.365.113.601	10.080.783.551	Related Parties
Pihak Ketiga	25	315.921.526.485	277.599.246.755	Third Parties
Utang Bank Jangka Panjang				Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	30	833.000.000.000	416.500.000.000	Long-Term Bank Loan
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	32	8.710.487	198.479.272	Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	27	732.996.527.781	812.204.218.768	Short-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	28	3.264.993.640.444	1.999.290.340.350	Short-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	29	493.295.932.778	825.239.033.758	Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		45.023.495.139.583	56.799.725.099.343	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang				Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	30, 54	14.972.616.592.642	15.157.592.571.768	Related Parties
Pihak Ketiga	30	14.352.533.774.287	5.594.661.305.370	Third Parties
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang	31			Long-Term Joint Venture Payable
Pihak Berelasi	31	238.172.581.683	284.884.748.376	Related Parties
Pihak Ketiga	31	535.261.199.938	386.722.691.962	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang				Long Term Loan to Financial Institution Non Bank
Pihak Berelasi	23	1.279.719.946.497	--	Related Parties
Pihak Ketiga	23	566.871.061.034	161.786.818.242	Third Parties
Utang Bruto Jangka Panjang				Long-Term Gross Amount
Pihak Ketiga	24	1.361.073.469.091	2.225.140.670.799	Third Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				Advances on Long-Term Contract
Pihak Berelasi	34, 54	2.710.233.423	76.760.975.950	Related Parties
Pihak Ketiga	34	163.195.034.137	186.139.786.284	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	28.635.109.703	54.362.636.473	Deferred Tax Liabilities
Utang Pajak Jangka Panjang	11	193.161.337.709	805.408.693.733	Long-Term Taxes Payable
Utang Lain-lain Jangka Panjang				Other Long-Term Payables
Pihak Ketiga	33	1.876.410.844.810	1.549.134.705.578	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	27	300.000.000.000	300.000.000.000	Long-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	28	12.422.420.279.553	11.849.363.801.404	Long-Term Bonds Payable - Net
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian				Debt Purchases of Fixed Assets -
Jangka Panjang	32	--	6.226.563	Long-Term Portion
Liabilitas Imbalan Kerja	35	154.513.557.482	72.772.140.924	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		48.447.295.021.989	38.704.737.773.426	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		93.470.790.161.572	95.504.462.872.769	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham				Share Capital - Rp 100 par Value per Share for
pada 2019 dan 2018				for 2019 and 2018 respectively
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan				Authorized Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and
25.999.999.999 Saham Seri B				25,999,999,999 Shares of Serie B in
pada 2019 dan 2018				for 2019 and 2018 respectively
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				Subscribed and Fully Paid Capital
1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.902.599				1 share of Dwi Warna Serie A and 13,573,902,599
Saham Seri B				Serie B Shares in
pada 2019 dan 2018	36	1.357.390.259.999	1.357.390.259.999	for 2019 and 2018 respectively
Tambahan Modal Disetor	37	5.552.026.262.437	5.552.026.262.437	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	38			Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.672.393.928.212	1.583.494.837.349	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		8.561.015.893.115	8.763.909.422.956	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		739.581.647.808	744.295.282.636	Other Component of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable to
 Kepada Pemilik Entitas Induk		17.882.407.991.571	18.001.116.065.377	 Owners of Parent
Kepentingan Non-Pengendali	46	11.236.061.197.428	10.886.002.685.490	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		29.118.469.188.999	28.887.118.750.867	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		122.589.259.350.571	124.391.581.623.636	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Then Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Usaha	39, 55	31.387.389.629.869	48.788.950.838.822	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	40	(25.782.746.866.464)	(39.926.332.089.924)	Cost of Revenues
LABA BRUTO		5.604.642.763.405	8.862.618.748.898	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	41	(51.589.935.546)	(51.205.890.476)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	41	(1.319.957.348.117)	(1.616.540.079.059)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Final	11	(706.417.381.314)	(1.489.515.370.042)	Final Tax Expenses
Pendapatan Bunga		957.884.130.420	648.047.194.568	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih		(12.551.246.681)	11.863.388.237	Gain (Loss) on Foreign Exchange Rates - Net
Pendapatan Lain - lain	42	965.263.113.888	2.025.109.357.243	Other Income
Beban Lain-lain	43	(197.802.480.370)	(423.475.576.187)	Other Expenses
LABA SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA		5.239.471.615.685	7.966.901.773.182	PROFIT BEFORE FINANCIAL CHARGES, EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
Beban Keuangan	44	(3.620.533.969.507)	(2.459.241.670.378)	Financial Charges
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	45	(290.287.684.339)	28.782.401.204	Equity in Net Income (Loss) of Associates and Joint Ventures
LABA SEBELUM PAJAK		1.328.649.961.839	5.536.442.504.008	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	11	(299.751.593.948)	(916.874.798.455)	Income Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN		1.028.898.367.891	4.619.567.705.553	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		--	242.948.717.891	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih		(61.427.295.899)	27.790.965.459	Remeasurement of Defined Benefit Obligations - Net
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri		(4.713.634.828)	18.748.604.154	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operational
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan		(66.140.930.727)	289.488.287.504	Total Other Comprehensive Income (Expenses) For The Year
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN		962.757.437.164	4.909.055.993.057	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		938.142.364.887	3.962.838.031.865	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	46	90.756.003.004	656.729.673.688	Non-Controlling Interest
LABA TAHUN BERJALAN		1.028.898.367.891	4.619.567.705.553	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		872.001.434.160	4.252.326.319.369	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	46	90.756.003.004	656.729.673.688	Non-Controlling Interest
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN		962.757.437.164	4.909.055.993.057	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba per saham	47			Earnings per share
Dasar		69,11	291,95	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended Then December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to the Owners of the Parent											
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambahannya Additional Paid-In Capital	Saldo laba/ Retained earnings			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component of Equity			Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Selisih Penjabaran Laporan Dalam Mata Uang Asing/ Translation Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Jumlah/ Total			
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	1.357.390.259.999	5.467.018.482.083	920.938.115.937	5.760.142.991.677	6.681.081.107.614	(7.360.512.042)	508.308.951.702	14.006.438.289.356	8.748.386.520.139	22.754.824.809.495	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017
Cadangan Umum	38	--	--	662.556.721.412	(662.556.721.412)	--	--	--	--	--	General Reserves
Opsi Saham	--	(568.091.840)	--	--	--	--	--	(568.091.840)	--	(568.091.840)	Stock Option
Dividen Tunai	--	--	--	(776.342.383.468)	(776.342.383.468)	--	--	(776.342.383.468)	--	(776.342.383.468)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	46	--	--	--	--	--	--	--	1.480.886.491.663	1.480.886.491.663	Non-Controlling Interest
Surplus Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	242.948.717.891	242.948.717.891	--	242.948.717.891	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	3.962.838.031.865	3.962.838.031.865	--	--	3.962.838.031.865	656.729.673.688	4.619.567.705.553	Profit for the Current Year
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	--	85.575.872.194	--	452.036.538.835	452.036.538.835	--	(18.350.479.069)	519.261.931.960	--	519.261.931.960	Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	--	--	--	27.790.965.459	27.790.965.459	--	--	27.790.965.459	--	27.790.965.459	Remeasured of Defined Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	--	18.748.604.154	--	18.748.604.154	18.748.604.154	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.583.494.837.349	8.763.909.422.956	10.347.404.260.305	11.388.092.112	732.907.190.524	18.001.116.065.377	10.886.002.685.490	28.887.118.750.867	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018
Cadangan Umum	38	--	--	88.899.090.863	(88.899.090.863)	--	--	--	--	--	General Reserves
Dividen Tunai	--	--	--	--	(990.709.507.966)	(990.709.507.966)	--	(990.709.507.966)	--	(990.709.507.966)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	46	--	--	--	--	--	--	--	259.302.508.934	259.302.508.934	Non-Controlling Interest
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	938.142.364.887	938.142.364.887	--	--	938.142.364.887	90.756.003.004	1.028.898.367.891	Profit for the Current Year
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih	--	--	--	(61.427.295.899)	(61.427.295.899)	--	--	(61.427.295.899)	--	(61.427.295.899)	Remeasurement of Defined Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	--	(4.713.634.828)	--	(4.713.634.828)	(4.713.634.828)	Exchange Rates Difference on translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	8.561.015.893.115	10.233.409.821.327	6.674.457.284	732.907.190.524	17.882.407.991.571	11.236.061.197.428	29.118.469.188.999	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

For the Years Then Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Full of Rupiah)

<i>Notes</i>	2019	2018	
	Rp	Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	53.622.470.304.152	49.153.481.633.794	Cash Receipts from Customers
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(39.812.397.638.626)	(42.146.152.132.659)	Cash Paid to Suppliers
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi	(786.179.050.513)	(1.034.852.971.320)	Cash Paid to Employees and Directors
Kas Dihasilkan dari Operasi	13.023.893.615.013	5.972.476.529.815	Cash Generated from Operations
Pembayaran Beban Keuangan	(1.823.812.200.163)	(394.805.443.798)	Payment for Financial Charges
Penerimaan Restitusi Pajak	314.435.395.994	--	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Pajak	(2.500.267.370.782)	(1.566.131.007.443)	Payment for Taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	9.014.249.440.062	4.011.540.078.574	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari Ventura Bersama	915.660.664.958	195.521.828.745	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	(2.860.216.608.022)	(871.698.742.646)	Placement of Joint Ventures
Penempatan Deposito	(216.255.472.785)	(2.272.636.099.368)	Placement of Time Deposits
Penerimaan Pencairan Deposito	2.099.000.000.000	1.821.534.513.690	Receipt from Time Deposits
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak	--	484.030.710.810	Receipt Dividend from Subsidiaries
Perolehan Aset Tetap	(2.742.933.949.138)	(2.962.349.807.081)	Acquisition of Fixed Assets
Penambahan Properti Investasi	(183.866.984.995)	(59.733.151.815)	Addition of Investment Properties
Perolehan Aset Takberwujud	(11.963.159.274.305)	(15.181.992.508.784)	Acquisition of Intangible Assets
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	13 (1.597.873.534.941)	(2.801.102.344.000)	Placement of Investment In Associates and and Long-Term Investments
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1.657.200.000.000	2.857.143.347.539	Receipt from Disposal of Investment In Subsidiaries and Associates
Pinjaman Diberikan kepada Entitas Asosiasi	(32.298.146.709)	214.527.369.072	Loans to Associates
Pengurangan Penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	--	(191.396.766.625)	Reduction of Investment in Subsidiaries and Associates
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.924.743.305.937)	(18.768.151.650.463)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan Utang Obligasi	51 (2.000.000.000.000)	(350.000.000.000)	Payment of Bonds Payable
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	969.702.739.827	636.933.783.652	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Pembayaran Beban Keuangan	(3.642.809.954.485)	(1.613.334.640.902)	Payment for Financial Charges
Pembayaran Emisi Obligasi	51 (42.622.479.202)	(41.953.938.572)	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Penerbitan Obligasi	51 3.845.750.000.000	5.154.250.000.000	Receipt from Bonds Issuance
Penerimaan Pinjaman Bank	51 101.597.843.065.552	92.883.247.775.045	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	51 (96.874.491.736.591)	(76.733.808.263.389)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Dividen Tunai	51 (990.709.745.083)	(776.342.383.468)	Payment of Cash Dividend
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	51 1.292.187.578.508	879.341.822.975	Receipt from Financial Institution Non Bank
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	51 --	(2.218.009.712.976)	Payment to Financial Institution Non Bank
Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah	51 700.000.000.000	1.144.403.604.859	Receipt from Medium Term Notes
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah	51 (779.207.690.987)	(786.371.433.625)	Payment to Medium Term Notes
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	259.302.508.934	1.512.726.235.858	Receipt from Non-controlling Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4.334.944.286.473	19.691.082.849.457	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.575.549.579.402)	4.934.471.277.568	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI	(11.818.609.407)	11.113.410.916	UNREALIZED GAIN (LOSS) ON FOREIGN EXCHANGE RATE
EFEK DIVESTASI	--	(188.869.058.030)	EFFECT ON DIVESTMENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	10.845.678.217.201	6.088.962.586.747	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
(Catatan 50)

Reconciliation of liabilities arising from financing activities
(Note 50)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Negara Waskita Karya ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961, dari Perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 Januari 1961.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan Surat Keputusan No. 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 137 tanggal 27 Mei 2019 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033169.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai bidang usaha Perusahaan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

a. Kepemilikan Langsung

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2019	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Toll/ Toll Road	2014	80,56	71.249.304.994.583	(675.960.085.557)
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	16.149.121.684.330	806.148.752.926
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	5.074.027.250.603	102.717.027.218
PT Waskita Karya Infrastruktur (dih/ formerly PT Waskita Karya Energi)	Jakarta	Investasi/ Investment	2016	99,99	663.521.030.725	(9.719.896.586)

1. GENERAL

1.a. Establishment and General Information

The State Owned Company Waskita Karya ("the Company") was established on January 1, 1961 based on Government Regulation No. 62 year 1961, from a foreign company named "Volker Aanemings Maatschappij NV" which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. The Company started its commercial operations on January 1, 1961.

According to Government Regulation No. 40 year 1970, the Company's status was changed from State Enterprise into Perseroan (Persero). Furthermore, the Company was named as PT Waskita Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 80 dated March 15, 1973 of Kartini Mulyadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law on August 20, 1973 in his Decree No. 4.a.5/310/3 and stated on State Gazette of Republic of Indonesia No. 82 on November 13, 1973, Supplement No. 91.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 137 on May 27, 2019 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0033169.AH.01.02.Tahun 2019 dated June 26, 2019. The changes referred to include, among others, changes in the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the scope of business Company.

The Company is domiciled in Jakarta, with the head office located at Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Subsidiaries

The Company has 50% direct and indirect ownership interest in subsidiaries and/or has control over consolidated subsidiaries management as follows:

a. Direct Ownership

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2018	
					Jumlah Aset/ Total Assets Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	79,88	57.262.108.475.134	957.458.418.294
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	15.222.388.589.814	1.103.472.788.182
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	4.290.092.896.122	168.462.426.431
PT Waskita Karya Energi	Jakarta	Investasi/ Investment	2016	99,99	397.152.131.423	(23.188.344.439)

b. Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2019	
					Jumlah Aset/ Total Assets Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	382.762.473.532	11.973.369.828
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	17.376.158.131	(5.639.369.884)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	90,00	8.291.272.849.832	31.256.377.077
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	5.710.147.213.825	(294.387.069.541)
PT Pematang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Nopember/ November 2018	60,00	7.787.893.335.066	(209.878.492.852)
PT Waskita Sriwijaya Tol (dh/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	11.538.691.245.033	870.188.312
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,90	11.412.254.242.702	2.961.858.326
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	7.375.640.508.398	4.252.341.192
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2017	99,70	9.136.297.335.339	(379.390.444.826)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	19.585.019.151	210.703.894
PT Waskita Fim Perkasa Realti (WFPR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	826.685.975.678	5.457.526.154
PT Waskita Modern Realty (WMR)	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	401.825.844.521	87.222.470

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination 2018	
					Jumlah Aset/ Total Assets Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	374.632.256.444	(6.895.888.971)
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	13.636.736.210	(5.565.819.048)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	90,00	5.928.060.765.087	1.876.580.397
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	5.436.936.696.537	7.560.408.553
PT Pematang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Nopember/ November 2018	60,00	7.689.541.259.403	(8.913.171.618)
PT Waskita Sriwijaya Tol (dh PT Sriwijaya Markmore Persada)	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,19	8.271.557.566.264	2.469.228.764
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,90	8.557.702.147.304	888.522.992
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	4.217.355.404.456	6.370.767.223
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2017	99,70	6.973.010.047.504	(352.826.567.704)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	60,00	26.155.671.621	467.059.194
PT Waskita Fim Perkasa Realti	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	136.406.866.995	(596.753.442)
PT Waskita Modern Realty	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	401.667.169.202	184.676.343

PT Waskita Toll Road (WTR)

Pendirian WTR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 62 tanggal 19 Juni 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan

PT Waskita Toll Road (WTR)

The establishment of WTR (subsidiary) was based on notarial deed No. 62 dated June 19, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014.

Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-14734.40.10.2014 dated June 25, 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0323941 tanggal 30 Agustus 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor WTR.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 47 dated August 21, 2019 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0323941 dated August 30, 2019. The relevant changes are related to changes in the capital of WTR subscribed and paid.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

Pendirian WBP (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 47 tanggal 24 April 2019 dari notaris Fathiah Helmi S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0279668 tanggal 24 Mei 2019.

The establishment of WBP (subsidiary) was based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial deed No. 47 on April 24, 2019 of notary Fathiah Helmi, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0279668 dated May 24, 2019.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pendirian WKR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-54929.AH.01.02, tanggal 23 Oktober 2014.

The establishment of WKR (subsidiary) was based on notarial deed No. 27 dated October 16, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-54929.AH.01.02 dated October 23, 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal 11 Nopember 2019 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 14 on November 11, 2019 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 dated November 25, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)
(dh PT Waskita Karya Energi (WKE))

Pendirian WKI (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 05 tanggal 4 Maret 2016 dari notaris Fathiah Helmi S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 108 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0117125 tanggal 26 Pebruari 2019. Nama Perusahaan berubah menjadi PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) berdasarkan akta notaris No. 109 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Pebruari 2019.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

Pendirian WSE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No. 22 tanggal 11 Juli 2013 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-40852.AH.01.01.Tahun 2013.

Selanjutnya pengalihan kepemilikan (*inbreg*) WSE ke dalam WKI dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.Kn. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 21 Desember 2017 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0204677 tanggal 22 Desember 2017.

PT Waskita Wado Energi (WWE)

Pendirian WWE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No.15 tanggal 19 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN. Pada bulan Desember 2016, WKI mendirikan entitas anak baru, WWE, dengan kepemilikan saham sebesar 99,96% saham dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Waskita.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)
(formerly PT Waskita Karya Energi (WKE))

The establishment of WKI (subsidiary) was based on notarial deed No. 05 dated March 4, 2016 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 108 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0117125 dated February 26, 2019. The Company's Name change to PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) based on notarial deed No. 109 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 dated February 26, 2019.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

The establishment of WSE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 22 dated July 11, 2013 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-40852.AH.01.01. Tahun 2013.

Then transfer of ownership of WSE to WKI was based on the notarial deed No. 21 dated December 23, 2016 of Kokoh Henry, S.H., M.Kn. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 15 on December 21, 2017 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0204677 dated December 22, 2017.

PT Waskita Wado Energi (WWE)

The establishment of WWE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 15 dated December 19, 2016 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN. In December 2016, WKI established a new subsidiary, WWE, with 99.96% ownership and the remaining shares owned by Koperasi Waskita.

Berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 6 Desember 2018 dari notaris Yusdin Fahim, S.H., kepemilikan WKI di WWE berubah menjadi Rp 9.516.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 99,99%.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 142 tanggal 22 Juli 2019 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0044534.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 mengenai anggaran dasar dan susunan pemegang saham.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

Pendirian CCT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 52 tanggal 22 Pebruari 2008 dari notaris Agus Madjid, S.H. M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 tanggal 27 Pebruari 2008.

Selanjutnya, peralihan pemegang saham CCT kepada WTR dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 30 tanggal 13 Juli 2015 dari notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

Pendirian TJT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 79 tanggal 19 Juli 2007 dari notaris Humberg Lie, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Akuisisi TJT oleh WTR sesuai dengan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 tanggal 22 Desember 2015. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0990894.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 4 tanggal 3 Januari 2019 dari notaris Febby Ruben Hidayat S.H., yang telah disetujui

Based on the notarial deed No. 2 dated December 6, 2018 by notary Yusdin Fahim S.H., the ownership of WKI in WWE increased to Rp 9,516,000,000 which raised the Company's ownership to 99.99%.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 142 on July 22, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0044534. AH.01.02.Tahun 2019 dated July 31, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 4 paragraph 1 and 2 related to articles of association and shareholder structure.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

The establishment of CCT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 52 dated February 22, 2008 of notary Agus Madjid, S.H. M.Kn. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 dated February 27, 2008.

Furthermore, the change in ownership of CCT to WTR was based on notarial deed No. 30 dated July 13, 2015 of notary Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

The establishment of TJT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 79 dated July 19, 2007 of notary Humberg Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Acquisition of TJT by WTR was in accordance with the deed of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 dated December 22, 2015. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0990894.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 4 on January 3, 2019 of notary Febby Ruben Hidayat, S.H., which has been approved by

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0002381 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penambahan Modal.

the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0002381 dated January 3, 2019 related to Capital Addition.

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

Pendirian PBTR, (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 Juni 2006 dari notaris Bonardo Nasution S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 13 Juli 2006.

The establishment of PBTR, (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 10 dated June 15, 2006 of notary Bonardo Nasution, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 dated July 13, 2006.

Selanjutnya peralihan pemegang saham PBTR ke dalam WTR berdasarkan akta notaris No. 57 tanggal 15 Pebruari 2016 dari notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0982070.

Then change in ownership of PBTR to WTR was based on notarial deed No. 57 dated February 15, 2016 of notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0982070.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 46 tanggal 21 Desember 2018 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 46 on December 21, 2018 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 dated December 27, 2018.

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) (dahulu PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP))

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) (dahulu PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP))

Pendirian SRIMP (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 51 tanggal 18 Nopember 2011 dari notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Nopember 2011.

The establishment of SRIMP (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 51 dated November 18, 2011 by notary Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. This notarial deed was approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011, dated November 21, 2011.

Akuisisi SRIMP oleh WTR sesuai dengan akta notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 12 Mei 2016 dari notaris Fathiah Helmi, S.H.

The acquisition of SRIMP by WTR is in accordance with the notarial deed No. 26 and No. 27 dated May 12, 2016 by notary Fathiah Helmi, S.H.

Berdasarkan akta notaris No. 51 tanggal 27 April 2017 dari notaris Fathiah Helmi S.H., WTR membeli saham milik PT Persada Tanjung Api-Api sebesar Rp 146.250.000.000 atau sebesar 29,25%, saham milik PT Kayson Company sebesar Rp 23.750.000.000 atau sebesar 4,75% dan saham milik PT Sriwijaya Marga Persada sebesar Rp 20.000.000.000 atau sebesar

Based on the notarial deed No. 51 dated April 27, 2017 by notary Fathiah Helmi S.H., WTR bought the shares owned by PT Persada Tanjung Api – Api amounted to Rp 146,250,000,000 or equivalent to 29.25%, shares owned by PT Kayson Company amounted to Rp 23,750,000,000 or equivalent to 4.75% and shares owned by PT Sriwijaya Marga Persada amounted

4%, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 75,57%.

Berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 8 Juni 2018 dari notaris Catur Virgo, S.H., M.H., kepemilikan WTR di SRIMP berubah menjadi Rp 112.700.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 98,19%.

Berdasarkan akta notaris No. 49 tanggal 21 Desember 2018 dibuat oleh notaris Catur Virgo, S.H., M.H. berkedudukan di Jakarta Barat dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000072.AH.01.02 tanggal 2 Januari 2019 mengenai perubahan nama PT Sriwijaya Markmore Persada menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol disingkat WST.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 35 tanggal 24 September 2019 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074036.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 3 ayat 2 mengenai kegiatan usaha aktivitas jalan tol.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 48% atas modal disetor WBW (Kepemilikan tidak langsung melalui WTR) atau sebesar Rp 7.500.000.000, berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 tanggal 28 Oktober 2014.

Pada tanggal 9 Mei 2016, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Mei 2016, WTR membeli saham milik PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 1.094.000.000, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 55%.

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 4 April 2016, PT Energi Bumi Mining memiliki opsi saham untuk membeli kembali transfer kepemilikan 7% dari WBW sampai dengan 31 Desember 2016. Opsi saham tersebut hangus dan WBW dikonsolidasi.

Berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 8 Desember 2017 dari notaris Zulkifli Harahap S.H., Modal Dasar WBW yang

to Rp 20,000,000,000 or equivalent to 4%, which increased the Company's ownership to 75.57%.

Based on the notarial deed No. 11 dated June 8, 2018 by notary Catur Virgo S.H., M.H., the ownership of WTR in SRIMP increased to Rp 112,700,000,000 which raised the Company's ownership to 98.99%.

Based on notarial deed No. 49 dated December 21, 2018 made by notary Catur Virgo, S.H., M.H. based in West Jakarta and obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0000072.AH.01.02 dated January 2, 2019 regarding the change of name of PT Sriwijaya Markmore Persada into PT Waskita Sriwijaya Tol abbreviated as WST.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 35 on September 24, 2019 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0074036.AH.01.02 Tahun 2019 dated September 24, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the business activities of toll road activities.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

The Company had an initial ownership of 48% on the paid in capital of WBW (indirect ownership through WTR) amounted to Rp 7,500,000,000, based on the notarial deed of Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 dated October 28, 2014.

On May 9, 2016, based on the Decree of the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders (RUPS) dated May 3, 2016, WTR bought the shares owned by PT Energi Bumi Mining amounted to Rp 1,094,000,000, which increased the Company's ownership to 55%.

Based on notarial deed No. 5 dated April 4, 2016, PT Energi Bumi Mining has shares option to buy back the 7% ownership transfer from WBW until December 31, 2016. The shares option was expired and WBW was consolidated.

Based on the notarial deed No. 13 dated December 8, 2017, by notary Zulkifli Harahap S.H., the authorized capital of

sebelumnya berjumlah 50.000 lembar saham menjadi 1.000.000 lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 7.500.000.000 menjadi Rp 554.957.000.000 sehingga penyertaan WTR meningkat menjadi 76,06%. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0156761.AH.01.11 tanggal 11 Desember 2017.

Berdasarkan surat keterangan notaris Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), WTR menambah penyertaan pada WBW sebesar Rp 826.718.000.000. Perubahan ini telah disahkan sesuai dengan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H No. 10 tanggal 9 Pebruari 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 27 Nopember 2018 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H., M.H., kepemilikan WTR di WBW berubah menjadi Rp 1.268.697.000.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0268229 tanggal 27 Nopember 2018.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

Pendirian PT MTD CTP Expressway (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 4 tanggal 13 September 2006 dari notaris Martina S.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 Nopember 2006 No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006.

Peralihan pemegang saham PT MTD CTP Expressway kepada WTR sesuai dengan akta notaris No. 15 tanggal 26 April 2017 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H.

Berdasarkan akta notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 17 tanggal 24 Mei 2017 telah disetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama "PT MTD CTP Expressway" menjadi "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 20 September 2019 dari notaris Drs. Soebiantoro, S.H., kepemilikan WTR di CTP berubah menjadi Rp 696.304.700.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0336756 tanggal 25 September 2019.

the WBW changed from 50,000 shares to 1,000,000 shares and increase in issued capital and fully paid from Rp 7,500,000,000 to Rp 554,957,000,000 which increased WTR's ownership to 76.06%. This deed was approved by Ministry of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0156761.AH.01.11 dated December 11, 2017.

Based on the letter of notary Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 dated February 1, 2018 in connection with the Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB), WTR added the investment in WBW amounted to Rp 826,718,000,000. This amendment has been ratified in accordance with the notarial deed of Zulkifli Harahap, S.H No. 10 dated February 9, 2018.

Based on the notarial deed No. 18 dated November 27, 2018 by notary Zulkifli Harahap S.H., M.H., the ownership of WTR in WBW increased to Rp 1,268,697,000,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0268229 dated November 27, 2018.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

The establishment of PT MTD CTP Expressway (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 4 dated September 13, 2006 of notary Martina, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Right through the decision letter No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006 dated November 23, 2006.

Transfer of ownership of PT MTD CTP Expressway to WTR was based on notarial deed No. 15 dated April 26, 2017 of notary Zulkifli Harahap, S.H.

Based on notarial deed Drs. Soebiantoro, S.H, No. 17 dated May 24, 2017 has approved to change the name of "PT MTD CTP Expressway" into "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Based on the notarial deed No. 18 dated September 20, 2019 by notary Drs. Soebiantoro S.H., the ownership of WTR in CTP increased to Rp 696,304,700,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0336756 dated September 25, 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 3 Oktober 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

Pendirian KKDM (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai Akta Pendirian dari Notaris Mudofir Hadi S.H, No. 94 tanggal 20 Desember 1996. WTR memiliki penyertaan 60% dari modal disetor KKDM.

Berdasarkan akta notaris tanggal 8 Juni 2017 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 25, WTR membeli kepemilikan minoritas pada saham KKDM sebesar 38,97% atau senilai Rp 525.000.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 98,97%.

Berdasarkan akta notaris No. 17 tanggal 20 Desember 2017 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR membeli penerbitan saham KKDM sebesar 0,57% sehingga kepemilikan WTR atas KKDM menjadi 99,54%.

Berdasarkan akta notaris No. 3 tanggal 9 Februari 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., perihal Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Januari 2018, WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 73.476.879.000.

Berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 5 Juni 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 49.124.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 99,64%, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0216005 tanggal 26 Juni 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 9 Januari 2019 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan penerbitan dan penambahan modal. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0016493 tanggal 11 Januari 2019.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently based on notarial deed No. 4 on October 3, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 dated October 8, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

The establishment of KKDM (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 94 dated December 20, 1996 of notary Mudofir Hadi, S.H. WTR owns 60% of paid up capital of KKDM.

Based on notarial deed No. 25 dated June 8, 2017 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., WTR purchased a minority interest in KKDM amounted to 38.97% or equivalent to Rp 525,000,000,000, bringing the ownership of WTR to 98.97%.

Based on notarial deed No. 17 dated December 20, 2017 by notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR bought 0.57% issuance of KKDM shares and bringing the WTR's ownership on KKDM to 99.54%.

Based on notarial deed No. 3 dated February 9, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., regarding the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders (RUPS) dated January 24, 2018, WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 73,476,879,000.

Based on notarial deed No. 4 dated June 5, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 49,124,000,000, bringing the ownership of WTR to 99.64%, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0216005 dated June 26, 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 15 on January 9, 2019 of notary Ariani L. Rachim, S.H., regarding changes in the Company's issued and increased paid capital stocks. The amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0016493 dated January 11, 2019.

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

Pendirian TTB (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 42 tanggal 16 September 2016 dari notaris Yeti Liana, S.Psi., S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 21 September 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada TTB atau setara Rp 12.000.000.000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 27 tanggal 18 September 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Waskita Fim Perkasa Realti (WFPR)

Pendirian WFPR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 122 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Rosida Rajagukguk Siregar. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 31 Mei 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

Anggaran dasar WFPR telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 126 dari Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., tanggal 19 Desember 2019 tentang penambahan penyertaan WKR pada WFPR sebesar Rp 45.120.000.000 sehingga kepemilikan menjadi 60% atau setara dengan Rp 283.821.000.000. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0379243 tanggal 30 Desember 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

Pendirian WMR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 7 tanggal 17 Mei 2018 dari notaris Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 17 Mei 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11.Tahun 2018.

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

The establishment of TTB (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 42 dated September 16, 2016 of notary Yeti Liana, S. Psi., S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter dated September 21, 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, a subsidiary, holds a 60% interest in TTB or equivalent to Rp 12,000,000,000.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 27 on September 18, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 dated September 20, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Waskita Fim Perkasa Realti (WFPR)

The establishment of WFPR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 122 dated May 31, 2018 of notary Rosida Rajagukguk Siregar. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter dated May 31, 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

WFPR's Article of Association has been amended, most recently based on notarial deed No. 126 of Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., dated December 19, 2019 WKR increased its investment in WFPR amounted to Rp 45,120,000,000, increasing ownership to 60% or equivalent to Rp 283,821,000,000. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0379243 dated December 30, 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

The establishment of WMR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 7 dated May 17, 2018 of notary Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter dated May 17, 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11. Tahun 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 13 Juli 2018 dari notaris Dewi Tenti Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014522.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 4 on July 13, 2018 of notary Dewi Tenti Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn. The amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0014522.AH.01.02.Tahun 2018 dated July 18, 2018.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and subsidiaries herein after will be referred as "the Group".

1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

1.c. The Public Offering of the Company's Securities

Saham

Shares

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan surat keputusan No. S-14012/BL/2012.

On December 10, 2012, the Company's obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through the decision letter No. S-14012/BL/2012.

Pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan surat No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012 Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui penawaran efek Perusahaan di BEI kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham.

On December 17, 2012, according to letter No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012, Indonesian Stock Exchange (IDX) agreed to the public offering of the Company on IDX for 3,082,315,000 of common stock with the par value Rp 100 per share and the offering price Rp 380 per share.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat sebesar 6,25% atau sebanyak 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan kepada karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (*Employee Stock Allocation/ESA*).

From the number of shares offered in the public offering of 6.25% or 192,644,000 of new ordinary shares is allocated to the employees through the allocation shares program of the Company (Employee Stock Allocation/ESA).

Pada tanggal 19 Desember 2012, seluruh saham Perusahaan sebanyak 9.632.236.000 saham telah tercatat pada BEI. Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat keputusan No. S-238/D.04/2015.

On December 19, 2012, a total of 9,632,236,000 shares of the Company were listed on the IDX. On June 10, 2015, the Company obtained an effective statement from The Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) of the Registration Statement in the Limited Public Offering I (LPO I) through the decision letter No. S-238/D.04/2015.

Pada tanggal 7 Juli 2015, seluruh saham Perusahaan melalui PUT I sebanyak 3.653.498.200 saham telah tercatat pada BEI, sehingga jumlah keseluruhan saham Perusahaan setelah PUT I menjadi sebesar 13.567.473.560 saham.

On July 7, 2015, all the Company's shares through the LPO I amounted to 3,653,498,200 shares that have been listed in the IDX, bringing the number of shares of the Company after the LPO I amounted to 13,567,473,560 shares.

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status
1	Berkelanjutan I Tahap II Seri B/ Shelf I Phase II Tranche B	1.150.000.000.000	5	16 Oktober/ October 16, 2015	16 Oktober/ October 16, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
2	Berkelanjutan II Tahap II/ Shelf II Phase II	900.000.000.000	5	28 September/ September 28, 2016	28 September/ September 28, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
3	Berkelanjutan II Tahap III Seri A/ Shelf II Phase III Tranche A	747.000.000.000	3	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
4	Berkelanjutan II Tahap III Seri B/ Shelf II Phase III Tranche B	910.000.000.000	5	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
5	Berkelanjutan III Tahap I Seri A/ Shelf III Phase I Tranche A	1.369.000.000.000	3	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2020	Belum Lunas/ Outstanding
6	Berkelanjutan III Tahap I Seri B/ Shelf III Phase I Tranche B	1.631.000.000.000	5	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
7	Berkelanjutan III Tahap II Seri A/ Shelf III Phase II Tranche A	1.175.000.000.000	3	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
8	Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ Shelf III Phase II Tranche B	2.276.500.000.000	5	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
9	Berkelanjutan III Tahap III Seri A/ Shelf III Phase III Tranche A	761.000.000.000	3	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2021	Belum Lunas/ Outstanding
10	Berkelanjutan III Tahap III Seri B/ Shelf III Phase III Tranche B	941.750.000.000	5	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
11	Berkelanjutan III Tahap IV Seri A/ Shelf III Phase IV Tranche A	484.000.000.000	3	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
12	Berkelanjutan III Tahap IV Seri B/ Shelf III Phase IV Tranche B	1.361.750.000.000	5	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2024	Belum Lunas/ Outstanding

WBP telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status
1	Berkelanjutan I Tahap I/ Shelf I Phase I Tranche	500.000.000.000	3	5 Juli/ July 5, 2019	5 Juli/ July 5, 2022	Belum Lunas/ Outstanding
2	Berkelanjutan I Tahap II/ Shelf I Phase II Tranche	1.500.000.000.000	3	30 Oktober/ October 30, 2019	30 Oktober/ October 30, 2022	Belum Lunas/ Outstanding

1.d. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi EPC, perancangan dan pembangunan, layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen gedung, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik,

Bonds

The Company has issued bonds with the following details are as follows:

WBP has issued bonds with the following details are as follows:

1.d. The Scope of Business

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objectives of the Company are to doing business in construction industry, manufacturing industry, leasing service, agency services, investment, agro industry, integrated work (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), trade, area management, construction improvement services, information technology and tourism as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce high quality and strong competitive goods and/or services to gain/pursue profit to increase the Company's value by applying the principles of Limited Liability Company.

In order to achieve the objectives, the Company engaged in the following activities Construction execution work, mining services, integrated EPC, design and build, management consultant service, building management, building components and raw material fabrication, component and construction tools fabrication, metals, woods, rubber, and plastic fabrication, agency services for raw materials, building

penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, pengembangan sistem layanan jasa konsultasi (konsultan manajemen), layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan *property* dan *realty*.

components and construction equipment, investment and/or business management in area of basic facility and infrastructure and industry, performing activities in agro industry field, export-import, general trading, area management, system development consulting services (management consultant), service in information technology and tourism and property and realty development.

Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi EPC.

The Company's current business activities are construction activities and integrated EPC.

1.e. Organisasi

1.e. Organization

Struktur Organisasi

Organization Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan tanggal 9 Mei 2019, menetapkan 7 (tujuh) anggota direksi Perusahaan yaitu seorang direktur utama dan 6 (enam) direktur.

According to the Decree of State Ministry of State Owned Enterprise (BUMN) in General Meeting of Shareholders (RUPS) of the Company dated May 9, 2019, appointed 7 (seven) directors of the Company consisting of a president director and 6 (six) directors.

Wilayah kerja sesuai Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/WK/2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Unit bisnis memiliki 5 (lima) divisi, sebagai berikut:

Work areas according to the Decision Letter of Director No. 03/SK/WK/2019 concerning Changes in the Organizational Structure of the Company. The business unit have 5 (five) divisions, as follows:

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Gedung/ <i>Building Division</i>	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia dan luar negeri (kecuali Timor Leste) berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek gedung, bandara, jalan kereta api dan LRT, serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia and abroad (except Timor Leste), domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, railways and LRT projects, as well as investment projects and selected development established by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	Jakarta
Divisi Infrastruktur I/ <i>Infrastructure I Division</i>	Daerah operasional meliputi Pulau Sumatera berkedudukan di Medan dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the Sumatera Island, domiciled in Medan to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value> Rp 200 Billion.</i>	Medan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Infrastruktur II/ <i>Infrastructure II Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the Banten, DKI Jakarta, West Java, DI Yogyakarta, Central Java, West Kalimantan, and Central Kalimantan, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i></p>	Jakarta
Divisi Infrastruktur III/ <i>Infrastructure III Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta Timor Leste, berkedudukan di Surabaya dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar.</p> <p><i>Operational area covers the East Java, Bali, NTB, NTT, East Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua as well as Timor Leste, domiciled in Surabaya to perform its activities in marketing to production for civil infrastructure projects such as large dams, long spans bridges, roads including toll roads, as well as selected investment and development projects set by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i></p>	Surabaya
Divisi EPC/ <i>EPC Division</i>	<p>Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC dan proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak ada batasan nilai kontrak.</p> <p><i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for EPC projects and development projects chosen by Directors, with no contract restriction.</i></p>	Jakarta

1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi tahun 2019 ditetapkan berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dihadapan notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0269715 tanggal 21 Mei 2019.

Susunan Komisaris dan Direksi tahun 2018 ditetapkan berdasarkan akta keputusan RUPS No. 42 tanggal 12 April 2018 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0154671 tanggal 19 April 2018.

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1.f. The Composition of Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of Commissioners and Directors for the year 2019 were based on notarial deed No. 44 dated May 15, 2019 by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0269715 dated May 21, 2019.

The composition of Commissioners and Directors for the year 2018 were approved based on decisions deed of GMS No. 42 dated April 12, 2018 of notary Fathiah Helmi, S.H., authorized by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0154671 dated April 19, 2018.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors for the year 2019 and 2018 are as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019	2018	
Komisaris Utama	Badrodin Haiti	Badrodin Haiti	<i>President Commissioner</i>
Komisaris Independen	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait Muradi	M. Aqil Irham Viktor S. Sirait Muradi	<i>Independent Commissioners</i>
Komisaris	Danis H. Sumadilaga Robert Leonard Marbun R Agus Sartono	Danis H. Sumadilaga Arif Baharudin R Agus Sartono	<i>Commissioners</i>

	2019	2018	
Direktur Utama	I Gusti Ngurah Putra	I Gusti Ngurah Putra	<i>President Director</i>
Direktur Independen	Hadjar Seti Adji	Hadjar Seti Adji Wahyu Utama Putra	<i>Independent Director</i>
Direktur	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Haris Gunawan Gunadi	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Haris Gunawan	<i>Directors</i>

Komite Audit diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

The Audit Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 02/SK/WK/DK/2018 dated October 2, 2018.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Ketua	Viktor S. Sirait	<i>Head</i>
Anggota	R. Agus Sartono Suyanto Ihda Muktiyanto	<i>Members</i>

Komite Risiko dan Asuransi diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 12/SK/WK/DK/2015 tanggal 30 September 2015 mengenai penggantian anggota Komite Risiko dan Asuransi.

The Risk and Insurance Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 12/SK/WK/DK/2015 of September 30, 2015 regarding the replacement of Risk and Insurance's Committee members.

Susunan Komite Risiko dan Asuransi Perusahaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Risk and Insurance Committee for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Ketua	M. Aqil Irham	<i>Head</i>
Anggota	Danis H. Sumadilaga Ahmad Syarif Munawi Zulfan Zahar	<i>Members</i>

Internal Audit Perusahaan diangkat melalui surat keputusan direksi No. 42/SK/WK/PEN/2018 tanggal 26 Juni 2018 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis.

The Company's Internal Audit was appointed by the decision letter of director No. 42/SK/WK/PEN/2018 of June 26, 2018 regarding the Dismissal and Appointment of Structural Officials of Work Unit and Business Unit.

Senior Vice President Internal Audit dan Corporate Secretary pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company's Senior Vice President Internal Audit and Corporate Secretary for the year 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/and 2018	
Senior Vice President Internal Audit	Pius Sutrisno Riyanto	<i>Senior Vice President Internal Audit</i>
Corporate Secretary	Shastia Hadiarti	<i>Corporate Secretary</i>

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 31.821.502.383 dan Rp 27.831.685.783.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 65.350.676.708 dan Rp 58.563.197.550.

Grup memiliki karyawan tetap (tidak diaudit) masing-masing sebesar 2.390 dan 2.420 orang pada tahun 2019 dan 2018.

The total remuneration received by the Board of Commissioners for the year 2019 and 2018 were amounted to Rp 31,821,502,383 and Rp 27,831,685,783, respectively.

The total remuneration received by the Directors for the year 2019 and 2018 were amounted to Rp 65,350,676,708 and Rp 58,563,197,550, respectively.

The Group has an average number of 2,390 and 2,420 employees (unaudited) for the year 2019 and 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) di tahun 2000, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan konsolidasian dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The basic measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2000, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The consolidated financial statements are prepared based on going concern using the accrual method, except for the consolidated statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the consolidated financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights where the Group has the practical ability to execute (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are fully eliminated.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusts the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

<p>Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:</p> <p>(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk <i>goodwill</i>) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;</p> <p>(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);</p> <p>(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;</p> <p>(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;</p> <p>(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan</p> <p>(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.</p> <p>d. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)</p> <p>i. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan</p> <p>Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka; • ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan; • PSAK 22 (Penyesuaian 2018), Kombinasi Bisnis; • PSAK 26 (Penyesuaian 2018), "Biaya Pinjaman"; • PSAK 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan"; • PSAK 66 (Penyesuaian 2018), Pengaturan Bersama ; 	<p><i>If the Group loses control, the Group:</i></p> <p>(a) <i>Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;</i></p> <p>(b) <i>Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);</i></p> <p>(c) <i>Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;</i></p> <p>(d) <i>Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;</i></p> <p>(e) <i>Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and</i></p> <p>(f) <i>Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.</i></p> <p>d. Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)</p> <p>i. Amendments/ improvements and Interpretations to standards effective in the current year</p> <p><i>New standard and amandement to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;</i> • <i>ISAK 34, Uncertainty Over Income Tax Treatments;</i> • <i>PSAK 22 (Improvement 2018), Business Combination;</i> • <i>PSAK 26 (Improvement 2018), "Borrowing Cost";</i> • <i>PSAK 46 (Improvement 2018), "Income Taxes";</i> • <i>PSAK 66 (Improvement 2018), Joint Arrangement;</i>
--	--

- PSAK 24 (Amandemen 2018), Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

ii. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73, Sewa;
- ISAK 35, Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amandemen 2019), Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019), Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13, Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

- PSAK 24 (Amendment 2018), Employee benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

ii. Standards and interpretations issued not yet adopted

Standards and standard amendments are effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (Amendment 2017), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;
- PSAK 62 (Amendment 2017), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;
- PSAK 71, Financial Instruments;
- PSAK 71 (Amendment 2018), Financial Instruments: on Prepayment Features with Negative Compensation;
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers;
- PSAK 73, Leases;
- ISAK 35, Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements;
- PSAK 1 (Amendments 2019), Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements;
- PSAK 1 (Annual Adjustment 2019), Presentation of Financial Statements;
- PPSAK 13, Revocation of SFAS 45: Non-profit Entity Financial Reporting;
- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- PSAK 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";
- ISAK 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership";
- ISAK 102: "Impairment on Murabahah Receivable".

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada saat laporan keuangan konsolidasian.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations of standards to the consolidated financial statements.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Transactions and Translation of Financial Statements

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah (Rp).

In preparing consolidated financial statements, the Group record by using the currency of the primary economic environment where the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah (Rp).

Mata uang fungsional kantor cabang di Dubai, Malaysia dan Timor Leste, adalah Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) dan Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Kantor cabang di Dubai dan Timor Leste, pada tanggal laporan dijabarkan ke Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam Rupiah (Rp) dengan kurs *Reuters*, sedangkan kantor cabang Malaysia dan Timor Leste menggunakan mata uang Ringgit dan Dolar Amerika Serikat (USD) dengan kurs Bank Indonesia (BI). Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The functional currency of branch office in Dubai, Malaysia and Timor Leste are Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) and United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of branches in Dubai and Timor Leste at reporting date are translated to Rupiah (Rp) at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate for the period. For combining purposes, the financial statements of the branch office are translated into Rupiah (Rp) based on Reuters Rate, while Malaysia and Timor Leste Branch maintained in Ringgit and United Stated Dollar (USD) using Bank Indonesia (BI) rate. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah (Rp) using the closing rate, i.e middle rate of BI at December 31, 2019 and 2018 as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	13.901	14.481	U.S Dollar (USD)
Dolar Singapura (SGD)	10.321	10.603	Singapore Dollar (SGD)
Euro Eropa (EUR)	15.589	16.560	European Euro (EUR)
Ringgit Malaysia (MYR)	3.397	3.493	Malaysian Ringgit (MYR)
Riyal Arab Saudi (SAR)	3.706	3.859	Saudi Arabian Riyal (SAR)
Yen Jepang (JPY)	128	131	Japananese Yen (JPY)

Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- *Exchange differences on foreign currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.*
- *Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.*

f. Related Party Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 54).

g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung

- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organized the plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity that is controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the BUMN's Ministry as a shareholder's representative.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Note 54).

g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes financial assets or financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition

dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman; atau
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as to be measured at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) Those that intend to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;
- (b) Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of decrease in loan quality; or
- (c) Those that upon initial recognition designated as available for sale.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

Pada tahun 2019 dan 2018, Grup mempunyai kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, piutang lain-lain, tagihan bruto dan aset keuangan atas proyek konsesi kepada pengguna jasa yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

For the year 2019 and 2018, the Group has cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables, other receivables, gross amount due from customers and financial assets from concession project which were classified as loans and receivables.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

(iii) *Held-to-Maturity (HTM) Investments*

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 15).

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method (Note 15).

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

(iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is unrecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pada tahun 2019 dan 2018, Grup tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi saham diukur dengan metode biaya.

For the year 2019 and 2018, the Group has no financial assets classified as stock investments are measured using the cost method.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, utang bruto subkontraktor, utang bank, utang lembaga keuangan non-bank, biaya jangka panjang yang masih harus dibayar dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Financial liabilities at amortized cost*

Financial liabilities, which include accounts payables, gross amount due to third parties, bank loan, loan to financial institution non-bank, accrued expenses and other payables – long term are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or for right liabilities and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of

tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- (d) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

ownership of the financial asset and still retains control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- (d) *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

For investment in equity instrument, a significant or prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, minus any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, buy option or other similar options, but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties under the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*
- (ii) *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*
- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan setelah tanggal penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek. Deposito berjangka disajikan berdasarkan nilai nominal.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

k. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data as much as possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses evaluation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Short-Term Investment

Time deposits with maturity less than three months on the date of placement and pledged as collateral, or restricted and time deposits with maturity of more than three months on the date of placement is presented as short-term investment. The time deposits are presented using par value.

j. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable to the owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain conditions in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deductions are applied in every account receivable's claim which is retained by the owner of the project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, minus the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

I. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana perumahan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat).

Persediaan material dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih dan persediaan *precast* pun menggunakan metode yang sama.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

n. Aset Tetap

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan), kecuali di tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Entitas Anak) menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining* menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

I. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are in costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using first-in first-out method (FIFO). Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business minus the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventory of plots of land for housing facilities business are assessed using the acquisition cost plus other expenditures incurred to make the land ready for sale (with certificate).

Material inventories are stated at the lower of the cost or net realizable value and even precast inventories are using the same method.

Allowance for the decrease in inventory value is formed based on the physical check of inventory at the end of the period.

n. Fixed Assets

Fixed assets are accounted for using cost model and is stated based on acquisition cost minus the accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings), except in 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Subsidiary Entity) using straight line method.

Based on Directors Decision of WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets other than buildings WBP, mentioned based on a review of the fixed assets productions of WBP, there is a significant change in the estimated usage time of future economic benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method of productions assets from the double declining method into a straight line method.

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in this case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus land and buildings that has been presented in equity is transferred directly to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revalued every 3 (three) years.

Aset tetap tanah tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Fixed asset lands are not depreciated. While building assets are depreciated using the straight line method based on their estimated useful lives, as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Life</u>	<u>Persentase Penyusutan/ Depreciation Percentage</u>	
Gedung dan Pabrik	20 Tahun/ Years	5,00%	<i>Buildings and Plants</i>

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai jika ada, dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets except for land and buildings are accounted for using cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if there is any, and depreciated using the double declining method based on the estimated useful life of the fixed assets as follows:

	<u>Masa Manfaat/ Useful Life</u>	<u>Persentase Penyusutan/ Depreciation Percentage</u>	
Kendaraan	8 Tahun/ Years	25,00%	<i>Vehicles</i>
Perlengkapan Kantor	2 - 8 Tahun/ Years	25,00% - 50,00%	<i>Office Supplies</i>
Peralatan Proyek	4 - 16 Tahun/ Years	12,50% - 50,00%	<i>Project Equipment</i>

Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan pada tahun 2015, semula dicatat berdasarkan metode harga perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen (KJPP). Perubahan kebijakan akuntansi ini

The Group changed its accounting policy on fixed assets classified as land and buildings in 2015, which previously accounted for using the cost method, to revaluation model, which is then appraised by an independent appraiser (KJPP). The changes in the accounting

dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan konsolidasian dapat menggambarkan investasi Grup dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode laporan keuangan konsolidasian (Catatan 16).

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya biaya - biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Semua pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/ tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan.

Pada akhir periode/ tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

policies was made for the purpose to represent the Group's investment on land and buildings in the consolidated financial statements in accordance with their market value at the consolidated financial reporting period (Note 16).

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be added (capitalized) on the carrying amount of the assets.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the period/ year when the assets are derecognized.

When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged to profit or loss for the year.

At the end of reporting period/ year end, the Group periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

Construction in progress is stated at cost and will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready to use.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

p. Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

Beban tangguhan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

The transfer to investment property is made, if and only if, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

The transfer from investment property is made, if and only if, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sell.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Other Assets

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. All deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

q. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain

q. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) with no considerations.

Concession assets granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT at the end of the concession period and, at that time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road

atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

is transferred to another party or the Government/BPJT changes the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from the discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the statement of profit or loss and other consolidated comprehensive income.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenues in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Construction contract comprises all the amounts of toll road construction costs or toll road capacity improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of the public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance to the contract. Construction cost is the value of acquisition of a construction contract.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Interests and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obligated to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at fair value at the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

Amortization of asset roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is

pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 25 Januari 2010, 20 Juni 2016, 9 Desember 2017, 19 Desember 2018, dan 1 Pebruari 2019, Ruas Kanci - Pejagan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ruas Pejagan-Pemalang, Ruas Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 1, Ruas Simpang Susun Pemalang Batang, dan Ruas Ciawi Cigombong Seksi 1, telah beroperasi secara komersial. Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol dihitung sampai berakhirnya hak konsesi jalan tol hingga 28 Mei 2041.

r. Penurunan Aset Non-Keuangan kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus ditentukan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 2g; penurunan nilai untuk *goodwill* dijelaskan dalam Catatan 2q.

s. Aset Keuangan dari Perjanjian Jasa Konsesi

WSE menerapkan ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" atas Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

On January 25, 2010, June 20, 2016, December 9, 2017, December 19, 2018, and February 1, 2019, segment Kanci - Pejagan, West Java and Central Java, segment Pejagan-Pemalang, segment Bekasi Cawang Kampung Melayu Section 1, segment Simpang Susun Pemalang Batang, and segment Ciawi Cigombong Section 1, has been in commercial operation. Amortization of Toll Road Concession Rights are calculated until the end of the toll road concession rights up to May 28, 2041.

r. Impairment of Non-Financial Assets except Goodwill

At the end of the reporting period, the Group will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be determined by the recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets are recognized in the profit or loss. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized only if it does not exceed the carrying amount that would have been determined (after deducting depreciation and amortization) if no impairment losses of assets recognized in prior years.

The accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2g; while impairment for goodwill is discussed in Note 2q.

s. Financial Asset from Service Concession Arrangements

WSE applies ISAK 16 "Service Concession Arrangements" on its Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) yang diungkapkan pada Catatan 57 antara PLN dan WSE memenuhi definisi sebagai perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan WSE bertindak sebagai operator. WSE setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro ("infrastruktur") dan menjual kepada PLN energi yang dihasilkan darinya dengan syarat dan kondisi sebagaimana disepakati dalam PPA. Infrastruktur digunakan untuk seluruh masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan layanan konsesi.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, WSE tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or another body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public-to-private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*
- *The operator is obligated to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

The Power Purchase Agreement (PPA) disclosed in Note 57 between PLN and WSE meets the definition of a service concession arrangement, where PLN acts as a grantor and WSE acts as the operator. WSE agrees to design, finance, construct, own and operate a mini hydro power generating facility (the "infrastructure") and sell to PLN the power generated therefrom on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, WSE does not recognize

keuangan, karena WSE memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PPA. Aset keuangan dicatat sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

the infrastructure as property and equipment but recognizes it as a financial asset, as WSE has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted as a "loans and receivables" in accordance to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

WSE tidak mengakui penjualan kapasitas listrik, namun mengakui pendapatan keuangan (melalui aset keuangan). WSE menghitung pendapatan yang terkait dengan jasa operasi sesuai dengan PSAK 23, "Pendapatan". WSE mencatat kewajiban kontraktual untuk memelihara atau mengembalikan infrastruktur di lokasi operasi sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi.

WSE does not recognize the sale of electrical capacity, but recognizes financial revenue (through the financial asset). WSE accounts for revenue relating to operation services in accordance with PSAK 23, "Revenue". WSE accounts for the contractual obligations to maintain or restore the infrastructure in the plant operations in accordance to PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

t. Utang Bruto kepada Subkontraktor

t. Gross Amount Due to Subcontractors

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacitakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents the uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

u. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian), yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan eksternal.

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method), which is measured based on the physical progress at the end of reporting period, which is stated on the minutes of external progress of completed works.

Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

If it is most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises of the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable to produce revenue and can be reliably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprises costs that is related directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract and such other costs specifically can be billed to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan dari usaha sarana papan (properti) diakui dengan metode presentase penyelesaian, yang dinyatakan dalam PSAK 44 (Revisi 2010) "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", yang apabila syarat berikut terpenuhi:

Revenue from sales of housing is recognized by the percentage of completion, as stated in PSAK 44 (Revised 2010) "Accounting for Real Estate Development Activities", if the following criterias are met:

- I. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai terpenuhi;
- II. jumlah pembayaran oleh pelanggan telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pelanggan; dan
- III. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

- I. the construction process has surpassed the initial phase, which is, the foundation of the building has been completed;*
- II. total payments of the buyer equal or exceed 20% of the agreed sales price and no refund could be made by the buyer; and*
- III. total revenues and costs can be reasonably estimated.*

Metode yang digunakan untuk menentukan persentase penyelesaian adalah berdasarkan biaya aktual yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan estimasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan proyek real estat tersebut.

The method used to determine the percentage of completion is the proportion of actual costs incurred to the estimated total development cost of the real estate project.

Apabila persyaratan tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

If any of the above conditions are not met, all payment received from buyers are recognized as unearned revenue using the deposit method, until all conditions are met.

Unsur-unsur biaya yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat antara lain meliputi biaya pra-perolehan tanah, biaya perolehan tanah dan biaya lain-lain yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat. Biaya yang tidak berhubungan dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi, diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

This element of costs, which are capitalized to real estate development projects, include the preacquisition cost of land, cost of land acquisition and other costs attributable to the development activity of real estate. Costs, which are not related to real estate project, such as general and administrative expenses, are recognized as profit or loss as incurred.

Pendapatan Tol

Toll Revenues

Pendapatan Grup dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor with operating rights are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The differences of total payments over mandatory installment under joint operation are recorded as joint operation expense or revenue.

v. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

w. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar seluruh aset yang dialihkan oleh Grup pada tanggal akuisisi, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada

v. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

w. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair value of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are rendered.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at the fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK.

Components of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair

tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, yang jika diketahui, akan menyebabkan pengakuan aset dan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, Grup mengakui *goodwill* yang diukur sebagai selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi; dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto pihak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan

value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if there is any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required had the Group disposed of the previously held equity interest directly.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, the Group recognizes goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest, and in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree; and (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of business combinations, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill was allocated to a Cash Generating Unit and certain operations on the Cash Generating Unit are disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. The disposed goodwill is

tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan non-pengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

measured on the basis of relative values of the disposed operation and the portion of the Cash Generating Units retained.

Goodwill is initially measured at historical cost, the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests, and any previous interest held, over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Group reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed, and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in profit or loss.

When the determination of consideration from a business combination includes contingent consideration, it is measured at its fair value on acquisition date. Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in fair value recognized in profit or loss when adjustments are recorded outside the measurement period. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments made against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period, which cannot exceed one year from the acquisition date, about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

In a business combination that is achieved in stages, the acquirer remeasures its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognizes gain or loss resulted, if there is any, in profit or loss.

x. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of the current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

The amount of unpaid current tax for current and prior periods is recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover the current tax of previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to all taxable temporary differences arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, does not affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction does not affect neither the accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax assets and liabilities shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset if there is a high probability that sufficient taxable profit will no longer be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a) *The Group has a legally enforceable right to offset deferred tax assets against deferred tax liabilities; and*
- b) *The deferred tax assets and liabilities are related to the income taxes levied by the same taxation authority on either:*

- i. the same taxable entities; or*
- ii. different taxable entities that are intended to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.*

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

The Group offsets the current tax assets and current tax liabilities if, and only if:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- a) *Has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and*
- b) *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

y. Liabilitas Imbalan Kerja

y. Employee Benefits Liabilities

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-Term Employee Benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Grup mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sesuai dengan UU No. 13/2003, Grup berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup menutupi kewajiban.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of the benefit obligation determined is by discounting the benefit.

The Group not only records for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier than the following dates:

- (a) *When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

The Group has a pension insurance program which is organized by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In accordance with the Law No. 13/2003, the Group is obligated to cover the shortage of pension payments when the pension plans is currently not sufficient to cover liabilities.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

z. Investment in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary, and*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.*

When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidak diizinkan.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

The Group classifies joint arrangement as:

1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Assets, including its share of any assets held jointly;
- (b) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- (c) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
- (d) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- (e) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Joint Venture

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method. Proportional consolidation of joint arrangements is no longer permitted.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognized in the profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as a reduction in the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associates.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi.

Loss exceeding the carrying value of the investment is not recognized, unless the Group has committed to provide financial support or guarantee the associates' obligation.

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of the unrelated investor's interests in the associates.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komperhensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of profits or losses and other comprehensive income post acquisition. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Unrealized gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in the joint ventures. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

aa. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Merupakan investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% atau tidak memiliki pengaruh signifikan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi dipasar aktif.

aa. Other Long-Term Investment

Represent a shares investment with an ownership less than 20% or does not have significant influence that are recognized initially at fair value plus transaction costs. The best evidence of fair value is the current market price quotations.

Selanjutnya investasi saham yang tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur dengan biaya perolehan.

Furthermore, share investments that do not have an active market price quotations and their fair values can not be reliably measured, are measured at cost.

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai.

At each reporting date, the Company evaluates whether there is objective evidence that an investment is impaired.

Jika terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, penurunan tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi komperhensif di tahun berjalan.

If there is an objective evidence that an investment is impaired, the decline is charged to the statement of comprehensive income in the current year.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu periode.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 13.573.902.600 lembar pada tahun 2019 dan 2018 (Catatan 47).

cc. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

dd. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmen didasarkan pada aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- yang informasi keuangan yang terpisah miliknya tersedia.

bb. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the common shareholders parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of ordinary shares or potential financial instruments to be ordinary shares outstanding increases as a result of capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

The number of weighted average shares outstanding for the calculation of basic earnings per share amounted to 13,573,902,600 for the year 2019 and 2018, respectively (Note 47).

cc. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as an additional paid in capital and are not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital and not amortized.

dd. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

ee. Program Opsi Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP)

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk karyawan yang berhak dan anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas. Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan. Dampak dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan perubahan estimasi, dengan penyesuaian berdasarkan cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

ff. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup di atas, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

ee. Management and Employee Stock Option Program (MESOP)

The Company provides stock option program to their eligible employees and members of management (MESOP). This program consists of stock option plan that upon exercise is settled through issuance of shares (equity - settled share based payment arrangement) which is accounted as equity transaction. Equity - settled share based payments to member of management and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date.

The fair value determined at the grant date of the equity - settled share based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Company's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity.

At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest. The impact of the revision of the original estimates, if any, its will recognised in statements of comprehensive income such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

ff. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

In the application of the Group's accounting policies above, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan diatas, terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset tak berwujud. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol. Grup berpendapat bahwa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

WTR (entitas anak) yang memiliki hak pengusahaan jalan tol diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. WTR mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi sesuai dengan PSAK 34. Entitas anak, WTR mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi dengan menggunakan metode biaya dengan margin nol berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai wajar piutang ditentukan dengan

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies as described above, management has made any critical judgments that have significant impact on the amounts recognised in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Service Concession Arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as property and equipment, but should be recognized as a financial asset and/or an intangible asset. Indonesia Toll Road Authority (BPJT) granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads. Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities. The Group has made judgment that the Toll Road Concession Agreement (PPJT) qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

WTR (subsidiary) who has the toll road concession is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. WTR recognizes construction revenues of concession asset and construction costs in accordance with PSAK 34. Subsidiary, WTR measures construction revenues at cost with zero margin based on management estimation calculated by a certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

Key Sources of Estimation Uncertainty

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. The fair value of accounts receivable is determined by

memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

calculating the permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful life of each item of the Group's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of property and equipment.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Provision for Overlay

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

The provision for overlay is determined periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of the management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Post-Employment Benefits Obligation

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

The present value of post employment benefit liabilities depends on several factors which are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine pensions cost (benefits) covered discount rate. The changes of assumptions might affect carrying value of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the final reporting, by considering the discount rate of government's bond which denominated in benefit's currency that will be paid and have a similar term with the terms of the related liabilities.

Pajak Penghasilan Final

Final Income Tax

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation (PP) No. 40 year 2009 concerning amendments of

No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Penurunan Nilai atas Goodwill

Uji penurunan nilai *goodwill* wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 56, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Arus Kas Masa Depan dari Perjanjian Jasa Konsesi

WSE menilai aset keuangannya dari proyek konsesi pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen membuat penilaian mengenai metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan dari pembayaran kapasitas. Nilai tercatat aset keuangan dari proyek konsesi diungkapkan pada Catatan 20.

Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business that is effective starting August 1, 2008, where the final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Final income tax is presented outside of the income tax expenses in profit or loss.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Impairment of Goodwill

Impairment testing of goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of intangible assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of Group's operations.

Valuation of Financial Instruments

As described in Note 56, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Future Cash Flows from Service Concession Arrangement

WSE assesses its financial asset from concession project at each reporting date. Management makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows of capacity payments. The carrying amount of financial asset from concession project is disclosed in Note 20.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

3. KAS DAN SETARA KAS

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2019 Rp	2018 Rp
Kas/ Cash on Hand	1.833.539.821	2.690.836.858
Bank/ Cash in Banks		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.117.363.755.014	550.950.460.346
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.278.826.937.528	3.577.277.028.470
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.060.867.606.468	822.314.481.793
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.440.477.744	358.026.853.237
PT Bank BRIsyariah Tbk	6.075.498.471	13.935.029.576
Indonesia Eximbank	1.709.876.450	12.498.435.480
PT Bank Syariah Mandiri	1.541.193.831	20.121.642.345
PT Bank BNI Syariah	1.055.573.524	1.378.278.107
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.484.962.233	228.988.212.069
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.208.491.806	98.717.661.322
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	986.345.734	902.389.453
Yen Jepang/ Japanese Yen		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.555.980.848	7.741.972.406
Euro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.956.200	9.235.372
Sub Jumlah/ Sub Total	6.574.172.655.851	5.692.861.679.976
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	107.319.559.716	3.114.737.194
PT Bank Permata Tbk	90.488.399.975	14.474.682.739
PT Bank BTPN Tbk (d/h/ formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	25.492.859.677	16.186.984.681
PT Bank DBS Indonesia	18.999.621.620	15.230.102.540
MUFG Bank, Ltd.	15.560.389.271	30.949.986.488
PT Bank Bukopin Tbk	14.729.457.627	98.604.496.404
PT Bank Central Asia Tbk	12.549.476.570	30.021.254.768
PT Bank UOB Indonesia	11.340.410.805	109.254.884.725
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah	6.558.471.259	19.455.917.821
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.585.431.564	3.276.431.256
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.830.785.707	462.452.546.281
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.843.867.068	5.149.528.068
PT Bank BNP Paribas Indonesia	3.189.160.537	125.552.896
Bank Mizuho	3.038.693.131	54.224.434
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.904.452.836	14.322.102.544
PT Bank DKI	1.826.487.519	63.566.300.741
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.623.747.921	1.730.054.037
PT Bank Danamon Tbk	1.528.195.957	5.000.905.945
PT Bank Mega Tbk	1.393.379.612	919.454.796
PT Bank of China	1.340.970.499	1.512.880.496
PT Bank HSBC Indonesia	825.164.067	15.163.714.399
PT Bank BCA Syariah	762.237.161	1.268.600.607
PT Bank ICBC Indonesia	669.983.466	7.112.265.845
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	516.734.049	514.002.758
PT Bank Mestika Dharma Tbk	378.848.804	3.404.351.826
PT Bank CTBC Indonesia	313.985.105	3.301.107.451
PT Bank QNB Indonesia Tbk	249.965.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	10.709.668	5.131.241
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	--	3.632.774
Riyal Arab Saudi/ Saudi Arabian Riyal		
The National Commercial Bank - Jeddah	838.630.926	1.391.735.823
Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12.328.016	232.173.987
Sub Jumlah/ Sub Total	337.722.405.133	927.799.745.565
Deposito Berjangka/ Time Deposit		
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.383.340.293.859	2.082.320.954.802
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	540.000.000.000	977.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	96.505.000.000	108.505.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.000.000.000	110.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	2.044.845.293.859	3.277.825.954.802

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	154.100.000.000	317.500.000.000
PT Bank BTPN Tbk (d/h/ formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	75.636.133.728	300.000.000.000
PT Bank DKI	35.000.000.000	--
PT Bank Mega Tbk	10.000.000.000	--
PT Bank BTPN Syariah	10.000.000.000	--
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000.000	--
PT Bank CTBC	--	57.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga	--	200.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	299.736.133.728	944.500.000.000
Jumlah/ Total	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)/ <i>Interest Rate of Time Deposits per Annum (%)</i>	4,55% - 7,50%	3,30% - 9,50%
Jangka Waktu/ <i>Time Period</i>	1 - 3 Bulan/ <i>Months</i>	1 - 3 Bulan/ <i>Months</i>

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

4. SHORT-TERM INVESTMENTS

	2019 Rp	2018 Rp	
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya			<i>Restricted of Time Deposits</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.448.200.000	8.448.200.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Jumlah	8.448.200.000	8.448.200.000	Total

Deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan sampai dengan setahun dan sertifikat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank yaitu sebagai deposito yang dibatasi penggunaannya (Catatan 22).

Time deposits due three months until one year and certificates of time deposits is used as collateral for bank loans deposits that is restricted in use (Note 22).

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

5. ACCOUNTS RECEIVABLE – NET

Lancar

Current

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	870.358.621.995	1.853.135.078.019	<i>Construction Service Receivables</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konstruksi	(140.626.526.458)	(134.008.269.018)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables</i>
Piutang Dagang	356.167.835.472	522.930.768.360	<i>Trade Receivables</i>
Sub Jumlah	1.085.899.931.009	2.242.057.577.361	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	867.117.374.075	826.854.126.965	<i>Construction Service Receivables</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konstruksi	(494.627.995.276)	(502.932.659.704)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables</i>
Piutang Dagang	2.096.809.249.620	1.201.387.169.461	<i>Trade Receivables</i>
Piutang Sewa	695.923.299	822.475.571	<i>Rent Receivables</i>
Sub Jumlah	2.469.994.551.718	1.526.131.112.293	Sub Total
Jumlah	3.555.894.482.727	3.768.188.689.654	Total

Rincian saldo piutang usaha jasa konstruksi tanpa cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The details of construction service receivables without allowance for impairment losses are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Utama Karya (Persero)	260.208.871.090	--
PT Utama Marga Waskita	219.700.750.908	--
PT Kertas Leces (Persero)	86.707.725.121	86.707.725.121
PT Jasamarga Solo Ngawi	61.486.418.109	1.282.370.352.146
PT Angkasa Pura I (Persero)	47.076.836.802	78.318.343.800
PT Prima Multi Terminal	46.817.291.911	24.991.151.231
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	36.546.827.524	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	30.373.096.227	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	26.260.305.600	26.260.305.600
PT Istaka Karya (Persero)	22.527.353.440	22.527.353.440
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	16.499.794.207	27.307.686.385

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	--	108.375.622.730
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	--	122.388.873.896
KSO/JO WKR - RNI	--	41.166.848.158
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	16.153.351.056	32.720.815.512
Sub Jumlah/ Sub Total	870.358.621.995	1.853.135.078.019
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Pemerintah Daerah/ District Governments	145.175.717.957	136.945.828.517
PT Broadbiz Asia	106.596.781.459	106.596.781.459
PT Trikarya Graha Utama	100.650.939.502	100.650.939.502
PT Bangun Investa Graha	93.137.768.963	93.137.768.963
PT Royal Abadi Dentalindo	88.020.000.434	84.106.000.434
PT Ade Pede Realty	53.953.367.794	53.953.367.794
Bin Ladin Contractor Group LLC	53.000.910.398	53.000.910.399
PT Kukuh Mandiri Lestari	45.722.206.412	--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	22.446.113.833	31.871.330.197
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste Ministry of Public Works Democratic Republic of Timor-Leste	21.949.534.653	9.071.255.067
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	--	22.807.670.736
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	136.464.032.670	134.712.273.897
Sub Jumlah/ Sub Total	867.117.374.075	826.854.126.965
Jumlah/ Total	1.737.475.996.070	2.679.989.204.984

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of construction service receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(636.940.928.722)	(485.576.340.874)	Beginning Balance
Penambahan	(16.309.803.888)	(178.009.521.434)	Addition
Pemulihan	27.730.099.738	64.941.669.482	Recovery
Reklasifikasi	(9.733.888.862)	(38.296.735.896)	Reclassification
Saldo Akhir	(635.254.521.734)	(636.940.928.722)	Ending Balance

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 27.730.099.738, terdiri dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 9.743.644.262, Pemerintah Daerah sebesar Rp 6.777.686.896, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 6.288.623.519, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 3.639.118.492, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 1.281.026.569.

The value of recovery on allowance for impairment of account receivables from construction services for the year 2019 amounted to Rp 27,730,099,738, consists of the PT Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 9,743,644,262, District Governments amounted to Rp 6,777,686,896, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 6,288,623,519, PT Harmas Jalesveva amounted to Rp 3,639,118,492, and the Ministry of Public Works and Housing amounted Rp 1,281,026,569.

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 16.309.803.888 yang berasal dari PT Istaka Karya (Persero).

The additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable for the year 2019 amounted to Rp 16,309,803,888 was came from PT Istaka Karya (Persero).

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 64.941.669.482, terdiri dari PT Jasa Marga Bali Tol sebesar Rp 34.369.107.612, PT Halla Mohana sebesar Rp 10.741.054.966, Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 9.922.318.637, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 5.554.598.400, Kementerian PUPR sebesar Rp 1.457.214.382, PT Merdeka Sandi Surya sebesar Rp 1.000.000.000, Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp 831.402.185, PT Kertas Leces (Persero) sebesar Rp 508.261.538, PT Sijiro

The value of recovery on allowance for impairment of account receivables from construction services for the year 2018 amounted to Rp 64,941,669,482, consists of PT Jasa Marga Bali Tol amounted to Rp 34,369,107,612, PT Halla Mohana amounted to Rp 10,741,054,966, Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 9,922,318,637, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 5,554,598,400, the Ministry of Public Works and Public Housing amounted to Rp 1,457,214,382, PT Merdeka Sandi Surya amounted to Rp 1,000,000,000, the State

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Internasional sebesar Rp 307.711.762, dan PT Pancamulti Niaga Pratama sebesar Rp 250.000.000.

Administration Agency amounted to Rp 831,402,185, PT Kertas Leces (Persero) amounted to Rp 508,261,538, PT Sijiro Internasional amounted to Rp 307,711,762, and PT Pancamulti Niaga Pratama amounted to Rp 250,000,000.

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 178.009.521.434 terdiri dari PT Bangun Investa Graha sebesar Rp 65.196.438.274, PT Ade Pede Realty sebesar Rp 53.953.367.794, Pemerintah Daerah sebesar Rp 33.879.581.094, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 16.709.068.180, PT Pardika Wisthi Sarana sebesar Rp 3.601.769.500, PT Batam Island Marina sebesar Rp 1.840.547.431, PT Trikarya Graha Utama sebesar Rp 1.515.901.660, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sebesar Rp 977.545.114, dan PT Metro Wisata Raya sebesar Rp 335.302.387.

The additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable for the year 2018 amounted to Rp 178,009,521,434 consists of PT Bangun Investa Graha amounted to Rp 65,196,438,274, PT Ade Pede Realty amounted to Rp 53,953,367,794, District Government amounted to Rp 33,879,581,094, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 16,709,068,180, PT Pardika Wisthi Sarana amounted to Rp 3,601,769,500, PT Batam Island Marina amounted to Rp 1,840,547,431, PT Trikarya Graha Utama amounted to Rp 1,515,901,660, Public Works Office of Riau Province amounted to Rp 977,545,114, and PT Metro Wisata Raya amounted to Rp 335,302,387.

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

The management provided allowance for impairment losses on receivable, based on individual assessment of each customers.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

The management believes that allowance for impairment losses of trade accounts receivable to third parties are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables. The management also believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivable.

Rincian saldo piutang dagang sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	33.653.524.126	16.218.742.359
KSO/JO Waskita - Acset	23.547.705.806	18.911.177.500
KSO/JO Waskita - Gorip Nanda Guna	7.924.201.883	67.973.786.370
PT Pertamina (Persero)	4.825.685.885	49.588.241.256
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	300.463.878.011	380.529.443.185
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	<u>(14.247.160.239)</u>	<u>(10.290.622.310)</u>
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>356.167.835.472</u>	<u>522.930.768.360</u>
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Semutama Langgeng	401.818.200.000	--
PT Hakaaston	398.056.437.000	86.038.340.000
Pelanggan dari/ customer from Apartment The Reiz Condo	114.290.022.497	176.356.040.529
KSO/ JO RDMP Balikpapan	125.488.739.963	--
PT Mandiri Bangun Makmur	72.145.715.408	--
PT Kapuk Naga Indah	31.593.407.190	10.608.667.777
Pelanggan dari/ customer from Apartment Nines BSD	26.525.591.672	--
PT Hyundai Engineering & Construction CO LTD	26.388.253.077	11.118.136.001
PT Fin Centerindo Satu	24.187.415.867	--
KSO/ JO Shimizu Pembangunan Perumahan Bangun Cipta Kontraktor	23.669.386.995	--
KSO/ JO Pembangunan Perumahan	22.840.568.603	22.465.575.000
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	844.431.046.746	914.030.080.647
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	<u>(14.625.535.398)</u>	<u>(19.229.670.493)</u>
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>2.096.809.249.620</u>	<u>1.201.387.169.461</u>
Jumlah/ Total	<u>2.452.977.085.092</u>	<u>1.724.317.937.821</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of trade receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(29.520.292.803)	(195.360.105.193)	Beginning Balance
Penambahan	(16.812.787.100)	(15.196.087.395)	Addition
Pemulihan	17.460.384.266	181.035.899.785	Recovery
Saldo Akhir	(28.872.695.637)	(29.520.292.803)	Ending Balance

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of accounts receivable based on age are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum Jatuh Tempo	3.020.996.781.622	2.657.503.706.686	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 12 Bulan	338.887.921.315	1.078.184.737.177	Up to 12 Months
> 13 - 24 Bulan	210.146.385.550	222.375.747.281	>13 - 24 Months
> 25 - 36 Bulan	162.008.059.275	126.551.919.049	>25 - 36 Months
> 36 Bulan	487.982.552.336	350.033.800.986	>36 Months
Jumlah	4.220.021.700.098	4.434.649.911.179	Total

Piutang usaha dijamin pada bank-bank pemberi pinjaman (Catatan 22 dan 30), dengan rincian sebagai berikut:

Accounts receivables are guaranteed on bank lenders (Notes 22 and 30), with details as follows:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu Seksi 2A sebesar Rp 891.548.691.000, Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I sebesar Rp 2.058.463.205.040, Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2B sebesar Rp 467.333.480.784, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2A sebesar Rp 957.997.883.690, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 3 sebesar Rp 2.047.455.211.317, Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 1 sebesar Rp 622.703.919.382, dan Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 4A sebesar Rp 570.278.367.209 (Catatan 22.1).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 6 sebesar Rp 159.367.339.965, Proyek Pembangunan Tol Solo – Ngawi Paket 2 sebesar Rp 399.753.317.390, Pembangunan Teraskita Hotel Makassar sebesar Rp 88.979.924.526, Perluasan Bandara Depati Amir Rp 284.614.861.818, Pembangunan Apartemen Solterra sebesar Rp 487.926.000.000, Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung sebesar Rp 772.934.636.364, Pekerjaan Renovasi Masjid Istiqlal sebesar Rp 423.000.907.273, dan Pembangunan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 4 sebesar Rp 1.724.233.413.036 (Catatan 22.4).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Section 2A Toll Road Project amounted to Rp 891,548,691,000, Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Construction Package I project amounted to Rp 2,058,463,205,040, Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 2B project amounted to Rp 467,333,480,784, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 2A project amounted to Rp 957,997,883,690, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 3 project amounted to Rp 2,047,455,211,317, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 1 project amounted to Rp 622,703,919,382, and Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Construction Section 4A project amounted to Rp 570,278,367,209 (Note 22.1).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Medan Kualanamu Tebing Tinggi Section 6 Toll Road Project amounted to Rp 159,367,339,965, Solo – Ngawi Toll Road Project Package 2 project amounted to Rp 399,753,317,390, Teraskita Hotel Makassar Construction amounted to Rp 88,979,924,526, Depati Amir Airport Expansion amounted to Rp 284,614,861,818, Construction of Solterra Apartments amounted to Rp 487,926,000,000, Becakayu Toll Road Construction Section 2A Ujung project amounted to Rp 772,934,636,364, Istiqlal Mosque Renovation Project amounted to Rp 423,000,907,273, and Construction of Ciawi Sukabumi Section 4 Toll Road amounted to Rp 1,724,233,413,036 (Note 22.4).

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, piutang yang dijaminan terhadap Proyek yaitu tagihan termin atas pembangunan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 2 sebesar Rp 1.866.223.553.000 dan Jalan Tol Semarang – Batang sebesar Rp 937.500.000.000 (Catatan 22.10).
- Indonesia Eximbank, piutang usaha yang dijaminan yaitu tagihan termin atas proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 sebesar Rp 3.772.972.796.000 (Catatan 22.5).
- PT Bank Pan Indonesia Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Project Package IV Seksi 3 sebesar Rp 1.153.324.437.038 dan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 sebesar Rp 1.818.281.700.000 (Catatan 22.8).
- PT Bank UOB Indonesia, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar sebesar Rp 336.207.400.000, Pembangunan Rest Area Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbanggi Besar Paket II sebesar Rp 309.238.381.001, Bandara Juanda Surabaya sebesar Rp 651.225.000.000 dan Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan sebesar Rp 204.947.965.608 (Catatan 22.12).
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing sebesar Rp 2.431.622.463.327, Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris (Paket 2) sebesar Rp 291.578.218.364, Proyek Bendungan Jlantah sebesar Rp 599.773.156.627, Light Rail Transit di Sumatera Selatan sebesar Rp 4.129.318.842.470, dan Proyek Jalan Tol Japek Selatan : Ruas Taman Mekar – Sadang sebesar Rp 3.084.828.083.000 (Catatan 22.2 dan 30).
- PT Bank BTPN Tbk piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Tol Ruas Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 4 sebesar Rp 1.508.871.128.489, dan Proyek Tol Ruas Serpong – Cinere sebesar Rp 700.000.000.000 (Catatan 22.9).
- PT Bank Syariah Mandiri, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong sebesar Rp 911.973.843.648 dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebesar Rp 1.200.330.248.820 (Catatan 22.3).
- *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, accounts receivable used as collateral consisting of terms of bill from Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung section 2 Toll Road project amounted to Rp 1,866,223,553,000 and Semarang - Batang Toll Road Project amounted to Rp 937,500,000,000 (Note 22.10).*
- *Indonesia Eximbank, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Cimanggis Cibitung Toll Road Project Section 2 amounted to Rp 3,772,972,796,000 (Note 22.5).*
- *PT Bank Pan Indonesia Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Kayu Agung – Palembang - Betung Toll Road Project Package IV Section 3 amounted to Rp 1,153,324,437,038 and The Development of Ciawi – Sukabumi Toll Road Section 3 amounted to Rp 1,818,281,700,000 (Note 22.8).*
- *PT Bank UOB Indonesia, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Makassar Hasanuddin Airport Development Project amounted to Rp 336,207,400,000, the Construction of Rest Area of Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road Section II amounted to Rp 309,238,381,001, Juanda Airport in Surabaya at Rp 651,225,000,000 and Revitalization of the Ragunan Student Sports Training Center Area amounted to Rp 204,947,965,608 (Note 22.12).*
- *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from the development of Cibitung - Cilincing Toll Road project amounted to Rp 2,431,622,463,327, Leuwikeris Dam Construction Project (Package 2) amounted to Rp 291,578,218,364, Jlantah Dam Project amounted to Rp 599,773,156,627, Light Rail Transit in South Sumatra amounted to Rp 4,129,318,842,470, and Japek Selatan Toll Road Project: section Taman Mekar - Sadang amounted to Rp 3,084,828,083,000 (Notes 22.2 and 30).*
- *PT Bank BTPN Tbk, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Pematang Panggang - Kayu Agung Toll Road Project Section 4 amounted to Rp 1,508,871,128,489, and Serpong – Cinere Toll Road Project amounted to Rp 700,000,000,000 (Note 22.9).*
- *PT Bank Syariah Mandiri, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from the constructions of JORR II Toll Road Project section Kunciran - Serpong amounted to Rp 911,973,843,648 and the Constructions of Krian - Legundi Bunder-Manyar Toll Road project amounted to Rp 1,200,330,248,820 (Note 22.3).*

- PT Bank DKI, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Pembangunan (Design and Build) Akses Pelabuhan Kuala Tanjung Ruas Inderapura – Kuala Tanjung sebesar Rp 1.541.509.360.000 (Catatan 22.11).
- PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Kapal Betung Paket IV seksi 3B sebesar Rp 558.653.008.937 (Catatan 22.17 dan 30).
- Bank of China Ltd, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Bendungan Multipurpose Karian sebesar Rp 124.258.805.332, proyek pembangunan Bendungan Tapin sebesar Rp 220.072.178.791, proyek Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung (MYC) sebesar Rp 207.828.197.304, dan proyek Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Phase II sebesar Rp 173.041.000.000 (Catatan 22.14).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, proyek Bandara Achmad Yani Semarang, proyek Bendungan Temef NTT, Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan proyek Bendungan Marga Tiga sebesar total Rp 5.136.705.942.666 (Catatan 30.1 Pihak Ketiga).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi pembangunan proyek Jalan Tol Tebing Tinggi– Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence sebesar Rp 3.092.908.000.000 (Catatan 30.2 Pihak Ketiga).
- PT Bank BNI Syariah, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Bendungan Komerling II/Tiga Dihaji Paket II sebesar Rp 612.683.537.357 (Catatan 22.19).
- *PT Bank DKI, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Development and Design Project Access Kuala Tanjung Port section Inderapura - Kuala Tanjung amounted to Rp 1,541,509,360,000 (Note 22.11).*
- *PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Kayu Agung – Palembang – Kapal Betung Toll Road Construction Project Package IV Section 3B amounted to Rp 558,653,008,937 (Note 22.17 and 30).*
- *Bank of China Ltd, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project amounted to Rp 124,258,805,332, Construction of Tapin Dam project amounted to Rp 220,072,178,791, TPA Sarbagita Suwung Regional Revitalization (MYC) project amounted to Rp 207,828,197,304, and Cisumdawu Phase II Toll Road Project amounted to Rp 173,041,000,000 (Note 22.14).*
- *Syndication of PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia the project's guaranteed receivables are the constuction contract of Kayu Agung - Palembang - Betung II Toll Road project Section 1, Achmad Yani Semarang Airports project, Temef NTT Dam project, Construction of the Rectorate Building, Faculty & Area Building 3 Campus Pillars of the Islam Internasional Indonesia University (UIII) Package I, and Marga Tiga Dam project amounted to Rp 5,136,705,942,666 (Note 30.1 Third Parties).*
- *Syndication of PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, and PT Bank Resona Perdania which are guaranteed for the project, namely the construction contract value of the Tebing Tinggi – Parapat (Stage 1) Tebing Tinggi – Serbelawan include Simpang Susun Serbelawan, and Construction of Nines Plaza and Residence Project amounted to Rp 3,092,908,000,000 (Note 30.2 Third Parties).*
- *PT Bank BNI Syariah, accounts receivable which are used as collateral are terms of bill from Komerling II/Tiga Dihaji Package II Dam Project was used as collateral bank loans of PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 612,683,537,357 (Note 22.19).*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA

6. JOINT VENTURES RECEIVABLES

Kemitraan/ Venturer	Nama Proyek/ Project Name	2019 Rp	2018 Rp
Waskita - Acset	Jalan Layang Cikampek	3.178.315.554.988	500.058.753.646
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Temef	35.719.725.812	--
Waskita - Utama - Wika	Runway BDR Samarinda Baru	33.550.685.744	33.876.180.051
Waskita - Wika	Jalan Tol Bocimi	21.216.047.822	--
Waskita - PAL	PLTU Malinau	2.575.136.082	34.436.228.607
Waskita - Acset Indonusa	Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (VGF JAPEK)	448.651.261	31.485.897.725
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)		30.806.503.645	59.805.366.086
Jumlah/Total		3.302.632.305.354	659.662.426.115

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta.

Joint venture receivables were not subjected to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand.

Manajemen berpendapat bahwa piutang ventura bersama dapat ditagihkan.

Management believes that balances of joint venture receivables are collectible.

7. PIUTANG RETENSI – BERSIH

7. RETENTION RECEIVABLES – NET

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak Berelasi	1.478.346.703.038	976.780.232.806	<i>Related Parties</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(16.876.141.050)	(21.783.819.041)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Sub Jumlah	1.461.470.561.988	954.996.413.765	Sub Total
Pihak Ketiga	471.624.710.031	564.717.590.481	<i>Third Parties</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(149.968.115.342)	(185.846.919.096)	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Sub Jumlah	321.656.594.689	378.870.671.385	Sub Total
Jumlah	1.783.127.156.677	1.333.867.085.150	Total

Rincian saldo piutang retensi adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Utama Karya (Persero)	555.516.076.827	61.210.836.152
PT Jasamarga Solo Ngawi	226.094.178.092	296.040.870.372
PT Pejagan Pemasang Tol Road	185.886.927.457	167.017.230.721
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	157.170.764.021	111.731.435.646
PT Cinere Serpong Jaya	59.776.886.871	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	55.234.369.025	271.609.200
PT Prima Multi Terminal	52.734.492.106	48.152.664.562
KSO/JV Waskita Karya - Trinit	37.792.904.224	26.189.516.546
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	34.197.889.050	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25.955.245.552	29.466.418.607
PT PAL Indonesia (Persero)	23.835.098.479	23.835.098.479
PT Angkasa Pura II (Persero)	20.822.810.861	5.753.814.691
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	2.391.343.718	75.000.513.058
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1.730.115.440	33.208.263.892
PT Kereta Api Indonesia	--	37.558.238.570
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	39.207.601.315	61.343.722.310
Sub Jumlah/ Sub Total	1.478.346.703.038	976.780.232.806
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Marga Trans Nusantara	72.957.385.585	--
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Public Works of the Democratic Republic of Timor Leste	58.283.260.032	54.801.571.157

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste	45.699.537.045	91.225.884.453
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Ministry of Public Works and Housing	36.468.617.691	48.062.779.052
Bin Ladin Contractor Group LLC	27.707.741.349	29.577.446.348
PT Pardika Wisthi Sarana	23.431.420.350	23.431.420.350
Pemerintah Daerah/ District Governments	21.803.836.668	63.024.829.636
PT Toba Pengembang Sejahtera	--	28.076.717.899
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	185.272.911.311	226.516.941.586
Sub Jumlah/ Sub Total	471.624.710.031	564.717.590.481
Jumlah/ Total	1.949.971.413.069	1.541.497.823.287

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(207.630.738.137)	(130.013.128.440)	Beginning Balance
Penambahan	(3.908.000.000)	(57.990.994.384)	Addition
Pemulihan	30.326.535.615	10.756.559.394	Recovery
Reklasifikasi	14.367.946.130	(30.383.174.707)	Reclassification
Saldo Akhir	(166.844.256.392)	(207.630.738.137)	Ending Balance

Manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang, berdasarkan penilaian secara individual atas masing-masing pemberi kerja.

The management has provided an allowance for impairment losses of receivables, based on individual assessment of each owner of the project.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang retensi.

The management believes that allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible retention receivables in the future. The management also believes that there is no significant risk concentrated in retention receivables.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 30.326.535.615 yang terdiri dari PT Trans Marga Jateng sebesar Rp 12.467.863.408, Pemerintah Daerah sebesar Rp 7.253.450.872, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 6.843.350.000, PT Merdeka Sandi Surya sebesar Rp 1.698.000.000, PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 709.863.817, PT Sentul City Tbk sebesar Rp 700.000.000, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 382.398.318 dan PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 271.609.200. Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.908.000.000 berasal dari PT Mega Pasanggrahan Indah.

The value of recovery on allowance for impairment of retention receivables for the year 2019 amounted to Rp 30,326,535,615 consist of PT Trans Marga Jateng amounted to Rp 12,467,863,408, District Government amounted to Rp 7,253,450,872, PT Harmas Jalesveva amounted to Rp 6,843,350,000, PT Merdeka Sandi Surya amounted to Rp 1,698,000,000, PT Angkasa Pura II (Persero) amounted to Rp 709,863,817, PT Sentul City Tbk amounted to Rp 700,000,000, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) amounted to Rp 382,398,318 and PT Angkasa Pura I (Persero) amounted to Rp 271,609,200. The value of additional allowance for impairment of retention receivables for the year 2019 amounted to Rp 3,908,000,000 was came from PT Mega Pasanggrahan Indah.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 10.756.559.394, terdiri dari PT Rekayasa Industri (Persero) sebesar Rp 6.598.822.510, Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.150.079.999, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 1.839.320.018, dan Kementerian PUPR sebesar Rp 168.336.867.

The value of recovery on allowance for impairment of retention receivables for the year 2018 amounted to Rp 10,756,559,394 consists of PT Rekayasa Industri (Persero) amounted to Rp 6,598,822,510, District Governments amounted to Rp 2,150,079,999, the Minister of Law and Human Rights amounted to Rp 1,839,320,018 and the Ministry of Public Works and Public Housing amounted to Rp 168,336,867.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 57.990.994.384 terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 9.944.426.180, PT Graha Sarana Duta sebesar Rp 8.341.433.021, PT Mega Pasanggrahan Indah sebesar Rp 7.112.585.516, Bin Ladin Contractor Group sebesar Rp 6.336.292.257, PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar Rp 6.186.460.112, PT Sentul City Tbk sebesar Rp 5.000.000.000, PT Pardika Wisthi Sarana sebesar Rp 4.285.104.000, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3.617.875.301, PT Trikarya Graha Utama sebesar Rp 3.529.310.280, PT Gapura Kencana Abadi sebesar Rp 1.000.000.000, PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 709.863.819, PT Pandan Harum Medika sebesar Rp 681.818.182, Rumah Sakit Advent Bandung sebesar Rp 422.694.545, PT Pertamedika Sentul sebesar Rp 313.636.362, PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp 271.609.200, PT Menara Pelangi sebesar Rp 137.885.609 dan PT Jambi Permai Abadi sebesar Rp 100.000.000.

The additional value of allowance for impairment losses on retention receivable for the year 2018 amounted to Rp 57,990,994,384 consists of District Governments amounted to Rp 9,944,426,180, PT Graha Sarana Duta amounted to Rp 8,341,433,021, PT Mega Pasanggrahan Indah amounted to Rp 7,112,585,516, Bin Ladin Contractor Group amounted to Rp 6,336,292,257, PT Pembangunan Jaya Ancol amounted to Rp 6,186,460,112, PT Sentul City Tbk amounted to Rp 5,000,000,000, PT Pardika Wisthi Sarana amounted to Rp 4,285,104,000, PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 3,617,875,301, PT Trikarya Graha Utama amounted to Rp 3,529,310,280, PT Gapura Kencana Abadi amounted to Rp 1,000,000,000, PT Angkasa Pura II (Persero) amounted to Rp 709,863,819, PT Pandan Harum Medika amounted to Rp 681,818,182, Advent Bandung Hospital amounted to Rp 422,694,545, PT Pertamedika Sentul amounted to Rp 313,636,362, PT Angkasa Pura I (Persero) amounted to Rp 271,609,200, PT Menara Pelangi amounted to Rp 137,885,609 and PT Jambi Permai Abadi amounted to Rp 100,000,000.

8. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH

8. OTHER RECEIVABLES – NET

a. Piutang Lain-lain Lancar – Bersih

a. Other Current Receivable – Net

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Waskita Transjawa Toll Road	2.446.151.682.531	2.390.959.282.226
PT Hutama Karya (Persero)	472.428.664.459	659.975.854.163
PT Jasamarga Semarang Batang	310.026.387.800	--
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	261.083.807.289	--
KSO/JO WKR - Darmo Permai	201.998.014.250	136.766.227.637
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	184.168.799.025	45.755.415.603
PT Cinere Serpong Jaya	130.180.182	67.197.871.133
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	270.330.068.992
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	94.317.987.932	69.477.014.611
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(9.076.656.786)	(9.076.656.786)
Sub Jumlah/ Sub Total	3.961.228.866.682	3.631.385.077.579
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Lembaga Manajemen Aset Negara	4.214.783.076.596	5.136.839.607.632
PT Kings Key L	224.800.000.000	--
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	498.847.766	1.875.317.672
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(2.150.894.080)	(2.150.894.080)
Sub Jumlah/ Sub Total	4.437.931.030.282	5.136.564.031.224
Jumlah/ Total	8.399.159.896.964	8.767.949.108.803

Piutang lain-lain terutama merupakan biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh Grup untuk keperluan penerbitan bank garansi atas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk subkontraktor. Piutang ini akan dilunasi pada saat diminta.

Other receivables mainly consist of bank guarantee fee which has been paid in advance by the Group for the Working Capital Loan (WCL) to the subcontractors. These receivables are repayable on demand.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan modal kerja pinjaman kepada entitas asosiasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 05/FPPS/WTR/2018 tanggal 7 Nopember 2018, yang akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2019 dan telah diperpanjang sampai dengan 29 Oktober 2020 berdasarkan Amandemen I Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. ADD/10.1/WTR/2019. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional dan memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk dana talangan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. ADD/15.7/WTR/1219 tanggal 18 Desember 2019, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10% per tahun.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 26/ADD/FPPS/WTR/2019 tanggal 18 Desember 2019 antara Grup dan PT Waskita Transjawa Toll Road, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun.

Piutang kepada PT Utama Karya (Persero) digunakan untuk memberikan dana talangan tanah ruas Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Piutang kepada PT Jasamarga Semarang Batang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi perusahaan Jalan Tol Batang Semarang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian *Mandatory Convertible Loan (MCL)* tanggal 19 Desember 2019 antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR dan PT Jasamarga Semarang Batang, yang akan jatuh tempo dua tahun setelah kredit investasi dilunasi oleh PT Jasamarga Semarang Batang. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10,75% per tahun.

Piutang kepada KSO WKR – Asiana Senopati merupakan piutang atas pengakhiran kerja sama operasi antara WKR dengan PT Asiana Senopati pada tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Akta No. 002 tanggal 12 Desember 2019. Kedua belah pihak menyetujui hak dan kewajibannya untuk mengembalikan investasinya masing-masing dan PT Asiana Senopati mengakui utang atas pengembalian investasi WKR dengan pokok nominal Rp 400.000.000.000 yang disesuaikan dengan nilai bunga menjadi Rp 413.586.657.534. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo piutang lain-lain WKR ke KSO WKR – Asiana Senopati adalah sebesar Rp 245.586.657.534.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road is working capital loans to associates, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 05/FPPS/WTR/2018 dated November 7, 2018, which will mature on October 30, 2019 and has been extended until October 29, 2020 based on Amendment I of the Shareholders Loan Facility Agreement No. ADD/10.1/WTR/2019. The loans were used for the purpose of investment and operation and had an interest rate of 13.5% per annum.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for land bailout fund, as set forth in the Loan Facility Agreement No. ADD/15.7/WTR/1219 dated December 18, 2019, which has matured on December 31, 2020. The loan had an interest at a rate of 10% per annum.

Other receivables from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for the purpose of investment and operation, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 26/ADD/FPPS/WTR/2019 dated December 18, 2019, which has matured on December 31, 2020. The loan had an interest at a rate of 13.5% per annum.

Other receivables from PT Utama Karya (Persero) were used to provide land bailouts for the Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Toll Road section in accordance with the Loan Facility Agreement No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 dated June 19, 2017.

Other receivables from PT Jasamarga Semarang Batang are used to finance investment needs in the Batang Semarang toll road, as stated in the Mandatory Convertible Loan (MCL) Agreement dated December 19, 2019 between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR and PT Jasamarga Semarang Batang, which will mature two years after the investment credit is repaid by PT Jasamarga Semarang Batang. The loan has a loan interest of 10.75% per annum.

Other receivables from KSO WKR - Asiana Senopati represent receivables for the termination of the joint operation between WKR and PT Asiana Senopati on April 11, 2019 in accordance with the Deed No. 002 dated December 12, 2019. Both parties agree to their rights and obligations to return their respective investments and PT Asiana Senopati recognized the debt for returning WKR investment with a nominal principal of Rp 400,000,000,000 adjusted to the interest rate to Rp 413,586,657,534. As of December 31, 2019, the balance of other receivables from KSO WKR – Asiana Senopati amounted to Rp 245,586,657,534.

Piutang KSO WKR - Darmo Permai ini merupakan piutang terhadap KSO WKR - Darmo Permai sebesar Rp 172.750.000.000 dengan perjanjian No. 003/P.WKR/2017, WKR juga mempunyai hak pengembalian uang atas penyeteroran PPN Masukan pada saat akuisisi tanah perusahaan ke KSO sebesar Rp 21.736.737.500 dan penggantian biaya operasional KSO WKR - Darmo Permai sebesar Rp 7.511.276.750.

Other Receivables from KSO WKR - Darmo Permai is receivable from KSO WKR - Darmo Permai amounted to Rp 172,750,000,000 with the agreement No. 003/P.WKR/2017, the Company have right to get reimbursement from VAT in when acquisition land the company to joint venture amount Rp 21,736,737,500, and reimbursement of operational expense in KSO WKR - Darmo Permai amount Rp 7,511,276,750.

Piutang kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan piutang atas bunga ekuitas yang dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat penggunaan dana ekuitas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 1: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, New Aur Duri - Peranap No. 19.3/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 2: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, Peranap - Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Other Receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) represent receivables on equity interest charged to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) due to the use of equity funds as stated in the Agreement on Use and Refund of Equity Funds for Work Package 1: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, New Aur Duri - Peranap No. 19.3/P/WK/2016 dated May 23, 2016 and Agreement on the Use and Refund of Equity Funds for Work Package 2: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, Peranap - Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 dated May 23, 2016.

Piutang kepada PT Cinere Serpong Jaya digunakan untuk keperluan dana talangan tanah, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 08/PKS/WTR/2016 tanggal 28 November 2016 antara Grup dan PT Cinere Serpong Jaya, yang akan jatuh tempo pada 28 November 2017. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun. Pada tanggal 21 Juni 2017, dibuatkan Amandemen I atas perjanjian tersebut dengan mengubah bunga pinjaman menjadi 13,5% dan jangka waktu menjadi 31 Desember 2017. Pada tanggal 30 Nopember 2017 dibuatkan Amandemen II atas perjanjian tersebut dengan merubah jangka waktu peminjaman menjadi 29 Juni 2018. Sampai dengan tanggal pelaporan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian sesuai Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 106/BA/WTR/DIR/2018 tanggal 14 Desember 2018. Saldo tersebut di atas merupakan bunga pinjaman atas dana Talangan Tanah yang harus dibayarkan oleh PT Cinere Serpong Jaya maksimal tanggal 30 Juni 2019. Pinjaman sudah dilunasi sesuai dengan Addendum Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. ADD/04.1/WTR/0819 tanggal 23 Agustus 2019.

Other receivables from PT Cinere Serpong Jaya were used for the purpose of the land bailout funds, as set forth in the Loan Facility Agreement No. 08/PKS/WTR/2016 dated November 28, 2016 between the Group and PT Cinere Serpong Jaya, which will mature on November 28, 2017. The loan had an interest rate of 9.5% per annum. On June 21, 2017, Amendment I was made on the agreement by changing the loan interest rate to 13.5% and the maturity date to December 31, 2017. On November 30, 2017, Amendment II was made by changing the maturity date to June 29, 2018. As of the date of reporting, there is no extension of the agreement in accordance with the Minutes of Termination of the Loan Facility Shareholders Agreement No. 106/BA/WTR/DIR/2018 dated December 14, 2018. The balance above is the interest of the loan from the land bailout fund that must be paid by PT Cinere Serpong Jaya up to June 30, 2019. The loan has been paid in accordance with Addendum Minutes of Termination of the Shareholders Loan Facility Agreement No. ADD/04.1/WTR/0819 dated August 23, 2019.

Piutang kepada PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri digunakan untuk keperluan operasional, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham Amandemen II No. 26/ADD/FPPS/WTR/2018 tanggal 10 Desember 2018 antara WTR dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, yang akan jatuh tempo pada 10 Desember 2019. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Piutang ini sudah dibayar pada tanggal 18 Desember 2019.

Other receivables from PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri were used for operational purpose, as set forth in the Amendment II of Loan Facility Agreement No. 26/ADD/FPPS/WTR/2018 dated December 10, 2018 between WTR and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, which will mature on December 10, 2019. The loan had an interest rate of 12% per annum. These receivables were paid on December 18, 2019

Piutang lain-lain kepada Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan:

1. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cimanggis – Cibitung sesuai akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 5.281.759.035.495.
2. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen VI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cibitung – Cilincing sesuai akta notaris No. 17 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 4.028.212.083.253.
3. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Krian-Legundi-Bunder-Manyar sesuai akta notaris No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.700.000.000.000.
4. Piutang atas dana dukungan Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Bekasi -Cawang – Kampung Melayu sesuai akta notaris No. 09 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
5. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Pemalang – Batang sesuai akta notaris No. 6 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.400.000.000.000.
6. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Ciawi – Sukabumi sesuai akta notaris No. 18 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

Piutang lain-lain PT Kings Key Limited merupakan piutang atas pelepasan kepemilikan WTR di PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 91 dan 92 tanggal 18 Desember 2019 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. (Catatan 13).

Other receivables to Lembaga Manajemen Aset Negara represent:

1. *Receivables for Government Support Fund based on Amendment V Concession Agreement Cimanggis Cibitung Toll Road according to notarial deed No. 11 dated December 21, 2018 by Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 5,281,759,035,495.*
2. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment VI Concession Agreement Cibitung-Cilincing Toll Road according to the notarial deed No. 17 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 4,028,212,083,253.*
3. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment I Concession Agreement Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road according to the notarial deed No. 3 dated December 15, 2017 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,700,000,000,000.*
4. *Receivables of Government support fund based on Concession Agreement Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Toll Road according to the notarial deed No. 09 dated December 16, 2011 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*
5. *Receivables of Government Support Fund based on Concession Agreement Pemalang - Batang Toll Road according to the notarial deed No. 6 dated August 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,400,000,000,000.*
6. *Receivables of Government Support Fund based on Amendment V Concession Agreement Ciawi - Sukabumi Toll Road according to the notarial deed No. 18 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*

Other receivables from PT Kings Key Limited represent receivables from the transfer of ownership of WTR in PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri in accordance with the Share Sale and Purchase Deed No. 91 and 92 dated December 18, 2019 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. (Note 13).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

b. Piutang Lain-lain Tidak Lancar

Pihak Berelasi/ Related Parties
PT Istaka Karya (Persero)
PT Pejagan Pemalang Toll Road
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah/ Sub Total
Pihak Ketiga/ Third Parties
PT Bakrie Toll Indonesia
PT Bakrie Toll Road
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah/ Sub Total
Jumlah/ Total

Piutang lain-lain PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914 merupakan piutang Perusahaan yang diberikan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham Perusahaan di luar RUPS No. KEP-83/MBU/2011 dan No. KEP-PS04/PPA/0411 tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 21 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Pengakuan Utang No. L.05B/P/WK/2011 dan No. DU-SP/2011.01B dari PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914.

Pada tanggal 12 April 2011, PT Istaka Karya (Persero) memohon kepada Perusahaan sesuai surat No. DK/2011-323 untuk menerbitkan garansi bank proyek Bandar Lampung by Pass sebesar Rp 10.661.885.000 dan biaya provisi untuk penerbitan garansi bank sebesar Rp 312.445.834. Pada tanggal 30 Maret 2012, bank garansi No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday telah dicairkan oleh pemilik proyek, sehingga piutang Perusahaan kepada PT Istaka Karya (Persero) menjadi sebesar Rp 75.144.307.748. Ketidakmampuan PT Istaka Karya (Persero) dalam memenuhi pembayaran utangnya menyebabkan penyelesaian utang dilakukan dengan cara *Debt to Equity Swap*, yaitu para kreditur mendapatkan posisi sebagai pemegang ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sebagai pengganti pembayaran atas utang PT Istaka Karya (Persero) kepada para kreditur.

Pembayaran piutang akan dilakukan secara bertahap ditahun ke 9 sampai maksimal 5 tahun.

Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. Perusahaan meminta PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelesaikan utangnya dengan skema penyelesaian sebagai berikut:

1. Pembayaran awal senilai 3% atau sebesar Rp 2.549.586.465.

b. Other Non-Current Receivable

2019	2018
Rp	Rp
74.914.307.748	74.914.307.748
39.456.718.793	36.492.465.249
(74.914.307.748)	(74.914.307.748)
39.456.718.793	36.492.465.249
69.697.329.695	69.697.329.695
1.050.000.000	1.050.000.000
(1.050.000.000)	(30.383.893.165)
69.697.329.695	40.363.436.530
109.154.048.488	76.855.901.779

Other receivables from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914 were receivables given in accordance with the Shareholders of the Company decision outside of the Annual General Meeting of shareholders No. KEP-83/MBU/2011 and No. KEP-PS04/PPA/0411 dated April 1, 2011. On May 21, 2011, the Company received a Letter of Debt Acknowledgement No. L.05B/P/WK/2011 and No. DU-SP/2011.01B from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914.

On April 12, 2011, PT Istaka Karya (Persero) requested to the Company through letter No. DK/2011-323 to issue a bank guarantee for Bandar Lampung By Pass project amounted to Rp 10,661,885,000 and the cost of provision for bank guarantee issuance amounted to Rp 312,445,834. On March 30, 2012 the bank guarantee No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday has been executed by the owner of the project, so that the receivables of the Company to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748. Inability of PT Istaka Karya (Persero) in fulfilling its debt payments, caused the settlement of debt using Debt to Equity Swap to solve its debt, means the creditors get a position as an equity holder of PT Istaka Karya (Persero) in line of payment for a debt PT Istaka Karya (Persero) to the creditors.

The payment of receivables will be settled partially at the 9th year for a maximum of 5 years.

According to the Company's letters No. 483/WK/Dir/2013 dated May 7, 2013 that concerns The Execution of Decision to Ratification of Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. The Company asked PT Istaka Karya (Persero) to resolve the debt with this settlement scheme:

1. The initial payment valued at 3% or in amounted to Rp 2,549,586,465.

2. Pemenuhan sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sebesar Rp 82.436.629.045.

Berdasarkan surat di atas, Perusahaan menerima jawaban PT Istaka Karya (Persero) dengan surat No. DU/2013-131 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi:

1. Pembayaran awal 3% bersumber dari pencairan piutang atas eskalasi proyek SKSD.
2. Sisa pembayaran sebesar 97% dalam bentuk penyertaan saham, sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait.

Pada tahun 2017, terdapat pemulihan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 230.000.000 sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT Istaka Karya (Persero). Sampai dengan tanggal pelaporan, PT Istaka Karya (Persero) belum memenuhi sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sehingga Perusahaan membukukan cadangan kerugian penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 74.914.307.748 atau sebesar 100% dari nilai piutang. Tidak ada perubahan piutang pada 31 Desember 2019.

Piutang lain-lain PT Pejagan Pemalang Toll Road digunakan untuk operasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. 05/FPPS/WTR/2018 tanggal 7 Nopember 2018, antara WTR dan PT Pejagan Pemalang Toll Road yang akan jatuh tempo pada 29 Oktober 2019. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun. Sampai dengan tanggal pelaporan, addendum perjanjian masih dalam proses.

Piutang lain-lain kepada PT Bakrie Toll Indonesia dan PT Bakrie Toll Road diberikan sebagai pinjaman kepada pemegang saham PT Cimanggis Cibitung Toll Road terdahulu (Sebelum WTR mengakuisisi PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal	(116.525.751.779)	(107.449.094.993)	Beginning Balance
Penambahan	--	(9.076.656.786)	Addition
Pemulihan	29.816.404.375	--	Recovery
Reklasifikasi	(482.511.210)	--	Reclassification
Saldo Akhir	(87.191.858.614)	(116.525.751.779)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

2. The fulfillment of the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stocks (*Debt to Equity Swap*) for Rp 82,436,629,045.

Based on the letters above, the Company has received the answer from PT Istaka Karya (Persero) with the letters No. DU/2013-131 dated May 15, 2013 that contains:

1. The initial payment of 3% from the disbursement of receivables of the escalation SKSD project.
2. The remaining payment of 97% in the form of investments in share of stocks, is being reviewed by the Ministry of Finance and related institutions.

For the year 2017, there is recovery of the allowance for impairment losses of receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 230,000,000. Until reporting date, PT Istaka Karya (Persero) has not fulfilled the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stock (*Debt to Equity Swap*) thus the Company provided allowance for impairment loss on receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 74,914,307,748 or 100% from receivable. There is no change in receivable as of December 31, 2019.

Other receivables of PT Pejagan Pemalang Toll Road were used for the purpose of operation, as set forth in the Loan Facility Agreement of Shareholders No. 05/FPPS/ WTR/2018 dated November 7, 2018 with due date October 29, 2019. The loan had an interest rate of 13.5% per annum. Up to the reporting date, the addendum to the agreement is still in process.

Other accounts receivable from PT Bakrie Toll Indonesia and PT Bakrie Toll Road represent loan to the to the former shareholders of PT Cimanggis Cibitung Toll Road (before WTR acquired PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

The movements of allowance for impairment losses of other receivables are as follows:

The management believes that allowance for impairment losses on accounts receivable is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible other receivables in the future.

Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29.816.404.375 yang terdiri dari PT Bakrie Toll Indonesia sebesar Rp 29.333.893.165 dan PT Prolindo Cipta Nusantara sebesar Rp 482.511.210. Tidak ada penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2019.

The value of recovery on allowance for impairment of other receivables for the year 2019 amounted to Rp 29,816,404,375 consist of PT Bakrie Toll Indonesia amounted to Rp 29,333,893,165 and PT Prolindo Cipta Nusantara amounted to Rp 482,511,210. There is no additional on allowance for impairment of other receivables for the year 2019.

Tidak ada penambahan atas pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pada tahun 2018. Nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 9.076.656.786 disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain atas PT Kertas Leces (Persero).

There is no additional of recovery on allowance for impairment of other receivables for the year 2018. The additional value of allowance for impairment losses on other receivables amounted to Rp 9,076,656,786 was due to the decrease in other receivables from PT Kertas Leces (Persero).

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	2019 Rp	2018 Rp	
Bahan Baku			Raw Material
Konstruksi	485.366.618.276	820.899.169.547	Construction
Beton Precast	729.625.054.391	1.228.429.929.512	Precast Concrete
Sub Jumlah	1.214.991.672.667	2.049.329.099.059	Sub Total
Persediaan dalam Pengembangan			Work in Progress
Aset Real Estat	2.447.579.643.106	2.038.845.632.511	Real Estate Assets
Tanah yang Belum Dikembangkan	795.739.844	795.739.844	Undeveloped Land
Sub Jumlah	2.448.375.382.950	2.039.641.372.355	Sub Total
Persediaan untuk Dijual			Inventory Available for Sale
Beton Precast	806.880.148.578	999.662.254.602	Precast Concrete
Tanah Kavling Siap Dijual	598.345.228	598.345.228	Lots of Land Ready for Sale
Sub Jumlah	807.478.493.806	1.000.260.599.830	Sub Total
Jumlah	4.470.845.549.423	5.089.231.071.244	Total

Bahan baku konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Grup. Persediaan material terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/ marmar, *traveler form*, *geotextile*, aspal, dan batu.

Raw construction material represents construction materials and equipment supply projects that are still available at the warehouse of existing project owned by the Group. The raw material consists of iron, cement, diesel, pile, ceramic/ marble, traveler form, geotextile, asphalt, and stone.

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha *precast* yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku, dan bahan penolong serta persediaan bahan dalam proses.

The precast concrete represents the inventory of concrete products of precast business units consisting of concrete finished good, raw materials and supporting materials, including materials in the process.

Persediaan aset real estat merupakan bangunan apartemen yang siap dijual, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi.

The inventory of real estate assets represents apartment units ready for sale, land under development and buildings under constructions.

Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai persediaan, sebab Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan dapat digunakan dan dijual.

The management did not provide allowance for impairment losses of inventory for the management believes that all inventories are fully usable and are able to sell.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

10. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA

10. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa – Lancar

Gross Amount Due From Customers – Current

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi	11.557.452.399.567	25.029.465.405.951
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(81.767.789.694)	(92.180.175.725)
Sub Jumlah	11.475.684.609.873	24.937.285.230.226
Pihak Ketiga	2.994.610.914.423	7.694.745.218.248
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(299.119.965.280)	(281.297.285.372)
Sub Jumlah	2.695.490.949.143	7.413.447.932.876
Jumlah	14.171.175.559.016	32.350.733.163.102

Related Parties
Less: Allowance for Impairment
Losses of Receivables

Sub Total

Third Parties
Less: Allowance for Impairment
Losses of Receivables

Sub Total

Total

Rincian saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian lancar adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers – current portion are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi - Lancar/ Related Parties - Current Portion		
PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	3.919.391.926.704	2.908.863.506.310
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.517.337.389.316	4.335.022.338.588
PT Utama Karya (Persero)	2.207.276.450.367	13.307.336.684.806
PT Utama Marga Waskita	935.324.590.771	--
PT Cinere Serpong Jaya	794.993.020.913	--
PT Jasamarga Japek Selatan	406.050.425.374	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	286.004.050.824	132.807.897.720
PT Angkasa Pura II (Persero)	214.197.806.402	245.834.186.585
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	107.237.903.443	817.399.354.874
PT Jasamarga Semarang Batang	103.739.802.908	1.917.028.248.076
PT Jasamarga Solo Ngawi	5.565.310.116	516.335.351.659
PT Prima Multi Terminal	--	46.271.433.648
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	75.291.840.944
KSO/JO RNI Waskita	--	51.745.450.620
PT Pejagan Pemalang Toll Road	--	353.629.304.351
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	127.298.348.995
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	71.144.732.296
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	60.333.722.429	123.456.726.479
Sub Jumlah/ Sub Total	11.557.452.399.567	25.029.465.405.951
Pihak Ketiga - Lancar/ Third Parties - Current Portion		
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	2.263.571.913.959	4.417.482.026.289
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	285.255.191.246	119.503.966.879
Pemerintah Daerah/ District Governments	70.944.853.158	84.972.965.233
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ The Ministry of Public Work of the Republic Democratic of Timor Leste	24.350.570.577	64.936.235.997
PT Marga Trans Nusantara	--	1.281.554.253.626
PT Cinere Serpong Jaya	--	1.425.042.674.256
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	350.488.385.483	301.253.095.968
Sub Jumlah/ Sub Total	2.994.610.914.423	7.694.745.218.248
Jumlah/ Total	14.552.063.313.990	32.724.210.624.199

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto kepada pengguna jasa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Other important informations regarding to gross amount due from customers as of December 31, 2019 are as follows:

1. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek – Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated

1. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek – Jakarta Cikampek II Elevated Toll Road Project

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated dengan nomor kontrak 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.300.715.272.727.

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Elevated Toll Road Project with contract number 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 with a contract value amounted to Rp 12,300,715,272,727.

**2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) –
Proyek Transmisi Sumatera 500 KVA**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Transmisi Sumatera 500 kVA Paket 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Paket 2 No. 0533.PJ/ DAN.02.02/DIR/2015, dan Paket 3 No. 0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp 4.026.285.529.669, Rp 2.678.957.208.310 dan Rp 2.609.973.000.000.

**3. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek
Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-
Pematang Panggang**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 442.499.784.161 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Zona HK-1, Rp 1.778.742.359.383 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-2, Rp 856.654.890.679 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-3, dan Rp 185.741.098.521 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Zona HK-4 Jembatan Sodong.

**4. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pematang
Panggang – Kayu Agung**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 untuk pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp 622.703.919.383 untuk Seksi 1, sebesar Rp 434.890.726.064 untuk Seksi 1a, sebesar Rp 1.827.814.190.904 untuk Seksi 2, sebesar Rp 1.020.944.279.465 untuk Seksi 2a, sebesar Rp 506.693.608.324 untuk Seksi 2b, sebesar Rp 2.105.066.823.305 untuk Seksi 3, Rp 1.388.581.735.869 untuk Seksi 4, dan Rp 517.365.548.368 untuk Seksi 4a.

**5. PT Hutama Marga Waskita – Proyek Jalan Tol
Tebing Tinggi – Parapat**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat No. 002/KONTRAK-HMW/VI/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.197.007.509.090.

**2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(PLN) - Sumatera Transmition 500 KVA
Project**

The Company entered into a construction contract on Sumatera Transmition 500 kVA Package 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Package 2 No. 0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, and Package 3 No. 0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 with a contract amounted to Rp 4,026,285,529,669, Rp 2,678,957,208,310 and Rp 2,609,973,000,000, respectively.

**3. PT Hutama Karya (Persero) –
The Development of Terbanggi Besar –
Pematang Panggang Toll Road Project**

The Company entered into a construction contract No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 amounted to Rp 442,499,784,161 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-1 Toll Road Project, amounted to Rp 1,778,742,359,383 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-2 Toll Road Project, Rp 856,654,890,679 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-3 Toll Road Project, Rp 185,741,098,521 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-4 Sodong Bridge Toll Road Project.

**4. PT Hutama Karya (Persero) – Pematang
Panggang – Kayu Agung Project**

The Company entered into a construction contract No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 for the development of Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road with a contract amounted to Rp 622,703,919,383 for Section 1, amounted to Rp 434,890,726,064 for Section 1a, amounted to Rp 1,827,814,190,904 for Section 2, amounted to Rp 1,020,944,279,465 for Section 2a, amounted to Rp 506,693,608,324 for Section 2b, amounted to Rp 2,105,066,823,305 for Section 3, amounted to Rp 1,388,581,735,869 for Section 4, and amounted to Rp 517,365,548,368 for Section 4a.

**5. PT Hutama Marga Waskita – Tebing
Tinggi - Parapat Toll Road Project**

The Company entered into a construction contract on Tebing Tinggi – Parapat Toll Road Project No. 002/KONTRAK-HMW/VI/2018 with a contract amounted to Rp 2,197,007,509,090.

6. PT Cinere Serpong Jaya – Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan tol Serpong - Cinere No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.454.401.060.881 (tanpa PPN).

7. PT Jasamarga Japek Selatan – Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III dengan nomor kontrak 11/BA.JJS/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.634.858.146.150.

8. PT Angkasa Pura I (Persero) – Proyek Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Proyek Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda pada tanggal 4 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 623.181.818.182.

9. Kementerian Perhubungan – Proyek LRT Sumatera Selatan

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan proyek LRT Sumatera Selatan No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.560.500.212.691.

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket II

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Bendungan Bener Paket II No. HK.02.03/PKK.BEND.II/2018/01 pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 557.877.638.182.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto – bagian tidak lancar adalah sebagai berikut:

Saldo Awal/ *Beginning Balance*
Penambahan/ *Addition*
Pemulihan/ *Recovery*
Reklasifikasi/ *Reclassification*
Saldo Akhir/ *Ending Balance*

6. PT Cinere Serpong Jaya – Serpong – Cinere Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Serpong - Cinere Toll Road Project No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 dated August 1, 2017 with contract value of Rp 2,454,401,060,881 (Exclude VAT).

7. PT Jasamarga Japek Selatan – Jakarta Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project with contract number 11/BA.JJS/2019 with a contract value amounted to Rp 2,634,858,146,150.

8. PT Angkasa Pura I (Persero) – The Expansion of Terminal 1 Juanda Airport Project

The Company entered into a construction for the expansion of Terminal 1 Juanda Airport Project dated July 4, 2019 amounted to Rp 623,181,818,182.

9. Ministry of Transportation – The Development of South Sumatera LRT Project

The Company entered into a construction contract on the development of South Sumatera LRT No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 and 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 dated June 30, 2016 with contract amounted to Rp 10,560,500,212,691.

10. Ministry of Public Works and Housing – The Development of Bener Dam Package II

The Company entered into a construction contract for the development of Bener Dam Package II No. HK.02.03/PKK.BEND.II/2018/01 dated October 16, 2018 with a contract amounted to Rp 557,877,638,182.

The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers – non-current position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
	(373.477.461.097)	(416.506.863.382)
	(23.463.718.514)	(75.839.925.990)
	20.204.970.695	50.189.417.672
	(4.151.546.058)	68.679.910.603
	(380.887.754.974)	(373.477.461.097)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto dapat ditagihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

The management believes all gross amounts due from customers are collectible. The management also believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.

Pada tahun 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 23.463.718.514 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Tarakan. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 20.204.970.695 yang terdiri dari PT Trans Marga Jateng sebesar Rp 12.114.737.689, Pemerintah Daerah sebesar Rp 5.692.110.835, PT Harmas Jalesveva sebesar Rp 1.497.099.369, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 667.036.362, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 181.818.182, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 52.168.258.

For the year 2019, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 23,463,718,514 was came from Tarakan Public Works Service. The recovery value on allowance for impairment of gross amount due from customers amounted to Rp 20,204,970,695 consists of PT Trans Marga Jateng amounted to Rp 12,114,737,689, District Government amounted to Rp 5,692,110,835, PT Harmas jalesveva amounted to Rp 1,497,099,369, the Ministry of Public Works and Housing amounted to Rp 667,036,362, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) amounted to Rp 181,818,182, and PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 52,168,258.

Pada tahun 2018, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 75.839.925.990 yang terdiri dari PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 37.796.106.830, Perpustakaan Nasional sebesar Rp 10.000.000.000, Dinas Pekerjaan Umum Karimun sebesar Rp 9.458.903.025, PT Broadbiz Asia sebesar Rp 6.437.849.729, Dinas Pekerjaan Umum Tarakan sebesar Rp 5.000.000.000, Pemerintah Daerah sebesar Rp 4.958.812.019, PT Graha Sarana Duta sebesar Rp 1.024.283.558, PT Mega Pasanggrahan Indah sebesar Rp 1.002.983.752, dan Waskita – Darmo Permai sebesar Rp 160.987.077. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 50.189.417.672 yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 26.460.495.973, PT Rekayasa Industri (Persero) sebesar Rp 12.290.040.836, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 6.914.654.188, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp 4.087.377.818, dan PT Bali Seminyak Resort sebesar Rp 436.848.857.

For the year 2018, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 75,839,925,990 consists of PT PAL Indonesia (Persero) amounted to Rp 37,796,106,830, National Library amounted to Rp 10,000,000,000, Karimun Public Works Service amounted to Rp 9,458,903,025, PT Broadbiz Asia amounted to Rp 6,437,849,729, Tarakan Public Works Service amounted to Rp 5,000,000,000, Government District amounted to Rp 4,958,812,019, PT Graha Sarana Duta amounted to Rp 1,024,283,558, PT Mega Pasanggrahan Indah amounted to Rp 1,002,983,752, and Waskita – Darmo Permai amounted to Rp 160,987,077. The recovery value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 50,189,417,672 consists of the Ministry of Public Works and Housing amounted to Rp 26,460,495,973, PT Rekayasa Industri (Persero) amounted to Rp 12,290,040,836, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk amounted to Rp 6,914,654,188, the Ministry of Law and Human Rights amounted to Rp 4,087,377,818 and PT Bali Seminyak Resort amounted to Rp 436,848,857.

Jumlah tagihan bruto berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of gross amount due from customers based on age are as follows:

	<u>2019</u> Rp	<u>2018</u> Rp	
Belum Jatuh Tempo	12.704.045.645.039	29.942.190.288.155	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 180 Hari	972.159.628.512	1.309.139.722.099	Up to 180 Days
> 181 - 360 Hari	176.370.453.608	696.788.580.344	> 181 - 360 Days
> 360 Hari	699.487.586.831	776.092.033.601	> 360 Days
Jumlah	14.552.063.313.990	32.724.210.624.199	Total

11. PERPAJAKAN

11. TAXES

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pasal 4 (2)	982.965.192	1.433.803.534	Article 4(2)
Pasal 22			Article 22
2019	1.131.663.642	--	2019
2018	--	13.311.506.242	2018
2017	--	40.284.349.330	2017
2016	--	16.150.829	2016
Pasal 23			Article 23
2019	826.739.911	--	2019
2018	--	1.634.905.464	2018
2017	--	2.491.228.447	2017
2016	--	2.829.513.314	2016
Pasal 25			Article 25
2017	--	384.000.000	2017
Pasal 28A			Article 28A
2018	387.546.777.287	228.543.955.814	2018
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2019	274.349.963.722	--	2019
2018	325.180.121.107	325.180.121.107	2018
2017	1.649.143.045.450	1.649.143.045.450	2017
2016	--	478.969.781.661	2016
Jumlah	2.639.161.276.311	2.744.222.361.192	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Utang Pajak Jangka Pendek			Short-Term Taxes Payable
Pasal 21	33.731.102.123	27.391.834.451	Article 21
Pasal 22	8.079.374.844	16.979.053.083	Article 22
Pasal 23	5.693.014.634	118.900.801.498	Article 23
Pajak Final Konstruksi	1.057.110.107.853	906.459.557.704	Construction Final Tax
Pajak Pertambahan Nilai	123.910.113.737	386.202.197.626	Value Added Tax
Pasal 4 (2) - Final	67.239.573.242	303.420.999.417	Article 4 (2) - Final
Pasal 29	86.081.321.095	269.254.188.862	Article 29
Total Utang Pajak Jangka Pendek	1.381.844.607.528	2.028.608.632.641	Total Short-Term Taxes Payable
Utang Pajak Jangka Panjang			Long-Term Taxes Payable
Pajak Final Konstruksi	193.161.337.709	805.408.693.733	Construction Final Tax
Total Utang Pajak Jangka Panjang	193.161.337.709	805.408.693.733	Total Long-Term Taxes Payable
Jumlah	1.575.005.945.237	2.834.017.326.374	Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Beban Pajak Kini			Current Tax Expense
Perusahaan	19.580.438.038	114.572.353.500	The Company
Entitas Anak	308.288.480.732	710.795.245.078	Subsidiaries
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(28.117.324.822)	91.507.199.877	Deferred Tax Expenses (Benefit)
Jumlah	299.751.593.948	916.874.798.455	Total

d. Beban Pajak Final

d. Final Tax Expenses

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pendapatan Perusahaan			The Company's Revenues
Pendapatan Jasa Konstruksi	23.278.812.183.433	41.736.556.172.428	Construction Revenues
Dikurangi			Deduction
Pendapatan Usaha yang			Revenues that Funded by
Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri	(58.882.823.148)	(787.894.721.295)	Foreign Loan
Pendapatan Usaha Luar Negeri			Non Taxable Foreign
Tidak Kena Pajak dan KSO	(2.582.399.415.192)	(2.168.633.767.430)	Revenues and JV
Pendapatan Beda Waktu			Time Differences
Penaan Pajak - Bersih	(1.564.854.260.222)	(9.980.392.070.606)	Taxable Revenue - Net
Pendapatan Jasa Konstruksi			Taxable Income from
Kena Pajak			Construction Revenues
Telah Terealisasi	19.072.675.684.871	28.799.635.613.097	Realized
Belum Terealisasi	4.470.089.611.916	20.843.936.361.731	Unrealized
Pendapatan Gedung yang Disewakan	1.344.224.095	2.082.107.965	Building Rental Revenues
Jumlah Pendapatan Kena Pajak	23.544.109.520.882	49.645.654.082.793	Total Taxable Income
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
3% atas Pendapatan Jasa Konstruksi	706.282.958.904	1.489.307.159.245	3% of Construction Revenues
10% atas Pendapatan Gedung yang Disewakan	134.422.410	208.210.797	10% of Building Rental Revenues
Jumlah Beban Pajak Final	706.417.381.314	1.489.515.370.042	Total Final Tax Expenses

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Estimasi Penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh badan 2019 dan 2018.

The estimated taxable incomes were used as the basis in preparation of the 2019 and 2018 annual corporate tax return.

e. Beban Pajak Non Final

e. Non Final Tax Expenses

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan Non Final	432.155.308.183	666.507.418.277	Non Final Income
Perbedaan Tetap			Permanent Difference
Beban Non Final	353.833.554.228	208.218.004.281	Non Final Expenses
Jumlah Laba kena Pajak	78.321.753.955	458.289.413.996	Total Taxable Income
Laba Kena Pajak	78.321.753.955	458.289.413.996	Total Taxable Income
Beban Pajak Non Final			Non Final Taxes Expenses
2019: 25%x Rp 78.321.753.955	19.580.438.038	--	2019: 25%x Rp 78.321.753.955
2018: 25%x Rp 458.289.413.996	--	114.572.353.500	2018: 25%x Rp 458.289.413.996
Jumlah Beban Pajak Non Final	19.580.438.038	114.572.353.500	Total Non Final Taxes Expenses
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka:			Deducting Prepaid Taxes
PPH 22	806.108.120	1.816.706.013	Article 22
PPH 23	7.382.406.374	216.763.463.439	Article 23
PPH 25	--	15.129.381.865	Article 25
Jumlah	8.188.514.494	233.709.551.317	Total
Pajak Non Final Terutang	11.391.923.544	(119.137.197.817)	Non Final Tax Payable

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	1 Januari/ January 1, 2019 Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	581.979.033	--	(4.439.237)	(31.545.686)	545.994.110
CCT	143.819.850	--	(2.598.651)	(54.028.615)	87.192.584
CTP	133.048.726	--	33.025.529	14.441.304	180.515.559
WTR	66.990.246	--	192.864.287	13.261.594	273.116.127
KKDM	--	455.606.192	--	--	455.606.192
WBP	631.410.216	(631.410.216)	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	1.557.248.071	(175.804.024)	218.851.928	(57.871.403)	1.542.424.572
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
WBP	--	1.012.901.895	(23.237.392.154)	768.045.006	25.018.339.055
KKDM	50.323.695.776	455.606.192	50.713.694.999	(65.606.969)	--
PBTR	1.315.064.304	--	1.315.064.304	--	--
WKR	2.723.876.393	--	(892.894.255)	--	3.616.770.648
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	54.362.636.473	1.468.508.087	27.898.472.894	702.438.037	28.635.109.703

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2018 Rp	Penyesuaian/ Adjustment Rp	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income Rp	31 Desember/ December 31, 2018 Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	1.834.047.166	--	(1.155.344.657)	(96.723.476)	581.979.033
CCT	126.112.719	--	44.996.593	(27.289.462)	143.819.850
CTP	--	--	145.605.691	(12.556.965)	133.048.726
WTR	--	--	82.504.735	(15.514.489)	66.990.246
WBP	41.963.875.696	--	(41.533.040.343)	200.574.863	631.410.216
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	43.924.035.581	--	(42.415.277.981)	48.490.471	1.557.248.071
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
PPTR	37.831.852.057	(37.831.852.057)	--	--	--
KKDM	3.495.794.867	--	(46.778.916.954)	48.983.955	50.323.695.776
PBTR	--	--	(1.315.064.304)	--	1.315.064.304
WKR	1.725.928.190	7.565	(997.940.638)	--	2.723.876.393
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	43.053.575.114	(37.831.844.492)	(49.091.921.896)	48.983.955	54.362.636.473

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 2 April 2019, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 320.441.716.778 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 6.006.320.784 terkait denda pajak, sehingga perusahaan menerima Rp 314.435.395.994, dengan rincian sebagai berikut:

g. Tax Assessment Letters

On April 2, 2019, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 320,441,716,778 and has received Tax Collection Letter amounted to Rp 6,006,320,784 related to administrative sanction of tax, so the Company has received amounted to Rp 314,435,395,994, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP dan STP/ SKP and STP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Des-16	00011/407/16/093/19	05-Mar-19	320.441.716.778	Terima/ Receipt
2	PPN	Des-16	00003/107/16/093/19	05-Mar-19	(26.905.531)	Bayar/ Paid
3	PPN	Des-16	00013/287/16/093/19	05-Mar-19	(5.871.490.796)	Bayar/ Paid
4	PPN	Des-16	00009/187/16/093/19	05-Mar-19	(21.337.306)	Bayar/ Paid
5	PPh Pasal 21	Des-13	00330/101/13/701/18	04-Apr-18	(720.317)	Bayar/ Paid
6	PPh Pasal 21	Feb-16	00285/101/16/831/18	22-Mei-18	(100.000)	Bayar/ Paid
7	PPh Pasal 21	Jun-16	00286/101/16/831/18	22-Mei-18	(100.000)	Bayar/ Paid
8	PPh Pasal 21	Mei-17	00128/101/17/114/18	02-Jul-18	(100.000)	Bayar/ Paid
9	PPh Pasal 23	Des-14	00008/103/14/805/18	14-Sep-18	(21.368.112)	Bayar/ Paid
10	PPh Pasal 21	Apr-17	00298/101/17/942/18	23-Okt-18	(101.668)	Bayar/ Paid
11	PPh Pasal 21	Mar-17	00295/101/17/942/18	23-Okt-18	(101.668)	Bayar/ Paid
12	PPh Pasal 21	Jan-17	00288/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
13	PPh Pasal 21	Feb-17	00270/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
14	PPh Pasal 21	Mei-17	00277/101/17/942/18	23-Okt-18	(100.000)	Bayar/ Paid
15	PPh Pasal 21	Jun-17	00274/101/17/942/18	23-Okt-18	(14.076)	Bayar/ Paid
16	PPh Pasal 21	Des-16	00008/101/16/904/19	28-Jan-19	(21.377)	Bayar/ Paid
17	PPh Pasal 23	Nov-16	00007/103/16/646/19	21-Feb-19	(1.151.886)	Bayar/ Paid
18	PPh Pasal 23	Jan-17	00001/103/17/646/19	21-Feb-19	(1.055.385)	Bayar/ Paid
19	PPh Pasal 23	Jun-16	00002/103/16/646/19	21-Feb-19	(1.035.559)	Bayar/ Paid
20	PPh Pasal 23	Sep-16	00005/103/16/646/19	21-Feb-19	(929.708)	Bayar/ Paid
21	PPh Pasal 23	Agu-16	00004/103/16/646/19	21-Feb-19	(896.476)	Bayar/ Paid
22	PPh Pasal 21	Jun-16	00010/101/16/646/19	21-Feb-19	(816.883)	Bayar/ Paid
23	PPh Pasal 23	Okt-16	00006/103/16/646/19	21-Feb-19	(770.384)	Bayar/ Paid
24	PPh Pasal 21	Sep-16	00013/101/16/646/19	21-Feb-19	(500.317)	Bayar/ Paid
25	PPh Pasal 23	Mei-16	00001/103/16/646/19	21-Feb-19	(405.614)	Bayar/ Paid
26	PPh Final Pasal 4(2)	Jun-16	00006/140/16/646/19	21-Feb-19	(301.422)	Bayar/ Paid
27	PPh Final Pasal 4(2)	Nov-16	00010/140/16/646/19	21-Feb-19	(291.766)	Bayar/ Paid
28	PPh Pasal 21	Mei-16	00009/101/16/646/19	21-Feb-19	(263.428)	Bayar/ Paid
29	PPh Pasal 23	Jul-16	00003/103/16/646/19	21-Feb-19	(230.884)	Bayar/ Paid
30	PPh Final Pasal 4(2)	Mei-16	00005/140/16/646/19	21-Feb-19	(170.000)	Bayar/ Paid
31	PPh Pasal 21	Jan-17	00012/101/17/646/19	21-Feb-19	(147.108)	Bayar/ Paid
32	PPh Pasal 21	Agu-16	00012/101/16/646/19	21-Feb-19	(102.135)	Bayar/ Paid
33	PPh Final Pasal 4(2)	Jan-17	00038/140/17/646/19	21-Feb-19	(95.188)	Bayar/ Paid
34	PPh Pasal 21	Jul-16	00011/101/16/646/19	21-Feb-19	(40.662)	Bayar/ Paid
35	PPh Final Pasal 4(2)	Sep-16	00009/140/16/646/19	21-Feb-19	(39.860)	Bayar/ Paid
36	PPh Final Pasal 4(2)	Jul-16	00007/140/16/646/19	21-Feb-19	(38.888)	Bayar/ Paid
37	PPh Final Pasal 4(2)	Agu-16	00008/140/16/646/19	21-Feb-19	(38.800)	Bayar/ Paid
38	PPh Pasal 22	Des-17	00001/102/17/513/19	11-Mar-19	(21.644.685)	Bayar/ Paid
39	PPh Pasal 22	Jan-18	00001/102/18/513/19	11-Mar-19	(31.761.481)	Bayar/ Paid
40	PPh Pasal 21	Des-15	00116/101/15/805/19	14-Mar-19	(931.414)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					314.435.395.994	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.138.408.486 terkait denda pajak, sebagai berikut:

On April 5, 2019, the Company has received Tax Collection Letter amounted to Rp 1,138,408,486 related to administrative sanction of tax, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	00003/187/17/093/19	19-Mar-19	(527.579.325)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-17	00004/187/17/093/19	19-Mar-19	(195.664.995)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-17	00005/187/17/093/19	19-Mar-19	(80.871.771)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-17	00006/187/17/093/19	19-Mar-19	(60.619.428)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-17	00007/187/17/093/19	19-Mar-19	(24.316.480)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-17	00008/187/17/093/19	19-Mar-19	(24.055.858)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-17	00009/187/17/093/19	19-Mar-19	(4.855.558)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-17	00010/187/17/093/19	19-Mar-19	(14.217.504)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-17	00011/187/17/093/19	19-Mar-19	(20.763.868)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-17	00012/187/17/093/19	19-Mar-19	(23.216.403)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-17	00013/187/17/093/19	19-Mar-19	(26.143.846)	Bayar/ Paid
12	PPN	Des-17	00014/187/17/093/19	19-Mar-19	(4.721.037)	Bayar/ Paid
13	PPN	Jan-18	00024/187/18/093/19	27-Mar-19	(131.382.413)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(1.138.408.486)	

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan menerima SKPKB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kekurangan pembayaran Rp 10.048.516.490, sebagai berikut:

On December 9, 2019, the Company has received SKPKB from KPP of VAT to confirm underpayment of total Rp 10,048,516,490, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-16	00037/287/16/093/19	12-Nov-19	(965.762.008)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-16	00038/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.660.250.093)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-16	00039/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.065.116.683)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-16	00040/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.189.098.666)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-16	00041/287/16/093/19	12-Nov-19	(449.177.022)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-16	00042/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.155.132.234)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-16	00043/287/16/093/19	12-Nov-19	(158.991.001)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-16	00044/287/16/093/19	12-Nov-19	(923.833.813)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-16	00045/287/16/093/19	12-Nov-19	(1.014.008.861)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-16	00046/287/16/093/19	12-Nov-19	(697.632.814)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-16	00047/287/16/093/19	12-Nov-19	(769.513.295)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(10.048.516.490)	

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.377.832.345 terkait denda pajak, sebagai berikut:

On December 9, 2019, the Company has received Tax Collection Letter amounted to Rp 1,377,832,345 related to administrative sanction of tax, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-16	00032/187/16/093/19	12-Nov-19	(212.631.567)	Bayar/ Paid
2	PPN	Feb-16	00033/187/16/093/19	12-Nov-19	(119.759.970)	Bayar/ Paid
3	PPN	Mar-16	00034/187/16/093/19	12-Nov-19	(256.097.050)	Bayar/ Paid
4	PPN	Apr-16	00035/187/16/093/19	12-Nov-19	(260.896.485)	Bayar/ Paid
5	PPN	Mei-16	00036/187/16/093/19	12-Nov-19	(80.060.566)	Bayar/ Paid
6	PPN	Jun-16	00037/187/16/093/19	12-Nov-19	(173.924.663)	Bayar/ Paid
7	PPN	Jul-16	00038/187/16/093/19	12-Nov-19	(52.291.122)	Bayar/ Paid
8	PPN	Agu-16	00039/187/16/093/19	12-Nov-19	(109.298.549)	Bayar/ Paid
9	PPN	Sep-16	00040/187/16/093/19	12-Nov-19	(14.843.156)	Bayar/ Paid
10	PPN	Okt-16	00041/187/16/093/19	12-Nov-19	(9.116.678)	Bayar/ Paid
11	PPN	Nov-16	00042/187/16/093/19	12-Nov-19	(88.912.539)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(1.377.832.345)	

Pada tanggal 15 Nopember 2019, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 1.042.632.602.938 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 10.625.835.929 terkait denda pajak, sehingga perusahaan menerima Rp 1.032.006.767.009, dengan rincian sebagai berikut:

On November 15, 2019, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 1,042,632,602,938 and has received Tax Collection Letter amounted to Rp 10,625,835,929 related to administrative sanction of tax, so the Company has received amounted to Rp 1,032,006,767,009, as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	00114/407/17/093/19	15-Nov-19	59.428.627.760	Terimal/ Receipt
2	PPN	Feb-17	00115/407/17/093/19	15-Nov-19	89.473.535.275	Terimal/ Receipt
3	PPN	Mar-17	00116/407/17/093/19	15-Nov-19	41.073.130.627	Terimal/ Receipt
4	PPN	Apr-17	00117/407/17/093/19	15-Nov-19	83.959.607.577	Terimal/ Receipt
5	PPN	Mei-17	00118/407/17/093/19	15-Nov-19	35.521.925.144	Terimal/ Receipt
6	PPN	Jun-17	00119/407/17/093/19	15-Nov-19	34.426.368.380	Terimal/ Receipt
7	PPN	Jul-17	00120/407/17/093/19	15-Nov-19	15.497.855.419	Terimal/ Receipt
8	PPN	Agu-17	00121/407/17/093/19	15-Nov-19	68.976.281.221	Terimal/ Receipt
9	PPN	Sep-17	00122/407/17/093/19	15-Nov-19	93.851.157.934	Terimal/ Receipt
10	PPN	Okt-17	00123/407/17/093/19	15-Nov-19	207.479.372.372	Terimal/ Receipt
11	PPN	Nov-17	00124/407/17/093/19	15-Nov-19	115.330.527.814	Terimal/ Receipt
12	PPN	Des-17	00125/407/17/093/19	15-Nov-19	197.614.213.415	Terimal/ Receipt
13	PPN	Jan-17	00068/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.566.214.665)	Bayar/ Paid
14	PPN	Feb-17	00069/287/17/093/19	15-Nov-19	(3.376.662.357)	Bayar/ Paid
15	PPN	Mar-17	00070/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.536.595.721)	Bayar/ Paid
16	PPN	Apr-17	00071/287/17/093/19	15-Nov-19	(967.340.283)	Bayar/ Paid
17	PPN	Mei-17	00072/287/17/093/19	15-Nov-19	(292.473.329)	Bayar/ Paid
18	PPN	Jun-17	00073/287/17/093/19	15-Nov-19	(182.791.411)	Bayar/ Paid
19	PPN	Jul-17	00074/287/17/093/19	15-Nov-19	(449.989.035)	Bayar/ Paid
20	PPN	Agu-17	00075/287/17/093/19	15-Nov-19	(202.189.522)	Bayar/ Paid
21	PPN	Sep-17	00076/287/17/093/19	15-Nov-19	(622.516.085)	Bayar/ Paid
22	PPN	Okt-17	00077/287/17/093/19	15-Nov-19	(341.436.866)	Bayar/ Paid
23	PPN	Nov-17	00078/287/17/093/19	15-Nov-19	(486.432.888)	Bayar/ Paid
24	PPN	Des-17	00079/287/17/093/19	15-Nov-19	(601.193.767)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					1.032.006.767.009	

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	2019 Rp	2018 Rp	
PPN Keluaran Yang Belum Diterima	510.586.800.266	570.369.470.561	VAT Out Not Yet Received
Uang Muka Kontrak	465.154.794.272	772.783.381.095	Advanced Contracts
Uang Muka Investasi	280.000.000.000	--	Advanced Investment
Biaya Dibayar dimuka	170.075.172.952	52.127.276.897	Prepaid Expenses
Uang Muka Beban Umum dan Administrasi	2.524.386.521	1.453.262.340	Advances for General and Administration
Sewa Dibayar dimuka	7.442.433.132	5.417.418.363	Prepaid Rent
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	--	387.779.111	Accrued Revenue
Lain-lain	175.505.002	5.481.572.252	Others
Jumlah	1.435.959.092.145	1.408.020.160.619	Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) Out not yet received represents of VAT output on receivable, nevertheless the owner has not paid yet.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek belum berjalan, biaya provisi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penyelesaian biaya dibayar dimuka diperhitungkan pada saat proyek sudah berjalan, untuk biaya provisi diakui setiap bulan.

Prepayments represent the cost incurred for projects not yet started, the provision cost of Letter of Credit (L/C) and Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The Completion prepayments is calculated when the projects start, for a fee provision is recognized each month.

Uang muka kontrak diberikan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Grup. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan termin yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Advances contracts are presented to subcontractors, suppliers and the entire stock who worked on the Group's projects. The settlement of advance will be calculated by the invoice that will be paid related to third parties concerned.

Uang muka investasi merupakan pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas surat penawaran kerjasama aset properti investasi melalui konsorsium Perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Utama Karya (Persero). Perjanjian konsorsium tersebut terbentuk untuk melakukan optimalisasi properti (tanah dan bangunan) milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan Perjanjian No. 161.SJ.U.1018 dan No. TP.01.03/A.DIR.16877/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018.

Advances in investment represent payments to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the offering letter of joint investment property assets through a consortium of the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Utama Karya (Persero). The Consortium agreement was formed to optimize the property (land and building) owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in accordance with agreement No. 161.SJ.U.1018 and No. TP.01.03/A.DIR.16877/2018 dated October 11, 2018.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Sesuai dengan perjanjian pendahuluan antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan konsorsium BUMN Karya bahwa tanda minat atas rencana pengembangan atau pengalihan hak atas obyek optimalisasi adalah sebesar Rp 1.400.000.000.000. Jumlah pembagian porsi untuk masing-masing BUMN Karya adalah 20%, sehingga jumlah penyertaan Perusahaan dalam konsorsium tersebut adalah Rp 280.000.000.000.

In accordance with the preliminary agreements between PT Asuransi Jiwasraya (Persero) with a consortium of BUMN Karya that the sign of interest in the development plan or transfer of rights to the optimization object is Rp 1,400,000,000,000. The number of servings for each BUMN Karya is 20%, so the amount of company's inclusion in the consortium is Rp 280,000,000,000.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investments in Associates*
Investasi pada Ventura Bersama/ *Investments in Joint Ventures*
Jumlah/ Total

Investasi pada Entitas Asosiasi

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
	3.376.912.660.824	4.190.650.156.054
	2.007.581.530.917	2.460.822.014.487
	5.384.494.191.741	6.651.472.170.541

Investment in Associates Entities

Details of investments in associate entities are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	Aktivitas utama/ <i>Principal activity</i>	Kedudukan/ <i>Domicile</i>
PT Jasamarga Semarang Batang	1.181.915.838.627	1.338.240.345.233	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Waskita Transjawa Toll Road	1.129.460.227.941	820.612.697.793	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Jasamarga Kualanamu Tol	392.431.280.812	383.883.884.651	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Cinere Serpong Jaya	299.491.092.451	107.750.508.796	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Citra Waspolutowa	295.756.008.051	279.845.099.634	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Hutama Marga Waskita	58.389.310.511	26.545.070.423	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Hotel Karya Indonesia	15.718.902.431	--	Hotel/ <i>Hotel</i>	Indonesia
PT Waskita Bali Mandara	3.750.000.000	3.750.000.000	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Jasamarga Solo Ngawi	--	829.436.785.542	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	400.585.763.982	Operator Jalan Tol/ <i>Toll operator</i>	Indonesia
Jumlah/ Total	3.376.912.660.824	4.190.650.156.054		

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of ownership interest and movements of investment in associate entities for the year 2019 and 2018 are as follows:

	%	2019				
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ <i>Equity in net income (loss) associates</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	1.338.240.345.233	--	(156.324.506.606)	--	1.181.915.838.627
PT Waskita Transjawa Toll Road	34,75	820.612.697.793	420.070.567.530	(111.223.037.382)	--	1.129.460.227.941
PT Jasamarga Kualanamu Tol	30,00	383.883.884.651	18.000.000.000	(9.452.603.839)	--	392.431.280.812
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	107.750.508.796	191.533.669.600	206.914.055	--	299.491.092.451
PT Citra Waspolutowa	25,00	279.845.099.634	61.000.000.000	(45.089.091.583)	--	295.756.008.051
PT Hutama Marga Waskita	30,00	26.545.070.423	25.710.000.000	6.134.240.088	--	58.389.310.511
PT Hotel Karya Indonesia	25,00	--	15.525.000.000	193.902.431	--	15.718.902.431
PT Jasamarga Solo Ngawi	40,00	829.436.785.542	454.520.000.000	(90.927.657.088)	(1.193.029.128.454)	--
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	40,00	400.585.763.982	29.109.344.000	(27.152.955.738)	(402.542.152.244)	--
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
Jumlah/ Total		4.190.650.156.054	1.215.468.581.130	(433.634.795.662)	(1.595.571.280.698)	3.376.912.660.824

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 (Continued)**

2018					
%	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	61.553.113.737	1.272.007.560.000	4.679.671.496	1.338.240.345.233
PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) (d/h/ formerly PT Solo Ngawi Jaya)	40,00	549.938.491.414	303.112.084.000	(23.613.789.872)	829.436.785.542
PT Waskita Transjawa Toll Road	30,00	--	904.536.000.000	(83.923.302.207)	820.612.697.793
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) (d/h/ formerly PT Ngawi Kertosono Jaya)	40,00	380.675.125.233	79.200.000.000	(59.289.361.251)	400.585.763.982
PT Jasamarga Kualanamu Tol	30,00	296.426.884.210	115.710.000.000	(28.252.999.559)	383.883.884.651
PT Citra Waspphutowa	25,00	256.178.814.687	25.000.000.000	(1.333.715.053)	279.845.099.634
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	88.573.776.863	18.536.700.000	640.031.933	107.750.508.796
PT Hulama Marga Waskita	30,00	4.048.372.535	22.800.000.000	(303.302.112)	26.545.070.423
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	3.750.000.000
PT Jasamarga Transjawa Tol	35,00	437.500.000	--	(437.500.000)	--
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	40,00	--	200.000.000	(200.000.000)	--
Jumlah/ Total		1.641.582.078.679	2.741.102.344.000	(191.396.766.625)	4.190.650.156.054

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

Pendirian PT Waskita MNC Transjawa Toll Road (entitas anak WTR) adalah sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 25 tanggal 28 September 2015. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-2458481. AH.01.01.TH.2015 tanggal 29 September 2015.

Berdasarkan akta notaris Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 tanggal 27 Mei 2016 telah disetujui perubahan nama dari "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" menjadi "PT Waskita Transjawa Toll Road". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-005.3.001 tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 10 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR menjual 57,14% kepemilikan saham di WTTR dengan harga sebesar Rp 2.857.143.347.539. Kepemilikan saham WTR di WTTR menjadi sebesar 42,85% setelah penjualan tersebut. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0050658.AH.01.11 tanggal 11 April 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 11 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kepemilikan saham WTR di WTTR menjadi sebesar 29,99%. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0144385 tanggal 12 April 2018.

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

The establishment of PT Waskita MNC Transjawa Toll Road (subsidiary of WTR) was based on notarial deed No. 25 dated September 28, 2015 of notary Fathiah Helmi, S.H. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-2458481.AH.01.01.TH.2015 dated September 29, 2015.

Based on notarial deed Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 dated May 27, 2016 which approved to changing the name of "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" into "PT Waskita Transjawa Toll Road". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-005.3.001 dated May 31, 2016.

Based on notarial deed No. 23 dated April 10, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR sold its shares of WTTR with 57,14% ownership at a price of Rp 2,857,143,347,539. WTR's share ownership in WTTR became 42,85% after the sales of share transaction. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-0050658.AH.01.11 dated April 11, 2018.

Based on notarial deed No. 26 dated April 11, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR's share ownership in WTTR became 29.99%. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-0144385 dated April 12, 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 62 tanggal 23 Mei 2018 dari notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0215105 tanggal 12 Juni 2018.

WTR melakukan *Put Option* atas Kepemilikan saham di WTR sebesar 4,75%, sesuai dengan Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 25 tanggal 10 April 2018 Pasal 6.3 perihal Pengalihan Saham – *Put Option* dan *Call Option* sebesar Rp 420.070.567.530, kepemilikan saham WTR di WTR menjadi sebesar 34,75%.

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JSN atau setara Rp 166.820.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 34, Notaris Fathiah Helmi, S.H, pada tanggal 10 Juni 2015.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 96.404.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 9 Juli 2015.

WTR menambah penyertaan melalui konversi utang pada JSN sebesar Rp 1.075.839.217, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR dan JSN tanggal 30 Juni 2016.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 48.717.196.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 11 Februari 2016.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 47.293.496.800, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Agustus 2016.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 74.448.000.000, berdasarkan Akta No. 4 dari Notaris Ati Mulyati, S.H., M.Kn., tanggal 19 Juli 2017.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 101.332.792.000, berdasarkan Akta No. 5 dari Notaris Ati Mulyati, S.H., M.Kn., tanggal 18 Oktober 2017.

Berdasarkan akta notaris Windalina, S.H., No. 3 tanggal 27 Februari 2018 telah disetujui perubahan nama dari "PT Solo Ngawi Jaya" menjadi "PT Jasamarga Solo Ngawi". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0087454 tanggal 28 Februari 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial deed No. 62 dated May 23, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0215105 dated June 12, 2018.

WTR performed a Put Option on Shares Ownership in WTR of 4.75%, based on shareholders agreement No. 25 dated April 10, 2018 article 6.3 regarding the transfer of shares – Put Option and Call Option amounted to Rp 420,070,567,530, WTR's share ownership in WTR became 34.75%.

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

WTR, a subsidiary, has an investment of 40% in JSN or equivalent to Rp 166,820,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 34 of Notary Fathiah Helmi, S.H., dated June 10, 2015.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 96,404,000,000, based on the decree of the Circular of General Meeting of Shareholders (GMS) dated July 9, 2015.

WTR increased its investment through conversion of debt in JSN amounted to Rp 1,075,839,217, based on The Minutes of Debt between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR and JSN dated June 30, 2016.

WTR increased more investment in JSN amounted to Rp 48,717,196,000, based on the decree of the Circular of GMS dated February 11, 2016.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 47,293,496,800, based on Shareholders' General Meeting Circular (GMS) decision dated August 18, 2016.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 74,448,000,000, based on the notarial deed No. 4 by notary Ati Mulyati, S.H., M.Kn., dated July 19, 2017.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 101,332,792,000, based on the notarial deed No. 5 by notary Ati Mulyati, S.H., M.Kn., dated October 18, 2017.

Based on notarial deed Windalina, S.H., No. 3 dated February 27, 2018 which approved to changing the name of "PT Solo Ngawi Jaya" into "PT Jasamarga Solo Ngawi". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-AH.01.03-0087454 dated February 28, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sehingga kepemilikan menjadi Rp 534.911.388.000, berdasarkan Akta No. 5 dari Notaris Lintar Trie Utami, S.H. tanggal 18 Mei 2018, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0208162 tanggal 22 Mei 2018.

WTR increased its investment in JSN increasing their ownership to Rp 534,911,388,000, based on the notarial deed No. 5 by notary Lintar Trie Utami, S.H., dated May 18, 2018 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-AH.01.03-0208162 dated May 22, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 303.112.040.000, berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Windalina, S.H., tanggal 13 Desember 2018.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 303,112,040,000, based on the notarial deed No. 3 by Windalina, S.H., dated December 13, 2018.

WTR menambah penyertaan pada JSN sebesar Rp 454.520.000.000 berdasarkan Akta No. 6 dari Notaris Windalina, S.H., tanggal 11 April 2019.

WTR increased its investment in JSN amounted to Rp 454,520,000,000, based on the notarial deed No. 6 by Windalina, S.H., dated April 11, 2019.

WTR melepaskan 40% kepemilikan pada JSN dengan harga jual Rp 1.320.000.000.000 kepada PT Kings Key Limited, berdasarkan Akta No. 94 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 18 Desember 2019, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0375861. Atas transaksi ini WTR memperoleh laba sebesar Rp 126.970.871.546 (Catatan 42).

WTR relinquished 40% ownership in JSN with sale price amounted to Rp 1,320,000,000,000 to PT Kings Key Limited, based on Deed No. 94 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., December 18, 2019, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-AH.01.03-0375861. On this transaction WTR gained a profit of Rp 126,970,871,546 (note 42).

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JNKK atau setara Rp 8.780.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35, Notaris Fathiah Helmi, S.H.

WTR, a subsidiary, has an investment of 40% in JNKK or equal to Rp 8,780,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of Notary Fathiah Helmi, S.H.

WTR menambah penyertaan melalui utang pada JNKK sebesar Rp 2.898.818.457, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 17 Juni 2015.

WTR increased its investment through a debt in JNKK amounted to Rp 2,898,818,457, based on the decree of the Circular of RUPS dated June 17, 2015.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 55.435.600.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 7 Juli 2015.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 55,435,600,000, based on the decree of the Circular of GMS dated July 7, 2015.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 19.325.680.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 11 Pebruari 2016.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 19,325,680,000, based on the decree of the Circular GMS dated February 11, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 33.248.952.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 15 Juni 2016.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 33,248,952,000, based on the decree of the Circular of GMS dated June 15, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 48.171.200.000, berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 18 Agustus 2016.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 48,171,200,000, based on the decree of the Circular GMS dated August 18, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 111.138.588.000, berdasarkan Akta No. 21 dari Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., tanggal 26 April 2017.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 111,138,588,000, based on the notarial deed No. 21 by notary Julius Purnawan, S.H., M.Si., dated April 26, 2017.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 90.825.240.000, berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., tanggal 28 Juli 2017.

Berdasarkan akta notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., No. 2 tanggal 9 April 2018 telah disetujui perubahan nama dari "PT Ngawi Kertosono Jaya" menjadi "PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0007980.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 April 2018.

WTR menambah penyertaan pada JNKK sebesar Rp 29.103.344.000, berdasarkan Akta No. 59 dari Notaris Sakti Lo, S.H., tanggal 6 September 2019, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0332166 tanggal 16 September 2019.

WTR melepaskan 40% kepemilikan pada JNKK atau setara dengan Rp 562.000.000.000 kepada PT Kings Key Limited, berdasarkan Akta No. 95 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 18 Desember 2019, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0375865. Atas transaksi ini WTR memperoleh laba sebesar Rp 159.457.847.756 (Catatan 42).

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 15% di JMKT atau sebesar Rp 31.250.000.000. JMKT didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 tanggal 25 Nopember 2014, bergerak di bidang perusahaan jalan.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 10.050.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 23 Januari 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.450.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 16 Mei 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.000.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 22 Juli 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 19.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS pada Januari 2017.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 90,825,240,000, based on the notarial deed No. 10 of notary Julius Purnawan, S.H., M.Si., dated July 28, 2017.

Based on notarial deed Julius Purnawan, S.H., M.Si., No. 2 dated April 9, 2018 which approved to changing the name of "PT Ngawi Kertosono Jaya" into "PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0007980.AH.01.02. TAHUN 2018 dated April 10, 2018.

WTR increased its investment in JNKK amounted to Rp 29,103,344,000, based on the notarial deed No. 59 of notary Sakti Lo, S.H., dated September 6, 2019, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-AH.01.03-0332166 dated September 16, 2019.

WTR relinquished 40% ownership in JNKK with sale price amounted to Rp 562,000,000,000 to PT Kings Key Limited, based on Deed No. 95 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., December 18, 2019, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-AH.01.03-0375865. On this transaction WTR gained a profit of Rp 159,457,847,756 (note 42).

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

WTR, a subsidiary, has investments of 15% in JMKT amounted to Rp 31,250,000,000. JMKT was established based on the Notarial deed of notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 dated November 25, 2014 engaged in toll road.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 10,050,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated January 23, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,450,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated May 16, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,000,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated July 22, 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 19,500,000,000, based on decree of the Circular of GMS in January 2017.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai dengan Akta No. 22 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., WTR membeli saham JMKT yang dimiliki oleh Perusahaan Persero Tbk sebesar Rp 85.000.000.000 dengan disagio saham sebesar Rp 20.500.000.000, sehingga kepemilikan menjadi 30%.

On March 24, 2017 based on the Notarial deed No. 22 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., WTR bought the shares of JMKT owned by the Company Tbk amounted to Rp 85,000,000,000 with a share disagio of Rp 20,500,000,000. Resulting in the increase of the Company's participation becoming 30%.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 14 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 15 Mei 2017 pada JMKT sebesar Rp 19.500.000.000

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 14 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated May 15, 2017 in JMKT amounted to Rp 19,500,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 1 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 5 Juni 2017 pada JMKT sebesar Rp 60.000.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 1 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated June 5, 2017 in JMKT amounted to Rp 60,000,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 25 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 31 Oktober 2017 pada JMKT sebesar Rp 61.500.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 25 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated October 31, 2017 in JMKT amounted to Rp 61,500,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 02 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 04 Juli 2018 pada JMKT sebesar Rp 115.710.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 2 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated July 04, 2018 in JMKT amounted to Rp 115,710,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 11 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 13 Agustus 2019 pada JMKT sebesar Rp 18.000.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 11 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated August 13, 2019 in JMKT amounted to Rp 18,000,000,000.

PT Citra Waspphutowa (CW)

PT Citra Waspphutowa (CW)

Perusahaan dan WTR masing-masing memiliki penyertaan sebesar 12,50% pada CW atau setara Rp 125.000.000.000 yang didirikan sesuai Akta Pendirian No. 10 tanggal 13 Januari 2006 dari Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

The Company and WTR each owns investments of 12.50% in CW or equivalent to Rp 125,000,000,000. This entity was established based on the Notarial deed No. 10 dated January 13, 2006 of Notary Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., engaged in toll concession right.

Pada tanggal 5 April 2017, sesuai dengan Akta No. 13 dari Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., WTR membeli saham CW yang dimiliki oleh Perusahaan sebesar Rp 132.000.000.000 dengan disagio saham sebesar Rp 63.467.953.607 sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 25%.

On April 5, 2017, based on the notarial deed No. 13 by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., WTR bought the shares of CW owned by the Company amounted to Rp 132,000,000,000 with a share disagio of Rp 63,467,953,607. Resulting in the increase of the Company's ownership becoming 25%.

WTR menambah penyertaan pada CW sebesar Rp 20.000.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 25 Juli 2017.

WTR increased investment in CW amounted to Rp 20,000,000,000 based on Circular Resolution of the GMS dated July 25, 2017.

WTR menambah penyertaan pada CW sebesar Rp 45.000.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular di Luar RUPS pada Desember 2017.

WTR increased investment in CW amounted to Rp 45,000,000,000, based on circular GMS decision in December 2017.

WTR menambah penyertaan pada CW sehingga total penyertaan menjadi Rp 165.000.000.000, berdasarkan Keputusan Sirkular di Luar RUPS pada 20 Pebruari 2018 sesuai Akta No. 42 tanggal 28 Pebruari 2018 dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.PA.

WTR increased its investment in CW so that the total ownership will be Rp 165,000,000,000, based on Circular Decision outside the GMS on February 20, 2018 based on Deed No. 42 dated February 28, 2018 of Notary Dewantari Handayani, S.H., M.PA.

WTR menambah penyertaan pada CW sebesar Rp 61.000.000.000, berdasarkan Akta No. 95 dari Notaris Justriany Koni S.H., tanggal 28 Mei 2019.

WTR increased investment in CW amounted to Rp 61,000,000,000, based on the Notarial Deed No. 95 by Notary Justriany Koni S.H., dated May 28, 2019.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 35% pada CSJ atau setara Rp 70.000.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR a subsidiary, has investments of 35% in CSJ or equal to Rp 70,000,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR menambah penyertaan pada CSJ sebesar Rp 7.031.843.000, berdasarkan Surat Permintaan Setoran Modal Perseroan tanggal 6 Juli 2015.

WTR increased its investment in CSJ amounted to Rp 7,031,843,000, based on the Letter for request of Capital Subscription dated July 6, 2015.

WTR menambah penyertaan melalui konversi utang pada CSJ sebesar Rp 11.513.843.037, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang Antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo dan CSJ tanggal 31 Juli 2015.

WTR increased its investment through a conversion of debt in CSJ amounted to Rp 11,513,843,037, based on the Minutes of Meeting between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo and CSJ dated July 31, 2015.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 18 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 22 Nopember 2018 pada CSJ sebesar Rp 18.536.700.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 18 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dated November 22, 2018 in CSJ amounted to Rp 18,536,700,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 7 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 5 September 2019 pada CSJ sehingga kepemilikan menjadi sebesar Rp 191.533.669.600.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 7 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dated September 5, 2019 in CSJ, the ownership increased to Rp 191,533,669,600.

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JMSB atau setara Rp 53.458.400.000. JMSB ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016 dari Notaris Haji Rizul Sudarmadi, S.H., bergerak di bidang jalan tol.

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in JMSB or equivalent to Rp 53,458,400,000. JMSB was established under the Notarial deed of Establishment No. 128, dated April 21, 2016 of Notary Haji Rizul Sudarmadi, S.H., engaged in toll road sector.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp. N., MH, tanggal 24 Oktober 2018 pada JMSB sebesar Rp 14.671.800.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 13 by Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., MH, dated October 24, 2018 in JMSB amounted to Rp 14,671,800,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 103 dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM, tanggal 26 Desember 2018 pada JMSB sebesar Rp 1.257.335.760.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 103 by Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM, dated December 26, 2018 in JMSB amounted to Rp 1,257,335,760,000.

PT Utama Marga Waskita (HMW)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 30% dari modal HMW atau sebesar Rp 4.500.000.000. HMW didirikan sesuai Akta Pendirian No. 24 tanggal 20 Pebruari 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

WTR menambah penyertaan pada HMW sebesar Rp 22.800.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 8 Juni 2018.

WTR menambah penyertaan pada HMW sebesar Rp 25.710.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler di luar RUPS tanggal 19 Desember 2019.

PT Hotel Karya Indonesia (HKI)

Pendirian PT Hotel Karya Indonesia (Entitas Asosiasi WKR) adalah sesuai dengan akta notaris Cintya Ayu Rashanty, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 29 Oktober 2018. Akta ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0053574.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 9 Nopember 2018.

Berdasarkan akta notaris Cintya Ayu Rishanty, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 28 Januari 2019, WKR memiliki penyertaan di HKI sebesar Rp 15.525.000.000, Akta ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0017985.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Pebruari 2019.

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada WBM. WBM didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Nopember 2015 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WBM belum memiliki hak perusahaan jalan tol.

Manajemen berpendapat tidak terdapat harga kuotasi dipasar aktif atas nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan teknik penilaian tidak dapat digunakan, sehingga nilai wajar investasi diukur dengan biaya perolehan.

PT Utama Marga Waskita (HMW)

WTR, a subsidiary, owns investments of 30% in HMW or amounted to Rp 4,500,000,000. HMW was established based on the Notarial deed No. 24 dated February 20, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn and engaged in toll road concession.

WTR increased its investment in HMW amounted to Rp 22,800,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated May 24, 2018, based on the notarial deed No. 13 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated June 8, 2018.

WTR increased its investment in HMW amounted to Rp 25,710,000,000, based on the decree of the Circular outside of GMS dated December 19, 2019.

PT Hotel Karya Indonesia (HKI)

The establishment of PT Hotel Karya Indonesia (WKR Association Entity) was in accordance with the notary deed of Cintya Ayu Rashanty, S.H., M.Kn., No. 10 dated October 29, 2018. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights in the decree No. AHU-0053574.AH.01.01 2018 date November 9, 2018.

Based on notary deed of Cintya Ayu Rishanty, S.H., No. 15 dated January 28, 2019, WKR has investment in HKI amounted to Rp 15,525,000,000, this deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights in the decree No. AHU-0017985.AH.01.11.Tahun 2019 dated February 4, 2019.

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

WTR, a subsidiary, has investments of 60% in WBM. WBM was established under the Deed of Establishment No. 6 dated November 13, 2015 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WBM has no toll road concession right.

Management believes there is no active market price quotations in the fair value of investment in associates and valuation techniques can not be used, so fair value of the investment is measured at acquisition cost.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 (Continued)**

Investasi pada Ventura Bersama

Rincian saldo investasi ventura bersama adalah sebagai berikut:

Investment in Joint Ventures

Details of investment in joint ventures are as follows:

2019					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal/ Correction)	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties					
WKR - RNI	96%	271.858.055.348	(7.375.258.586)	5.329.300.574	269.812.097.336
Brantas - Waskita	49%	46.567.110.869	--	26.015.698.285	72.582.809.154
Waskita - Adhi	63%	46.223.592.286	(26.294.156.266)	40.490.962.364	60.420.398.384
Waskita - Adhi	70%	24.323.305.835	(14.523.305.839)	34.480.608.031	44.280.608.027
Waskita - NK	60%	38.473.287.580	--	--	38.473.287.580
Waskita - Adhi	65%	1.187.840.629	--	25.861.830.280	27.049.670.909
Waskita - Wika	51%	17.958.302.777	--	5.298.919	17.963.601.696
Waskita - Yodya Karya	99%	7.849.919.710	--	--	7.849.919.710
Waskita - Wika - PP - HK	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - HK	51%	7.348.709.249	--	--	7.348.709.249
Waskita - HK - Wika	43%	18.633.386.670	(11.474.999.998)	(648.572.949)	6.509.813.723
Waskita - PP	51%	6.163.904.085	--	(485.360.744)	5.678.543.341
Wika - Waskita - Nindya	31%	5.219.907.025	(18.312.774)	2.419.080	5.204.013.331
Waskita - PP - Wika	34%	4.490.658.282	(308.780.372)	(22.776)	4.181.855.134
Waskita - Adhi	60%	5.311.603.777	(1.372.920.124)	(232.982.209)	3.705.701.444
HK - Waskita	45%	6.895.497.144	(6.445.497.144)	236.467.805	686.467.805
Wika - Waskita	40%	271.701.933	--	--	271.701.933
Waskita - PP - HK	34%	--	241.478.820	--	241.478.820
Waskita - HK	51%	2.025.915.319	(2.025.915.319)	--	--
Waskita - Wika - PP - HK - Adhi	20%	280.000.000.000	(280.000.000.000)	--	--
Waskita - Brantas - Wika	33%	21.157.453.141	(21.157.453.141)	--	--
PP - Waskita	43%	195.911.276	(195.911.276)	--	--
Waskita - Wika	60%	--	(5.425.107.539)	5.425.107.539	--
Sub Jumlah/ Sub Total		819.604.236.921	(376.376.139.558)	136.480.754.199	579.708.851.562
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Darmo Permai	51%	327.680.205.750	6.318.262.500	3.193.601.874	337.192.070.124
Waskita - Trinita	51%	165.947.378.561	--	(117.656.873)	165.829.721.688
Waskita - Acset	51%	50.121.782.501	163.515.436.943	(60.282.451.050)	153.354.768.394
WKR - Sirius	51%	125.184.298.658	--	5.509.811.662	130.694.110.320
Waskita - JPC	68%	65.018.045.240	--	38.588.141.555	103.606.186.795
Waskita - Gorip Nanda Guna	60%	93.911.750.710	--	357.187.839	94.268.938.549
Waskita - Wika - PP - Jaya	45%	83.416.838.379	(16.732.941.888)	268.044.764	66.951.941.255
Dalawa - WKR	41%	64.557.379.965	--	(12.019.104)	64.545.360.861
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	8%	17.101.128.564	(3.162.427.176)	30.987.104.217	44.925.805.605
Waskita - Yasa	100%	39.303.948.460	--	--	39.303.948.460
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	78%	7.486.166.199	--	28.584.254.245	36.070.420.444
Waskita - Arkonin	92%	26.313.919.410	--	7.173.706.099	33.487.625.509
Waskita - Abdi Mulla Berkah	70%	29.644.945.006	--	(1.172.843.548)	28.472.101.458
Waskita - Citra Mandiri	70%	21.751.637.715	--	5.479.139.467	27.230.777.182
Waskita - Bawakaraeng	70%	27.376.594.088	--	(257.503.376)	27.119.090.712
Daelim - Wika - Waskita	22%	12.253.623.774	--	7.690.717.472	19.944.341.246
Waskita - Penta	98%	15.893.747.018	--	--	15.893.747.018
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	70%	15.310.394.263	--	(65.307.175)	15.245.087.088
Waskita - Surya Bakti	60%	14.131.774.066	(4.800.000.000)	83.834.213	9.415.608.279
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100%	5.805.911.452	--	--	5.805.911.452
Waskita - Wika - Shanghai	10%	6.476.285.827	(2.861.394.795)	--	3.614.891.032
Waskita - Pijar	65%	--	--	3.163.567.675	3.163.567.675
Waskita - Cempaka	55%	9.340.722.770	(7.802.299.998)	(97.396.370)	1.441.026.402
WKR - Ekatalama	60%	17.227.981.203	(17.300.000.000)	363.052.176	291.033.379
WKR - Asiana	51%	348.768.620.995	(348.764.022.567)	--	4.598.428
WBP - Jakon	60%	14.464.881.275	(14.464.881.275)	--	--
Waskita - Basuki Rahmana Putra	60%	21.328.737.599	(21.328.737.599)	--	--
Waskita - Feberco	60%	--	156.922.495	(156.922.495)	--
Waskita - Jakon - Sagna	57%	--	1.545.413.193	(1.545.413.193)	--
Waskita - PAL	100%	15.399.078.118	45.469.214.832	(60.868.292.950)	--
Sub Jumlah/ Sub Total		1.641.217.777.566	(220.211.455.335)	6.866.357.124	1.427.872.679.355
Jumlah/ Total		2.460.822.014.487	(596.587.594.893)	143.347.111.323	2.007.581.530.917

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 (Continued)**

2018						
Projek/ Project	Persentase/ Percentage %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction Rp	Pengakuan Laba (Rugi/ Gain (Loss) Recognition Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Pihak Berelasi/ Related Parties						
Waskita - Wika - PP - HK - Adhi	Optimalisasi Properti PT Asuransi Jiwasraya	20%	--	280.000.000.000	--	280.000.000.000
WKR - RNI	RNI Office Park	96%	110.030.046.349	59.069.559.628	102.758.449.371	271.858.055.348
Brantas - Waskita	Bendungan Tapin	49%	19.791.335.183	884.774.508	25.891.001.178	46.567.110.869
Waskita - Adhi	Bendungan Way Sekampung (Paket 2)	63%	7.790.337.543	10.433.487.250	27.999.767.493	46.223.592.286
Waskita - NK	Jalan Batu Aji Kuaro	60%	38.473.221.509	--	66.071	38.473.287.580
Waskita - Adhi	Bendungan Leuwi Keris Paket 2	70%	7.071.255.489	(4.200.000.000)	21.452.050.346	24.323.305.835
Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	33%	21.157.753.141	--	(300.000)	21.157.453.141
Waskita - HK - Wika	Bandara Samarinda	43%	27.981.051.600	(6.375.000.000)	(2.972.664.930)	18.633.386.670
Waskita - Wika	Jalan Tol Ciawi Sukabumi seksi 1	51%	15.063.632.277	--	2.894.670.500	17.958.302.777
Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	99%	10.487.155.978	--	(2.637.236.268)	7.849.919.710
Waskita - Wika - PP - HK	Jatigede Sumedang	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - HK	Sal Induk Sidorejo	51%	7.333.792.903	--	14.916.346	7.348.709.249
HK - Waskita	Manado - Bitung (Air Madidil)	45%	3.080.745.497	(8.480.745.497)	12.295.497.144	6.895.497.144
Waskita - PP	Kamijoro	51%	4.583.424.384	--	1.580.479.701	6.163.904.085
Waskita - Adhi	Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Paket 1	60%	12.493.401.691	(11.147.939.067)	3.966.141.153	5.311.603.777
Wika - Waskita - Nindya	Soker MYC	31%	9.045.838.634	(5.069.244.383)	1.243.312.774	5.219.907.025
Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	34%	14.326.978.866	(9.327.170.880)	(509.149.704)	4.490.658.282
Waskita - HK	Normalisasi Kali Ciliwung - Cisadane	51%	2.442.563.467	(1.275.000.000)	858.351.852	2.025.915.319
Waskita - Adhi	Bendungan Margatiga	65%	--	--	1.187.840.629	1.187.840.629
Wika - Waskita	RSUD Pasar Minggu	40%	271.701.933	--	--	271.701.933
PP - Waskita	Jalan Tol Solo - Kertosono Paket 03 Seksi 4	43%	195.911.276	--	--	195.911.276
Waskita - PP - HK	Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1	34%	--	(2.107.189.324)	2.107.189.324	--
WKR - KAI	TOD Stasiun Bogor	100%	595.740.798	(595.740.798)	--	--
Waskita - Wika	Irigasi Batang Sinamar	60%	--	4.275.954.926	(4.275.954.926)	--
Sub Jumlah/ Sub Total			319.664.062.504	306.085.746.363	193.854.428.054	819.604.236.921
Pihak Ketiga/ Third Parties						
WKR - Asiana	Two Senopati	51%	347.044.038.112	1.722.951.338	1.631.543	348.768.620.993
WKR - Darmo Permai	Segi 88 Avenue	51%	305.480.096.911	75.486.587	22.124.622.252	327.680.205.750
Waskita - Trinita	Alam Sutra	51%	166.445.845.638	--	(498.467.077)	165.947.378.561
WKR - Sirius	Yukata Suites	51%	74.963.296.361	29.880.580.519	20.340.421.778	125.184.298.658
Waskita - Gorip Nanda Guna	Jl. Gempor Paket 2 Porong-Kejapan	60%	22.712.846.382	--	71.198.904.328	93.911.750.710
Waskita - Wika - PP - Jaya	Gd. Terminal 3	45%	87.132.922.037	(3.770.143.171)	54.059.512	83.416.838.378
Waskita - JPC	SMM Muara Teweuh Div. Sipil	68%	65.018.045.240	--	--	65.018.045.240
Dalawa - WKR	Zallaka - Batu Tumpang	41%	203.446.276.931	(138.886.349.119)	(2.547.847)	64.557.379.965
Waskita - Acset	Jalanlayang Cikampek	51%	--	246.776.291.298	(196.654.508.797)	50.121.782.501
Waskita - Yasa	Jl. Galing Aruk	100%	35.323.129.793	--	3.980.818.667	39.303.948.460
Waskita - Abdi Mulia Berkah	Sal Primer Jabung II	70%	10.789.801.243	--	18.855.143.763	29.644.945.006
Waskita - Bawakaraeng	Irigasi D.I. Batang Alai	70%	18.373.631.754	--	9.002.962.334	27.376.594.088
Waskita - Arkonin	Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwing (MYC)	92%	--	--	26.313.919.410	26.313.919.410
Waskita - Citra Mandiri	Jaringan Irigasi D.I Air Lakitan	70%	6.355.161.579	--	15.396.476.136	21.751.637.715
Waskita - Basuki Rahmana Putra	Dredging & Embankmen of Grogol	60%	21.328.737.599	--	--	21.328.737.599
WKR - Ekutama	Apartemen Pejaten	60%	29.390.315.730	(12.162.334.527)	--	17.227.981.203
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	Jl Tol Cisumdawu Phase 2	8%	5.264.440.264	--	11.836.688.300	17.101.128.564
Waskita - Penta	Lansekap Bandara Soetta	98%	15.893.747.018	--	--	15.893.747.018
Waskita - PAL	PLTU 2X3 MW Malinau	100%	--	--	15.399.078.118	15.399.078.118
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	Jaringan Irigasi D.I Colo (MYC)	70%	7.847.495.378	--	7.462.898.885	15.310.394.263
WBP - Jakon	Normalisasi Turap Pasar Lama	60%	14.464.881.275	--	--	14.464.881.275
Waskita - Surya Bakti	Jalan Pendekat Mahakam IV Sisi Samarinda Kota (MYC)	60%	11.783.943.613	(900.000.000)	3.247.830.453	14.131.774.066
Daelim - Wika - Waskita	Karian Multipurpose Dam Project	22%	11.877.903.223	--	375.720.551	12.253.623.774
Waskita - Cempaka	Bendung Baliase	55%	12.938.472.869	(4.856.834.059)	1.259.083.963	9.340.722.773
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Ternef (Paket 1)	78%	--	--	7.486.166.199	7.486.166.199
Waskita - Wika - Shanghai	Jl Tol Cisumdawu Phase 1	10%	7.726.808.199	--	(1.250.522.372)	6.476.285.827
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Tulur Aji Jangkat	100%	5.805.911.452	--	--	5.805.911.452
Waskita - Andesmont	Kebayakan - Sp.Kraft Roads	60%	--	18.400.488.777	(18.400.488.777)	--
Waskita - Modern	Dermaga Peti Kemas (CY-01)	60%	684.494.719	(684.494.719)	--	--
Waskita - Kajima	E2 Cilincing-Cijampea	40%	--	(8.794.848.453)	8.794.848.453	--
Sub Jumlah/ Sub Total			1.488.092.243.320	126.800.794.471	26.324.739.775	1.641.217.777.566
Jumlah/ Total			1.807.756.305.824	432.886.540.834	220.179.167.829	2.460.822.014.487

Tidak terdapat perubahan kepemilikan atau hak suara Grup untuk tahun-tahun yang dilaporkan.

There has been no change in the Group's ownership or voting interests in these joint ventures for the reported years.

Operasi bersama

Perusahaan mempunyai 15% bagian dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Terminal *Multipurpose* dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala Tanjung di Propinsi Sumatera Utara. Perusahaan berhak atas proporsi bagian dari penghasilan dan dikenakan proporsi bagian dari biaya operasi bersama.

Perusahaan mempunyai bagian dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat sta 9+500 - sta 28+480 (Catatan 55).

Joint Operation

The Company has a 15% share in the Consortium Agreement for the Construction of Multipurpose Port and Support Facilities at the Port of Kuala Tanjung in North Sumatera Province. The Company is entitled to a proportionate share of the income and bears a proportionate share of the joint operating expenses.

The Company have shares in the joint operation for the construction work of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang sta 9 + 500 - sta 28 + 480 (Note 55).

14. PROPERTI INVESTASI

	2019 Rp	2018 Rp	
Harga Perolehan			Acquisition Cost
Tanah	72.307.454.963	28.196.842.480	Land
Bangunan	219.315.019.119	79.558.646.607	Building
Jumlah Harga Perolehan	291.622.474.082	107.755.489.087	Total Acquisition Cost
Kenaikan Nilai Wajar			Increase of Fair Value
Tanah	86.682.474.975	42.571.862.492	Land
Bangunan	223.463.914.709	83.707.542.197	Building
Total Nilai Wajar	310.146.389.684	126.279.404.689	Total Fair Value
Jumlah Properti Investasi	310.146.389.684	126.279.404.689	Total Investment Properties

Properti investasi merupakan proyek gedung perkantoran dan hotel Cawang dalam pengembangan, yang berlokasi di Jalan MT Haryono Cawang, dengan luas lahan sebesar 3.650m².

Properti investasi milik Perusahaan merupakan Hotel Dafam Teraskita yang berlokasi di Jakarta dan Teraskita the Reiz yang berlokasi di Medan. Yang menjadi bagian dari properti investasi adalah bagian yang disewakan untuk dijadikan perkantoran.

Pada tahun 2019 dan 2018 nilai wajar properti investasi adalah masing-masing sebesar Rp 310.146.389.684 dan Rp 126.279.404.689. Nilai Wajar pada 31 Desember 2018 didasarkan pada laporan penilaian dari KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan, penilai independen. Pendekatan penilaian nilai wajar yang digunakan oleh KJPP adalah metode pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.

14. INVESTMENT PROPERTIES

Investment properties consist of office building and Cawang hotel project under development, located in Jalan MT Haryono Cawang, lying on a land area of 3,650sqm.

Company's Investment Properties includes Hotel Dafam Teraskita, located in Jakarta and Teraskita the Reiz located in Medan. The part that is categorized as investment property is the office segment of the building.

For the year 2019 and 2018, the fair value of the investment properties amounted to Rp 310,146,389,684 and Rp 126,279,404,689. The fair value as of December 31, 2018 derived from the valuation report of KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan, independent valuers. The approach valuation of fair value that use by KJPP are cost approach and revenue approach method.

15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

PT Prima Multi Terminal
PT Citra Karya Jabar Tol
PT PP Sinergi Banjaratma
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
Jumlah/ Total

15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

2019 Rp	2018 Rp
302.622.000.000	302.622.000.000
131.250.000.000	45.000.000.000
12.684.923.000	--
200.000.000	200.000.000
446.756.923.000	347.822.000.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Rincian mutasi investasi jangka panjang lainnya sebagai berikut:

The detail of mutation of other long-term investment are as follows:

2019			
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan) Addition (Deduction)	Saldo Akhir/ Ending Balance
%	Rp	Rp	Rp
PT Prima Multi Terminal	302.622.000.000	--	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	45.000.000.000	86.250.000.000	131.250.000.000
PT PP Sinergi Banjartama	--	12.684.923.000	12.684.923.000
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	200.000.000	--	200.000.000
Jumlah/ Total	347.822.000.000	98.934.923.000	446.756.923.000
2018			
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan) Addition (Deduction)	Saldo Akhir/ Ending Balance
%	Rp	Rp	Rp
PT Prima Multi Terminal	272.622.000.000	30.000.000.000	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	15.000.000.000	30.000.000.000	45.000.000.000
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	--	200.000.000	200.000.000
Jumlah/ Total	287.622.000.000	60.200.000.000	347.822.000.000

PT Prima Multi Terminal (PMT)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20% pada PMT atau setara Rp 26.100.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 4 tanggal 26 September 2014 dari Notaris Tuti Sumarni, S.H., M.H., bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 16 Desember 2015 dari notaris Tuti Sumarni, S.H., M.H., PT Perumahan Pembangunan Tbk melakukan penjualan sebagian saham sebanyak 5% yang dimiliki di dalam PMT atau sebesar Rp 9.150.000.000.

Pada tanggal 14 Desember 2017, Perusahaan menambah penyertaan di PMT sebesar Rp 60.000.000.000. Kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar 20%, berdasarkan akta notaris No. 9 tanggal 23 Februari 2018 dari notaris Risna Rahmi Arifa, S.H.

Pada Desember 2018, Perusahaan menambah penyertaan di PMT sebesar Rp 30.000.000.000. Kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar 20%, berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 18 Maret 2019 dari notaris Risna Rahmi Arifa, S.H. Manajemen berpendapat penyertaan di PMT belum memiliki pengaruh signifikan sampai dengan tanggal pelaporan.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR memiliki penyertaan sebesar 15% dari modal CKT atau sebesar Rp 15.000.000.000. CKT didirikan sesuai Akta Pendirian No. 18 tanggal 30 Januari 2017 dari notaris Dessi, S.H., M.Kn., bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

PT Prima Multi Terminal (PMT)

The Company has investments of 20% in PMT or equivalent to Rp 26,100,000,000. The Company was established under the Notarial deed of Establishment No. 4 dated September 26, 2014 of Notary Tuti Sumarni, S.H., M.H., engaged in trading and services.

Based on Notarial deed No. 6 dated December 16, 2015 of notary Tuti Sumarni, S.H., M.H., PT Perumahan Pembangunan Tbk sold some of its own shares on PMT amounted to 5% or equivalent to Rp 9,150,000,000.

On December 14, 2017, the Company added investment in PMT amounted to Rp 60,000,000,000. Resulting in the increase of the Company's ownership becoming 20% according to notarial deed No. 9 dated February 23, 2018 of noatry Risna Rahmi Arifa, S.H.

On December, 2018, the Company added investments in PMT amounted to Rp 30,000,000,000. Resulting in the increase of the Company's ownership becoming 20% according to notarial deed No. 13 dated March 18, 2019 of noatry Risna Rahmi Arifa, S.H. The management has assessed that ownership in PMT does not have significant influence up to reporting date.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR owns investment equivalent to 15% of CKT paid in capital or amounted to Rp 15,000,000,000. CKT was established based on the notarial deed No. 18 dated January 30, 2017 by notary Dessi, S.H., M.Kn. and engaged in toll road concession.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

WTR menambah penyertaan pada CKT sebesar Rp 30.000.000.000 pada tanggal 1 Nopember 2018.

WTR increased its investment in CKT amounted to Rp 30,000,000,000 on November 1, 2018.

WTR menambah penyertaan pada CKT sebesar Rp 86.250.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler di luar RUPS pada tanggal 13 September 2019.

WTR increased its investment in CKT amounted to Rp 86,250,000,000 on September 13, 2019.

PT PP Sinergi Banjartatma

PT PP Sinergi Banjartatma

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20% pada PT PP Sinergi Banjartatma atau setara Rp 12.684.923.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 2 tanggal 7 Pebruari 2019 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

The Company has investments of 20% in PT PP Sinergi Banjartatma or equivalent to Rp 12,684,923,000. The Company was established under the Notarial deed of Establishment No. 2 dated February 7, 2019 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JPB setara Rp 200.000.000, berdasarkan Akta notaris No. 21 tanggal 29 Desember 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., M.Kn.

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in JPB or equivalent to Rp 200,000,000, based on the Notarial deed No. 21 dated December 29, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., M.Kn.

Berdasarkan akta berita acara RUPS Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 24 Januari 2018, kepemilikan WTR pada JPB menjadi 0,34%.

Based on GMS Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. No. 23 dated January 24, 2018 WTR has ownership of JPB to 0.34%.

Berdasarkan akta Notaris No. 30 tanggal 17 Juli 2018 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., kepemilikan WTR pada JPB menjadi 0,15%.

Based on the Notarial Deed No. 30 dated July 17, 2018 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., WTR has ownership of JPB to 0.15%.

Manajemen berpendapat tidak terdapat harga kuotasi dipasar aktif atas nilai wajar investasi jangka panjang lainnya dan teknik penilaian tidak dapat digunakan, sehingga nilai wajar investasi diukur dengan biaya perolehan.

Management believes there is no active market price quotations in the fair value of other longterm investment and valuation techniques can not be used, so fair value of the investment is measured at acquisition cost.

16. ASET TETAP – BERSIH

16. FIXED ASSETS – NET

	2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	1.591.127.544.038	93.202.988.463	--	890.612.929.613	2.574.943.462.114	Land
Gedung	475.119.538.755	163.106.363.064	--	--	638.225.901.819	Building
Pabrik	547.538.529.005	48.577.744.518	--	966.094.037.272	1.562.210.310.795	Plant
Perlengkapan Kantor	67.878.540.223	22.657.491.197	--	2.727.270.000	93.263.301.420	Office Supplies
Peralatan Proyek	4.142.242.065.703	194.455.882.403	3.191.780.982	502.757.610.726	4.836.263.777.850	Project Equipments
Kendaraan	16.629.165.207	2.455.093.575	354.700.000	--	18.729.558.782	Vehicles
Jumlah	6.840.535.382.931	524.455.563.220	3.546.480.982	2.362.191.847.611	9.723.636.312.780	Total
Aset dalam Pelaksanaan						Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	1.993.392.548.831	1.652.365.891.661	--	(2.362.191.847.611)	1.283.566.592.881	Building, Plant Project Equipments
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	103.577.847.944	13.228.081.160	--	--	116.805.929.104	Building
Pabrik	32.354.376.259	35.401.871.434	--	--	67.756.247.693	Plant
Perlengkapan Kantor	41.704.951.802	21.767.723.946	--	--	63.472.675.748	Office Supplies
Peralatan Proyek	1.552.098.071.484	532.217.823.166	3.191.780.965	--	2.081.124.113.685	Project Equipments
Kendaraan	13.071.524.630	2.105.590.416	349.239.436	--	14.827.875.610	Vehicles
Jumlah	1.742.806.772.119	604.721.090.122	3.541.020.401	--	2.343.986.841.840	Total
Nilai Buku	7.091.121.159.643				8.663.216.063.821	Book Value

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2018					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	1.199.834.463.721	391.293.080.317	--	--	1.591.127.544.038	Land
Gedung	456.719.108.049	19.001.519.598	601.088.892	--	475.119.538.755	Building
Pabrik	410.688.510.558	136.850.018.447	--	--	547.538.529.005	Plant
Perlengkapan Kantor	56.712.381.644	16.188.533.126	5.022.374.547	--	67.878.540.223	Office Supplies
Peralatan Proyek	2.993.349.008.106	1.148.893.057.597	--	--	4.142.242.065.703	Project Equipments
Kendaraan	30.119.586.914	114.860.000	13.605.281.707	--	16.629.165.207	Vehicles
Jumlah	5.147.423.058.992	1.712.341.069.085	19.228.745.146	--	6.840.535.382.931	Total
Aset dalam Pelaksanaan						Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	706.677.131.928	1.286.715.416.903	--	--	1.993.392.548.831	Building, Plant Project Equipments
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	93.963.227.763	9.641.132.500	26.512.319	--	103.577.847.944	Building
Pabrik	5.392.563.971	26.961.812.288	--	--	32.354.376.259	Plant
Perlengkapan Kantor	30.470.457.283	14.331.605.590	3.097.111.071	--	41.704.951.802	Office Supplies
Peralatan Proyek	965.967.174.368	586.130.897.116	--	--	1.552.098.071.484	Project Equipments
Kendaraan	16.018.637.174	549.509.552	3.496.622.096	--	13.071.524.630	Vehicles
Jumlah	1.111.812.060.559	637.614.957.046	6.620.245.486	--	1.742.806.772.119	Total
Nilai Buku	4.742.288.130.361				7.091.121.159.643	Book Value

Aset tetap, berupa tanah, pabrik, kendaraan dan gedung dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari bank. Sebagian tanah berikut gedungnya dijadikan jaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 22.1), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22.2), Indonesia Eximbank (Catatan 22.5), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22.4) masing-masing sebesar Rp 14.075.000.000, Rp 109.135.230.000, Rp 5.153.000.000, dan Rp 16.186.000.000, dengan nilai keseluruhan Rp 144.549.230.000, dan nilai wajar tanah dan gedung yang dijaminan sebesar Rp 201.353.690.000.000.

Berdasarkan penilaian independen KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan nilai wajar aset tanah dan bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.601.931.311.459, sehingga terdapat selisih penilaian aset tetap sebesar Rp 266.706.285.292 dan perusahaan mencatat selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 242.948.717.891 pada ekuitas setelah dikurangi dengan pajak.

Pada tanggal 10 April 2018, Grup melepaskan sebagian kepemilikan di WTTR, sehingga kepemilikan Grup menjadi 42,85% dan tidak dikonsolidasi oleh Grup. Sehingga terdapat penurunan pada aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 atas transaksi tersebut dengan nilai perolehan Rp 8.213.339.690 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.620.245.486 sehingga nilai buku pengurangan tersebut sebesar Rp 1.593.094.204.

Fixed assets in the form of land, plants, vehicles and buildings are used as collateral for bank loans. Some land and buildings above are used as collaterals to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 22.1), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 22.2), Indonesia Eximbank (Note 22.5) and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 22.4) amounted to Rp 14,075,000,000, Rp 109,135,230,000, Rp 5,153,000,000 and Rp 16,186,000,000, respectively, with a total amount of Rp 144,549,230,000, and the fair value of the lands and buildings as collateral amounted to Rp 201,353,690,000,000.

Based on revaluation of independent appraisal KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, the fair value of fixed asset on land and buildings as of December 31, 2018 amounted to Rp 2,601,931,311,459, so there is a differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 266,706,285,292 and the Company has recorded the differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 242,948,717,891 on equity after deducting tax.

On April 10, 2018, the Group partially disposed of its ownership in WTTR, so the Group's ownership became 42.85% and was not consolidated by the Group. Therefore there is a reduction in fixed assets as of December 31, 2018 for the transaction with an acquisition value of Rp 8,213,339,690 with accumulated depreciation of Rp 6,620,245,486 so that the book value of the deduction is Rp 1,593,094,204.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Gedung, pabrik dan peralatan dalam penyelesaian pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.283.566.592.881 terutama terdiri dari bangunan dalam penyelesaian dari WKI, entitas anak, sebesar Rp 18.398.531.491, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 79.275.192.010 dan peralatan dan renovasi gedung Perusahaan sebesar Rp 1.185.892.869.380.

The buildings, plants and equipments under construction as of December 31, 2019 amounted to Rp 1,283,566,592,881 mainly consisted of buildings in progress belonging to WKI, a subsidiary, amounted to Rp 18,398,531,491, precast plant in progress amounted to Rp 79,275,192,010 and the Company's equipment and building renovation amounted to Rp 1,185,892,869,380.

Berikut presentase dan estimasi penyelesaian aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2019:

The following are the percentages and estimates of the completion of assets under construction on December 31, 2019:

Proyek/ Project	Presentase dalam Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian Estimated Completion
Pembangunan Plant Bojanegara	54,60%	Akhir Pebruari/ End of February, 2020
Pembangunan Plant Gasing	99,53%	Akhir Januari/ End of January, 2020
Pembangunan Quarry Bojanegara	90,11%	Akhir April/ End of April, 2020
Pembangunan Proyek Penajam	73,77%	Akhir Januari/ End of January, 2020

Selama tahun 2019 telah dilakukan pengeluaran untuk aset dalam penyelesaian sebesar Rp 744.901.374.490. Selama tahun berjalan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tidak ada kendala dalam proses pembangunan.

During 2019 expenditures were made for assets in progress amounted to Rp 744,901,374,490. During the current year there were no capitalized borrowing costs and there are no obstacles in the development process.

Gedung, pabrik dan peralatan dalam penyelesaian pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.993.392.548.831 terutama terdiri dari bangunan dalam penyelesaian dari WKE, entitas anak, sebesar Rp 2.541.333.521, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 1.232.239.072.204 dan peralatan Perusahaan sebesar Rp 758.612.143.106.

The buildings, plants and equipments under construction as of December 31, 2018 amounted to Rp 1,993,392,548,831 mainly consisted of buildings in progress belonging to WKE, a subsidiary, amounted to Rp 2,541,333,521, precast plant in progress amounted to Rp 1,232,239,072,204 and the Company's equipment amounted to Rp 758,612,143,106.

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining* menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

Based on Directors Decree of WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets other than buildings WBP, mentioned based on a review of the fixed assets productions of WBP, there is a significant change in the estimated usage time of future economic benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method of productions assets from the double declining method into a straight line method.

Revaluasi aset tetap dilakukan secara berkala setiap tiga (3) tahun.

Revaluation of fixed assets will be done periodically every three (3) years.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses are allocated as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 40)	514.662.370.404	585.168.988.017	Cost of Revenues (Note 40)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 41)	90.058.719.718	52.445.969.029	General and Administrative Expenses (Note 41)
Jumlah	604.721.090.122	637.614.957.046	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Gedung, pabrik, peralatan proyek dan kendaraan untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan dan risiko sebagai berikut:

Buildings, plants, project equipments and vehicles for all business units and head office were insured in the amount and risk as follows:

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period	Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
			Rp	
PT Asuransi Ramayana Tbk	Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle	25 Desember / December 25, 2019 s.d/ to 24 Desember / December 24, 2020	597.628.352.630	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019 s.d/ to 18 Januari / January 18, 2020	441.773.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	23 Nopember / November 23, 2019 s.d/ to 23 Nopember / November 23, 2020	327.565.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur (d/h/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Intra Asia	Risiko Industri/ Industrial All Risk	23 Nopember / November 23, 2019 s.d/ to 23 Nopember / November 23, 2020	327.565.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur (d/h/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019 s.d/ to 18 Januari / January 18, 2020	245.514.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	15 Januari / January 15, 2019 s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	135.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	23 Nopember / November 23, 2019 s.d/ to 23 Nopember / November 23, 2020	117.315.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur (d/h/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Agustus / August 1, 2019 s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2020	67.429.710.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019 s.d/ to 18 Januari / January 18, 2020	48.813.750.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	4 Maret / March 4, 2019 s.d/ to 4 Maret / March 4, 2020	26.174.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	4 Maret / March 4, 2019 s.d/ to 4 Maret / March 4, 2020	26.174.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2019 s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	25.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2019 s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	20.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019 s.d/ to 18 Januari / January 18, 2020	9.062.150.200	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	15 Januari / January 15, 2019 s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	5.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Contractor's All Risk Including Third Party Legal Liability	9 Desember / December 9, 2016 s.d/ to 9 Desember / December 9, 2022	3.863.759.544	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	2 Agustus / August 2, 2019 s.d/ to 2 Agustus / August 2, 2020	2.452.470.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2019 s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2020	2.452.470.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Aspan	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	25 Mei / May 25, 2019 s.d/ to 25 Mei / May 25, 2020	2.022.226.500	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Intra Asia	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	23 Nopember / November 23, 2019 s.d/ to 23 Nopember / November 23, 2020	1.000.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur (d/h/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Contractor's All Risk Including Third Party Legal Liability	21 Desember / December 21, 2019 s.d/ to 29 Februari / February 29, 2020	752.478.569	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Ramayana Tbk	Contractor's Plant & Equipment Insurance	25 Desember / December 25, 2019 s.d/ to 24 Desember / December 24, 2020	629.538.710	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Astra Buana	Carda Oto	20 Desember / December 20, 2019 s.d/ to 20 Desember / December 20, 2022	20.057.675	PT Waskita Beton Precast Tbk
		Jumlah / Total	2.433.206.963.828	

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

The management believes that insurance coverage for fixed assets which have been insured are adequate to cover the possible losses.

17. GOODWILL

17. GOODWILL

	2019				
	2018 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	2019 Rp	
Biaya Perolehan	1.995.908.825.753	--	--	1.995.908.825.753	Acquisition Cost
Nilai Buku	1.995.908.825.753	--	--	1.995.908.825.753	Net Book Value
	2018				
	2017 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Penyesuaian/ Adjustments Rp	2018 Rp	
Biaya Perolehan	2.235.779.910.646	--	(239.871.084.893)	1.995.908.825.753	Acquisition Cost
Nilai Buku	2.235.779.910.646	--	(239.871.084.893)	1.995.908.825.753	Net Book Value

Rincian nilai tercatat goodwill adalah sebagai berikut:

The details of goodwill are as follows:

Entitas Pengakuisisi/ Acquirer Entity	Perolehan Saham pada/ Share Acquisition in	Tahun Perolehan/ Year of Acquisition	2019 Rp	2018 Rp
PT Waskita Toll Road	PT MTD CTP Expressway (CTP)	2017	602.593.363.949	602.593.363.949
PT Waskita Toll Road	PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	2016	183.723.536.629	183.723.536.629
PT Waskita Toll Road	PT Waskita Sriwijaya Tol (d/h/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada) (WST)	2016	58.782.241.692	58.782.241.692
PT Waskita Toll Road	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	2015	466.615.258.744	466.615.258.744
PT Waskita Toll Road	PT Trans Jabar Tol (TJT)	2015	684.194.424.739	684.194.424.739
Jumlah/ Total			1.995.908.825.753	1.995.908.825.753

Akuisisi CTP

CTP Acquisition

	2019 Rp	2018 Rp	
CTP (55 %)			CTP (55 %)
Imbalan yang Dialihkan Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	715.000.000.000	715.000.000.000	Consideration of Transferred Value Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	602.593.363.949	602.593.363.949	Goodwill

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 26 April 2017, WTR dan PT MTD Capital BHD dan PT Nusacipta Etika Pratama menandatangani perjanjian pembelian 55% kepemilikan PT CTP dengan harga perolehan sebesar Rp 715.000.000.000.

On April 26, 2017, WTR and PT MTD Capital BHD and PT Nusacipta Etika Pratama entered into an agreement to purchase 55% ownership in PT CTP amounted to Rp 715,000,000,000.

Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The fair values of the assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas dan Setara Kas	17.343.287.994	17.343.287.994	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	297.576.173.928	297.576.173.928	Advances and Prepayments
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	440.621.654.574	440.621.654.574	Intangible Assets - Toll Road Concession Right
Utang Bank	(330.186.844.740)	(330.186.844.740)	Bank Loan
Utang Pihak Berelasi	(137.177.789.760)	(137.177.789.760)	Related Parties Payable
Liabilitas Lain-lain	(83.800.780.085)	(83.800.780.085)	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	204.375.701.911	204.375.701.911	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(91.969.065.860)	(91.969.065.860)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	602.593.363.949	602.593.363.949	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	715.000.000.000	715.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi WST (dh SRIMP)

WST (formerly SRIMP) Acquisition

	2019 Rp	2018 Rp	
WST (60 %)			WST (60 %)
Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	315.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	(256.217.758.308)	(256.217.758.308)	Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	58.782.241.692	58.782.241.692	Goodwill

Pada tanggal 19 Mei 2016, WTR dan PT Persada Tanjung Api-Api, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan WST dengan harga perolehan sebesar Rp 315.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On May 19, 2016, WTR and PT Persada Tanjung Api-Api entered into an agreement to purchase 60% ownership in WST amounted to Rp 315,000,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas dan Setara Kas	303.517.604.893	303.517.604.893	Cash and Cash Equivalents
Aset Pajak Tangguhan	1.232.557.000	1.232.557.000	Deferred Tax Assets
Proyek dalam Pelaksanaan	135.758.968.659	135.758.968.659	Project on Progress
Aset Tetap	36.876.125	36.876.125	Fixed Assets
Utang Pajak	(6.050.791.698)	(6.050.791.698)	Tax Payables
Liabilitas Lain-lain	(7.465.617.800)	(7.465.617.800)	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	427.029.597.179	427.029.597.179	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(170.811.838.872)	(170.811.838.872)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	58.782.241.693	58.782.241.693	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	315.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi PBTR

PBTR Acquisition

	2019 Rp	2018 Rp	
PBTR (60 %)			PBTR (60 %)
Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000	220.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	(36.276.463.371)	(36.276.463.371)	Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	183.723.536.629	183.723.536.629	Goodwill

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 15 Pebruari 2016, WTR dan PT Langkah Utama Perkasa, *Countryside Investment Corporation* dan PT Sumber Mitra Jaya, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan PBTR dengan harga perolehan sebesar Rp 220.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On February 15, 2016, WTR and PT Langkah Utama Perkasa, *Countryside Investment Corporation* and PT Sumber Mitra Jaya entered into an agreement to purchase 60% ownership in PBTR amounted to Rp 220,000,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas dan Setara Kas	44.721.174	44.721.174	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	576.893.132	576.893.132	Advances and Prepayments
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	59.839.157.979	59.839.157.979	Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	60.460.772.285	60.460.772.285	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(24.184.308.914)	(24.184.308.914)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	183.723.536.629	183.723.536.629	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000	220.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi TJJ

TJJ Acquisition

	2019 Rp	2018 Rp	
TJJ (81.65%)			TJJ (81.65%)
Imbalan yang Dialihkan Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	944.336.642.803	944.336.642.803	Consideration of Transferred Value Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	(260.142.218.064)	(260.142.218.064)	Goodwill
	684.194.424.739	684.194.424.739	

Pada tanggal 11 Nopember 2015, WTR bersama PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera dan PT Karya Perkasa Insani menandatangani perjanjian pembelian 81,65% kepemilikan TJJ dengan harga perolehan sebesar Rp 944.336.642.803. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On November 11, 2015, WTR and PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera and PT Karya Perkasa Insani entered into an agreement to purchase 81.65% ownership in TJJ amounted to Rp 944,336,642,803. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas dan Setara Kas	4.525.513.134	4.525.513.134	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	55.380.122.729	55.380.122.729	Advances and Prepaid Expenses
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	210.596.774.983	210.596.774.983	Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Aset Tetap dalam Konstruksi	761.525.928.371	761.525.928.371	Asset under Construction
Aset Lain-lain	(544.722.104.382)	(544.722.104.382)	Other Assets
Utang Usaha	(168.360.859.675)	(168.360.859.675)	Accounts Payable
Utang Pajak	(40.926.508)	(40.926.508)	Tax Payables
Liabilitas Lainnya	(80.750.000)	(80.750.000)	Other liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	318.823.698.652	318.823.698.652	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(58.681.480.588)	(58.681.480.588)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	684.194.424.739	684.194.424.739	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	944.336.642.803	944.336.642.803	Fair Value of Consideration

Akuisisi CCT

CCT Acquisition

	2019 Rp	2018 Rp	
CCT (90%)			CCT (90%)
Imbalan yang Dialihkan Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	551.250.000.000	551.250.000.000	Consideration of Transferred Value Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	(84.634.741.256)	(84.634.741.256)	Goodwill
	466.615.258.744	466.615.258.744	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 13 Juli 2015, WTR dan PT Bakrie & Brothers Tbk menandatangani perjanjian pembelian 90% kepemilikan CCT dengan harga perolehan sebesar Rp 551.250.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On July 13, 2015, WTR and PT Bakrie & Brothers Tbk, entered into an agreement to purchase 90% ownership in CCT amounted to Rp 551,250,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas dan Setara Kas	202.869.015	202.869.015	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	7.000.000	7.000.000	Advances and Prepayments
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	70.519.462.085	70.519.462.085	Other Receivables - Related Parties
Aset Tetap dalam Konstruksi	53.886.970.322	53.886.970.322	Asset under Construction
Beban Akruak	(758.833.655)	(758.833.655)	Accrued Expenses
Liabilitas Lainnya	(875.820.000)	(875.820.000)	Other Liabilities
Utang Lain-lain Berelasi	(28.943.046.371)	(28.943.046.371)	Other Payables - Related Parties
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	94.038.601.396	94.038.601.396	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non Pengendali	(9.403.860.140)	(9.403.860.140)	Fair Value of Non Controlling Interest
Goodwill	466.615.258.744	466.615.258.744	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	551.250.000.000	551.250.000.000	Fair Value of Consideration

18. ASET LAIN-LAIN

18. OTHER ASSETS

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Kontrak Ditangguhkan	754.641.393.913	391.791.699.443	Contract Deferred Charges
Aset Lain-lain Dalam Pengembangan (Catatan 14)	92.026.826.430	--	Other Assets in Progress (Note 14)
Kontrak Sewa Jangka Panjang	42.196.046.044	49.009.574.538	Long-Term Rent Contract
Perangkat Lunak	28.170.671.954	46.144.267.715	Software
Tanah dan Bangunan	2.769.621.190	7.852.869.160	Lands and Buildings
Aset Tetap Tidak Digunakan Untuk Dijual	--	116.581.984	Fixed Assets are not Used for Sale
Uang Jaminan	2.539.417.277	1.652.822.000	Warranty
Jumlah	922.343.976.808	496.567.814.840	Total

Beban kontrak yang ditangguhkan merupakan beban yang ditangguhkan atas proyek-proyek yang dalam persiapan, yang akan dibebankan sebagai beban kontrak pada saat proyek tersebut dilaksanakan.

Contract deferred charges represent deferred expense of the projects' preparation, which will be charged as expense when the project contract is executed.

Kontrak sewa jangka panjang merupakan biaya sewa tanah jangka panjang dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Long-term rent contracts represent long-term land rent with a period of 1 to 5 years.

Perangkat Lunak terdiri dari:

Software consists of:

	2019		
	Harga Perolehan/ Historical Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortication	Nilai Buku/ Book Value
SAP Hana (dalam Pengembangan/ in Developing)	19.745.317.022	--	19.745.317.022
ERP MS Dynamics AX2012	13.681.891.620	13.563.092.890	118.798.730
Auto Desk CAD Design	17.039.095.869	9.491.851.636	7.547.244.233
Waskita Employee Self Service Technology (WEST)	822.180.000	227.998.750	594.181.250
IFCA Software	165.130.719	--	165.130.719
Jumlah/ Total	51.453.615.230	23.282.943.276	28.170.671.954
	2018		
	Harga Perolehan/ Historical Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortication	Nilai Buku/ Book Value
ERP MS Dynamics AX2012	48.207.087.141	10.295.801.653	37.911.285.488
Auto Desk CAD Design	14.726.539.593	7.457.739.735	7.268.799.858
Waskita Employee Self Service Technology (WEST)	822.180.000	22.453.750	799.726.250
IFCA Software	164.456.119	--	164.456.119
Jumlah/ Total	63.920.262.853	17.775.995.138	46.144.267.715

Aset lain-lain tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Tanah di Cengkareng yang dibeli oleh Perusahaan pada tanggal 21 Mei 1991. Selanjutnya, di tahun 1996, Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Dinas Tata Kota Jakarta Barat mengenai peruntukkan tanah tersebut. Kemudian Perusahaan memperoleh jawaban berdasarkan Surat Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat Suku Dinas Tata Kota No. 288/17125 tanggal 18 Juli 1996, yang menyebutkan sesuai dengan Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Kalideres tahun 2005 lokasi tanah tersebut diperuntukan untuk Penyempurnaan Hijau Umum (PHU). Sehingga Perusahaan tidak dapat memproses sertifikat kepemilikan lebih lanjut.
2. Apartemen Sahid berlokasi di Jalan K.H. Mansur Jakarta yang merupakan kompensasi pembayaran piutang retensi dari PT Sahid Inti Dinamika pada tanggal 22 Oktober 1997.

Perusahaan tidak menggunakan tanah dan apartemen tersebut dalam proses produksi ataupun menyewakannya kepada pihak ketiga, sehubungan aset tersebut tidak terkait dengan kegiatan utama Perusahaan. Perusahaan berpendapat bahwa apartemen tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap, sehingga mencatat aset tersebut diatas sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain dalam pengembangan terdiri dari:

2019		
Nama Proyek Bagi Hasil/ Name of Profit Sharing Project	Harga Perolehan/ Historical Cost	Lokasi/ Location
1 Teraskita Bandung	23.189.665.991	Bandung
2 Teraskita Makassar	68.837.160.439	Makassar
Jumlah/ Total	92.026.826.430	

Aset lain-lain dalam pengembangan merupakan penambahan dari konstruksi dalam penyelesaian Hotel Dafam Teraskita di Bandung dan Makassar sebesar Rp 92.026.826.430.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 18 April 2017, Perusahaan memberikan hak pengembangan tanah seluas 1.535 M² yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 55 RT 003 RW 03 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perusahaan kepada PT Waskita Karya Realty. Berdasarkan Surat Pernyataan No. 81/SPN/WK/2017 tanggal 29 September 2017, Perusahaan memberikan hak pengembangan tanah seluas 1.661 m² berdasarkan SHGB No. 20407 dan seluas 168 m² berdasarkan SHGB No. 20403 atas nama Perusahaan, yang terletak di Jalan Jl. A.P. Pettarani 88 RT 002 RW 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Others asset land and building as follows:

1. Land located in Cengkareng which was purchased by the Company on May 21, 1991. Furthermore, in 1996, the Company submitted a letter to the Head of City Planning, West Jakarta regarding the designation of the land. Then the Company received the answer by letter from the Sub Department of City Planning, West Jakarta District No. 288/17125 dated July 18, 1996, which stated that in accordance with the planning of the Kalideres District year 2005, the land is allocated for the Public Green Improvement. Hence the Company can not process the certificated ownership further.
2. Sahid Apartment located in K.H. Mansur Jakarta that represents the payment compensation of retention receivables of PT Sahid Inti Dinamika on the date of October 22, 1997.

The Company does not use the land and the apartment in the process of producing or rent to the third parties in line with those assets is not related to the main activities of the Company. The management believes that the land and the apartment do not meet the criteria to be classified as fixed asset, so that those assets are recorded as other assets.

Other Assets in Progress consists of:

Other assets in progress are the addition of construction completion of Hotel Dafam Teraskita in Bandung and Makassar amounted to Rp 92,026,826,430.

Based on the Board of Directors' Statement dated April 18, 2017, the Company granted the development rights of 1,535 sqm of land located on Jl. Asia Africa No. 55 RT 003 RW 03 Kebon Pisang Village, Sumur Bandung District with proof of ownership of SHGB No. 655 on behalf of the Company to PT Waskita Karya Realty. Based on Statement No. 81/SPN/WK/2017 dated September 29, 2017, the Company provides development rights to land covering an area of 1,661 sqm based on SHGB No. 20407 and an area of 168 sqm based on SHGB No. 20403 on behalf of the Company, located on Jalan Jl. A.P. Pettarani 88 RT 002 RW 02 Village Buakana Rappocini District, Makassar City.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 (Continued)**

19. ASET TAK BERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL **19. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS**

	2019				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Pemalang - Batang	690.497.633.291	6.469.374.724.296	(22.877.075.282)	7.136.995.282.305	Pemalang - Batang
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	3.927.214.535.935	--	--	3.927.214.535.935	Bekasi - Cawang - Kp Melayu
Ciawi - Sukabumi	--	4.598.287.819.795	--	4.598.287.819.795	Ciawi - Sukabumi
	<u>4.617.712.169.226</u>	<u>11.067.662.544.091</u>	<u>(22.877.075.282)</u>	<u>15.662.497.638.035</u>	
Aset Dalam Penyelesaian					Construction in Progress
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	1.972.334.661.823	1.859.925.711.500	--	3.832.260.373.323	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
Cimanggis - Cibitung	3.507.714.033.665	2.722.868.261.723	--	6.230.582.295.388	Cimanggis - Cibitung
Ciawi - Sukabumi	4.723.630.727.424	611.748.929.102	(4.598.287.819.795)	737.091.836.731	Ciawi - Sukabumi
Kayu Agung - Palembang - Betung	8.104.695.754.538	3.281.735.658.037	--	11.386.431.412.575	Palembang - Betung
Cibitung - Cilincing	3.253.684.150.965	3.363.774.382.054	--	6.617.458.533.019	Cibitung - Cilincing
Pemalang - Batang	6.428.909.489.583	444.208.468.058	(6.469.374.724.296)	403.743.233.345	Pemalang - Batang
Krian-Legundi-Bunder	7.634.857.631.813	2.997.392.484.503	--	10.632.250.116.316	Krian-Legundi-Bunder
	<u>35.625.826.449.811</u>	<u>15.281.653.894.977</u>	<u>(11.067.662.544.091)</u>	<u>39.839.817.800.697</u>	
Akumulasi					Accumulated
Amortisasi					Amortization
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Pemalang - Batang	446.029.841	72.028.531.194	--	72.474.561.035	Pemalang - Batang
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	9.847.428.605	13.880.772.462	--	23.728.201.067	Bekasi - Cawang - Kp Melayu
Ciawi - Sukabumi	--	27.278.847.379	--	27.278.847.379	Ciawi - Sukabumi
	<u>10.293.458.446</u>	<u>113.188.151.035</u>	<u>--</u>	<u>123.481.609.481</u>	
Nilai Tercatat	<u><u>40.233.245.160.591</u></u>			<u><u>55.378.833.829.251</u></u>	Carrying Value
2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	3.781.863.956.418	--	(3.781.863.956.418)	--	Kanci - Pejagan
Pejagan - Pemalang	2.216.218.041.782	--	(2.216.218.041.782)	--	Pejagan - Pemalang
Pemalang - Batang	--	690.497.633.291	--	690.497.633.291	Pemalang - Batang
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	3.927.214.535.935	--	--	3.927.214.535.935	Bekasi - Cawang - Kp Melayu
	<u>9.925.296.534.135</u>	<u>690.497.633.291</u>	<u>(5.998.081.998.200)</u>	<u>4.617.712.169.226</u>	
Aset Dalam Penyelesaian					Construction in Progress
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	75.619.200.142	5.748.333.591	(81.367.533.733)	--	Kanci - Pejagan
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	1.210.379.700.393	761.954.961.430	--	1.972.334.661.823	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
Cimanggis - Cibitung	1.714.437.999.533	1.793.276.034.132	--	3.507.714.033.665	Cimanggis - Cibitung
Pejagan - Pemalang	3.298.220.365.906	16.235.482.332	(3.314.455.848.238)	--	Pejagan - Pemalang
Pasuruan - Probolinggo	1.787.639.683.039	12.826.801.126	(1.800.466.484.165)	--	Pasuruan - Probolinggo
Ciawi - Sukabumi	2.905.677.128.568	1.817.953.598.856	--	4.723.630.727.424	Ciawi - Sukabumi
Kayu Agung - Palembang - Betung	4.548.220.139.490	3.556.475.615.048	--	8.104.695.754.538	Palembang - Betung
Cibitung - Cilincing	763.235.664.744	2.490.448.486.221	--	3.253.684.150.965	Cibitung - Cilincing
Pemalang - Batang	3.603.993.037.666	3.515.414.085.208	(690.497.633.291)	6.428.909.489.583	Pemalang - Batang
Krian-Legundi-Bunder	4.554.298.825.637	3.080.558.806.176	--	7.634.857.631.813	Krian-Legundi-Bunder
	<u>24.461.721.745.118</u>	<u>17.050.892.204.120</u>	<u>(5.886.787.499.427)</u>	<u>35.625.826.449.811</u>	
Akumulasi					Accumulated
Amortisasi					Amortization
Ruas Jalan Tol :					Toll Road Section :
Kanci - Pejagan	429.207.926.932	--	(429.207.926.932)	--	Kanci - Pejagan
Pejagan - Pemalang	24.302.910.755	--	(24.302.910.755)	--	Pejagan - Pemalang
Pemalang - Batang	--	446.029.841	--	446.029.841	Pemalang - Batang
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	823.199.912	9.024.228.693	--	9.847.428.605	Bekasi - Cawang - Kp Melayu
	<u>454.334.037.599</u>	<u>9.470.258.534</u>	<u>(453.510.837.687)</u>	<u>10.293.458.446</u>	
Nilai Tercatat	<u><u>33.932.684.241.654</u></u>			<u><u>40.233.245.160.591</u></u>	Carrying Value

Pada tanggal 31 Desember 2018 aset takberwujud dari hak pengusahaan jalan tol WTR mengalami penurunan sebesar Rp 11.431.358.659.940 yang disebabkan oleh pelepasan ruas tol Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, dan Pasuruan – Probolinggo (Catatan 55.C).

As of December 31, 2018, WTR's intangible assets from toll road concession rights have decreased by Rp 11,431,358,659,940 caused by the release of Kanci - Pejagan toll road, Pejagan - Pemalang, and Pasuruan – Probolinggo (Note 55.C).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

20. ASET KEUANGAN ATAS PROYEK KONSESI

**20. FINANCIAL
PROJECT**

ASSETS FROM CONCESSION

	2019 Rp	2018 Rp	
Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan:			<i>Future Minimum Capacity Payment Not Later Than One Year</i>
Tidak Lebih dari Satu Tahun	79.146.492.651	79.146.492.651	<i>Not Later than One Year</i>
Lebih dari Satu Tahun Tetapi Tidak Lebih Dari Lima Tahun	229.599.450.915	272.201.775.120	<i>Later than One Year Later than Five Year</i>
Lebih dari Lima Tahun	633.567.669.469	633.567.669.469	<i>Later than Five Year</i>
Jumlah Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan	942.313.613.035	984.915.937.240	<i>Total Future Minimum Capacity Payments</i>
Pendapatan Keuangan yang Belum Diterima	590.164.482.591	590.164.482.591	<i>Less Unearned Financial Revenue</i>
Nilai Sekarang dari Pembayaran Kapasitas Masa Depan	352.149.130.444	394.751.454.649	<i>Present Value of Future Capacity Payments</i>
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	13.129.339.111	13.129.339.111	<i>Current Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	<u>339.019.791.333</u>	<u>381.622.115.538</u>	<i>Non-Current Portion</i>

Akun ini merupakan piutang tidak lancar dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum masa depan yang tercantum dalam PPA yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16. Jumlah pendapatan konstruksi yang terkait dengan aset keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Nihil dan Rp 14.281.324.371.

This account represents non current receivable from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PPA that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16. The amount of total construction revenue related to this financial asset as of December 31, 2019 and 2018 are Nil and Rp 14,281,324,371, respectively.

Pada tanggal 9 Desember 2016, WSE memulai operasi komersial (COD) untuk proyek konsesi ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, WSE mengakui pendapatan konsesi masing-masing sebesar Rp 51.169.987.260 dan Rp 25.690.553.460.

On December 9, 2016, WSE had its commercial operation date (COD) on this concession project. As of December 31, 2019 and 2018, the WSE recognized the concession revenues amounted to Rp 51,169,987,260 and Rp 25,690,553,460, respectively.

Fasilitas pembangkit tenaga mini hidro (infrastruktur) telah dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan pihak berelasi (Catatan 23.b).

Mini hydro power generating facility (infrastructure) has been pledged as collateral for long-term loan from the third party and the related party (Note 23.b).

21. UTANG USAHA

21. ACCOUNTS PAYABLE

	2019 Rp	2018 Rp	
Pemasok	5.891.807.950.332	7.590.922.823.740	<i>Suppliers</i>
Subkontraktor	4.782.324.333.208	5.534.308.199.618	<i>Subcontractors</i>
Sewa Alat	785.037.588.036	818.008.865.990	<i>Rental Equipment</i>
Upah Kerja	590.601.040.877	94.898.107.701	<i>Wages</i>
Lain-lain	331.406.914.380	867.695.001.917	<i>Others</i>
Jumlah	<u>12.381.177.826.833</u>	<u>14.905.832.998.966</u>	Total

Rincian utang usaha sebagai berikut:

The following are the details of account payable:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya Beton	65.043.706.383	93.738.063.837
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	137.340.346.116	68.904.652.677
Sub Jumlah/ Sub Total	<u>202.384.052.499</u>	<u>162.642.716.514</u>
Pihak Ketiga / Third Parties		
PT Citra Baru Steel	317.084.687.796	336.134.028.608
PT Len Industri	192.381.558.197	311.707.714.721
PT Hanil Jaya Steel	191.055.106.096	189.781.370.113
PT Inti Sumber Bajasakti	191.028.798.186	210.341.729.426
PT Toyogiri Iron Steel	180.191.441.305	87.527.899.579
PT Bakrie Metal Industries	164.630.331.975	121.579.605.191
PT Gunanusa Utama Fabricator	144.272.425.415	--
PT Wisisco Baja Putra	144.215.235.909	--
PT Grant Surya Pondasi	142.961.843.178	115.334.281.808

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Intiniaga Sukses Abadi	134.240.965.915	--
PT Asphalt Bangun Sarana	132.585.743.977	--
PT Tri Citra Perdana	132.321.446.980	--
PT Bukaka Teknik Utama	130.855.354.873	210.458.944.400
PT Krakatau Wajatama Osaka Steel Marketing	116.300.550.980	225.107.004.985
PT Eltran Indonesia	103.413.094.733	--
PT Geotekindo	97.547.731.988	178.143.520.767
PT Hanwa Indonesia	88.427.846.600	252.825.863.274
PT Sinar Indahjaya Kencana	83.650.887.925	77.071.376.438
PT Dharma Mulia Buana Abadi	80.367.631.059	--
PT Janti Sarana Material Beton	76.018.279.999	--
PT Farika Beton	74.837.075.828	113.251.377.954
PT Budi Daya Mandiri	71.586.893.300	--
PT Pinnacle Optima Karya	67.244.402.266	--
PT Adi Banuwa	61.483.499.005	--
PT Multi Trading Pratama	60.347.453.885	--
PT Multi Welindo	58.968.593.296	107.601.403.828
PT Superkrane Mitra Utama	58.680.495.408	--
PT Duta Hita Jaya	57.271.218.697	--
PT Komponindo Betonjaya	56.594.115.659	77.479.043.005
PT Intiroda Makmur	54.961.329.997	--
PT Prima Indojoya Mandiri	53.677.288.111	104.066.816.455
PT Mitra Usaha Rakyat	52.905.690.006	125.862.429.077
PT Progresmax	51.636.389.495	--
PT Surya Perkasa Globalindo	51.527.406.852	--
PT Kisi Anak Negeri	51.484.413.302	--
PT Sumiden Serasi Wire Products	50.413.508.522	67.006.050.446
PT Fluidra Indonesia	50.039.711.302	--
PT Teknindo Geosistem Unggul	--	100.082.134.955
PT Karunia Berca Indonesia	--	79.173.453.069
PT Jaya Glassindo Abadi	--	70.475.663.010
PT Maju Mix Bersama Abadi	--	77.031.095.968
PT Adhimix PCI Indonesia	--	111.837.978.200
PT Detede	--	125.551.952.750
PT Citramas Heavy Industries	--	56.297.765.307
PT Farika Riau Perkasa	--	55.583.876.844
PT Tiga Sekawan Serasi	--	71.738.704.793
PT Cipta Hasil Sugiarto	--	58.139.643.694
PT Mitra Tata Abadi Bersama	--	98.241.548.925
KSO/ JO WKR - RNI	--	161.115.532.502
PT China Harbour Indonesia	--	98.604.040.650
PT Honindo Pratama Mandiri	--	68.925.672.593
PT Pura Barutama	--	57.796.827.791
PT Waagner Biro Indonesia	--	57.380.550.751
PT Heksa Nenggala Indonusa	--	57.339.579.330
PT Asri Kemasindo	--	56.456.865.666
PT Holcim Beton	--	56.106.349.267
PT Pancang Sakti Citra Perkasa	--	52.654.957.097
PT Paradise Perkasa	--	51.926.129.615
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	--	51.893.765.857
PT Bina Mulia Wijaya	--	50.249.342.832
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Milyar/Billion)	8.351.583.326.317	10.107.306.390.911
Sub Jumlah/ Sub Total	12.178.793.774.334	14.743.190.282.452
Jumlah/ Total	12.381.177.826.833	14.905.832.998.966

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The following are the details of aging schedule of account payable:

	2019 Rp	2018 Rp	
Utang Pemasok			Suppliers Payables
Belum Jatuh Tempo	2.566.429.916.229	2.050.924.311.311	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 90 Hari	994.463.235.960	1.913.544.342.298	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	1.067.897.815.964	2.231.971.442.943	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	782.974.520.164	964.983.205.657	> 180 - 360 days
> 360 Hari	480.042.462.015	429.499.521.531	> 360 Days
Jumlah	5.891.807.950.332	7.590.922.823.740	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp	
Utang Subkontraktor			Subcontractors Payables
Belum Jatuh Tempo	1.234.582.380.604	1.961.263.952.049	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 90 Hari	755.080.740.964	1.110.712.371.071	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	1.369.223.659.820	1.393.504.300.204	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	1.076.975.232.252	746.956.602.482	> 180 - 360 days
> 360 Hari	346.462.319.568	321.870.973.812	> 360 Days
Jumlah	4.782.324.333.208	5.534.308.199.618	Total
	2019 Rp	2018 Rp	
Utang Sewa Alat			Rental Equipment Payables
Belum Jatuh Tempo	119.206.587.232	161.469.659.488	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 90 Hari	119.182.930.586	171.210.163.089	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	276.532.779.659	313.132.871.346	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	214.958.492.659	154.563.369.995	> 180 - 360 days
> 360 Hari	55.156.797.900	17.632.802.072	> 360 Days
Jumlah	785.037.588.036	818.008.865.990	Total
	2019 Rp	2018 Rp	
Utang Upah Kerja			Wages Payables
Belum Jatuh Tempo	153.008.323.033	42.456.849.979	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo			Past Due
Sampai dengan 90 Hari	126.262.988.729	14.296.133.935	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	267.303.662.570	13.492.275.492	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	27.828.262.177	7.621.495.015	> 180 - 360 days
> 360 Hari	16.197.804.368	17.031.353.280	> 360 Days
Jumlah	590.601.040.877	94.898.107.701	Total

22. UTANG BANK JANGKA PENDEK

22. SHORT-TERM BANK LOANS

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Perusahaan/ The Company		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.286.400.842.373	4.789.214.194.112
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.201.759.060.301	2.148.464.882.826
PT Bank Syariah Mandiri	1.498.928.610.882	999.999.999.744
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.434.632.026.581	1.272.706.650.083
Indonesia Eximbank	499.892.361.111	1.949.700.000.000
Sindikasi/ Syndication Transmisi Sumatera 500 KV		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	592.291.027.654
Indonesia Eximbank	--	270.725.279.811
Sindikasi/ Syndication Jakarta - Cikampek Elevated II		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	424.266.909.090
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP		
PT Bank BRI Syariah Tbk	512.000.000.000	512.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	435.863.758.291	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	379.099.999.999	670.359.467.938
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.000.000.000	350.000.000.019
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	600.000.000.000
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WTR		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.150.293.844.725	1.259.252.695.484
Sub Jumlah/ Sub Total	10.548.870.504.263	15.838.981.106.761
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Perusahaan/ The Company		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.395.997.810.616	2.000.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	1.649.934.027.778	700.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Barat dan Banten Tbk	1.594.791.279.224	845.000.000.000
PT Bank DKI	997.863.221.572	1.000.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	907.425.974.384	335.666.043.122
PT Bank Mizuho Indonesia	785.584.501.592	280.138.925
Bank of China Ltd	599.033.377.486	500.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	63.882.918.767	362.562.066.828
MUFG Bank, Ltd.	827.110.410	168.112.661.042
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah	--	500.000.000.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Sindikasi/ <i>Syndication</i> Transmisi Sumatera 500 KV		
PT Bank Central Asia Tbk	--	360.967.055.125
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	126.338.463.910
Sindikasi/ <i>Syndication</i> Jakarta - Cikampek Elevated II		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	424.266.909.090
PT Bank Central Asia Tbk	--	424.266.909.090
MUFG Bank, Ltd.	--	212.133.090.910
PT Bank BNP Paribas Indonesia	--	212.133.090.910
PT Bank KEB Hana Indonesia	--	90.800.000.000
Sindikasi/ <i>Syndication</i> Cinere Serpong		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	267.189.000.000
PT Bank DBS Indonesia	--	178.126.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	--	81.685.000.000
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP		
PT Bank DKI	580.000.000.000	644.200.000.000
PT Bank UOB Indonesia	340.000.000.000	--
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	333.605.049.438	486.714.847.274
PT Bank Permata Tbk	300.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	300.000.000.000	300.000.000.000
MUFG Bank, Ltd.	245.000.000.000	450.000.000.000
PT Bank ICBC Indonesia	235.124.000.062	700.000.000.000
PT Bank QNB Indonesia	184.423.417.288	--
PT Bank BCA Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	299.824.895.228
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	--	50.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	11.613.492.688.617	12.120.266.171.454
Jumlah/ Total	22.162.363.192.880	27.959.247.278.215

Suku bunga kontraktual per tahun:

Contractual interest rate per annum:

	2019	2018
Perusahaan/ The Company		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,00%	8,50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,65% - 9,25%	8,10%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,65% - 9,25%	8,00% - 8,10%
Indonesia Eximbank	8,75%	7,80% - 8,40%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	8,50%	8,50%
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	7,50%	8,00%
MUFG Bank, Ltd.	7,16%-7,44%	8,68%
PT Bank UOB Indonesia	8,50%-8,75%	8,00% - 8,40%
PT Bank DKI	7,80%	7,80%
PT Bank DBS Indonesia	9,25%-9,50%	9,30%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8,25%	8,25%
PT Bank Syariah Mandiri	8,55%	7,50%
PT Bank BNP Paribas Indonesia	8,95%	<i>Cost of Fund + 1,20%</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8,00%	7,50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia - Kredit Sindikasi/ <i>Syndicated Credit</i>	9,075%	8,83%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	8,50%	9,25%
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia), Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank SBI Indonesia	8,075%	10,08%
Bank of China Ltd	8,00%	7,75%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, MUFG Bank, Ltd., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank BPD Riau	--	10,50%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk., MUFG Bank, Ltd., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	9,43%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia	7,91%	9,91%
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia), PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania	7,80%	10,08%
Entitas anak/ Subsidiary Entity - WBP		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,50%	9,75%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,50%	9,25%
PT Bank BRI Syariah Tbk	9,00%	9,00%

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019	2018
PT Bank ICBC Indonesia	9,00% - 9,25%	9,25%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	9,50%	9,50%
PT Bank DKI	9,25%	9,50%
MUFG Bank, Ltd.	7,62%	9,50%
PT Bank CTBC Indonesia	8,35%	10,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	9,00%
PT Bank Permata Tbk	9,25%	9,50%
PT Bank BCA Syariah	9,50%	9,50%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	9,60%
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	9,30%	8,80% - 9,55%
PT Bank UOB Indonesia	8,50% - 9,00%	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,00%	--
PT Bank QNB Indonesia	9,00%	--

Perusahaan

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas/ <i>The Facilities</i>	Batas/ <i>Limit</i>	Jatuh Tempo/ <i>Due date</i>
	Rp	
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan Facility</i>)	4.500.000.000.000	14/11/2020
Fasilitas/ <i>Facility Supply Chain Financing</i> (SCF)	2.006.000.000.000	14/11/2020
Kredit Modal Kerja Transaksional (<i>Transactional Working Capital Credit</i>)	1.765.000.000.000	14/11/2020
L/C / SKBDN (<i>Sub limit dari NCL/ from NCL</i>)	500.000.000.000	14/11/2020
<i>Trust Receipt</i> (<i>Sub limit dari NCL/ from NCL</i>)	115.000.000.000	14/11/2020
Kredit Modal Kerja Rekening Koran (<i>Current Account Working Capital Credit</i>)	35.000.000.000	14/11/2020
Kredit Jangka Pendek (<i>Short-Term Credit</i>)	4.000.000.000.000	14/11/2020

Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga 8,65% - 9,25% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Deposito sebesar Rp 8.448.200.000 (Catatan 4).
- b. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, yang telah diserahkan dan telah diikat hak tanggungan (HT) dengan nilai Rp 14.075.000.000 (Catatan 16).
- c. Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 2A, Proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I, Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2B, Proyek Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 2A, Proyek Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 3, Proyek Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 1, Proyek Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Seksi 4A dijamin atas utang bank (Catatan 5).

The Company

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

The loan bears interest by 8.65% - 9.25% per annum. The loan facilities are collateralized and tied with:

- a. Time deposit amounted to Rp 8,448,200,000 (Note 4).
- b. 3 (three) plots of land and buildings at Pekanbaru Branch office, which have been submitted and tied with guarantee rights amounted to Rp 14,075,000,000 (Note 16).
- c. As of December 31, 2019, all amount due from customers of Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Toll Road Section 2A Project, Kayu Agung – Palembang – Betung Package I Toll Road Project, Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project Section 2B, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project Section 2A, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project Section 3, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project Section 1, Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project Section 4A of were used as collateral bank (Note 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: memindah tangankan barang jaminan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter* dan lain-lain dalam hal Perusahaan melakukan *corporate action* dalam rangka *fund raising* di dalam negeri.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 2.286.400.842.373 dan Rp 4.789.214.194.112.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving* Rp 200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp 4.450.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp 3.175.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 705.000.000.000.
- e. *Trust Receipt*, *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 240.000.000.000.

Berdasarkan surat No.BIN/2.2/263/R tanggal 8 April 2020, jangka waktu pinjaman jatuh tempo 20 April 2022 dan surat No. BIN/2.2/261/R tanggal 25 September 2019 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bridging yang berlaku sampai dengan 30 Nopember 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363 (Catatan 9).

This agreement includes restrictions which the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, such as: transfer the collateral; bind itself as guarantor of the debt or pledge the Company's assets that have been pledged to another party; maintain the financial ratios of fixed assets to be acquired/ purchased by the Company in the future, it will be used as collateral for loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the Company will prioritize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and its affiliates to be an arranger, underwriter and others in terms of the Company's corporate action in order to do fund raising internally.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one) time, debt to equity ratio of a maximum 3 (three) times and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company's loan balance to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 2,286,400,842,373 and Rp 4,789,214,194,112, respectively.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. *Revolving Working Capital Loan (WCL) of Rp 200,000,000,000.*
- b. *Transactional Capital Loan of Rp 4,450,000,000,000.*
- c. *Supply Chain Financing (SCF) Working Capital Loan of Rp 3,175,000,000,000.*
- d. *Bank Guarantee of Rp 705,000,000,000.*
- e. *Trust Receipt, Letter of Credit (L/C) or SKBDN of Rp 240,000,000,000.*

According to letter No.BIN/2.2/263/R dated April 8, 2020, the term of loan will be due on April 20, 2022 and letter No. BIN/2.2/261/R dated September 25, 2019 concerning Agreement Additional Transactional Working Capital Credit Bridging Facilities which are valid until November 30, 2020. The loan facilities are secured and bounded with:

- a. *Inventory which has been tied by fiduciary deed No. 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH. 2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363 (Note 9).*

- b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098 m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004, senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 dimana SHT IV sedang dalam proses (Catatan 16).
- c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m², terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 (Catatan 16) dan senilai Rp 1.860.010.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- d. Satu bidang tanah SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- e. Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511 m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- f. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806 m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016 (Catatan 16).
- b. A plot of land SHGB No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098 sqm located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta on behalf of the Company amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397/T/1988, amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT.II No. 408/2004, amounted to Rp 48,320,400,000 according to SHT III No. 06386/2014 and Rp 11,120,940,000 while SHT IV still in process (Note 16).
- c. A plot of land with SHGB No. 38, April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332 sqm, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, on behalf of the Company NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No. 687/2007 (Note 16) and amounted Rp 1,860,010,000 while SHT II still in process.
- d. A plot of land with SHGB No. 2001 dated June 1, 2006 until on January 1, 2026, an area of 5,798 sqm, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, on behalf of the Company amounted to Rp 5,191,600,000 according to SHT I No. 323 (Note 16) and amounted Rp 9,779,660,000 according to SHT II No. 1375/2015.
- e. A plot of land with SHGB No. 4 dated November 10, 1998 until December 19, 2028 an area of 2,511 sqm, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 651,430,000 (Note 16) and amounted Rp 6,321,020,000 while SHT II still in process.
- f. A plot of land with SHGB No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806 sqm, located at Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT I No. 3129/2001, amounted to Rp 460,020,000 according to SHT II No. 1151/2007. The land right (SHGB) has been extended until February 7, 2033 and amounted to Rp 3,474,910,000 according to SHT III No 1846/2016 (Note 16).

- g. Satu bidang tanah SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004 m², terletak di Desa Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 (Catatan 16).
- h. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404 m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016 (Catatan 16).
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- j. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000 m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015 (Catatan 16).
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 24 Oktober 2017, seluas 595 m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007 (Catatan 16).
- g. A plot of land with SHGB No. 436 dated March 10, 1998 until June 19, 2032, an area of 1,004 sqm, located at Desa Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, on behalf of the Company amounted to Rp 464,850,000 according to SHT I No. 356/2001, amounted to Rp 747,850,000 according to SHT II No. 169/2007, and amounted to Rp 3,595,942,000 according to SHT III No. 36/2016 (Note 16).
- h. A plot of land with SHGB No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404 sqm, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT I No. 2952/2007 and amounted Rp 3,595,940,000 according to SHT III No. 00621/2016 dated January 28, 2016 (Note 16).
- i. A plot of land with SHGB No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013 sqm, located at Kelurahan Kalirungkut, Surabaya City, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT I No. 4772/2001, amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT II No. 2948/2007 and amounted to Rp 10,571,030,000 while SHT III still in process (Note 16).
- j. A plot of land with SHGB No. 2 dated June 25, 1997 until June 25, 2017, an area of 1,000 sqm, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 402,860,000 according to SHT I No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT II No. 239/2007 amounted to Rp 3,085,070,000 according to SHT III No. 1387/2015 (Note 16).
- k. A plot of land with SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 24, 2017, an area of 595 sqm, located at Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 49,260,000 according to SHT I No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT II No. 240/2007 (Note 16).

- i. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001 (Catatan 16).
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- n. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 16).
- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 dimana SHT II sedang dalam proses. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- i. A plot of land with SHGB No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830 sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 457,590,000 according to SHT I No. 375/2001 (Note 16).
- m. A plot of land with SHGB No. 14 dated July 22, 1993 until April 22, 2023, an area of 4,800 sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 228,000,000 according to SHT I No. 375/2001, amounted to Rp 602,410,000 according to SHT II No. 238/2007 and amounted Rp 7,828,880,000 while SHT III still in process (Note 16).
- n. A plot of land with SHGB No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276 sqm, located at Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, North Sulawesi, on behalf of the Company amounted to Rp 263,530,000 according to SHT I No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT II No. 667/2007. The land right (SHGB) has been extended until May 25, 2033 (Note 16).
- o. A plot of land with SHGB No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2020, an area of 4,040 sqm, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, on behalf of the Company amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT I No. 2927/2001, amounted to Rp 994,180,000 according to SHT II No. 1613/2007 and amounted to Rp 3,182,880,000 according to SHT III No. 10710/2015. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).
- p. A plot of land with SHGB No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250 sqm, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, on behalf of the Company amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT I No. 2012/2007 amounted to Rp 18,705,400,000 while SHT II still in process. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).

- q. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905 m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016. (Catatan 16).
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020.AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000 (Catatan 16).

- q. A plot of land with SHGB No. 1 dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,905 sqm, located at Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung, on behalf of the Company amounted to Rp 30,000,000 according to S. Hip No. 3181 dated September 13, 1989, amounted to Rp 2,222,100,000 according to SHT II No. 01057/2007 and amounted to Rp 3,642,670,000 according to SHT III No. 02119/2016 (Note 16).
- r. Vehicles consisting of 1 (one) unit VW Caravelle 2.0 year 2012 tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed No. W.10.00426020.AH.05.01 dated February 26, 2012 amounted to Rp 620,000,000 (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing, Bendungan Leuwikeris Paket 2, Bendungan Jlantah, *Light Rail Transit* di Sumatera Selatan, dan Tol Japek Selatan : Ruas Taman Mekar – Sadang digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

As of December 31, 2019, all amount due from customers of the Constructions of Cibitung - Cilincing Toll Road project, Leuwikeris Dam Package 2, Jlantah Dam, Light Rail Transit at South Sumatera, and Japek Selatan Section Taman Mekar – Sadang are used as collateral for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as; to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property/assets owned in a single transaction or in a transaction except selling or transfer assets except one that is *arm's length*; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic Indonesia through the sale of these assets do not have material effect; done with requirement will be the surviving legal entity; making amendments to it may be caused by due to the material; filed a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

The Company should maintain the following financial ratios: *current ratio* at least 1 (one), *debt to equity ratio* of a maximum 3 (three) and *debt service coverage* of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 2.201.759.060.301 dan Rp 2.148.464.882.826.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 2,201,759,060,301 and Rp 2,148,464,882,826, respectively.

3. PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 20 Maret 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian *Line Facility* berdasarkan prinsip Musyarakah No. 21/013-3/SP3/CB1 dengan PT Bank Syariah Mandiri atas fasilitas pembiayaan gabungan sebesar Rp 1.500.000.000.000. Sublimit fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pembiayaan modal kerja transaksional sebesar Rp 1.475.000.000.000, dan Fasilitas Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai 20 Maret 2020 dan telah diperpanjang dengan surat No.22/011-3SP3/CB1 tanggal 19 Maret 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021. Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas *iB Supplier Financing (iB-SF)* dengan Nomor Buyer L.40/P/WK/2017, dan Nomor Bank 19/670A-PKS/DIR dengan Bank Syariah Mandiri dengan nilai fasilitas Rp 500.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019, dan telah diperpanjang dengan Nomor Buyer L.57/P/WK/2019 dan Nomor Bank 21/638-PKS/DIR dengan nilai fasilitas sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2021.

3. PT Bank Syariah Mandiri

*As of March 20, 2019, the Company signed into Credit Line Facility Musyarakah Agreement Deed No. 21/013-3/SP3/CB1 with PT Bank Syariah Mandiri of combined facilities amounted to Rp 1,500,000,000,000. The Sublimit for this facility consist of Transactional Working Capital Loan amounted to Rp 1,475,000,000,000, and Musharaka Revolving Fund Financing amounted to Rp 25,000,000,000. The availability period of facility is until March 20, 2020 and has been extended with according to Extension Letter No.22/011-3SP3/CB1 which is valid until March 20, 2021. As of October 13, 2017, the Company signed an *iB Supplier Financing Facility (iB-SF) Facility Agreement* with Buyer Number L.40/P/WK/2017, and Bank Number 19/670A-PKS/DIR with Bank Syariah Mandiri with value of facilities Rp 500,000,000,000, which is valid until October 13, 2019, and has been extended with Buyer Number L.57/P/WK/2019 and Bank Number 21/638-PKS/DIR with a facility value of Rp 1,000,000,000,000 which is valid until April 13, 2021.*

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Under the agreement, the Company should maintain debt to equity ratio maximum 3 (three) times, debt service coverage ratio minimum 1 time and current ratio minimum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol JORR II Ruas Kunciran – Serpong dan Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder - Manyar, digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Syariah Mandiri (Catatan 5).

As of December 31, 2019, all amount due from customers of JORR II Toll Road Section Kunciran - Serpong and Krian – Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project were used as collateral bank loans of PT Bank Syariah Mandiri (Note 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Syariah Mandiri masing-masing sebesar Rp 1.498.928.610.882 dan Rp 999.999.999.744.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Syariah Mandiri amounted to Rp 1,498,928,610,882 and Rp 999,999,999,744, respectively.

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 1.800.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.161-OPK/DKD/06/2018 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 25 Juni 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2020.
- b. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp 1.000.000.000.000 bersifat *interchangeable* dengan fasilitas KMKK sesuai dengan surat No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Agustus 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2020.
- c. Fasilitas bank garansi sebesar Rp 4.500.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Agustus 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2020.
- d. Fasilitas SCF A/P 1 sebesar Rp 500.000.000.000 *interchangeable* dengan fasilitas KMK Konstruksi sesuai dengan surat No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Agustus 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2020.
- e. Fasilitas SCF A/P 2 sebesar Rp 1.200.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Agustus 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 655 dengan masa berlaku dari tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah diikat hak tanggungan dengan nilai Rp 16.186.000.000 (Catatan 16).

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank antara lain: mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijamin kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham. Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. Working capital credit facility amounted to Rp 1,800,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.161-OPK/DKD/06/2018 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated June 25, 2018. The facility may be used up to June 10, 2020.
- b. Short-Term Loan facility amounted to Rp 1,000,000,000,000 is interchangeable with KMKK facility in accordance to letter No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated August 21, 2018. The facility may be used until June 10, 2020.
- c. Bank guarantee facility amounted to Rp 4,500,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated August 21, 2018. The facility can be used until June 10, 2020.
- d. The SCF A/P 1 facility amounted to Rp 500,000,000,000 is interchangeable with KMK Konstruksi facility in accordance with letter No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated August 21, 2018. The facility can be used up to June 10, 2020.
- e. The SCF A/P 2 facility amounted to Rp 1,200,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.227-OPK/DKD/08/2019 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated August 21, 2018. The facility may be used up to June 10, 2020.

Loan facilities are collateralized and tied with a piece of land with land right (SHGB) No. 655 dated January 7, 1992 until December 28, 2020 that have been tied with its guarantee rights amounted to Rp 16,186,000,000 (Note 16).

Under the agreement, the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as: filed for bankruptcy to the court, leased assets as collateral to the bank; pay interest on shareholder loans. Under the agreement, the Company should maintain: *current ratio* at least 1 (one). The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 6, Tol Solo - Ngawi Paket 2, Pembangunan Teraskita Hotel Makasar, Perluasan Bandara Depati Amir, Pembangunan Apartemen Solterra, Pembangunan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung, Pembangunan Tol Ciawi Sukabumi Seksi 4 dan Proyek Renovasi Masjid Istiqlal, digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

As of December 31, 2019, all amount due from customers of Medan Kualanamu Tebing Tinggi Section 6 Toll Road Project, Solo – Ngawi Toll Road Project Package 2, Teraskita Hotel Makassar Construction, Depati Amir Airport Expansion, Construction of Solterra Apartments, the Constructions of Becakayu Toll Road Section 2A Ujung, the Constructions of Ciawi Sukabumi Toll Road Section 4 and Istiqlal Mosque Renovation Project, were used as collateral bank loans of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.434.632.026.581 dan Rp 1.272.706.650.083.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,434,632,026,581 and Rp 1,272,706,650,083, respectively.

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) sebesar Rp 1.000.000.000.000 sesuai dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No.BMN/SP3/04/2020 dan 001/PJMN/SP3/03/2020 tanggal 26 Maret 2020. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 27 Maret 2021.

The Company obtained an Export Working Capital Credit (KMKE) facility amounted to Rp 1,000,000,000,000 in accordance to to Extension Letter facility No.BMN/SP3/04/2020 dan 001/PJMN/SP3/03/2020 dated March 26, 2020. The facility will be mature on March 27, 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 dan tanah dan bangunan (HGB) No. 592 Jl. RE Martadinata No. 24 Kel Ciputat, Tangerang Selatan sebesar Rp 5.153.000.000, digunakan sebagai jaminan atas utang bank Indonesia Eximbank (Catatan 5 dan 16).

As of December 31, 2019, all amount due from customers of project Development of Cimanggis – Cibitung Section 2 Toll Road and land and building (HGB) No. 592 which located in Jl. RE Martadinata No. 24 Kel Ciputat, Tangerang Selatan amounted to Rp 5,153,000,000, were used as collateral bank loans of Indonesia Eximbank (Note 5 and 16).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepaillitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as, a merger, acquisition that can impact paying obligations to the bank; obtaining new loans on projects that have been financed by the bank; expand or narrow the business that may affect the repayment of loans; the usage of credit facilities for purposes other than financing credit facilities purposes; filed the bankruptcy petition to the court; sell or transfer assets used as collateral; lend money to anyone, except the result of normal business activities; act as a guarantor or pledge assets property to another party.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* minimal 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Under the agreement the Company should maintain the following financial ratios: debt to equity ratio maximum 3 times, debt service coverage ratio at least 2 times and current ratio at least 1 time. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada Indonesia Eximbank masing-masing sebesar Rp 499.892.361.111 dan Rp 1.949.700.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of Company's loan to Indonesia Eximbank amounted to Rp 499,892,361,111 and Rp 1,949,700,000,000, respectively.

6. Sindikasi Transmisi 500 KV Sumatera

6. Transmission 500 KV Sumatera Syndication Loan

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 25 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk sebesar maksimum Rp 4.402.500.000.000 dengan suku bunga *reference rate (Average Time Deposit)* untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019. Pada tanggal 10 Juli 2017 melalui Sertifikat Pengalihan Kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melimpahkan sebagian porsinya sebagai kreditur ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 31 Desember 2019.

Based on the Syndicated Credit Agreement No. 25 dated May 23, 2016, the Company obtained syndicated credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk for a maximum of Rp 4,402,500,000,000 with a reference rate (Average Time Deposit) for 3 months period plus a maximum margin. The facility has a period until December 31, 2019. On July 10, 2017 through the Credit Transfer Certificate, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk delegated part of its portion as a creditor to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). This loan has been paid in full on December 31, 2019.

Berdasarkan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B-1282-SJK/SDK/112/2019 tanggal 19 Desember 2019 selaku Agen Fasilitas, suku bunga yang berlaku untuk fasilitas kredit sindikasi adalah *reference rate* ditambah margin maksimal sebesar 9,075% per tahun.

Based on the letter of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B-1282-SJK/SDK/112/2019 dated December 19, 2019 as an Agent Facility, the interest rate applicable to syndicated credit facilities is the reference rate plus a maximum margin of 9.075% per annum

Tujuan dari fasilitas kredit sindikasi ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi pengadaan transmisi 500 kV Sumatera ("Proyek Transmisi Sumatera") yang terdiri dari pengadaan transmisi dengan rute New Aur Duri – Peranap (Seksi 1) dan rute Peranap – Perawang (Seksi 2).

The purpose of the syndicated credit facility is to finance the working capital needs for construction procurement of Sumatera 500 kV transmission ("Sumatera Transmission Project") consisting of procurement transmission route New Aur Duri – Peranap (Section 1) and the Peranap – Perawang (Section 2).

Setelah berita acara serah terima untuk masing-masing paket pekerjaan diserahkan kepada PLN selaku *owner* proyek, sumber pelunasan dari fasilitas kredit ini akan beralih secara langsung kepada *owner*. Seluruh tagihan atas pekerjaan dan tagihan atas klaim asuransi terkait proyek yang dibiayai menjadi jaminan atas fasilitas kredit ini.

After the handover for each work package submitted to PLN as the owner of the project, the source of repayment of the credit facility will be switched directly to the owner. The entire bill for the work and the bill on insurance claims related to projects financed served as collateral for the credit facility.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain:

- a. Memberikan jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang termasuk dalam maksud dan tujuan Perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasarnya;
- b. Melakukan permohonan pailit dan permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);
- c. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran utang Debitur;
- d. Melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, pemisahan atau membeli atau dengan cara lain memperoleh Perusahaan atau saham-saham dalam Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam maksud dan tujuan Perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasarnya; dan
- e. Mengubah status kelembagaan, maksud, tujuan atau kegiatan usaha utama Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *current ratio* minimal 1 (satu) kali;
- b. *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali; dan
- c. perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Nihil dan Rp 592.291.027.654; Indonesia Eximbank sebesar Nihil dan Rp 270.725.279.811; PT Bank Central Asia Tbk sebesar Nihil dan Rp 360.967.055.125; dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Nihil dan Rp 126.338.463.910.

7. Sindikasi Jakarta-Cikampek Elevated II

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 7 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. beserta dengan perubahan-perubahannya perusahaan telah memperoleh fasilitas kredit sindikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

This Agreement also includes restrictions the Company and is not permitted without prior written approval from the Bank, among others:

- a. *Providing corporate guarantees to other parties, except guaranteed the obligations of Subsidiaries conducting business activities that fall within the aims and objectives of the Company contained in their articles of association;*
- b. *Conducting bankruptcy application and request for postponement of payment to authorized institution (court);*
- c. *Selling or releasing immovable property or principal assets in the course of its business, except as long as it does not affect the debt service obligation of the Borrower;*
- d. *To acquire, merge, consolidate, segregate or purchase or acquire a company in other ways or shares in a company that carries on business activities not included in the Company's purposes and objectives contained in its articles of association; and*
- e. *Changing the institution's status, intent, purpose or main business activity.*

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- a. *current ratio of at least 1 (one) time;*
- b. *debt to equity ratio maximum of 3 (three) times; and*
- c. *comparison between EBITDA and interest expense is not less than 1.5 (one point five) times.*

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the Company's loans to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil and Rp 592,291,027,654; Indonesia Eximbank amounted to Nil and Rp 270,725,279,811; PT Bank Central Asia Tbk amounted to Nil and Rp 360,967,055,125; and PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounted to Nil and Rp 126,338,463,910.

7. Syndication Bank Loan Jakarta - Cikampek Elevated II

Based on the Deed of Credit Agreement No. 09 dated November 7, 2017 from Notary Fathiah Helmi, S.H. along with the changes the Company has obtained a syndicated credit facility with the following conditions:

1. Fasilitas Kredit Tranche A sebesar Rp 2.750.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Cabang Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pembangunan proyek.
2. Fasilitas Kredit Tranche B sebesar Rp 340.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan Down Payment atau uang muka atas pengadaan barang dan atau jasa porsi Waskita kepada KSO KS-Bukaka sesuai dengan Perjanjian JO/KSO KS-Bukaka.
3. Fasilitas Kredit Tranche C sebesar Rp 2.050.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Cabang Jakarta, dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan untuk pembiayaan supplier financing atas dasar akseptasi invoice kepada Waskita khusus pengadaan barang dan atau jasa sesuai Perjanjian JO/KSO KS-Bukaka.

Perusahaan memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia atas Tagihan;
- b. Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi; dan
- c. Perjanjian Pengalihan Hak.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1,00 kali dan *current ratio* minimal 1,00 kali. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 26 Desember 2019. Pinjaman ini dibayar lunas pada tanggal 27 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 424.266.909.090; PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 424.266.909.090; PT Bank Central Asia Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 424.266.909.090; MUFG Bank, Ltd. masing-masing sebesar Nihil dan Rp 212.133.090.910; PT Bank BNP Paribas Indonesia masing-masing sebesar Nihil dan Rp 212.133.090.910; dan PT Bank KEB Hana Indonesia masing-masing sebesar Nihil dan Rp 90.800.000.000.

1. Tranche A Credit Facility amounted to Rp 2,750,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Jakarta Branch, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank KEB Hana Indonesia that are used to finance working capital for project development.
2. Tranche B Credit Facility amounted to Rp 340,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank KEB Hana Indonesia are used for financing Down Payment or advances for procurement of goods and or Waskita's portion service to KSO KS-Bukaka is in accordance with the JO/KSO KS-Bukaka Agreement.
3. Tranche C Credit Facility amounted to Rp 2,050,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Jakarta Branch and PT Bank Central Asia Tbk are used for financing supplier financing on the basis of invoice acceptance to Waskita specifically the procurement of goods and or services in accordance with the KS/Bukaka JO/KSO Agreement.

The company provides the following guarantees:

- a. Fiduciary Guarantee on Bills;
- b. Fiduciary Guarantee on the Results of Insurance Claims; and
- c. Rights Transfer Agreement.

The company is required to maintain a maximum debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio 3 times, a minimum debt service coverage ratio of 1.00 time and a current ratio of at least 1.00 time. This facility can be used until December 26, 2019. This loan has been paid in full on December 27, 2019.

As of December 31, 2019 and December 31, 2018 the Company's loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Nil and Rp 424,266,909,090; PT Bank CIMB Niaga Tbk Amounted to Nil and Rp 424,266,909,090; PT Bank Central Asia Tbk amounted to Nil and Rp 424,266,909,090; MUFG Bank, Ltd. amounted to Nil and Rp 212,133,090,910; PT Bank BNP Paribas Indonesia amounted to Nil and Rp 212,133,090,910; and PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Nil and Rp 90,800,000,000, respectively.

8. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *money market* sebesar Rp 2.500.000.000.000 dengan garansi bank (*switchable*) sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 003/IBD-MM/LEG/17/Per.II dan dilegalisasi oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2020.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikat diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan *merger* atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt (a.d interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* lebih besar dari 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung Paket 4 Seksi 3 dan proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3 dijaminkan atas utang bank PT Bank Pan Indonesia Tbk (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk masing-masing sebesar Rp 2.395.997.810.616 dan Rp 2.000.000.000.000.

8. PT Bank Pan Indonesia Tbk

The Company obtained money market loan facilities amounted to Rp 2,500,000,000,000 and bank guarantee (*switchable*) according to Credit Agreement No. 003/IBD-MM/LEG/17/Per.II and was legalized by Notary M. Kholid Artha, SH. This facility can be used until May 24, 2020.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent Bank, such as, receive a loan or new credit from another bank or a third party whose numbers can lead to the violation of financial ratios on financial covenants; bind themselves as a loan against the third parties, opening new businesses other than an existing business; dissolve or liquidate the Company; change fields /types of business; to apply for bankruptcy or delayed payment of its debts (*surseance van betaling*); change the legal form or legal status of the Company; change the Company's articles of association; leasing the Company to a third party; lease/transfer the goods used as collateral, transferring the Company in any form to any third party; issuing new shares and selling existing shares; paying their debts to shareholders and shares or the shareholder in any form for existing or that will be arise in the future; a merger or business combination that changes the composition of share ownership; allow the shareholders to withdraw the capital that has been deposited, pledged or mortgaged the Company's shares

Under the agreement the Company should maintain the following financial ratios: *debt (a.d interest bearing debt) to equity ratio* maximum 3 times, *interest service coverage ratio* greater than 2 times and *current ratio* at least 1 time. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Pan Indonesia Tbk.

As of December 31, 2019, all amount due from costumers of Kayu Agung – Palembang - Betung Package 4 Section 3 toll road project and the Development of Ciawi–Sukabumi Toll Road Section 3 project were pledged against bank loans of PT Bank Pan Indonesia Tbk (Note 5).

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 2,395,997,810,616 and Rp 2,000,000,000,000, respectively.

9. PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0447, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk berupa fasilitas *cash loan revolving* sebesar Rp 950.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan telah diperpanjang sesuai dengan Perubahan Kedua yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain, memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya; menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam; menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan pengguna jasa atas proyek Tol Ruas Pematang Panggang - Kayu Agung seksi 4 dan Tol Serpong – Cinere digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank BTPN Tbk (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3,5 (tiga koma lima) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 1.649.934.027.778 dan Rp 700.000.000.000.

10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 750.000.000.000 dan fasilitas non-kas loan yang dapat digunakan untuk *Supply Chain Financing* (SCF), SKBDN, L/C dan bank garansi Rp 250.000.000.000 sesuai akta addendum perjanjian kredit No. 24 tanggal 7 Nopember 2018 oleh Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 7 Nopember 2019 dan

9. PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Based on the first change of Facility Agreement No. SMBCI/NS/0447, the Company obtained a credit facility from PT Bank BTPN Tbk in the form of cash loan revolving facility amounted to Rp 950,000,000,000. The facility can be used until December 31, 2019 and has been extended in accordance with the Second Amendment which is valid until December 31, 2020.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the bank, such as, installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets; sell, transfer or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower; sell, transfer or dispose of its receivables with recourse; entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set-off) or the possibility of combining multiple accounts; or hold priority setting receipts have the same effect, in a state where the arrangement or transaction is done mainly as a way to add debt financing or finance the purchase of assets.

As at December 31, 2019, all amount due from customers of road project of Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Section 4 and Serpong Cinere Toll Road were used as collateral bank loans of PT Bank BTPN Tbk (Note 5).

The Company is required to maintain financial ratios as follows: current ratio of at least 1 (one) time, maximum debt to equity ratio 3,5 (three point one) times and debt service coverage ratio at least 1 (one) time.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 1,649,934,027,778 and Rp 700,000,000,000, respectively.

10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

The company obtained a Working Capital Credit (KMK) facility amounted to Rp 750,000,000,000 and a non-cash loan facility that can be used for Supply Chain Financing (SCF), SKBDN, L/C and a bank guarantee amounted to Rp 250,000,000,000 according to addendum credit agreement No. 24 dated November 7, 2018 by Notary H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. This

telah diperpanjang sesuai Akta Notaris No. 2 tanggal 6 Nopember 2019 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., yang berlaku sampai dengan 6 Nopember 2020. Perusahaan juga memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp 750.000.000.000 sesuai Akta Perjanjian kredit No. 23 tanggal 23 Agustus 2019 oleh Notaris Fessy Farisqoh Alwi, S.H., M.Kn. Fasilitas Kredit tersebut dapat digunakan sampai dengan 23 Pebruari 2020 dan sudah dibayar lunas tanggal 21 Pebruari 2020. Perusahaan juga memperoleh fasilitas kredit *Cash Collateral* sesuai Perjanjian Kredit *Cash Collateral* No: 040/UBA-OKR/KOM/XII/2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 dan sudah dibayar lunas tanggal 31 Januari 2020.

facility can be used until November 7, 2019 and has been extended in accordance with Notarial Deed No. 2 dated November 6, 2019 of Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., which is valid until November 6, 2020. The company also obtained an additional credit facility of Rp 750,000,000,000 according to the Credit Agreement Deed No. 23 dated August 23, 2019 by Notary Fessy Farisqoh Alwi, S.H., M.Kn. The credit facility can be used until February 23, 2020 and has been paid in full on February 21, 2020. The company also obtained a Cash Collateral credit facility in accordance with the Cash Collateral Credit Agreement No: 040/UBA-OKR/KOM/XII/2019 which is valid until January 31, 2020 and has been paid in full on January 31, 2020.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank antara lain: memindah tanggakan agunan/tagihan termin; mengubah bentuk objek agunan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; penggabungan dan peleburan dengan pihak ketiga; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang, meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha debitur; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

This agreement includes restrictions where the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, such as: transferring the collateral/billing terms; changing the object of credit collateral; obtaining an investment credit facility or other loans from third parties for the same project, except for the normal operation transaction; bind itself as guarantor of the debt or mortgage the Company's financed assets that financed the property to another party; acquisition and merger and merger with third parties; apply and or encouraging others to apply to the court to be declared bankrupt or delay payment of the debt, lend money to anybody, except for results of normal business activities in the debtor's business; give up some or all of the rights and obligations of the credit facility to another party.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas pembangunan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Seksi 2 dan Jalan Tol Semarang - Batang digunakan sebagai jaminan atas utang Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Catatan 5).

As of December 31, 2019, all amount due from customers of Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung section 2 toll road project and Semarang – Batang Toll Road were used as collateral bank loans of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Note 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *current ratio* minimal 1 kali, dan *interest coverage ratio* minimal 1,5 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Under the agreement, the Company should maintain debt to equity ratio maximum 3 times, current ratio minimum 1 time, and interest coverage ratio minimum 1,5 times. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 1.594.791.279.224 dan Rp 845.000.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk amounted to Rp 1,594,791,279,224 and Rp 845,000,000,000, respectively.

11. PT Bank DKI

Pada tanggal 12 September 2018, Perusahaan menandatangani Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 143 dengan PT Bank DKI atas fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka sebesar Rp 1.000.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai 12 September 2019, yang telah diperpanjang pada tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Akta Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit No. 13 yang berlaku sampai dengan 12 September 2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 4,5 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank DKI.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan (*Design and Build*) Akses Pelabuhan Kuala Tanjung Ruas Inderapura - Kuala Tanjung digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank DKI (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 997.863.221.572 dan Rp 1.000.000.000.000.

12. PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp 1.200.000.000.000 sesuai dengan perubahan XI terhadap perjanjian kredit No. 264/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dengan sublimit fasilitas non-kas Rp 1.200.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 18 April 2019. Berdasarkan surat dari PT Bank UOB Indonesia No. 19/CBO/0025 tanggal 15 April 2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, jangka waktu fasilitas diperpanjang sampai dengan 18 Mei 2019 dan Perubahan XII Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 16, tanggal 7 Mei 2019 yang berlaku sampai dengan 18 April 2020. Fasilitas ini telah diperpanjang lagi berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No.20/CBO/023 tanggal 13 April 2020 yang berlaku sampai dengan 1 Juni 2020

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan

11. PT Bank DKI

As of September 12, 2018, the Company signed into Addendum Credit Agreement Deed No. 143 with PT Bank DKI of Fixed Term Loan Working Capital Loan amounted to Rp 1,000,000,000,000. The availability period of the facility is until September 12, 2019, which has been extended on September 6, 2019 in accordance with Addendum II (Second) Deed of Credit Agreement No. 13 which is valid until September 12, 2020.

Under the agreement, the Company should maintain debt to equity ratio maximum 4.5 times, debt service coverage ratio minimum 1 time and current ratio minimum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank DKI.

As of December 31, 2019, all amount due from costumers of the Development and Design Project Access Kuala Tanjung Port section Inderapura - Kuala Tanjung are used as collateral for the debts of PT Bank DKI (Note 5).

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank DKI amounted to Rp 997,863,221,572 and Rp 1,000,000,000,000, respectively.

12. PT Bank UOB Indonesia

The company obtained KMK facilities in the amount of Rp 1,200,000,000,000 in accordance with amendment XI to the credit agreement No. 264/05/2018 dated May 21, 2018 with a sub-facility of non-cash facilities of Rp 1,200,000,000,000. The facility can be used until April 18, 2019. Based on a letter from PT Bank UOB Indonesia No. 19/CBO/0025 dated April 15, 2019 concerning Notification of the Term of Credit Facility Extension, the facility period is extended until May 18, 2019 and Amendment to XII to Credit Agreement Number 16, May 7, 2019 which is valid until April 18, 2020. This facility has recently been extended again based on loan extension approval letter No.20/CBO/023 dated April 13, 2020, which are valid until June 1, 2020.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank among others: not change the core business of the Company. The Company should maintain important licence regarding with the Company's business (if any). Do not dispose of significant assets, there is no adverses changes to

kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progres pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar, Pembangunan Rest Area Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbanggi Besar Paket II, Bandara Juanda Surabaya, dan Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank UOB Indonesia (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Rp 907.425.974.384 dan Rp 335.666.043.122.

13. PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pemasok No. 038/SFA/MZH/0418 tanggal 30 April 2018, PT Bank Mizuho Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa komitmen kepada Perusahaan. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000.000. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan dengan 30 April 2020 sesuai dengan Perubahan No. 552/AMD/MZH/0419.

Selama Perusahaan memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada PT Bank Mizuho Indonesia, Perusahaan memiliki batasan-batasan yakni:

- a. Perusahaan tidak akan mengadakan transaksi apapun dengan afiliasi lain
- b. Menggabungkan diri dengan perusahaan lain
- c. Membubarkan struktur Perusahaan
- d. Menimbulkan atau membebankan atau mengizinkan timbulnya gadai
- e. Menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan semua usaha

the Company's financial condition. Maintain the average of direct ownership averages or indirect ownership of Government of Republic of Indonesia at least 51% during the period. Deliver the progress of monthly work on the project being financed. To submit all amount due from customers of projects funded. To submit all the litigation, arbitration or other administrative suit. To inform the bank for every change of the composition of the board of directors and the board of commissioners. To inform the bank for any failure or potential failure and to inform of other information according to the bank's request.

As of December 31, 2019, all amount due from customers of the Development of Hasanuddin Airport in Makassar, the Constructions of Rest Area at Bakauheni Terbanggi Besar Package II Toll Road Project, Juanda Airport in Surabaya, and the Revitalization of the Ragunan Student Sports Training Center Area were used as collateral bank loans of PT Bank UOB Indonesia (Note 5).

Under the agreement the Company should maintain its debt to equity ratio maximum 3 (three) times, debt service coverage ratio maximum 1 times and current ratio maximum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank UOB Indonesia.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank UOB Indonesia amounted to Rp 907,425,974,384 and Rp 335,666,043,122, respectively.

13. PT Bank Mizuho Indonesia

Based on the Supplier Financing Agreement No. 038/SFA/MZH/0418 dated April 30, 2018, PT Bank Mizuho Indonesia provides supplier financing facilities without commitment to the Company. The limit of facilities provided by the Bank is a maximum of Rp 1,000,000,000,000. The Cooperation Agreement is valid for one year up to April 30, 2020 as stated in Amendment No. 552/AMD/MZH/0419.

As long as the Company has an outstanding obligation to the PT Bank Mizuho Indonesia, the Company has limitations, namely:

- a. *The company will not hold any transactions with other affiliates*
- b. *Merge with other companies*
- c. *Dissolve the Company's structure*
- d. *Inflict or impose or permit the emergence of pawning*
- e. *Selling, leasing, moving or releasing all businesses*

- f. Secara signifikan mengubah sifat usahanya
- g. Melakukan tindakan lain yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Mizuho Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mizuho Indonesia masing-masing sebesar Rp 785.584.501.592 dan Rp 280.138.925.

14. Bank of China Ltd

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 600.000.000.000 dengan perjanjian fasilitas No. 56 tanggal 21 Agustus 2018 dan dilegalisasi oleh Notaris A. Wahono P, S.H. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 yang sudah diperpanjang sampai dengan 28 Agustus 2020.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, *arbitrase* atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan Bank of China Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank of China Ltd.

Pada tanggal 31 Desember 2019 seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Bendungan Tapin, Pembangunan Bendungan Multipurpose Karian, Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung (MYC) dan Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Phase II digunakan sebagai jaminan atas utang Bank of China Ltd (Catatan 5).

- f. Significantly changes the nature of the business
- g. Take other actions that cause the Company to be unable to fulfill obligations

The Company is required to maintain financial ratios as follows: *current ratio* of at least 1 (one) time, *maximum debt to equity ratio* 3 (three) times and *debt service coverage ratio* at least 1 (one) time. The compliance of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by the PT Bank Mizuho Indonesia.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to PT Bank Mizuho Indonesia amounted to Rp 785,584,501,592 and Rp 280,138,925, respectively.

14. Bank of China Ltd

The Company obtained a non-committed loan facility amounted to Rp 600,000,000,000 with facility agreement No. 56 dated August 21, 2018 and legalized by Notary A. Wahono P, S.H. The facility can be used until August 21, 2019 which has been extended until August 28, 2020.

This agreement covers restrictions that are not permitted by the Company without the Bank's prior written approval, including not changing the Company's business, the Company must maintain important licenses related to the Company's business (if any). Doesn't release significant assets, there are no changes that have a negative to the Company's financial condition. Maintain an average direct or indirect ownership by the Government of Indonesia of at least 51% throughout the period. Delivering monthly work progress on projects financed. Submit all bills issued for projects financed. Deliver all legal cases, *arbitrase* or other administrative cases. Inform the bank of any failure or potential failure and submit other information in accordance with Bank of China Ltd 's request.

The company is required to maintain a maximum debt to equity ratio of 3 (three) times, a maximum debt service coverage ratio of 1 time and a maximum current ratio of 1 time. Fulfillment of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by Bank of China Ltd.

As of December 31, 2019, all amount due from customer of the Tapin Dam Construction Project, Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project, Sarbagita Suwung Regional Landfill Revitalization (MYC) and Cisumdawu Phase II Toll Road Project were used as collateral bank loans of Bank of China Ltd (Note 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada Bank of China Ltd. masing-masing sebesar Rp 599.033.377.486 dan Rp 500.000.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of Company's loan to Bank of China Ltd. each amounted to Rp 599,033,377,486 and Rp 500,000,000,000, respectively.

15. PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta notaris dari Engawati Gazali, S.H., No. 39 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pemberian Fasilitas *Receivable Purchase*, dan perubahannya pada No. 179/CBL/PKS/V/2019, tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok terhadap Mitra Bisnis atas dasar invoice yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar ekuivalen Rp 1.500.000.000.000. Bunga diskonto adalah 8,95% per tahun dan akan dibebankan kepada pemasok. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 1 Mei 2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk.

16. MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 800.000.000.000 dan fasilitas pinjaman terhadap tagihan sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai dengan perjanjian kredit No. 18-0219-GC-LN tanggal 17 Desember 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan tidak diperpanjang. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 30 September 2019.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata - rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, *arbitrase* atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan MUFG Bank, Ltd atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan MUFG Bank, Ltd.

15. PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on the Notary Deed of Engawati Gazali, S.H., No. 39 dated May 24, 2018 concerning the Provision of Receivable Purchase Facilities, and Amendments to No. 179/CBL/PKS/V/2019, the Company has a cooperation agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk in connection with the purchase of receivables owned by Suppliers against Business Partners based on invoices that have been accepted by Business Partners. The limit of facilities provided by the Bank is a maximum of equivalent to Rp 1,500,000,000,000. Discount interest is 8,95% per year and will be charged by the supplier. The Cooperation Agreement is valid for one year up to May 1, 2020.

The Company are required to maintain financial ratios as follows: *current ratio* of at least 1 (one) time, *maximum debt to equity ratio* 3 (three) times and *debt service coverage ratio* at least 1 (one) time. Compliance with bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by the PT Bank OCBC NISP Tbk.

16. MUFG Bank, Ltd.

The Company obtained a uncommitted loan facility amounted to Rp 800,000,000,000 and loan against invoice facility amounted to Rp 300,000,000,000 according to credit agreement No. 18-0219-GC-LN dated December 17, 2018. The facility can be used until December 17, 2019 and not extended. This loan has been paid in full on September 30, 2019.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, among others: do not change the Company's business, the Company must maintain a important licenses related to the business of the Company (if any). Do not dispose significant assets, there are no adverse changes in Company's financial condition. Keeping the average ownership directly or indirectly, by the Government of Indonesia for at least 51% over the period. Delivering monthly progress of work on the project financed. Submit the bill issued on the project financed. Delivering the entire case law, *arbitrase* or other administrative matters. Notify the MUFG Bank, Ltd for any failure or potential failure and convey other information as requested by the MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh MUFG Bank, Ltd.

Under the agreement the Company should maintain a maximum debt equity ratio of 3 (three) times and a maximum of 1 time for the current ratio. Fulfillment restrictions on bank lending is reported by the Company at end of the year and will be evaluated by the MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada MUFG Bank, Ltd. masing-masing sebesar Rp 827.110.410 dan Rp 168.112.661.042.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan to MUFG Bank, Ltd. amounted to Rp 827,110,410 and Rp 168,112,661,042, respectively.

17. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah

17. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit

Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000 sesuai Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. 038/OL/CBGII/II/19 tanggal 12 Pebruari 2019. Fasilitas tersebut dapat digunakan hingga 20 Desember 2020.

The Company obtained a Financing Facility of Musyarakah Special Transaction amounted to Rp 500,000,000,000 according to Extension Letter of Financing Facility No. 038/OL/CBGII/II/19 dated February 12, 2019. The facility can be used until December 20, 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 3B (Catatan 5).

These loans are collateralized with all amount due from customer of Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Package IV Section 3B (Note 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 100%.

The Company should maintain interest bearing debt to equity ratio maximum 3 times, interest service coverage ratio minimum 1.5 times and current ratio minimum 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar Nihil dan Rp 500.000.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of Company's loan to PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit amounted to Nil and Rp 500,000,000,000, respectively.

18. Sindikasi Tol Cinere Serpong

18. Syndication Cinere Serpong Toll Road

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, S.H. dan Perubahan I Atas Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 23 April 2018 No. 1 tanggal 31 Agustus 2018, perusahaan telah memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 1.480.000.000.000. Suku bunga yang berlaku adalah sebesar JIBOR 1 M ditambah dengan margin per tahun, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 18 bulan dari tanggal Perjanjian fasilitas. Pinjaman ini dibayar lunas pada tanggal 23 Oktober 2019.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 20 dated April 23, 2018 from Notary Pratiwi Handayani, S.H. and Amendment I To Credit Agreement No. 20 dated April 23, 2018 No. 1 dated August 31, 2018, the Company has obtained a syndicated credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 1,480,000,000,000. The applicable interest rate is JIBOR 1 M plus a margin per year, with a facility period of up to 18 months from the date of the Facility agreement. This loan has been paid in full on October 23, 2019.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank. Jaminan yang diberikan secara paripasu pada untuk fasilitas kredit ini adalah tagihan/piutang dari proyek yang dibiayai diikat fidusia dengan nilai objek jaminan sebesar 100% dari nilai kontrak dan tagihan atas pendapatan klaim asuransi proyek yang dibiayai diikat secara Fidusia.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1,5 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 1,00 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Nihil dan Rp 267.189.000.000; PT Bank DBS Indonesia sebesar Nihil dan Rp 178.126.000.000; dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Nihil dan Rp 81.685.000.000.

19. PT Bank BNI Syariah

Berdasarkan Akta notaris dari M. Kholid Artha, S.H., No. 25 tanggal 5 April 2018 tentang Addendum Akad Kafalah Bil Ujroh dan perubahannya pada No. 014/ADD-ADMP/2019, tanggal 26 April 2019, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank BNI Syariah sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok terhadap Mitra Bisnis atas dasar *invoice* yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar ekuivalen Rp 500.000.000.000. Bunga diskonto adalah 8,00% per tahun dan akan dibebankan kepada pemasok. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 4 April 2020. Sampai dengan tanggal pelaporan, addendum perjanjian masih dalam proses.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* minimal 4 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Bendungan Komerling II/Tiga Dihaji Paket II digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank BNI Syariah (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BNI Syariah masing-masing sebesar Nihil.

The fulfillment of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by the bank. The guarantees that are extended extensively for this credit facility are bills/receivables from projects financed by a fiduciary with a collateral object value of 100% from the contract value and a claim for project insurance claim financed by Fiduciary.

The Company is required to maintain a maximum of 3 times the debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio, a minimum interest service coverage ratio of 1.5 times, a minimum debt service coverage ratio of 1.5 times and a current ratio of at least 1.00 time.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of the Company's loans to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Nil and Rp 267,189,000,000; PT Bank DBS Indonesia amounted to Nil and Rp 178,126,000,000; and PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Nil and Rp 81,685,000,000, respectively.

19. PT Bank BNI Syariah

Based on the Notary Deed of M. Kholid Artha, S.H., No. 25 dated April 5, 2018 concerning Addendum Akad Kafalah Bil Ujroh and the amendment to No. 014/ADD-ADMP/2019, dated April 26, 2019, the Company has a cooperation agreement with PT Bank BNI Syariah in connection with the purchase of receivables owned by the Supplier against the Business Partner on the basis of the invoice that has been accepted by the Business Partner. The facility limit provided by the Bank is a maximum of equivalent Rp 500,000,000,000. The discounted interest is 8.00% per annum and will be charged to the supplier. The Cooperation Agreement is valid for a period of one year until April 4, 2020. Up to the reporting date, the addendum to the agreement is still in process..

Under the agreement, the Company should maintain debt to equity ratio minimum 4 (four) times and current ratio minimum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of December 31, 2019, all amount due from customers of the Komerling II/Tiga Dihaji Package II Dam Project was used as collateral bank loans of PT Bank BNI Syariah (Note 5).

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of the Company's loans to PT Bank BNI Syariah amounted to Nil, respectively.

Entitas Anak – WBP

1. PT Bank BRISyariah Tbk

Berdasarkan perjanjian pemberian *line facility* Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan pembiayaan No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Plafon Rp 600.000.000.000;
- b. Plafon perpanjangan Rp 495.000.000.000;
- c. Jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan sejak penandatanganan perpanjangan atau maksimal sampai dengan Pebruari 2020;
- d. Nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi *expense yield Bank* saat ini sebesar 9% efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) berlangsung maka WBP tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS:

- a. Mengadakan merger dengan Perusahaan lain;
- b. Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham;
- c. Mengubah bentuk atau status badan hukum perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;
- d. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;
- e. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah;
- f. Menjual sebagian atau seluruh aset Perusahaan, di luar kegiatan operasional Perusahaan.

Selama masa pembiayaan di BRIS berlangsung maka WBP wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada BRIS sebelum melakukan tindakan-tindakan di bawah ini:

- a. Memperoleh atau menambah pinjaman dari Bank atau institusi Keuangan lain
- b. Mengubah susunan pengurus Perusahaan
- c. Melakukan investasi (*capital expenditure*) sama dengan atau lebih besar dari persentase aset Perusahaan

Fasilitas ini dijaminkan dengan:

1. Jumlah piutang kepada Perusahaan dan/atau tagihan WBP selain kepada Perusahaan (dengan persetujuan PT Bank BRISyariah Tbk), sebagai *bouwheer* atas kontrak-kontrak pekerjaan yang menjadi *underlying* pencairan di PT Bank BRISyariah Tbk.

Subsidiary – WBP

1. PT Bank BRISyariah Tbk

Based Musyarakah facility agreement No. 13 dated October 17, 2016, and this facility has recently been extended based on the loan extension approval letter No. B.101/OL/CBG/VIII/2018 dated August 23, 2018, with the following conditions:

- a. Initial ceiling of Rp 600,000,000,000;
- b. Extension ceiling of Rp 495,000,000,000;
- c. Facility period is a maximum of 18 months from the signing of the extension or up to February 2020;
- d. The profit sharing ratio will be determined later when disbursing with an indication that the current bank yield is 9% effective per year.

During the financing period at PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), WBP are not permitted to carry out the following actions without written consent from BRIS:

- a. Hold a merger with another company;
- b. Pay/pay off part or all of the loan from the shareholders;
- c. Change the form or status of the legal entity of the company, amending the Company's articles of association, transferring recipients or shares both among shareholders and other parties;
- d. Appoint, lease and transfer assets guaranteed to creditors or other parties;
- e. Make new investments in business fields that are not directly related to the customer's core business;
- f. Sells part or all of the Company's assets, excluding the Company's operational activities.

During the financing period at BRIS, WBP must provide written notification to BRIS before taking the following actions:

- a. Obtain or add a loan from a bank or other financial institution
- b. Change the management of the Company
- c. Make an investment (*capital expenditure*) equal to or greater than percentage of the Company's assets.

This loan facility are secured with:

1. Total bill/receivable to the Company and/or other than the Company (with approval from PT Bank BRISyariah Tbk), as customer based on contract agreement as *underlying* for drawdown in PT Bank BRISyariah Tbk.

2. Persediaan berupa material yang dibeli dengan pembiayaan PT Bank BRIsyariah Tbk melalui skema pra proyek pendanaan.

Nilai fidusia atas jaminan berupa tagihan dan persediaan adalah minimal 125% dari *plafond* fasilitas atau Rp 750.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BRIsyariah masing-masing sebesar Rp 512.000.000.000.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 tanggal 12 Nopember 2019, telah disetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit WBP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas *Receivable Financing (RF) Sublimit Non Cash Loan* dengan Limit Rp 500.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 Nopember 2020, dengan suku bunga *PO Financing* 8,75% dan *Invoice Financing* 8,50%, Agunannya adalah agunan *fixed aset* berupa pabrik Produksi beton precast di Bojonegara, Serang berupa tanah seluas 58.677 m² dengan nilai pengikatan sebesar Rp 200.000.000.000. Agunan *non fixed aset* adalah piutang dan persediaan yang akan diikat fiducia masing-masing sebesar Rp 170.000.000.000 dan Rp 255.000.000.000.
- Fasilitas *No Cash Loan (Bank Garansi) Sublimit* dari Fasilitas *Receivable Financing* dengan limit Rp 100.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 Nopember 2020, agunan dikaitkan dengan agunan fasilitas *Receivable Financing*.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing - masing sebesar Rp 435.863.758.291 dan Nihil.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan surat No. R-II-127-ADK/DKR-2/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, WBP memperoleh fasilitas kredit dari BRI berupa KMKK sebesar Rp 1.000.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 30 Mei 2016 dan jatuh tempo 29 Mei 2017, berdasarkan perjanjian kredit No. 116 tanggal 30 Mei 2016 dengan suku bunga 10% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. R.II.120-ADK/DKR-2/06/2017 tanggal 12 Juni 2017, dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan tanggal 30 Mei 2018. Fasilitas ini telah diperpanjang lagi

2. *Material inventory bought under financing of from PT Bank BRIsyariah Tbk with pre-project financing scheme.*

Fiduciary value with collateralized bill and inventory are minimum 125% from the plafond or equivalent to Rp 750,000,000,000.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank BRIsyariah amounted to Rp 512,000,000,000, respectively.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on a letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 dated November 12, 2019, an extension of the WBP credit facility has been approved with the following terms and conditions:

- *Receivable Financing (RF) Facilities for Sublimit Non Cash Loans with a Limit of Rp 500,000,000,000, the period up to November 14, 2020, with PO Financing 8.75% interest and Invoice Financing 8.50%. The collateral is the fixed asset collateral a precast concrete production plant in Bojonegara, Serang in the form of land area of 58,677 sqm with binding value of Rp 200,000,000,000. Non-fixed collateral assets are receivables and inventories that will be bound by fiducia are Rp 170,000,000,000 and Rp 255,000,000,000, respectively*
- *Facility of No Cash Loan (Bank Guarantee) Sublimit from Receivable Financing Facility with a limit of Rp 100,000,000,000, the period up to November 14, 2020, collateral is associated with collateral for Receivable Financing facilities.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 435,863,758,291 and Nil, respectively.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

According to the letter No. R-II-127-ADK/DKR-2/5/2016 dated May 30, 2016, WBP entered into the credit facilities from BRI in the form of KMKK Rp 1,000,000,000,000 the term of loan is for 12 months since May 30, 2016 and will be due on May 29, 2017, based on loan agreement No. 116 dated May 30, 2016 with an interest rate of 10% per annum (p.a.). This facility has recently been extended based on loan extension approval letter No. R.II.120-ADK/DKR-2/06/2017 dated June 12, 2017, with a term of 12 months until May 30, 2018. This facility has recently been extended again

berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. R.II.149-OPK/DKD/06/2019 tanggal 11 Juni 2019, dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, dengan suku bunga 9,50% per tahun.

based on loan extension approval letter No. R.II.149-OPK/DKD/06/2019 dated June 11, 2019, with a term of 12 months until May 30, 2020, with an interest rate of 9.50% per annum.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

The loan facility is collateralized and bounded with:

- a. Tagihan atas Proyek Tol Solo Kertosono yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 690.669.000.000.
- b. Tagihan atas Proyek *Light Rapid Transit* yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 301.209.000.000.
- c. Tagihan atas Proyek Pengaman Pantai yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 108.578.000.000.
- d. Tagihan atas Proyek Jalan Tol Manado Bitung yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 122.352.000.000.
- e. Tagihan atas Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 180.442.000.000.
- f. Tagihan atas proyek Proyek Jalan Tol Pemalang Batang yang akan diikat dengan *cessie* sebesar Rp 481.162.000.000.
- g. Proyek-proyek WBP yang akan dibiayai oleh Bank minimal mencover 120%.
- h. Tanah di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah diikat Hak Tanggungan dengan No. 1249/2017 senilai Rp 41.651.000.000 atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasing, 334/Gasing, dan 325/Gasing (Catatan 16).

- a. *Amount due from customer of Solo Kertosono Toll Road Project with cessie amounted to Rp 690,669,000,000.*
- b. *Amount due from customer of Light Rapid Transit Project with cessie amounted to Rp 301,209,000,000.*
- c. *Amount due from customer of Pengaman Pantai Project with cessie amounted to Rp 108,578,000,000.*
- d. *Amount due from customer of Manado Bitung Toll Road Project with cessie amounted to Rp 122,352,000,000.*
- e. *Amount due from customer of Pejagan Pemalang Toll Road project with cessie amounted to Rp 180,442,000,000.*
- f. *Amount due from customer of Pemalang Batang Toll Road project with cessie amounted to Rp 481,162,000,000.*
- g. *The projects of WBP that will funded by the Bank, should covered at least 120%.*
- h. *Land located in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin, South Sumatera, has been tied by Mortgage Right No. 1249/2017 amounted to Rp 41,651,000,000 with Building Use Right No. 324/Gasing, 326/Gasing, 327/Gasing, 328/Gasing, 329/Gasing, 331/Gasing, 342/Gasing, 343/Gasing, 334/Gasing, and 325/Gasing (Notes 16).*

Pembatasan terhadap tindakan:

Restriction of covenant:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
3. Menyewakan aset yang dijaminakan di bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham/utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.

1. *Binds itself as a collateral against the other party and/or pledging Debtor wealth to other parties, except those already existing.*
2. *Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare itself insolvent debtor.*
3. *Lease the tangible assets in banks or other financial institutions.*
4. *Repay the debt to shareholders/limited company's debt before the bank repays the debt in advance.*

5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset Perusahaan;
6. Menerima Pinjaman/pembiayaan baru dari BRI atau lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 379.099.999.999 dan Rp 670.359.467.938.

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/094/R tanggal 10 Juni 2015, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja *revolving* Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja *revolving* tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 150 tanggal 22 Juni 2018. Fasilitas telah diperpanjang berdasarkan Persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/146/R sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
- Kredit modal transaksional Rp 300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal transaksional tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 151 tanggal 22 Juni 2018. Fasilitas telah diperpanjang berdasarkan Persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/146/R sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
- Kredit modal kerja *supply chain financing* (SCF), bank garansi dan *letter of credit* (L/C) atau SKBDN Rp 300.000.000.000, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak tanggal 23 Juni 2015 dan jatuh tempo 23 Juni 2016. Kredit modal kerja SCF tersebut telah diaktanotariskan berdasarkan perjanjian kredit No. 152 tanggal 22 Juni 2018. Fasilitas telah diperpanjang berdasarkan Persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BIN/2.2/146/R sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m², terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama WBP senilai Rp 66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 16) akan diikat Hak Tanggungan (HT).

5. Perform mergers, acquisitions, *go public* and sell the Company's assets;
6. Receive new loans/financing from BRI or other financial institutions.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan of WBP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 379,099,999,999 and Rp 670,359,467,938, respectively.

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

According to letter No. BIN/2.2/094/R dated June 10, 2015, WBP entered into the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- *Revolving working capital loan* amounted to Rp 50,000,000,000, the term of loan for 12 months since June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. *Revolving working capital loan* has been annotated based on loan agreement No. 150 dated June 22, 2018. The facility has been extended based on the letter of approval for extension of credit facility No. BIN/2.2/146/R up to June 22, 2020.
- *Transactional working capital loan* amounted to Rp 300,000,000,000, the term of loan for 12 months since June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. *Transactional working capital loan* has been annotated based on loan agreement No. 151 dated June 22, 2018. The facility has been extended based on the letter of approval for extension of credit facility No. BIN/2.2/146/R up to June 22, 2020.
- *Working capital supply chain financing* (SCF), bank guarantee and *letter of credit* (L/C) or SKBDN, working capital loan of Rp 300,000,000,000, the term of loan for 12 months since date of June 23, 2015 and will be due on June 23, 2016. SCF has been annotated based on loan agreement No. 152 dated June 22, 2018. The facility has been extended based on the letter of approval for extension of credit facility No. BIN/2.2/146/R up to June 22, 2020.

The loan facilities are collateralized and bounded with:

- A plot of land and a building, with an area of 40,196 sqm, located at Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, West Java under the name of WBP amounted to Rp 66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 16) will be tied by Guarantee Right.

- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099 m², terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama WBP (dahulu atas nama Perusahaan) senilai Rp 88.340.004.000 (Catatan 16) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02/Kalijaya berlaku sejak tanggal 16 Februari 1988 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2018, dengan luas 16.620m², terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 58.218.498.201 (Catatan 16) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp 299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 16) yang akan diikat secara fidusia.
- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 130.296 m², terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 137.721.233.566 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 14) sudah diikat Hak Tanggungan (HT)..
- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp 175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC. KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Piutang usaha WBP pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 240.461.410.753 yang akan diikat secara fidusia.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:

- A plot of land and a building with land use rights (SHGB) No. 38 dated January 22, 2015 and the right will expired on January 16, 2045, an area of 70,099 sqm, located at Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, West Java, under the name of WBP (formerly under the name of the Company) amounted to Rp 88,340,004,000 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.
- A plot of land and a building with land use rights (SHGB) No. 02/Kalijaya dated February 16, 1988 and the right will expired on February 16, 2018, an area of 16,620 sqm, located at Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, West Java, under the name of the Company amounted to Rp 58,218,498,201 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.
- Equipment/machine/heavy equipment at Karawang Plant, Desa Klari, Kabupaten Karawang, West Java amounted to Rp 299,866,478,836 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 16) will be tied by fiduciary.
- A plot of land and building, covering an area of 130,296 sqm, located at Curug Village, Klari District, Karawang Regency, West Jawa under the name of the Company amounted to Rp 137,721,233,566 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by Guarantee Right.
- Equipment/machine/heavy equipment at Sidoarjo Plant, Desa Kedungwonokerto, East Java amounted to Rp 175,490,704,294 according to Consultan KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 will be tied by fiduciary.
- Trade accounts receivable of WBP as of December 31, 2017 amounted to Rp 240,461,410,753 will be tied by fiduciary.

Restriction of covenant:

1. Changing business activities as stated in the article of association that can reduce the ability to pay off the credit facility.
2. Sell or transfer all or a part of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:

- Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:
- Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.
5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 150.000.000.000 dan Rp 350.000.000.019.

5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 53, 57 dan 61 tanggal 25 Mei 2018 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupa kredit modal kerja kontraktor, yang masing-masing peruntukannya adalah sebagai modal kerja pengadaan material *precast* dan *readymix* proyek Tol Cinere – Serpong

- *Selling or transferring assets with the provisions that are arm's length for the purpose to perform daily business activities.*
 - *Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality.*
 - *Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result*
 - *Selling or transferring assets that are not useful or are not used anymore with the requirements of arm's length.*
3. *Changing the operation of a current business that may cause material results unless required by applicable law.*
4. *Merging, combining, separation, liquidation or reconstruction of the Company except the following requirements:*
- *Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as it does not have a material result.*
 - *The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements.*
 - *Corporate actions required by applicable laws and regulations.*
 - *Separation which the Company becomes the major shareholder.*

3. *Changing the operation of a current business that may cause material results unless required by applicable law.*

4. *Merging, combining, separation, liquidation or reconstruction of the Company except the following requirements:*

- *Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as it does not have a material result.*
- *The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements.*
- *Corporate actions required by applicable laws and regulations.*
- *Separation which the Company becomes the major shareholder.*

5. *Changes of association that can lead to a material result.*

6. *Proposing a file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.*

7. *Obtaining loans from other banks or financial institutions.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 150,000,000,000 and Rp 350,000,000,019, respectively.

5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on the Deed of Cooperation Agreement No. 53, 57 and 61 dated May 25, 2018 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, WBP obtained a credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in the form of contractor working capital credit, each of which is used as working capital procurement of precast and readymix materials for

sebesar Rp 200.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 8 bulan, SKBDN untuk pembelian bahan baku/perengkapan sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 27 April 2019, dan sebagai modal kerja pengadaan material *precast* dan *readymix* proyek Tol Cibitung – Cilincing sebesar Rp 400.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 16 Nopember 2019. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 21 Nopember 2019.

Masing-masing fasilitas ini dijamin dengan *cassie* atas tagihan termin/pembayaran berdasarkan SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 28 September 2017, *cassie* atas tagihan termin pembayaran berdasarkan SPM No. 09/SPPM/WK/DVII/2017 tanggal 25 September 2017.

Pembatasan:

1. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi yang lazim;
2. Mengikat diri sebagai penjamin dan atau menjamin harta;
3. Melakukan merger dan akuisisi;
4. Melunasi hutang kepada pemegang saham;
5. Membubarkan Perusahaan atau meminta dinyatakan pailit;
6. Memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga.
7. Memberitahu secara tertulis kepada Bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) masing-masing sebesar Nihil dan Rp 600.000.000.000.

6. PT Bank DKI

Berdasarkan Perjanjian Layanan Pembayaran antara PT Bank DKI dengan WBP tentang Pemberian Fasilitas *Supply Chain Financing* No. 04/PKS/DIR/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, WBP memperoleh fasilitas *Supply Chain Financing* maksimum Rp 300.000.000.000 sampai dengan 15 Juni 2020.

Pembatasan:

1. Melakukan Adendum Kontrak pengadaan material *precast* dan *readymix* dalam pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated.
2. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijamin ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan Perseroan yang sudah dijamin ke Bank DKI kepada pihak lain.

the Cinere - Serpong Toll Road project amounted to Rp 200,000,000,000, with a loan period of 8 months, SKBDN for the purchase of raw materials/equipment amounted to Rp 100,000,000,000 with a period of up to April 27, 2019, and as working capital for procurement of precast and readymix materials for Cibitung - Cilincing Toll Project of Rp 400,000,000,000, with a loan period of up to November 16, 2019. This loan has been paid in full on November 21, 2019.

This loan facility is secured with Cassie on account receivables from SPPM No. 10/SPPM/WK/DVII/2017 dated September 28, 2017, cassie on account receivables from SPM No. 09/SPPM/WK/DVII/2017 dated September 25, 2017.

Negative covenants:

1. *Obtained credit facilities from others related to the project except the credit facility from the shareholders and common transactions;*
2. *Binds itself as surety and/ or pledging the Company's assets;*
3. *Hold a merger and acquisition;*
4. *Pay off the loan from the shareholders;*
5. *Liquidation of corporate or propose file bankruptcy;*
6. *Transferring in any form to a third party;*
7. *The Company must provide written notification to the Bank regarding the issuance of the new shares and selling the existing shares.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank Tabungan Negara (Persero) amounted to Nil and Rp 600,000,000,000, respectively.

6. PT Bank DKI

Based on Payment Service Agreement between PT Bank DKI and WBP regarding the Supply Chain Financing Facility No. 04/PKS/DIR/VIII/2019 dated August 14, 2019, WBP obtained a Supply Chain Financing facility with a maximum of Rp 300,000,000,000 up to June 15, 2020.

Negative Covenant:

1. *Conduct Addendum Contract for the procurement of precast and readymix materials in the construction of the Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road.*
2. *Transferring the right to collateral that has been pledged to Bank DKI to another party*
3. *Binding themselves as guarantor of debt or pledging the Company's assets that have been pledged to Bank DKI to other parties*

4. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 580.000.000.000 dan Rp 644.200.000.000.

7. PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 28 Agustus 2019 dari PT Bank UOB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia berupa fasilitas *Letter of Credit (LC)* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000, dengan jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha dengan nilai *loan-to-value* tidak melebihi 80% dari nilai pendaftaran atau nilai penjaminan.

Pembatasan:

Menjaminkan aset tetap kepada pihak lain, kecuali terhadap:

- a. Aset tetap yang saat ini telah dijamin kepada kreditur BUMN sebelum penggunaan fasilitas di Bank, kecuali atas aset yang saat ini telah dijamin kepada CIMB Niaga dimana harus dilepaskan/roya sebelum penggunaan fasilitas di Bank.
- b. Aset tetap yang hanya dapat dijamin untuk menjamin pinjaman jangka panjang atau pinjaman investasi (jika ada) kepada pemberi pinjaman.

WBP diwajibkan untuk mempertahankan *interest service coverage ratio* minimal 3 kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Rp 340.000.000.000 dan Nihil.

8. PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Berdasarkan perubahan pertama atas Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0494 tanggal 18 Desember 2019, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk sebagai berikut:

1. *Loan on note 1* untuk tujuan modal kerja sebesar Rp 250.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 dengan suku bunga 9% per tahun.

4. *Transferring / surrendering to other parties, in part or in whole for rights and obligations arising in connection with Debtor credit facilities at Bank DKI.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank DKI amounted to Rp 580,000,000,000 and Rp 644,200,000,000, respectively.

7. PT Bank UOB Indonesia

Based on the Letter of Offer dated August 28, 2019 from PT Bank UOB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank UOB Indonesia in the form of Letter of Credit (LC) and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) up to the principal amount of Rp 500,000,000,000, with a maturity date of August 22, 2020.

This facility is collateralized by trade receivables with a loan-to-value not exceeding 80% of the registration value or guarantee value.

Negative Covenant:

Securing fixed assets to other parties, except for:

- a. *Fixed assets that have now been pledged to BUMN creditors prior to the use of facilities at the Bank, except for assets that have now been pledged to CIMB Niaga which must be released/roya before the use of facilities at the Bank.*
- b. *Fixed assets that can only be guaranteed to guarantee long-term loans or investment loans (if any) to lenders.*

Under the agreement, WBP should maintain interest service coverage ration minimum 3 times, debt to equity ratio maximum 2.5 times and current ratio minimum 1 time.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank UOB Indonesia amounted to Rp 340,000,000,000 and Nil, respectively.

8. PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Based on the first amendment to Facility Agreement No. SMBCI/NS/0494 dated December 18, 2019, WBP obtained a credit facility from PT Bank BTPN Tbk as follows:

1. *Loan on note 1 for working capital purposes amounted to Rp 250,000,000,000, with a term of 12 months until October 30, 2020 with an interest rate of 9% per annum.*

2. *Commercial LC* untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis WBP melalui penerbitan *LC* dan *LC usance* lokal, *sight*, *LC usance*, *payable at sight* (*LC UPAS*), *LC usance payable at usance* (*LC UPAU*) sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.
3. *Acceptance* untuk tujuan akseptasi *LC usance* ataupun *LC* lokal sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu enam (6) bulan.
4. *Loan on note trust receipt* untuk tujuan pembayaran *LC* ataupun *LC* lokal sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal jatuh tempo *LC* atau apabila lebih singkat dapat diperpanjang hingga enam (6) bulan dari tanggal penerbitan *LC* ataupun *LC* lokal, dengan suku bunga 9% per tahun.
5. *Guarantee* untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk *payment bond*, *bid bond*, *performance bond*, dan *maintenance bond*, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan namun tidak termasuk periode klaim 30 hari kalender.
6. *Loan on note account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.
7. *Loan on note discounted account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp 1.062.500.000.000 atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia.

Pembatasan:

1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya;
2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;
3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;

2. *Commercial LC* for purposes of importing or local purchasing of raw materials or equipment for WBP business activities through the issuance of *LC* and *LC local usance*, *sight*, *LC usance*, *payable at sight* (*LC UPAS*), *LC usance payable at usance* (*LC UPAU*) amounted to Rp 850,000,000,000, with the term of 12 months until October 30, 2020.
3. *Acceptance* for acceptance purposes of *LC usance* or local *LC* of Rp 850,000,000,000, with the term of six (6) months.
4. *Loan on note trust receipt* for payment of *LC* or local *LC* of Rp 850,000,000,000, with the term of three (3) months from the *LC* due date or if shorter and may be extended to six (6) months from the date of issuance of *LC* or local *LC* with interest rate of 9% per annum.
5. *Guarantee* for issuance of bank guarantee in the form of *payment bond*, *bid bond*, *performance bond*, and *maintenance bond*, in connection with the borrower's business amounted to Rp 850,000,000,000, with a period of 12 months but excluding the 30-days calendar claim period.
6. *Loan on note account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp 850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is nonextendable and interest rate 8.8% per annum.
7. *Loan on note discounted account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp 850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is nonextendable and interest rate 8.8% per annum.

These loan facilities are collateralized by all current or future trade accounts receivable with minimum collateral value amounted to Rp 1,062,500,000,000 or 125% of the combined limit and which has been tied by fiduciary.

Negative covenants:

1. Installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets;
2. Sell, transfer, or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower;
3. Sell, transfer, or dispose of its receivables with resource;

4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau
5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 333.605.049.438 dan Rp 486.714.847.274.

9. PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018, WBP memperoleh *Revolving Financing iB* (Baru) sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani, dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Surat No. 254/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
4. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
5. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar;
6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank;
7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan/ atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/ atau pemegang saham pengendali Perusahaan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;

4. Entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (*set off*) or the possibility of combining multiple accounts;

5. Hold priority setting receipts have the same effect.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan of WBP to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 333,605,049,438 and Rp 486,714,847,274, respectively.

9. PT Bank Permata Tbk

According to the Agreement of Finance Method of Musyarakah Mutanaqisah No. 18 dated July 26, 2018, WBP obtained *Revolving Finance iB* (New) amounted to Rp 300,000,000,000, the loan term for 12 months since signing with the pricing equivalent to 9,25% per annum. This agreement has been extended in accordance with the Letter No. 254/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2019 until July 26, 2020.

Restriction of covenant:

1. Binds itself as surety against the other party, except in order to perform daily business activities;
2. Change the business activities or run the new business opening other than an existing business;
3. Mortgaging, transferring, leasing, submitting collateral to the other party;
4. Provide loans or other financial facility to or from the other party except for short-term and in order to drive the daily business activities;
5. Make new investments that could affect to the payment quality;
6. Taking actions that could affect the obligation to the bank;
7. Liquidation of corporate, business combination, and/ or merger with other Company or obtain the part of other Company's assets or other business changes;
8. Change the form and quantities of the shareholder (except Stated Owned Enterprise), pay or declare of dividend or distribute the gain in any form of shares issued;

9. Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan surat No. 0050/SK/CB3/WB/4/2019 tanggal 18 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan *waiver* atas pembayaran dividen tahun 2019.

Berdasarkan surat No. 239/WBP/DIR/2019 tanggal 15 April 2019, Bank Permata memberikan persetujuan *waiver* atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar Rp 300.000.000.000.

10. PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp 300.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2,0% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang lagi berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. MKT/EXT/128/VII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha dari proyek Perusahaan untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perusahaan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
 - Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan *arm's length* dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik menurut jenis, sifat, kualitas;
 - Menjual atau mengalihkan aset untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan aset tidak memiliki hasil material;

9. *Repay the bills or receivables that will given now and/ or later from shareholders.*

Based on the letter No. 0050/SK/CB3/WB/4/2019 dated April 18, 2019, Bank Permata approved to waive restriction concerning payment of dividends in 2019.

Based on the letter No.239/WBP/DIR/2019 dated April 15, 2019, Bank Permata approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 300,000,000,000, respectively.

10. PT Bank CTBC Indonesia

Based on letter No. MKT/EXT/138/VII/2017 dated July 12, 2017, WBP obtained credit facility from CTBC in the form of working capital loan amounted to Rp 300,000,000,000, with the term of 12 months from July 12, 2017 until July 12, 2018 with an interest rate of JIBOR+2.0% per annum. This facility has recently been extended again based on loan extension approval letter No. MKT/EXT/128/VII/2019 dated August 13, 2019, with a term of 12 months until August 15, 2020.

This loan facility is colateralized by trade accounts receivable from the Company project for a Government project for minimum of 100% of current outstanding loan which ties by fiduciary. The list of trade accounts receivable will be updated every 6 months.

Negative covenants or restrictions:

1. *Changing the business activities as stated in the Company's article of association that could reduce the ability to pay off the credit facility.*
2. *Sell or transfer all of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:*
 - *Selling or transferring assets under arrangement that are at arm's length and in order to run the daily business activities;*
 - *Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, quality;*
 - *Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result;*

- Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan *arm's length*; dan
 - Penjualan pengalihan aset per tahun melebihi Rp 500.000.000.000.
3. Mengubah operasional bisnis saat ini yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
4. Penggabungan, pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi Perusahaan kecuali persyaratan sebagai berikut:
- Reorganisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material;
 - Tindakan Perusahaan dengan anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan;
 - Perusahaan akan bertahan sebagai badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar.
5. Perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;
7. Usulkan berkas kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang; dan
8. Melunasi utang kepada pemegang saham/utang Perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank CTBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 300.000.000.000.

11. MUFG Bank, Ltd.

Berdasarkan surat No.0187/CF/CDU-NJ/RAD/18 tanggal 26 Juli 2018, WBP memperoleh fasilitas kredit berupa kredit modal kerja sebesar Rp 500.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan sublimit untuk Fasilitas Impor/Lokal LC (*Sight/Usance*) dibatasi sampai dengan Rp 150.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai 26 Juli 2019 dengan suku bunga ICE LIBOR untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan margin yang berlaku

- *Selling or transferring assets that are not useful or are not anymore used with the requirements of arm's length; and*
- *Selling of transferring assets per year exceeding of Rp 500,000,000,000.*

3. *Changing the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law*

4. *Merging, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization except the following requirements:*

- *Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as the impact is not material;*
- *The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements;*
- *The Company will survive as legal entity and will have the legal status after the corporate action; and*
- *Separation which the Company becomes the mayor shareholder.*

5. *Changes in the Articles of Association that can lead to material impact;*

6. *Bind itself as a collateral against the other party and/ or pledging the Company's assets to other parties, except those that are already existing;*

7. *Proposing a file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties; and*

8. *Repay the debt to shareholders/ limited company's debt before the bank repays the debt in advance.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 300,000,000,000, respectively.

11. MUFG Bank, Ltd.

According to Letter No. 0187/CF/CDU-NJ/RAD/18 dated July 26, 2018, WBP obtained the credit facilities in the form of working capital credit amounted to Rp 500,000,000,000 or its equivalent in United States Dollars Currency, with sublimit for Import/Local LC (Sight/Usance) Facility is limited up to Rp 150,000,000,000, the loan term for 12 month since date of July 26, 2018 until July 26, 2019 with the interest rate of ICE LIBOR for Relevant Interest Period plus applicable margin for loan in USD and JIBOR

untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan JIBOR untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku baik untuk USD maupun Rupiah sebesar 2,50% per tahun.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset debitur, kecuali dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
2. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari yang sesuai dengan anggaran dasar Debitur.
3. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

Ketentuan pinjaman berdasarkan addendum mengenai ketentuan komersial yang berlaku terhadap fasilitas SCF sebagai berikut:

1. Jenis fasilitas adalah fasilitas pembiayaan pemasok.
2. Batas fasilitas sebesar Rp 100.000.000.000.
3. Tujuan fasilitas untuk membiayai kebutuhan modal kerja pemasok atau sub kontraktor dari obligor berdasarkan program pembiayaan pemasok.
4. Periode ketersediaan adalah 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018.
5. Ongkos pendanaan +1,1% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia.

Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 0065/CF/CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC tanggal 26 Juli 2019, jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2020 dan terdapat 2 fasilitas:

1. Fasilitas Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC dengan limit sebesar Rp 150.000.000.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021.
2. *Foreign Exchange Forward/SWAP* dengan limit sebesar USD 500.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada MUFG Bank, Ltd masing-masing sebesar Rp 245.000.000.000 dan Rp 450.000.000.000.

for Relevant Interest Period plus Applicable Margin for Loan in IDR. Applicable margin in USD or IDR is amounted to 2.50% per annum.

Restriction of covenant:

1. *Sale, Lease, Transfer or other means dispose of, or grant any security interest over, any of the Borrower's assets, except in its ordinary course of business.*
2. *Acquire by purchase or by other means any assets, except in its ordinary course of business in compliance with the Article of Association of the Borrower.*
3. *Act as a guarantor or perform any acts with similar effect, against any third party's obligations.*

The terms of the loan based on addendum regarding the prevailing commercial provisions on the SCF facility are as follows:

1. *Type of facility is supplier financing facility.*
2. *Facility limit of Rp 100,000,000,000.*
3. *Purpose of the facility is to finance the working capital needs of suppliers or sub contractors from obligor under supplier financing program.*
4. *Availability period is from July 26, 2017 until July 26, 2018.*
5. *Funding Fee of +1.1% per annum.*

These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary.

Based on facility confirmation No. 0065/CF/CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC dated July 26, 2019, the term of bank loan are 12 months from July 26, 2019 until July 26, 2020 and there are 2 facilities:

1. *Trading Facility without Import Commitment/Local LC with a limit of Rp150,000,000,000, due on January 26, 2021.*
2. *Foreign Exchange Forward / SWAP with a limit of USD500,000, due on January 26, 2021.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to MUFG Bank, Ltd amounted to Rp 245,000,000,000 and Rp 450,000,000,000, respectively.

12. PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 001/LOD-CBII/IX/2019 tanggal 16 September 2019, WBP mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 350.000.000.000, jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian dengan suku bunga sebesar 9.25% per tahun (*floating*).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha WBP yang diikat secara fidusia
2. Sisa nilai atau omzet kontrak WBP - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Pembatasan:

Menjaminkan aset kepada pihak lain, kecuali bilamana WBP menjaga DER pada maksimal sebesar 3x selama periode pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank ICBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 235.124.000.062 dan Rp 700.000.000.000.

13. PT Bank QNB Indonesia

Berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Kredit No. 0116/CLSV/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 dari PT Bank QNB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank QNB Indonesia berupa *Demand Loan*, yang peruntukannya adalah sebagai modal kerja dengan *plafond* Rp 350.000.000.000 suku bunga jibor 1/3/6 bulan ditambah 3% per annum dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan satu tahun sejak tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Dagang dengan cakupan 120%.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, WBP dilarang untuk:

- Melakukan perubahan bisnis
- Melakukan perubahan pengendali atau pemegang saham mayoritas

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank QNB Indonesia masing-masing sebesar Rp 184.423.417.288 dan Nihil.

14. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan No. 056/ADP/2018, tanggal 6 Juni 2018 dengan PT Bank BCA Syariah, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (*Revolving*), yang

12. PT Bank ICBC Indonesia

Based on the Credit Agreement No. 001/LOD-CBII/IX/2019 dated September 16, 2019, WBP obtained a working capital loan from PT Bank ICBC Indonesia with total facility amounted to Rp 350,000,000,000, with loan period of one year from the signing of the agreement and the interest rate amounted to 9.25% per annum (floating).

This loan facility is collateralized by:

1. *Trade accounts receivable of WBP bound under fiduciary.*
2. *Future receivables value or turnover of WBP - contractors must by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.*

Negative Covenant:

Assuring assets to other parties, except when WBP maintains DER at a maximum of 3x during the loan period.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp 235,124,000,062 and Rp 700,000,000,000, respectively.

13. PT Bank QNB Indonesia

Based on the Credit Facility Offer Letter No. 0116/CLSV/XI/2019, dated November 13, 2019 from PT Bank QNB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank QNB Indonesia in the form of a Demand Loan, which was designated as working capital with a ceiling of Rp 350,000,000,000 jibor interest rates 1/3/6 months plus 3% per annum with a loan term of up to one year from the date of the credit agreement.

This loan facility is secured with account receivable with a coverage of 120%.

Without written approval from the Bank, WBP is prohibited from:

- *Make business changes*
- *Make changes to the controller or majority shareholder*

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan of WBP to PT Bank QNB Indonesia amounted to Rp 184,423,417,288 and Nil, respectively.

14. PT Bank BCA Syariah

Based on the Notification of Provision of Financing Facilities No. 056 / ADP / 2018, dated June 6, 2018 with PT Bank BCA Syariah, WBP obtained a credit facility from PT Bank BCA Syariah in the form of Musharaka PMK

peruntukannya adalah sebagai modal kerja Proyek pembangunan infrastruktur dan tagihan penjualan (piutang usaha) khusus kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak sebesar Rp 100.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Jangka waktu pinjaman ini telah diperpanjang berdasarkan Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 303/PRBH-BCAS/VI/19 menjadi tanggal 6 Juni 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha senilai Rp 120.000.000.000 (Catatan 5).

Pembatasan:

WBP sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan *waiver* atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000.

15. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan surat perjanjian No. 049/PP/CB/JKT/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan CIMB Niaga, WBP memperoleh fasilitas pembiayaan transaksi khusus Murabahah, *On Revolving Basis, Uncommitted* untuk pembelian berupa bahan baku dan/atau bahan pendukung produksi beton dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 77.695.194.234 dalam jangka waktu tiga (3) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 dan dengan margin Bank sebesar Rp 1.836.628.064.

Fasilitas-fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. 231/OL/CBGIII/XI/18 tanggal 14 Nopember 2018, dengan jangka waktu sembilan (9) bulan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 2 September 2019.

Berikut rincian fasilitas kredit yang diberikan:

- Fasilitas *commercial credit lines, revolving, uncommitted*, sebesar Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.

(*Revolving*), the designation of which was as *working capital Infrastructure development projects and special sales receivables (trade receivables)* to PT Waskita Karya (Persero) Tbk and subsidiaries amounted to Rp 100,000,000,000, with a loan period of 12 months. The term of this loan has been extended based on the Changes to the Agreement on the Granting of the Line Facility No. 303/PRBH-BCAS/VI/19 to June 6, 2020.

This loan facility is secured with account receivable amounted to Rp 120,000,000,000 (Note 5).

Negative Covenant:

WBP before or after the facility provided by the bank, having loan to the third party that not inform to the bank.

Based on the letter No. 205/WBP/DIR/2019 dated April 1, 2019, Bank BCA Syariah approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan of WBP to PT Bank BCA Syariah amounted to Rp 100,000,000,000, respectively.

15. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on letter of contract No. 049/PP/CB/JKT/2018 dated August 15, 2018 with CIMB Niaga, WBP obtained a Murabahah, *On Revolving Base, and Uncommitted transaction specific financing facility for purchases in the form of raw materials and/or concrete production supporting materials* with a total facility of Rp 77,695,194,234 in three (3) months from August 16, 2018 until November 16, 2018 and with a bank margin of Rp 1,836,628,064.

These facility has been extended based on loan extension approval letter No.231 /OL/CBGIII/XI//18 dated November 14, 2018, extending the term of loan for nine (9) months until August 16, 2019. This loan has been paid in full on September 2, 2019.

Following are the details of the credit facilities provided:

- *Commercial credit lines facility, revolving, uncommitted*, amounted to Rp 300,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.5% per annum.

- Fasilitas trust receipt, revolving, uncommitted, sebesar Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019.
- Fasilitas bank garansi, revolving, uncommitted, sebesar Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,5% per tahun.
- Fasilitas pinjaman transaksi khusus Musyarakah, revolving, uncommitted, sebesar Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu selama Sembilan (9) bulan sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 dan dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

- a. Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 28/ Kaliangsana meliputi seluas 147 m2 yang terletak di Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat atas nama Perusahaan sebesar Rp 131.186.250.000.
- b. Fidusia atas piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan minimal sebesar Rp 500.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 299.824.895.228.

16. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Berdasarkan surat No.027/KRM-BB/IL/VII/2018 WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) berupa kredit modal kerja sebesar Rp 70.000.000.000, dengan jangka waktu 9 bulan sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan suku bunga 9,5% p.a efektif *rate*. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 4 Januari 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 50.000.000.000.

- *Trust receipt facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp 200,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019.*
- *Bank guarantee facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp 200,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.5% per annum.*
- *Musyarakah Special transaction facility, revolving, uncommitted, amounted to Rp 300,000,000,000, with a term of nine (9) months from November 14, 2018 until August 16, 2019 and with an interest rate of 9.6% per annum.*

These loan facilities are collateralized by:

- a. *Building use right (SHGB) No. 28/ Kaliangsana covering an area of 147 sqm located in the Kaliangsana Village, Kalijati Sub District, Subang Regency, West Java under the name of the Company amounting to Rp 131,186,250,000.*
- b. *Fiduciary on the Company's trade accounts receivable with minimum collateral value amounting to Rp 500,000,000,000.*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of WBP to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Nil and Rp 299,824,895,228, respectively.

16. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

According to the Letter No.027/KRM-BB/IL/VII/2018, WBP obtained into the credit facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) form of working capital credit amounted to Rp 70,000,000,000, the loan term for 9 months since date of July 23, 2018 and could be extended based on needed with the interest rate of 9.5% p.a effective rate. This loan has been paid in full on January 4, 2019.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan of WBP to PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. amounted to Nil and Rp 50,000,000,000, respectively.

Entitas Anak – WTR

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

a. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit CTP

CTP mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1.800.000.000.000. Kredit ini untuk dana talangan tanah, dengan jangka waktu selama 24 bulan dan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman CTP kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil dan Rp 666.633.907.946.

b. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit KKDM

Berdasarkan akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sriyani Burlian, S.H., KKDM mendapatkan fasilitas kredit untuk dana talangan tanah dengan maksimum plafond sebesar Rp 1.380.074.000.000 dengan ketentuan:

- Fasilitas Tranche I sebesar Rp 370.779.000.000
- Fasilitas Tranche II sebesar Rp 1.009.295.000.000

Jangka waktu fasilitas kredit adalah 24 bulan setelah penandatanganan akta perjanjian kredit dengan bunga sebesar 8,25% per tahun. Seluruh tagihan dana talangan tanah dan rekening pengembalian dana talangan tanah digunakan sebagai jaminan kepada bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman KKDM kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.150.293.844.725 dan Rp 592.618.787.538.

23. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

a. Bagian Jangka Pendek

Pihak Berelasi/ Related Parties	
Perusahaan/ The Company	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	
Jumlah/ Total	

Perusahaan

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Subsidiary – WTR

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

a. Loan Agreement and Loan Facility CTP

CTP obtained credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,800,000,000,000. This credit is for land bailout, with a term of 24 months and interest rate of 8.75% per annum.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of CTP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil and Rp 666,633,907,946, respectively.

b. Loan Agreement and Loan Facilitie KKDM

Based on the notarial deed No. 37 dated May 31, 2018 from notary Sriyani Burlian, S.H., KKDM obtained a credit facility for land bailouts with a maximum ceiling amounted to Rp 1,380,074,000,000 with the following provisions:

- Tranche I facility amounted to Rp 370,779,000,000
- Tranche II facilities amounted to Rp 1,009,295,000,000

The credit facility period is 24 months after the signing of the loan agreement with an interest of 8.25% per annum. All land bailout bills and land bailout refund accounts are used as collateral to the bank.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of loan of KKDM to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,150,293,844,725 and Rp 592,618,787,538, respectively.

23. LOAN TO FINANCIAL INSTITUTION NON-BANK

a. Short-Term Portion

2019 Rp	2018 Rp
--	392.616.610.781
==	==
==	==
==	==

The Company

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Sindikasi Transmisi 500 KV Sumatera

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 25 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk sebesar maksimum Rp 4.402.500.000.000 dengan suku bunga *reference rate (Average Time Deposit)* untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019. Pada tanggal 10 Juli 2017 melalui Sertifikat Pengalihan Kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melimpahkan sebagian porsinya sebagai kreditur ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B-1282-SJK/SDK/112/2019 tanggal 19 Desember 2019 selaku Agen Fasilitas suku bunga yang berlaku untuk fasilitas kredit sindikasi adalah *reference rate* ditambah margin maksimal sebesar 9,075% per tahun.

Tujuan dari fasilitas kredit sindikasi ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja konstruksi pengadaan transmisi 500 kV Sumatera ("Proyek Transmisi Sumatera") yang terdiri dari pengadaan transmisi dengan rute New Aur Duri – Peranap (Seksi 1) dan rute Peranap – Perawang (Seksi 2).

Setelah berita acara serah terima untuk masing-masing paket pekerjaan diserahkan kepada PLN selaku *owner* proyek, sumber pelunasan dari fasilitas kredit ini akan beralih secara langsung kepada *owner*. Seluruh tagihan atas pekerjaan dan tagihan atas klaim asuransi terkait proyek yang dibiayai menjadi jaminan atas fasilitas kredit ini.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain:

- a. Memberikan jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang termasuk dalam maksud dan tujuan Perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasarnya;
- b. Melakukan permohonan pailit dan permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);

**Transmission 500 KV Sumatera
Syndication Loan**

Based on the Syndicated Credit Agreement No. 25 dated May 23, 2016, the Company obtained syndicated credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk for a maximum of Rp 4,402,500,000,000 with a reference rate (Average Time Deposit) for 3 months period plus a maximum margin. The facility has a period until December 31, 2019. On July 10, 2017 through the Credit Transfer Certificate, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk delegated part of its portion as a creditor to the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). This loan has been paid in full on December 31, 2019.

Based on the letter of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B-1282-SJK/SDK/112/2019 dated December 19, 2019 as an Agent, the interest rate facility applicable to syndicated credit facilities is the reference rate plus a maximum margin of 9.075% per annum

The purpose of the syndicated credit facility is to finance the working capital needs for construction procurement of Sumatera 500 kV transmission ("Sumatera Transmission Project") consisting of procurement transmission route New Aur Duri - Peranap (Section 1) and the Peranap - Perawang (Section 2).

After the handover for each work package submitted to PLN as the owner of the project, the source of repayment of the credit facility will be switched directly to the owner. The entire bill for the work and the bill on insurance claims related to projects financed as collateral for the credit facility.

This Agreement also includes restrictions to the Company and not permitted without prior written approval from the Bank, among others:

- a. *Providing corporate guarantees to other parties, except to guarantee the obligations of Subsidiaries conducting business activities that fall within the aims and objectives of the Company contained in their articles of association;*
- b. *Conducting bankruptcy application and requesting for postponement of payment to authorized institution (court);*

- c. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran utang Debitur;
- d. Melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, pemisahan atau membeli atau dengan cara lain memperoleh Perusahaan atau saham-saham dalam Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam maksud dan tujuan Perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasarnya; dan
- e. Mengubah status kelembagaan, maksud, tujuan atau kegiatan usaha utama Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a) *current ratio* minimal 1 (satu) kali;
b) *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali; dan
c) perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebesar Nihil dan Rp 180.483.519.871.

Sindikasi Jakarta - Cikampek Elevated II

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 7 Nopember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. beserta dengan perubahan-perubahannya perusahaan telah memperoleh fasilitas kredit sindikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit *Tranche A* sebesar Rp 2.750.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Cabang Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pembangunan proyek.
2. Fasilitas Kredit *Tranche B* sebesar Rp 340.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan *Down Payment* atau uang muka

- c. *Selling or releasing immovable property or principal assets in the course of its business, except as it does not affect the debt service obligation of the Borrower;*
- d. *To acquire, merge, consolidate, segregate or purchase or otherwise acquire a company or shares in a company that carries on business activities not included in the Company's purposes and objectives contained in its articles of association; and*
- e. *Changing the institution's status, intent, purpose or main business activity.*

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- a) *current ratio of at least 1 (one) time;*
b) *debt to equity ratio maximum of 3 (three) times; and*
c) *comparison between EBITDA and interest expense not less than 1.5 (one point five) times.*

The fulfillment of bank loan restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the Company's loans to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Nil and Rp 180,483,519,871, respectively.

Syndication Bank Loan Jakarta - Cikampek Elevated II

Based on the Deed of Credit Agreement No. 9 dated November 7, 2018 from Notary Fathiah Helmi, S.H. along with the changes the Company has obtained a syndicated credit facility with the following conditions:

1. *Tranche A Credit Facility amounted to Rp 2,750,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Jakarta Branch, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank KEB Hana Indonesia which are used to finance working capital for project development.*
2. *Tranche B Credit Facility amounted to Rp 340,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank KEB Hana Indonesia which are used for financing*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

atas pengadaan barang dan atau jasa porsi Waskita kepada KSO KS-Bukaka sesuai dengan Perjanjian JO/KSO KS-Bukaka.

Down Payment or advances for procurement of goods and or Waskita's portion service to KSO KS-Bukaka in accordance with the JO/KSO KS-Bukaka Agreement.

3. Fasilitas Kredit *Tranche C* sebesar Rp 2.050.000.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Cabang Jakarta, dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan untuk pembiayaan *supplier financing* atas dasar akseptasi *invoice* kepada Perusahaan khusus pengadaan barang dan atau jasa sesuai Perjanjian JO/KSO KS-Bukaka.

3. *Tranche C Credit Facility* amounted to Rp 2,050,000,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd., Jakarta Branch and PT Bank Central Asia Tbk which are used for *supplier financing* on the basis of *invoice acceptance* to the Company specifically the procurement of goods and or services in accordance with the JO/KSO KS-Bukaka Agreement.

Perusahaan memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:

The company provides the following guarantees:

- a. Jaminan Fidusia atas Tagihan;
- b. Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi; dan
- c. Perjanjian Pengalihan Hak

- a. *Fiduciary Guarantee on Bills;*
- b. *Fiduciary Guarantee on the Results of Insurance Claims; and*
- c. *Rights Transfer Agreement*

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1,00 kali dan *current ratio* minimal 1,00 kali. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 26 Desember 2019. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2019.

The company is required to maintain a maximum debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio 3 times, a minimum debt service coverage ratio of 1.00 time and a current ratio of at least 1.00 time. This facility can be used until December 26, 2019. This loan has been paid in full on December 27, 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Nihil dan Rp 212.133.090.910.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company's loan balances to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Nil and Rp 212,133,090,910, respectively.

b. Bagian Jangka Panjang

b. Long-Term Portion

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Entitas anak/ Subsidiary - WTR		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)	1.279.719.946.497	--
Sub Jumlah/ Sub Total	1.279.719.946.497	--
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Entitas anak/ Subsidiary - WSE		
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)	152.755.489.866	160.965.118.242
PT Shalawat Power	821.700.000	821.700.000
Entitas anak/ Subsidiary - WTR		
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)		
Kredit Investasi	413.293.871.168	--
Sub Jumlah/ Sub Total	566.871.061.034	161.786.818.242
Jumlah/ Total	1.846.591.007.531	161.786.818.242

Entitas anak – WTR

Kredit Sindikasi WBW

Berdasarkan keterangan Notaris Ariani L. Rachim, SH No 23/ALR/NOT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan keputusan Kredit Pembiayaan Sindikasi WBW No. SDK/2.2/3618 tanggal 21 Desember 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan No. S-1053/SMI/DPI/1218 tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi WBW untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv 10,50%* untuk *Tranche 1A* dan *1B* dan *Reference Rate + Margin eqv 11,50%* untuk *Tranche 1C* dan *1D*.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 789.833.300.327 dan Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 51.910.108.556 dan Nihil.

The subsidiary – WTR

Syndication Loan WBW

Based on the statement of Notary Ariani L. Rachim, SH No. 23/ALR/NOT/XII/2018 dated December 21, 2018 and the Syndicated Financing Credit decision WBW No. SDK/2.2/3618 dated December 21, 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 dated December 21, 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 dated December 10, 2018 and No. S-1053/SMI/DPI/1218 dated December 21, 2018, WBW entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. In accordance with the decision of the Syndicated Creditors for participation in syndicated financing of PT Waskita Bumi Wira for Credit purposes Development financing investment with an investment credit facility limit of Rp 5,360,084,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including the Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate +. Margin eqv 10.50% for Tranche 1A and 1B and Reference Rate + Margin eqv 11.50% for Tranche 1C and 1D.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of WBW investment credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 789,833,300,327 and Nil, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of WBW IDC credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 51,910,108,556 and Nil, respectively.

Kredit Sindikasi CTP

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas tranche A dengan jatuh tempo 180 bulan dan tranche B dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi perusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*, mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menangguk/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 437.976.537.614 dan Nihil.

Syndication Loan CTP

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of tranche A facilities with a maturity of 180 months and tranche B with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend / stop all or part of the implementation of project documents.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CTP investment credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 437,976,537,614 and Nil, respectively.

Entitas anak (kepemilikan tidak langsung)– WSE

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 8 Maret 2016, WSE memperoleh fasilitas pinjaman berjangka panjang dari IIF sejumlah Rp 175.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Interest During Construction (IDC) sebesar Rp 10.400.000.000.

Pinjaman ini dibayarkan secara cicilan triwulan sampai dengan bulan Maret 2026 dengan masa tenggang 12 bulan dimana pembayaran cicilan pertama dilakukan setelah 3 bulan setelah masa tenggang. Fasilitas pinjaman berjangka panjang ini diperoleh untuk pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga *mini hydro* 2X5 MW dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,25%. WSE menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap termasuk fasilitas pembangkit listrik tenaga hidro (infrastruktur) (Catatan 20).

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu yang mengharuskan WSE mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dan persyaratan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 WSE sudah memakai Fasilitas pinjaman tersebut masing – masing sebesar Rp 152.755.489.866 dan Rp 160.965.118.242.

- PT Shalawat Power

WSE memperoleh pinjaman dari pihak berelasi PT Shalawat Power sebesar Rp 821.700.000 pada tanggal 12 Juni 2017 dengan tingkat bunga variabel sebesar 10% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2020.

Entitas Anak – WTR

- Kredit Sindikasi PBTR

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah

The subsidiary (indirect ownership) – WSE

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

On March 8, 2016, WSE obtained a long-term loan facility from IIF amounted to Rp 175,000,000,000, which consists of Investment Credit facility and Interest During Construction (IDC) facility amounted to Rp 10,400,000,000.

The loan is paid in quarterly installments until March 2026 with grace period of 12 months which the first installment payment is made after 3 months of the grace period. This long-term loan facility was obtained to finance the construction of 2X5 MW mini-hydro power plant with interest rate per annum of 12.25%. WSE appoints PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as a security agent.

The loan is collateralized with accounts receivable and property and equipment including minihydro power generating facility (infrastructure) (Note 20).

The loan agreements include certain requirements for WSE to maintain certain financial ratios calculated based on the consolidated financial statements and other requirements.

As of December 31, 2019 and 2018, WSE has used Loan Facility amounted to Rp 152,755,489,866 and Rp 160,965,118,242, respectively.

- PT Shalawat Power

WSE obtained a loan from a related party PT Shalawat Power amounted to Rp 821,700,000 on June 12, 2017 with interest at variable rate 10% per annum. The loan used for interest loan payment to PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and will due on June 18, 2020.

The Subsidiary – WTR

- Syndication Loan PBTR

Based on Notarial Deed No. 48 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated August 27, 2018, PBTR obtained Syndicated credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku and Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa

Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank DIY Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Kalsel Syariah. Kedua Puluh Empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang - Batang.

Jangka waktu kredit investasi dan kredit *interest during construction (IDC)* adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10% per tahun yang merupakan rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu *Reference Rate* (LPS) ditambah dengan Margin.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan seluruh hak konsesi perusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengelolaan jalan tol dan usaha usaha lain terkait dengan pengelolaan jalan tol, *escrow account*, tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham milik pemegang saham, serta *company guarantee* dari para pemegang saham. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perusahaan untuk memperoleh kredit/fasilitas baru, mengubah susunan pemegang saham, melakukan perubahan PPJT dan atau *business plan*, serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

Pembatasan penting dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah:

- *Debt to equity ratio (DER)* mencerminkan rasio pembiayaan bank dan self financing dengan komposisi 70 : 30.

Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah and PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank DIY Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Kalsel Syariah. These Twenty Four banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,248,541,000,000 which consists of investment credit and interest during construction amounted to Rp 4,919,070,000,000 and Rp 329,471,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pematang - Batang Toll Road.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 162 months or 14 years including a grace period of 24 months or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is 10% p.a which represents the weighted average interest rate based on the Reference Rate (LPS) plus Margin.

The above loans are collateralized by all of toll road concessions rights, all invoices and operating revenues from toll road management and other business ventures related to toll road management, escrow accounts, claims for income from insurance claims, bank guarantee claims and reimbursement of funds from the government, the shareholders' pledge of shares, and the company guarantee of the shareholders. The loan agreement also covers certain requirements such as: limiting the Company's right to obtain new credits/ facilities, changing shareholder structure, making changes to the PPJT and/or business plan. and requires the Company to maintain certain financial ratios calculated based on the Company financial statement.

Important covenant in the syndicate loan agreement include the following:

- *Debt to equity ratio (DER)* reflects the ratio of bank financing and self financing with the composition of 70:30.

- *Current ratio (CR)* di luar bagian lancar hutang jangka panjang minimum sebesar 1,0 selama masa operasi.
- *Debt service coverage ratio (DSCR)* lebih dari 1,0 kali selama masa operasi.
- Menjaga ekuitas selalu positif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi PBTR kepada IIF masing-masing sebesar Rp 199.500.000.000 dan Nihil.

• **Kredit Sindikasi CTP**

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas *trance* A dengan jatuh tempo 180 bulan dan *trance* B dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi perusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*,

- *The current ratio (CR) excluding current portion of long term debt minimum of 1.0 times during the operation period.*
- *Debt service coverage ratio (DSCR) above 1.0 times during the operation period.*
- *Maintain positive balance of equity.*

As of December 31, 2019 and 2018 the PBTR investment credit loan balances to IIF amounted to Rp 199,500,000,000 and Nil, respectively.

• **Syndication Loan CTP**

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of *trance* A facilities with a maturity of 180 months and *trance* B with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menangguhkan/ menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada IIF adalah sebesar Rp 213.793.871.168 dan Nihil.

agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend/ stop all or part of the implementation of project documents.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CTP investment credit loan to IIF amounted to Rp 213,793,871,168 and Nil, respectively.

24. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR

Utang bruto subkontraktor merupakan utang kerja subkontraktor yang belum diberitaacitakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Rincian utang bruto subkontraktor jangka pendek berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

24. GROSS AMOUNT DUE TO SUBCONTRACTORS

Gross amount due to subcontractors represents payable for uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress but it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

The details of short-term gross amount due to subcontractors based on business units are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Perusahaan/ The Company		
Divisi Gedung/ <i>Division Building</i> - Jakarta	1.020.174.428.720	--
Divisi Infrastruktur I / <i>Division Infrastructure I</i> - Medan	811.750.190.520	--
Divisi Infrastruktur II / <i>Division Infrastructure II</i> - Jakarta	414.181.609.161	--
Divisi Infrastruktur III / <i>Division Infrastructure III</i> - Surabaya	219.247.177.813	--
Divisi EPC/ <i>Division EPC</i> - Jakarta	123.267.506.375	--
Divisi/ <i>Division VI</i>	--	2.092.144.012.492
Divisi/ <i>Division I</i>	--	1.615.552.478.964
Divisi/ <i>Division VII</i>	--	1.047.954.085.821
Divisi/ <i>Division VIII</i>	--	539.711.281.985
Divisi/ <i>Division III</i>	--	499.128.037.867
Divisi/ <i>Division II</i>	--	301.708.300.819
Divisi/ <i>Division IV</i>	--	216.832.284.894
Divisi/ <i>Division V</i>	--	110.358.841.769
Sub Jumlah/ Sub Total	2.588.620.912.589	6.423.389.324.611
Entitas Anak/ Subsidiary		
PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)	100.278.737.817	53.132.173.364
Sub Jumlah/ Sub Total	100.278.737.817	53.132.173.364
Jumlah/ Total	2.688.899.650.406	6.476.521.497.975

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Rincian utang bruto subkontraktor jangka pendek berdasarkan pihak subkontraktor sebagai berikut:

The details of short-term gross amount due to subcontractors based on subcontractors are as follows:

	2019	2018
	Rp	Rp
Berelasi/ Related Parties		
PT Wijaya Karya (Persero)	57.146.091.219	--
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Milyar/Billion)	14.146.164.400	28.608.708.105
Sub Jumlah/ Sub Total	71.292.255.619	28.608.708.105
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Len Railway System	278.350.046.967	660.034.019.549
PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada	61.032.386.867	--
PT Bakrie Metal Industries	49.435.276.729	122.774.357.685
PT Fluidra Indonesia	46.828.029.941	--
PT Surya Perkasa Globalindo	46.656.292.240	--
PT Citra Baru Steel	43.693.852.038	--
PT Dwi Berkah Arga Kencana	41.848.282.076	--
PT Mandala Putra Prima	39.578.206.114	--
PT Asri Kremasindo	39.340.683.697	--
PT Archi Metric	38.974.144.000	--
PT Rajawali Sakti Utama	36.552.760.202	--
PT Nusa Inti Cemerlang	33.705.878.869	--
PT Pancang Sakti Citra Perkasa	33.695.010.664	53.717.211.150
PT Bangun Bantala Indonesia	31.567.875.490	--
PT Maju Mix Bersama Abadi	30.461.218.509	--
PT Geotekindo	--	321.410.765.188
PT Teknindo Geosistem Unggul	--	83.765.665.214
PT Progresmax	--	171.571.005.230
PT Karya Wida Perkasa	--	134.304.593.752
PT Duta Hita Jaya	--	66.611.391.633
PT Adi Banuwa	--	141.292.864.048
PT Grant Surya Pondasi	--	86.435.814.472
PT Gading Semesta Utama	--	72.295.862.675
PT Putra Hasan Karya	--	69.264.500.000
PT Pinnacle Optima Karya	--	83.144.125.175
PT Wira Agung	--	70.072.058.856
PT Kisi Anak Negri	--	67.771.936.502
PT Mitra Tata Abadi Bersama	--	86.986.542.593
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	--	136.557.910.897
PT Sardo Mitra Sejati	--	129.137.856.461
PT Sarana Baja Perkasa	--	112.983.766.635
PT Farika Riau Perkasa	--	108.128.544.174
PT China Harbour Indonesia	--	89.094.406.454
PT Lingga Perkasa Jaya Line	--	87.838.250.883
PT Pancar Pilar	--	79.929.893.360
PT Yudha Sarana Utama	--	70.519.443.568
PT Lingga Indoteknik Utama	--	70.222.622.862
PT Bangun Citra Bangsa Bersama	--	61.072.997.957
PT Ricky Kencana Sukses Mandiri	--	57.139.366.077
PT Patria Karya Persada	--	56.050.369.433
PT Jaya Makmur Eka Lestari	--	53.114.185.952
PT Sumber Wampu Lestrai	--	53.054.385.317
PT Bumi Sentosa Dwi Agung	--	52.252.966.757
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 30 Milyar/Billion)	1.765.887.450.384	2.939.363.109.361
Sub Jumlah/ Sub Total	2.617.607.394.787	6.447.912.789.870
Jumlah/ Total	2.688.899.650.406	6.476.521.497.975

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Rincian utang bruto jangka panjang adalah sebagai berikut:

The details of long-term gross amount are as follows:

Pihak Ketiga/ Third Parties

Perusahaan/ The Company

Divisi Infrastruktur I / <i>Division Infrastructure I</i> - Medan	657.312.744.955	--
Divisi Gedung/ <i>Division Building</i> - Jakarta	447.196.107.143	--
Divisi Infrastruktur II / <i>Division Infrastructure II</i> - Jakarta	178.438.902.512	--
Divisi Infrastruktur III / <i>Division Infrastructure III</i> - Surabaya	48.255.743.587	--
Divisi EPC/ <i>Division EPC</i> - Jakarta	29.869.970.894	--
Divisi/ <i>Division VI</i> - Palembang	--	714.495.668.947
Divisi/ <i>Division V</i> - Jakarta	--	1.030.212.186.382
Divisi/ <i>Division III</i> - Jakarta	--	313.519.078.122
Divisi/ <i>Division I</i> - Jakarta	--	11.252.983.343
Divisi/ <i>Division VII</i> - Jakarta	--	62.975.574.362
Divisi/ <i>Division IV</i> - Surabaya	--	58.839.723.945
Divisi/ <i>Division VIII</i> - Jakarta	--	22.999.499.999
Divisi/ <i>Division II</i> - Jakarta	--	10.845.955.699

Jumlah/ Total

	2019	2018
	Rp	Rp
	<u>1.361.073.469.091</u>	<u>2.225.140.670.799</u>

25. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PENDEK

Uang muka kontrak jangka pendek merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progress pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan progress lapangan.

25. ADVANCES ON SHORT-TERM CONTRACT

Advances on Short-Term Contract represents advance received from the owners of projects on short-term construction contracts; the advances will be offset with the progress of work and terms of payment in accordance with the progress of work.

Rincian uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

The details of advance on short-term contract based on business unit are as follows:

Perusahaan/ The Company

Divisi Gedung/ <i>Division Building</i>	130.903.876.064	--
Divisi Infrastruktur III/ <i>Division Infrastructure III</i>	102.696.815.139	--
Divisi Infrastruktur II/ <i>Division Infrastructure II</i>	17.806.236.896	--
Divisi EPC/ <i>Division EPC</i>	12.469.162.592	--
Divisi/ <i>Division I</i>	--	80.618.777.169
Divisi/ <i>Division Precast</i>	--	17.617.966.900
Divisi/ <i>Division II</i>	--	9.150.058.249
Divisi/ <i>Division VIII</i>	--	3.294.177.228

Sub Jumlah/ Sub Total

Entitas Anak/ Subsidiaries

PT Waskita Karya Realty	78.968.817.934	36.920.760.840
PT Waskita Beton Precast Tbk	21.441.731.461	140.078.289.920

Sub Jumlah/ Sub Total

Jumlah/ Total

	2019	2018
	Rp	Rp
	<u>263.876.090.691</u>	<u>110.680.979.546</u>
	<u>78.968.817.934</u>	<u>36.920.760.840</u>
	<u>21.441.731.461</u>	<u>140.078.289.920</u>
	<u>100.410.549.395</u>	<u>176.999.050.760</u>
	<u>364.286.640.086</u>	<u>287.680.030.306</u>

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja sebagai berikut:

Advance on short-term contracts based on the owner of projects are as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties

Lain-lain/ *Others* (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)

Sub Jumlah/ Sub Total

Pihak Ketiga/ Third Parties

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>The Ministry of Public Works and Housing</i>	131.421.595.442	--
PT Royal Abadi Dentalindo	73.197.759.090	73.197.759.090
Lain-lain/ <i>Others</i> (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	111.302.171.953	204.401.487.665

Sub Jumlah/ Sub Total

Jumlah/ Total

	2019	2018
	Rp	Rp
	<u>48.365.113.601</u>	<u>10.080.783.551</u>
	<u>131.421.595.442</u>	<u>73.197.759.090</u>
	<u>73.197.759.090</u>	<u>73.197.759.090</u>
	<u>111.302.171.953</u>	<u>204.401.487.665</u>
	<u>315.921.526.485</u>	<u>277.599.246.755</u>
	<u>364.286.640.086</u>	<u>287.680.030.306</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Uang muka pada WBP, entitas anak, merupakan uang muka yang diterima atas pesanan beton *precast* dari pelanggan.

Advances on WBP, a subsidiary, represent advances received on precast concrete orders from customers.

26. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

26. ACCRUED EXPENSES

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban Umum	369.122.212.409	322.256.759.716	General Expenses
Beban Bunga Obligasi	305.037.581.975	255.818.229.798	Bond Interest Expenses
Beban Kantor	27.204.555.718	105.383.813.987	Office Expenses
Beban Pegawai	17.618.005.412	11.768.016.400	Employee Expenses
Beban Gedung	370.048.323	--	Building Expenses
Beban Operasional Proyek	87.858.057	559.158.410	Projects Operational Charges
Lain-lain	1.188.148.466	--	Others
Jumlah	720.628.410.360	695.785.978.311	Total

Biaya yang masih harus dibayar dari beban operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek Perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Accrued expenses of projects operational charges represent payables to third parties in line with the project operations of the Company and others are for building expenses, office expenses, employee expense and general expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2019, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 17 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2015 Berkelanjutan I Tahap II;
- Periode tanggal 10 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap I;
- Periode tanggal 10 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III;
- Periode tanggal 6 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I;
- Periode tanggal 23 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II; dan
- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III.
- Periode tanggal 16 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan III Tahap IV.
- Periode tanggal 5 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap I (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk).

As of December 31, 2019 accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds that's not yet paid as follows:

- *Period of December 17 – 31, 2019 for bonds year 2015 Shelf I Phase II;*
- *Period of December 10 – 31, 2019 for bonds year 2016 Shelf II Phase I;*
- *Period of December 10 – 31, 2019 for bonds year 2016 Shelf II Phase II;*
- *Period of December 21 – 31, 2019 for bonds year 2017 Shelf II Phase III;*
- *Period of December 6 – 31, 2019 for bonds year 2017 Shelf III Phase I;*
- *Period of December 23 – 31, 2019 for bonds year 2018 Shelf III Phase II; and*
- *Period of December 28 – 31, 2019 for bonds year 2018 Shelf III Phase III.*
- *Period of December 16 – 31, 2019 for bonds year 2019 Shelf III Phase IV.*
- *Period of December 5 – 31, 2019 for bonds year 2019 Shelf I Phase I (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk).*

Pada tanggal 31 Desember 2018, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 17 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2015 Berkelanjutan I Tahap II;
- Periode tanggal 10 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap I;
- Periode tanggal 10 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III;
- Periode tanggal 6 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I;
- Periode tanggal 23 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II; dan
- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2018 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III.

As of December 31, 2018 accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds which not yet paid as follows:

- *Period of December 17 – 31, 2018 for bonds year 2015 Shelf I Phase II;*
- *Period of December 10 – 31, 2018 for bonds year 2016 Shelf II Phase I;*
- *Period of December 10 – 31, 2018 for bonds year 2016 Shelf II Phase II;*
- *Period of December 21 – 31, 2018 for bonds year 2017 Shelf II Phase III;*
- *Period of December 6 – 31, 2018 for bonds year 2017 Shelf III Phase I;*
- *Period of December 23 – 31, 2018 for bonds year 2018 Shelf III Phase II; and*
- *Period of December 28 – 31, 2018 for bonds year 2018 Shelf III Phase III.*

27. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

27. MEDIUM TERM NOTES

	2019 Rp	2018 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah			Medium Term Notes
PT Waskita Toll Road	700.000.000.000	763.326.631.134	PT Waskita Toll Road
PT Waskita Karya Realty	300.000.000.000	300.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	32.996.527.781	48.877.587.634	Unamortized Transaction Cost
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(732.996.527.781)	(812.204.218.768)	Less: Short-Term
Jumlah	300.000.000.000	300.000.000.000	Total

PT Waskita Toll Road (WTR)

PT Waskita Toll Road (WTR) menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahun 2017 dengan nilai hingga Rp 1.291.975.038.484 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 7 Nopember 2017, diterbitkan MTN tahap I sebesar Rp 786.371.433.625, kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 WTR menerbitkan MTN tahap II dengan nilai Rp 505.603.604.859 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 10,43% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2019. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 7 Maret 2019.

WTR menerbitkan MTN berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahun 2018 dengan nilai hingga Rp 1.500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 26 September 2018, diterbitkan MTN tahap I Seri A sebesar Rp 338.800.000.000 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 9,35% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 3 Oktober 2019.

Pembayaran pokok MTN dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk dana talangan pembebasan lahan untuk ruas-ruas tol yang dimiliki Grup melalui anak Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Cinere Serpong Jaya, PT Citra Waspphotowa, PT Waskita Bumi Wira dan PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Pada tanggal 24 Mei 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, tanpa bunga dengan tingkat diskonto 10,75% per tahun. Pada tanggal 27 September 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar dan Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, dengan tingkat bunga tetap 10,35% per tahun.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pada tanggal 21 Pebruari 2018, PT Waskita Karya Realty (WKR) menandatangani kontrak perjanjian No. 19 untuk menerbitkan MTN dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas pinjaman ini diterbitkan melalui Seri A, B, C, dan selanjutnya dengan tingkat bunga 10% per tahun. Fasilitas peminjaman ini digunakan untuk modal kerja dan/atau pembayaran kembali utang usaha. Penerbitan MTN ini memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat BBB-(idn) untuk WKR.

PT Waskita Toll Road (WTR)

PT Waskita Toll Road (WTR) issued a *Medium Term Notes* (MTN) *Berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahun 2017*, which values up to Rp 1,291,975,038,484 for a period of 370 days. On November 7, 2017, MTN stage I amounted to Rp 786,371,433,625, then WTR issued MTN stage II on March 2, 2018 amounted to Rp 505,603,604,859 with zero coupon rate and at discount rate of 10.43% per annum and will mature on March 7, 2019. This MTN has been paid in full on March 7, 2019.

WTR issued a MTN *Berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahun 2018*, which values up to Rp 1,500,000,000,000 for a period of 370 days. On September 26, 2018, the Company issued MTN Tahap I Seri A amounted to Rp 338,800,000,000 with zero coupon rate and at discount rate of 9.35% per annum. This MTN has been paid in full on October 3, 2019.

Principal payments will be made in full on the due date. The purpose of this MTN issuance is for bailout of land acquisition for toll sections owned by the Group through subsidiaries including but not limited to PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Cinere Serpong Jaya, PT Citra Waspphotowa, PT Waskita Bumi Wira and PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

As of May 24, 2019, WTR issued a MTN Tahun 2019, which values up to Rp 500,000,000,000 for a period of 370 days, with zero coupon rate and at discount rate of 10.75% per annum. On September 27, 2019, the Company issued MTN Tahun 2019 amounted to Rp 200,000,000,000 for a period of 370 days, with a fixed interest rate of 10.35% per annum.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

On February 21, 2018, PT Waskita Karya Realty (WKR) entered a contract agreement No. 19 to issue MTN with facilities amounted to Rp 300,000,000,000, with a due date of 3 years. This loan facility issued through Serie A, B, C, and continued with 10% annual interest rate. This facility of loan will be used for working capital and/or refinancing debt. The issuance of MTN is rated from PT Fitch Ratings Indonesia with BBB-(idn) rate for WKR.

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, WKR harus mematuhi pembatasan antara lain memperoleh pinjaman dengan cara penerbitan utang baru dengan cara lainnya yang mempunyai batasan lebih tinggi dari penerbitan MTN sebelum adanya MTN, menjamin atau membebani aset WKR lebih besar dari 50% dari total aset WKR, memberikan jaminan W kecuali untuk kegiatan usaha dan anak WKR, melakukan penggabungan, pengambilalihan dengan WKR lain yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha, merubah komposisi pemegang saham mayoritas, menjual atau mengalihkan aset tetap WKR sebanyak lebih dari 50% dari total aset dalam 1 tahun periode berjalan, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali berkaitan dengan sehubungan pembangunan fasilitas usaha, pinjaman karyawan, dan koperasi, mengubah bentuk usaha WKR, dan mengurangi modal dasar, ditempatkan, dan modal dasar WKR:

- a. Pembatasan-pembatasan atas pinjaman berdasarkan perjanjian No. 19 tahun 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 manajemen berpendapat bahwa WKR mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang. Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan, WKR tidak pernah mengalami gagal bayar atas utang yang telah jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2019, WKR telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

- b. Wali Amanat

WKR telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara WKR dengan pemegang MTN. Adapun wali amanat untuk MTN adalah PT Asta Kapital Asia.

Under the term and conditions of these long-term obligation, WKR are subjects to various covenants as follow as obtaining debt with new issuance of debts with other methods which have a more senior level than MTN before issuance of MTN, guarantee and make expense from assets within 50% from total asset of WKR, issued guarantee of WKR except for business activity and subsidiary operation, mergers and acquisition with other Companys which have a bad influence toward business continuity, changing a majority of the composition of shareholders, sell and dispose of fixed asset more than 50% from total asset within 1 current year period, giving another loan to other third parties except regarding to business facilities development, employees loan, and cooperation, changing main business activity, and reducing of authorized, issued, and fully paid capital of WKR:

- a. *Limitations on loan in accordance with agreement No. 19 year 2018*

As of December 31, 2019 management assumed that WKR complies with the covenant of all long term obligations. The management stated that during the reporting period and on the completion date of financial report, WKR has never experience default from maturing bonds. As of December 31, 2019, WKR has complied with all financial ratio required on MTN agreements.

- b. *Trustees*

WKR engaged Trustees to act as the intermediary between WKR and MTN holders. The Trustees for MTN issuance is PT Asta Kapital Asia.

28. UTANG OBLIGASI – BERSIH

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	Rp		Rp	
Nominal	15.707.000.000.000		13.861.250.000.000	Face Value
Biaya Emisi Obligasi	(31.119.315.378)		(21.493.363.957)	Bonds Issuance Cost
Akumulasi Amortisasi	11.533.235.375		8.897.505.711	Accumulated Amortization
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(3.264.993.640.444)		(1.999.290.340.350)	Less: Current Maturity
Jumlah	<u>12.422.420.279.553</u>		<u>11.849.363.801.404</u>	Total
Biaya Emisi Obligasi	31.119.315.378		21.493.363.957	Bonds Issuance Cost
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(11.533.235.375)		(8.897.505.711)	Less: Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	<u>19.586.080.003</u>		<u>12.595.858.246</u>	Unamortized Bond Issuance Costs

28. BOND PAYABLE - NET

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan:

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV tahun 2019 No. 53 pada tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.845.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 484.000.000.000.
- Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.361.750.000.000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Rating Indonesia tanggal 12 April 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Waskita Karya tahun 2019 adalah A-(idn).

- b. Berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 82 pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.702.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 761.000.000.000.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 941.750.000.000.

- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 6 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp 3.451.500.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dengan nilai Rp 1.175.000.000.000.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan nilai Rp 2.276.500.000.000.

Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direksi Perusahaan No. S-420/D.04/2017 tanggal 28 September 2017 Perusahaan efektif mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi).

Bonds issued by the Company:

- a. *Based on the Trusteeship Agreement Deed Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV 2019 No. 53 dated April 26, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV Year 2019 amounted to Rp 1,845,750,000,000 which consist of two tranches:*

- *Tranche A with fixed interest rate of 9.00% p.a. with value of Rp 484,000,000,000.*
- *Tranche B with fixed interest rate of 9.75% p.a. with value of Rp 1,361,750,000,000.*

Based on the rating issued by PT Fitch Rating Indonesia dated April 12, 2019, the Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV 2019 are rated as A-(idn).

- b. *Based on Deed of Amendment I of Trustee Agreement No. 82 on September 26, 2018 from Notary Fathiah Helmi, SH, the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase III Year 2018 with a principal amount of Rp 1,702,750,000,000 divided into two tranches:*

- *Tranche A with a fixed interest rate of 9.00% per annum with a value of Rp 761,000,000,000.*
- *Tranche B with a fixed interest rate of 9.75% per year with a value of Rp 941,750,000,000.*

- c. *Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 12 dated February 6, 2018 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase II Year 2018 amounted to Rp 3,451,500,000,000 which consists of two tranches:*

- *Tranche A with fixed interest rate of 7.75% per annum with value of Rp 1,175,000,000,000.*
- *Tranche B with fixed interest rate of 8.25% per annum with value of Rp 2,276,500,000,000.*

Based on Letter from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to Company's Board of Directors No. S-420/D.04/2017 dated September 28, 2017. The Company has effectively registered the Waskita Karya Shelf III Phase II 2018 (Bonds).

- Kemudian, berdasarkan surat dari DBS Bank ke Dewan Komisaris OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Pasar Perdana dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi) dan Surat dari DBS Bank ke OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Manager Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018, Obligasi Perusahaan telah selesai masa penawarannya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2018, dan proses penjatahan pada tanggal 21 Pebruari 2018, serta telah dilaksanakan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 23 Pebruari 2018. Jumlah obligasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.451.500.000.000
- d. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 45 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun dengan nilai Rp 1.369.000.000.000.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp 1.631.000.000.000.
- e. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp 1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 747.000.000.000.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 910.000.000.000.
- f. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 900.000.000.000.
- Furthermore, based on letter from DBS Bank to the Board of Commissioner OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 regarding the Initial Public Market Report for the Bond III Waskita Karya Phase II 2018 (Bonds) and Surat from DBS Bank to OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 concerning the Allotment Report for Sustained Public Offering of Shelf Registered Bonds III Waskita Karya Phase II 2018, the Company Bonds have been completed the offering period, which was held on 19 February 2018, allotment on February 21, 2018, and electronic bond distribution has been executed on February 23, 2018. The amount of bond issued is Rp 3,451,500,000,000.
- d. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 45 dated August 23, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase I Year 2017 amounted to Rp 3,000,000,000,000 which consists of two tranches:
- Tranche A with fixed interest rate of 8.00% per annum with value of Rp 1,369,000,000,000.
 - Tranche B with fixed interest rate of 8.5% per annum with value of Rp 1,631,000,000,000.
- e. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 02 dated February 2, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase III Year 2017 amounted to Rp 1,657,000,000,000 which consists of two tranches:
- Tranche A with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 747,000,000,000.
 - Tranche B with fixed interest rate of 9.00% per annum with value of Rp 910,000,000,000.
- f. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 55 dated September 9, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase II Year 2016 with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 900,000,000,000.

g. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan nilai Rp 2.000.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Mei 2019.

g. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 22 dated April 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase I Year 2016 with fixed interest rate of 9.25% per annum with value of Rp 2,000,000,000,000 and has been paid in full on May 31, 2019.

h. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

h. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 29 dated September 29, 2015 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company has issued Shelf Registration Bond I Waskita Karya Phase II Year 2015 amounted to Rp 1,500,000,000,000 which consist of two tranches:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp 1.150.000.000.000.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp 350.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 16 Oktober 2018.

- Tranche A with fixed interest rate of 11.10% per annum with value of Rp 1,150,000,000,000.
- Tranche B with fixed interest rate of 10.40% per annum with value of Rp 350,000,000,000 and has been paid in full on October 16, 2018.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 30 Juli 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Perusahaan untuk adalah idA- dan Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Rating Indonesia tanggal 2 Agustus 2018, peringkat Obligasi Berkelanjutan III adalah A-(idn).

Based on the ratings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dated July 30, 2019, the rating of the Company's Shelf II - Registered Bonds is idA- and Based on the rating issued by PT Fitch Rating Indonesia on August 2, 2018, Self registered III Bonds rating is A- (idn).

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

- *Current ratio* is not less than 1 : 1 (one is to one);
- *Debt to Equity* is no more than 3 : 1 (three is to one); and
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year end.

Obligasi yang diterbitkan entitas anak – WBP:

Bonds issued by subsidiary - WBP:

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan nilai Rp 500.000.000.000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 37 dated April 15, 2019 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase I Year 2019, with a rate fixed interest at 9.95% per annum with value Rp 500,000,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tanggal 12 April 2019, peringkat obligasi adalah BBB+(idn) (Triple B Plus).

Based on the rating issued by PT Fitch Ratings Indonesia dated April 12, 2019, the bond rating is BBB + (idn) (Triple B Plus).

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 47 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.500.000.000.000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 47 dated October 8, 2019 by notary Jose Dima Satria, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase II Year 2019, with a rate fixed interest at 9.75% per annum with value Rp 1,500,000,000,000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tanggal 11 September 2019, peringkat obligasi adalah BBB+(idn) (Triple B Plus).

Based on the rating issued by PT Fitch Ratings Indonesia dated September 11, 2019, the bond rating is BBB + (idn) (Triple B Plus).

Utang obligasi ini mensyaratkan WBP untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

This bond debt requires WBP to maintain the following financial ratios:

- *Current ratio* minimal 1.0 x (satu kali)
- *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 2,5 (dua koma lima)
- *Debt Service Coverage (DSC)* minimal 100% (seratus persen)

- *Current ratio of at least 1.0 x (one time)*
- *Maximum Debt to Equity Ratio (DER) is 2.5 (two point five)*
- *Debt Service Coverage (DSC) of at least 100% (one hundred percent)*

29. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

29. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa Produksi dan Tantiem	268.026.638.636	565.979.031.667	Production Benefits and Tantiem
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	179.730.172.460	179.730.172.460	The Ministry of Public Works and Housing
Iuran Dana Pensiun	10.674.569.546	7.450.905.610	Pension Fund Contribution
Jamsostek	5.387.721.181	5.673.448.791	Jamsostek
Lain-lain	29.476.830.955	66.405.475.230	Others
Jumlah	493.295.932.778	825.239.033.758	Total

30. UTANG BANK JANGKA PANJANG

30. LONG-TERM BANK LOANS

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Perusahaan/ The Company		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.975.839.901.332	2.644.000.000.000
Entitas anak/ Subsidiaries		
WTR		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi	4.261.689.606.608	6.111.500.126.769
Kredit IDC	123.399.595.640	106.699.789.831
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi	4.330.910.112.909	5.624.429.058.646
Kredit Dana Talangan Tanah	2.432.139.672.794	--
Kredit IDC	128.412.973.548	116.382.922.643
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit investasi	557.548.955.491	--
PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi	196.911.572.492	94.580.673.879
PT Bank BNI Syariah		
Kredit Investasi	354.357.085.352	--

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Bank BRIsyariah Tbk		
Kredit Investasi	59.601.466.459	--
WKR		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	551.805.650.017	460.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	14.972.616.592.642	15.157.592.571.768
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Perusahaan/ The Company		
<i>Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication</i>		
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	1.000.457.500.000	1.102.500.000.000
Bank of China Ltd	1.000.457.500.000	1.102.500.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	408.350.000.000	450.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	408.350.000.000	450.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	405.999.080.710	450.000.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	326.680.000.000	360.000.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	245.010.000.000	270.000.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia	163.340.000.000	180.000.000.000
PT Bank SBI Indonesia	122.505.000.000	135.000.000.000
<i>Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication</i>		
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	1.000.000.000.000	277.800.000.000
PT Bank Permata Tbk	500.000.000.000	138.900.000.000
PT Bank Resona Perdana Indonesia	200.000.000.000	55.500.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia	150.000.000.000	27.800.000.000
Bank QNB Indonesia	500.000.000.000	--
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah	500.000.000.000	--
Entitas anak/ Subsidiaries		
WTR		
<i>Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication</i>		
WBW, CCT, CTP, dan PBTR		
PT CIMB Niaga Tbk	372.236.723.405	--
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	473.899.980.196	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
- Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	79.468.621.944	--
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		
Kredit Investasi	476.811.731.665	--
Kredit IDC	6.666.833.747	--
PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	19.867.155.486	--
PT Bank Aceh Syariah		
Kredit Investasi	428.617.220.709	--
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	73.293.668.934	--
PT Bank Bank Pembangunan Daerah DIY - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	48.855.381.910	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		
- Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	60.775.253.658	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	118.717.641.005	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
Kredit Investasi	251.167.621.944	171.699.000.000
Kredit IDC	12.665.945.510	--
PT Bank Kalimantan Selatan - Unit Usaha/ Business Unit Syariah		
Kredit Investasi	68.729.601.441	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		
Kredit Investasi	137.861.482.500	--
Kredit IDC	11.763.517.500	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat		
Kredit Investasi	79.468.621.944	--
Kredit IDC	2.083.632.805	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		
Kredit Investasi	137.861.482.500	--
Kredit IDC	11.763.517.500	--
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu		
Kredit Investasi	78.983.330.033	--
Kredit IDC	4.766.114.792	--
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung		
Kredit Investasi	39.734.310.972	--
Kredit IDC	40.562.110	--

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Bank Pembangunan Daerah DIY		
Kredit Investasi	45.953.827.500	--
Kredit IDC	3.921.172.500	--
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		
Kredit Investasi	187.647.883.505	--
Kredit IDC	11.752.710.869	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		
Kredit Investasi	137.861.482.500	--
Kredit IDC	11.763.517.500	--
PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
Kredit Investasi	39.734.310.972	--
Kredit IDC	1.041.816.406	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		
Kredit Investasi	256.579.123.506	--
Kredit IDC	17.582.739.543	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah		
Kredit Investasi	45.953.827.500	--
Kredit IDC	3.921.172.500	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
Kredit Investasi	68.930.242.500	--
Kredit IDC	5.882.257.500	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		
Kredit Investasi	344.982.705.000	171.699.000.000
Kredit IDC	27.370.763.791	--
PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau		
Kredit Investasi	335.565.725.000	128.774.000.000
Kredit IDC	27.084.372.647	--
PT Bank Pembangunan Daerah Papua		
Kredit Investasi	598.768.227.430	85.849.000.000
Kredit IDC	42.749.105.743	--
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara		
Kredit Investasi	131.556.560.729	55.802.000.000
Kredit IDC	8.835.235.763	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur		
Kredit Investasi	237.435.282.009	42.925.000.000
Kredit IDC	10.229.675.444	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		
Kredit investasi	765.659.065.946	354.413.305.370
Kredit IDC	42.244.034.079	--
PT Bank Nagari		
Kredit investasi	183.814.312.500	--
Kredit IDC	15.685.687.500	--
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Kredit investasi	1.004.071.235.566	--
Kredit IDC	32.972.727.764	--
PT Bank Artha Graha International Tbk		
Kredit investasi	137.861.482.500	--
Kredit IDC	11.763.517.498	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
Kredit investasi	269.503.448.472	--
Kredit IDC	20.710.201.077	--
PT Bank DKI		
Kredit investasi	74.446.573.349	--
WKI		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	96.448.714.759	--
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Less: Current Maturity	(833.000.000.000)	(416.500.000.000)
Sub Jumlah/ Sub Total	14.352.533.774.287	5.594.661.305.370
Jumlah	29.325.150.366.929	20.752.253.877.138

**Pihak Berelasi
Perusahaan**

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving* Rp 200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp 4.450.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp 3.175.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 705.000.000.000.
- e. *Trust Receipt, Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 240.000.000.000.

Berdasarkan surat No.BIN/2.2/263/R tanggal 8 April 2020, jangka waktu pinjaman jatuh tempo 20 April 2022 dan surat No. BIN/2.2/261/R tanggal 25 September 2019 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Bridging* yang berlaku sampai dengan 30 Nopember 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363 (Catatan 9).
- b. Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT. II No. 408 / 2004 (Catatan 16). Senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 dimana SHT IV sedang dalam proses.
- c. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m², terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 (Catatan 16) dan senilai Rp 1.860.010.000 dimana SHT II sedang dalam proses.

**Related Parties
The Company**

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. *Revolving Working Capital Loan* (WCL) of Rp 200,000,000,000.
- b. *Transactional Capital Loan* of Rp 4,450,000,000,000.
- c. *Supply Chain Financing* (SCF) *Working Capital Loan* of Rp 3,175,000,000,000.
- d. *Bank Guarantee* of Rp 705,000,000,000.
- e. *Trust Receipt, Letter of Credit* (L/C) or SKBDN of Rp 240,000,000,000.

According to letter No.BIN/2.2/263/R dated April 8, 2020, the term of loan will be due on April 20, 2022 and letter No. BIN/2.2/261/R dated September 25, 2019 related to Agreement of Additional Transactional Working Capital Credit Bridging Facilities which are valid until November 30, 2020. The loan facilities are secured and bounded with:

- a. Inventory which has been tied by fiduciary deed No. 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH. 2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363 (Note 9).
- b. A plot of land with land right (SHGB) No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098sqm located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Districts Jatinegara, East Jakarta on behalf of the Company amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397 / T / 1988, amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT.II No. 408/2004 (Note 16). Amounted to Rp 48,320,400,000 according to SHT III No. 06386/2014 and Rp 11,120,940,000 while SHT IV is still in process.
- c. A plot of land with SHGB No. 38, dated April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332sqm, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, on behalf of the Company NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No. 687/2007 (Note 16) and amounted Rp 1,860,010,000 while SHT II still in process.

- d. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- e. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 dimana SHT II sedang dalam proses.
- f. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016 (Catatan 16).
- g. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004m², terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 (Catatan 16).
- h. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016 (Catatan 16).
- d. A plot of land with SHGB No. 2001 dated June 1, 2006 until on January 1, 2026, an area of 5,798sqm, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, on behalf of the Company amounted to Rp 5,191,600,000 according to SHT I No. 323 (Note 16) and amounted Rp 9,779,660,000 according to SHT II No. 1375/2015.
- e. A plot of land with SHGB No. 4 dated November 10, 1998 until December 19, 2028 an area of 2,511sqm, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Districts Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 651,430,000 (Note 16) and amounted Rp 6,321,020,000 while SHT II still in process.
- f. A plot of land with SHGB No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806sqm, located at Kelurahan Belakanolo, Districts West Padang, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT I No. 3129/2001, amounted to Rp 460,020,000 according to SHT II No. 1151/2007. The land right (SHGB) has been extended until February 7, 2033 and amounted to Rp 3,474,910,000 according to SHT III No 1846/2016 (Note 16).
- g. A plot of land with SHGB No. 436 dated March 10, 1998 until June 19, 2032, an area of 1,004sqm, located at Desa Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, on behalf of the Company amounted to Rp 464,850,000 according to SHT I No. 356/2001, amounted to Rp 747,850,000 according to SHT II No. 169/2007, and amounted to Rp 3,595,942,000 according to SHT III No. 36/2016 (Note 16).
- h. A plot of land with SHGB No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404sqm, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT I No. 2952/2007 and amounted Rp 3,595,940,000 according to SHT III No. 00621/2016 dated January 28, 2016 (Note 16).

- i. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- j. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015 (Catatan 16).
- k. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 24 Oktober 2017, seluas 595m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007 (Catatan 16).
- l. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001 (Catatan 16).
- m. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 dimana SHT III sedang dalam proses (Catatan 16).
- i. A plot of land with SHGB No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013sqm, located at Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT I No. 4772/2001, amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT II No. 2948/2007 and amounted to Rp 10,571,030,000 while SHT III still in process (Note 16).
- j. A plot of land with SHGB No. 2 dated June 25, 1997 until June 25, 2017, an area of 1,000sqm, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 402,860,000 according to SHT I No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT II No. 239/2007 amounted to Rp 3,085,070,000 according to SHT III No. 1387/2015 (Note 16).
- k. A plot of land with SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 24, 2017, an area of 595sqm, located at Kelurahan Oesapa, Districts Kelapa Lima, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 49,260,000 according to SHT I No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT II No. 240/2007 (Note 16).
- l. A plot of land with SHGB No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 457,590,000 according to SHT I No. 375/2001 (Note 16).
- m. A plot of land with SHGB No. 14 dated July 22, 1993 until April 22, 2023, an area of 4,800sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 288,000,000 according to SHT I No. 375/2001, amounted to Rp 602,410,000 according to SHT II No. 238/2007 and amounted Rp 7,828,880,000 while SHT III still in process (Note 16).

- n. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 16).
- o. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- p. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 dimana SHT II sedang dalam proses. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- q. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 01 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016. (Catatan 16).
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000 (Catatan 16).
- n. A plot of land with SHGB No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276sqm, located at Kelurahan Tikala Ares, Districts Wenang, Manado, North Sulawesi, on behalf of the Company amounted to Rp 263,530,000 according to SHT I No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT II No. 667/2007. The land right (SHGB) has been extended until May 25, 2033 (Note 16).
- o. A plot of land with SHGB No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2020, an area of 4,040sqm, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, on behalf of the Company amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT I No. 2927/2001, amounted to Rp 994,180,000 according to SHT II No. 1613/2007 and amounted to Rp 3,182,880,000 according to SHT III No. 10710/2015. Land pledged as collateral consists of buildings and related things already existing in the land, or will exist there (Note 16).
- p. A plot of land with SHGB No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250sqm, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, on behalf of the Company amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT I No. 2012/2007 amounted to Rp 18,705,400,000 while SHT II still in process. Land pledged as collateral consist of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).
- q. A plot of land with SHGB No. 01 dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,905 sqm, located at Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung, on behalf of the Company amounted to Rp 30,000,000 according to S. Hip No. 3181 dated September 13, 1989, amounted to Rp 2,222,100,000 according to SHT II No. 01057/2007 and amounted to Rp 3,642,670,000 according to SHT III No. 02119/2016 (Note 16).
- r. Vehicles consisting of 1 (one) unit VW Caravelle 2.0 year 2012 tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed No. W.10.00426020.AH.05.01 dated February 26, 2012 amounted to Rp 620,000,000 (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh tagihan kepada pengguna jasa proyek Bendungan Leuwikeris Paket 2, Bendungan Jlantah, dan Tol Japek Selatan: Ruas Taman Mekar – Sadang digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.975.839.901.332 dan Rp 2.644.000.000.000.

Entitas Anak – WTR

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Utang Bank Sindikasi PBTR

Berdasarkan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 37 tanggal 24 Mei 2017 dan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari,

As of December 31, 2019, all amount due from customers of the Leuwikeris Dam Package 2, Jlantah Dam, and Japek Selatan Toll Road Section Taman Mekar - Sadang are used as collateral for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, such as to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property/assets owned in a single transaction or in a several transaction unless sell or transfer assets that is arm's length; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of the nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic Indonesia through the sale of these assets do not have material effect; performed with with the provision of becoming a surviving legal entity; amendments to it may result to material; filing a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one), debt to equity ratio of a maximum 3 (three) and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,975,839,901,332 and Rp 2,644,000,000,000, respectively.

Subsidiary – WTR

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Syndication Bank Loan PBTR

Based on Notarial deed No. 37 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated May 24, 2017 and Notarial deed No. 48 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated August 27, 2018, PBTR entered into a Syndicated Loan Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Keduapuluh empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan Kredit Bunga masa Konstruksi (IDC) masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang – Batang.

Jangka waktu kredit investasi dan IDC adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga adalah rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu *Reference Rate* (LPS) ditambah dengan Margin atau setara dengan 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.396.880.047.500 dan Rp 4.366.424.126.771.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman kredit IDC PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 99.369.952.500 dan Rp 106.699.789.831.

b. Utang Bank Sindikasi KKDM

Berdasarkan Akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sri Burlian, S.H., KKDM telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.380.074.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Perusahaan wajib mempertahankan *financial covenant*, sebagai berikut:

- 1) *CR (Current Ratio)* minimal 1,0 kali;
- 2) *DER (Debt to Equity Ratio)* maksimal 3,0 kali;
- 3) *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* sejak tahun 2022 minimal 100%.

Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

These twenty four banks provided a credit facility with a maximum credit facility limit of Rp 5,248,541,000,000 which consists of Investment Credit and Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 4,919,070,000,000 and Rp 329,471,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pematang - Batang Toll Road.

The investment credit and IDC have a credit term loan of 162 months or 14 years including a grace period of 24 months or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is weighted average interest rate based on the Reference Rate (LPS) plus Margin or equivalent to 10.5% per annum.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of PBTR investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,396,880,047,500, and Rp 4,366,424,126,771, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of PBTR IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 99,369,952,500 and Rp 106,699,789,831, respectively.

b. Syndication Bank Loan KKDM

Based on Deed No. 37 dated May 31, 2018, by notary Sri Burlian, S.H., KKDM obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. These bank provided Working Capital Loan with maximum credit facility limit of Rp 1,380,074,000,000. There facilities is provided for the land acquisition bailout for the development of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project (Becakayu).

The Company is required to maintain a financial covenant, as follows:

- 1) *CR (Current Ratio)* at least 1.0 time;
- 2) *DER (Debt to Equity Ratio)* maximum 3.0 times;
- 3) *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* since 2022 at least 100%.

KKDM tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, memperoleh kredit/fasilitas baru atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan, mengikat diri sebagai penjamin utang, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan pembagian dividen, menerbitkan saham-saham baru yang dapat mengakibatkan presentase komposisi kepemilikan saham oleh pemegang-pemegang saham *existing* menjadi terdilusi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi KKDM ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.736.327.999.994 dan Rp 1.745.075.999.998.

c. Utang Bank Sindikasi CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakshmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

KKDM is not allowed to do any of the following matters such as submitting or transferring all or any of the Company's rights and/or obligations arising under Transaction Document to other parties, changing the business activities as contained in the articles of association which may reduce the Company's ability to fulfill its obligations, applying for PKPU or bankruptcy, obtaining new credit/facilities or other loans from a financial institution, binding itself as debt guarantor, changing shareholder structure, giving credit to any party, making dividend payments, issuing new shares which may result in a percentage of composition share ownership by existing shareholders becomes diluted.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of KKDM investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,736,327,999,994 and Rp 1,745,075,999,998, respectively.

c. Syndication Bank Loan CCT

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakshmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate* (ATD) ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4,625% during construction and 4,375% during operation.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 596.014.664.594 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CCT investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 596,014,664,594 and Nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit IDC CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 15.596.742.377 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of CCT IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 15,596,742,377 and Nil, respectively.

d. Utang Bank Sindikasi WBW

d. Syndication Bank Loan WBW

Berdasarkan keterangan Notaris Ariani L. Rachim, SH No 23/ALR/NOT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan keputusan Kredit Pembiayaan Sindikasi WBW No. SDK/2.2/3618 tanggal 21 Desember 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan No. S-1053/SMI/DPI/1218 tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi WBW untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate* + *Margin* eqv 10,50% untuk *Tranche* 1A dan 1B dan *Reference Rate* + *Margin* eqv 11,50% untuk *Tranche* 1C dan 1D.

Based on the statement of Notary Ariani L. Rachim, SH No. 23/ALR/NOT/XII/2018 dated December 21, 2018 and the Syndicated Financing Credit decision WBW No. SDK/2.2/3618 dated December 21, 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 dated December 21, 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 dated December 10, 2018 and No. S-1053/SMI/DPI/1218 dated December 21, 2018, WBW entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. In accordance with the decision of the Syndicated Creditors for participation in syndicated financing of PT Waskita Bumi Wira for Credit purposes Development financing investment with an investment credit facility limit of Rp 5,360,084,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including the Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv 10.50% for Tranche 1A and 1B and Reference Rate + Margin eqv 11.50% for Tranche 1C and 1D.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 197.458.325.081 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of WBW investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 197,458,325,081 and Nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 8.432.900.763 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of WBW IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 8,432,900,763 and Nil, respectively.

e. Utang Bank Sindikasi CTP

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas tranche A dengan jatuh tempo 180 bulan dan tranche B dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi perusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

e. Syndication Bank Loan CTP

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of tranche A facilities with a maturity of 180 months and tranche B with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*, mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend / stop all or part of the implementation of project documents.

lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menanggihkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 335.008.569.439 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CTP investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 335,008,569,439 and Nil, respectively.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit TJJ

a. Loan Agreement and Loan Facility TJJ

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Mei 2015 dari Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, TJJ dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.915.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 1.754.000.000.000 dan Rp 161.000.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 15,35 Km.

Based on Deed No. 86 dated May 29, 2015 of Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notary in Jakarta, TJJ and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk signed a loan agreement providing a loan facilities with a maximum of Rp 1,915,000,000,000 which consists of investment and interest credit during constructions amounted to Rp 1,754,000,000,000 and Rp 161,000,000,000, respectively. Both of loan facilities were provided for construction of Ciawi-Sukabumi Toll Road section 1 (Ciawi-Cigombong) 15.35 Km.

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 14 Juni 2016 dari Muchlis Patahna S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, TJJ dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Adendum Perjanjian Kredit Investasi dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Perjanjian Kredit Investasi *Interest During Construction (IDC)*, dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain:

Based on Deed No. 37 dated June 14, 2016 of Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, TJJ and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into an addendum of Investment Credit agreement and Investment Credit Interest During Construction (IDC), by changing certain clauses among others:

a) Mengubah suku bunga fasilitas Kredit Investasi menjadi sebesar 11,75% per tahun dibayar efektif setiap bulan, dan mengubah suku bunga fasilitas KI IDC menjadi sebesar 11,75% per tahun dibayar efektif setiap bulan

a) Changing loan interest of Investment Credit to 11.75% per year paid effectively every month, and changing Loan Interest Credit Interest During Construction to 11.75% per year paid effectively every month

b) Perubahan *Corporate Guarantee* menjadi atas nama PT Waskita Toll Road.

b) Changing the Corporate Guarantee into PT Waskita Toll Road.

Berdasarkan Akta notaris Sriyani Burlian, S.H No. 34 tanggal 31 Mei 2018, TJJ memperoleh Fasilitas Pinjaman *non-revolving* dengan pagu pinjaman sebesar Rp 2.078.065.000.000 yang terdiri dari *Tranche I* Rp 500.000.000.000 dan *Tranche II* Rp 1.578.065.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai dengan 31 Mei 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun.

Based on Notarial deed No. 34 of Sriyani Burlian, S.H., dated May 31, 2018, TJJ obtained nonrevolving credit facility with a maximum credit of Rp 2,078,065,000,000 which consist of Tranch I Rp 500,000,000,000 and Tranch II of Rp 1,578,065,000,000. The purpose of this credit is for bailout of land acquisition. The credit have a credit term until May 31, 2020 with interest rate of 8.25% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit dana talangan tanah TJJ ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 309.272.078.607 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of a credit facility for land bailouts TJJ to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 309,272,078,607 and Nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit investasi TJJ ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.720.136.391.588 dan Rp 2.321.978.783.431.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of investment credit of TJJ to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,720,136,391,588 and Rp 2,321,978,783,431, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit IDC dari TJJ ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 114.772.922.643 dan Rp 116.382.922.643.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of IDC investment of TJJ to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 114,772,922,643 and Rp 116,382,922,643, respectively.

b. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit KKDM

b. Loan Agreement and Loan Facilitie KKDM

Berdasarkan Akta Notaris Sri Burlian, SH., No. 37 tanggal 31 Mei 2018, KKDM telah menandatangani perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.380.074.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu).

Based on Deed Notary Sri Burlian, SH., No. 37 dated Mei 31, 2018, KKDM obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. These bank provided a credit Working Capital Loan with maximum credit facility limit of Rp 1,380,074,000,000. There facilities is provided for the land acquisition bailout for the development of Bekasi – Cawang - Kampung Melayu (Becakayu).

Berdasarkan Akta Notaris Ariani L, Rachim, SH nomor 72 tanggal 30 Oktober 2015, KKDM mendapatkan fasilitas kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 3.498.899.000.000.

Based on Deed No. 72 dated October 30, 2015, Ariani L, Rachim, SH, KKDM obtained credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 3,498,899,000,000.

Kredit ini untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu, dengan jangka waktu selama 15 tahun dan dengan tingkat bunga BI – 7 days Repo rate dan marjin sebesar 5.25% per tahun.

This credit is for the development of Bekasi-Cawang - Kampung Melayu Toll Road, with term of 15 years and with interest rate BI – 7 days Repo rate and margin 5,25% per annum.

KKDM wajib mempertahankan *financial covenant*, sebagai berikut:

KKDM is required to maintain a financial covenant, as follows:

- *CR (Current Ratio)* minimal 1,0 kali;
- *DER (Debt to Equity Ratio)* maksimal 3,0 kali;
- *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* sejak tahun 2022 minimal 100%.

- *CR (Current Ratio)* at least 1.0 times;
- *DER (Debt to Equity Ratio)* maximum 3.0 times;
- *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* since 2022 at least 100%.

KKDM tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, memperoleh kredit/fasilitas baru atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan pembagian dividen, menerbitkan saham-saham baru yang dapat mengakibatkan prosentase komposisi kepemilikan saham oleh pemegang-pemegang saham existing menjadi terdilusi.

KKDM is not allowed to do any of the following matters such as submitting or transferring all or any of the Company's rights and or obligations arising under Transaction Document to other parties, changing the business activities as contained in the articles of association which may reduce the Company's ability to fulfill its obligations, applying for PKPU or bankruptcy, obtaining new credit/facilities or other loans from a financial institution, binding itself as debt guarantor, changing shareholder structure, giving credit to any party, making dividend payments, issuing new shares which may result in a percentage of composition share ownership by existing shareholders becomes diluted.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit investasi KKDM ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.736.327.999.994 dan Rp 1.745.075.999.998.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of investment credit of KKDM to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,736,327,999,994 and Rp 1,745,075,999,998, respectively.

c. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate* (ATD) ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Berdasarkan Akta notaris Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn No. 5 tanggal 6 Agustus 2018, CCT mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 3.702.485.000.000 yang terdiri dari *Tranche I* Rp 1.002.287.000.000 dan *Tranche II* Rp 2.700.198.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit dihitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai dengan Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun.

c. Loan Agreement and Loan Facilitie CCT

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

The investment credit and interest during constructin credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4,625% during construction and 4,375% during operation.

Based on Notarial deed No. 5 of Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn, dated August 6, 2018, CCT has signed a financing agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit of Rp 3,702,485,000,000 which consist of *Tranche I* Rp 1,002,287,000,000 and *Tranche II* of Rp 2,700,198,000,000. The purpose of credit is for bailout of land acqusition. The credit has a credit term until August 2020 with interest rate of 8.25% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit dana talangan tanah CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.636.355.737.590 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of a credit facility for land bailouts CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,636,355,737,590 and Nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit investasi CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 158.937.243.888 dan Rp 1.557.374.275.217.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of investment credit of CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 158,937,243,888 and Rp 1,557,374,275,217, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit IDC dari CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 4.160.813.683 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of IDC investment of CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 4,160,813,683 and Nil, respectively.

d. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit WBW

Berdasarkan keterangan Notaris Ariani L. Rachim, SH No 23/ALR/NOT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan keputusan Kredit Pembiayaan Sindikasi WBW No. SDK/2.2/3618 tanggal 21 Desember 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan No. S-1053/ SMI/ DPI/1218 tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi WBW untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv 10,50%* untuk *Tranche 1A* dan *1B* dan *Reference Rate + Margin eqv 11,50%* untuk *Tranche 1C* dan *1D*.

d. Loan Agreement and Loan Facilities WBW

Based on the statement of Notary Ariani L. Rachim, SH No. 23/ALR/NOT/XII/2018 dated December 21, 2018 and the Syndicated Financing Credit decision WBW No. SDK/2.2/3618 dated December 21, 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 dated December 21, 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 dated December 10, 2018 and No. S-1053/SMI/ DPI/1218 dated December 21, 2018, WBW entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. In accordance with the decision of the Syndicated Creditors for participation in syndicated financing of PT Waskita Bumi Wira for Credit purposes Development financing investment with an investment credit facility limit of Rp 5,360,084,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including the Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv 10.50% for Tranche 1A and 1B and Reference Rate + Margin eqv 11.50% for Tranche 1C and 1D.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit investasi WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 157.966.660.065 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of investment credit of WBW to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 157,966,660,065 and Nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit IDC dari WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 9.479.237.222 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of IDC investment of WBW to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 9,479,237,222 and Nil, respectively.

e. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit CTP

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas trance A dengan jatuh tempo 180 bulan dan trance B dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi perusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

e. Loan Agreement and Loan Facilities CTP

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of trance A facilities with a maturity of 180 months and trance B with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*, mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menangguhkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend/stop all or part of the implementation of project documents.

CTP menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon maksimal Rp 3.720.000.000.000. Fasilitas ini bisa digunakan sampai dengan 21 Maret 2021 dengan tingkat bunga per tahun 8,25% - 8,50%. Kredit sindikasi ini dijamin dengan tagihan dana talangan tanah kepada Pemerintah dan atau instansi yang berwenang pemilik CTP dengan nilai sebesar Rp 4.044.145.056.979.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo kredit investasi CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 557.541.817.374 dan Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo kredit dana talangan tanah CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 486.511.856.597 dan Nihil.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas tranche A dengan jatuh tempo 180 bulan dan tranche B dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau

CTP signed a syndication loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum ceiling of Rp 3,720,000,000,000. This facility can be used until March 21, 2021 with an annual interest rate of 8.25% - 8.50%. This syndication loan is guaranteed with a bailout from the land to the Government and or an authorized institution that owns a CTP with a value of Rp 4,044,145,056,979.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of investment credit of CTP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 557,541,817,374 and Nil, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of a credit facility for land bailouts CTP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 486,511,856,597 and Nil, respectively.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of tranche A facilities with a maturity of 180 months and tranche B with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve

memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*, mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menanggguhkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 557.548.955.491 dan Nihil.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta notaris H. Bambang Suprianto, S.H., SpN., M.H No. 49 dan 50 tanggal 30 Agustus 2018, WBW mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 400.000.000.000 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.125.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai dengan Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan cession atas tagihan termin/pembayaran yang akan diterima dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atas pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Catatan 8). Selama jangka waktu pemberian fasilitas pinjaman, WBW tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari bank untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang telah dibiayai oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, serta menjaminkan piutang yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini, mengajukan pailit atas diri sendiri, melakukan merger, dan WBW harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham yang telah ada.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman jangka panjang WBW ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. masing-masing sebesar Rp 196.911.572.492 dan Rp 94.580.673.879.

the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend / stop all or part of the implementation of project documents.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CTP investment credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 557,548,955,491 and Nil, respectively.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on Notarial deed No. 49 and 50 of H. Bambang Suprianto, S.H., SpN., M.H, dated August 30, 2018, WBW has signed a financing agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with provided a credit working capital loan of Rp 400,000,000,000 with maximum credit of Rp 1,125,000,000,000. The purpose of this credit is for bailout of land acquisition. The credit has a credit term until August 2020 with interest rate of 8.25% per annum.

This loan facility is collateralized by a cession for the term bill/payment to be received from the Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) for the payment of land acquisition compensation for the Krian-Legundi-Bunder-Manyar toll road project (Note 8). During the term of the loan facility, WBW is not permitted without written approval from the bank to obtain credit facilities from other parties in connection with projects financed by PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, except loans from shareholders and common trade transactions, and pledging collateral as collateral in this agreement, filing for bankruptcy on its own, conducting a merger, and WBW must first notify the bank in writing about its intention to issue new shares and sell existing shares.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of long-term loan WBW to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. amounted to Rp 196,911,572,492 and Rp 94,580,673,879, respectively.

5. PT Bank BNI Syariah

a. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit PBTR

Berdasarkan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 37 tanggal 24 Mei 2017 dan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PT PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Keduapuluh empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan Kredit Bunga masa Konstruksi (IDC) masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Jangka waktu kredit investasi dan IDC adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga adalah rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu Reference Rate (LPS) ditambah dengan Margin atau setara dengan 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah yang terhutang kepada PT Bank BNI Syariah adalah sebesar Rp 195.419.841.463 dan Nihil.

b. Perjanjian Kredit dan Fasilitas Kredit CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,

5. PT Bank BNI Syariah

a. Loan Agreement and Loan Facilitie PBTR

Based on Notarial deed No. 37 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated May 24, 2017 and Notarial deed No. 48 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated August 27, 2018, PT PBTR entered into a syndicated Loan Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

These twenty four banks provided a credit facility with a maximum credit facility limit of Rp 5,248,541,000,000 which consists of Investment Credit and Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 4,919,070,000,000 and Rp 329,471,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pemalang - Batang Toll Road.

The investment credit and IDC have a credit term loan of 162 months or 14 years including a grace period of 24 months or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is weighted average interest rate based on the Reference Rate (LPS) plus Margin or equivalent to 10.5% per annum.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding amount to PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 195,419,841,463 and Nil, respectively.

b. Loan Agreement and Loan Facilitie CCT

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, the Company PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate (ATD)* ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 158.937.243.889 dan Nihil.

6. PT Bank BRISyariah Tbk

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut

Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan Syariah, PT BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4.625% during construction and 4.375% during operation.

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of CCT investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 158,937,243,889 and Nil, respectively.

6. PT Bank BRISyariah Tbk

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan Syariah, PT BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one

memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate (ATD)* ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank BRI Syariah Tbk masing-masing sebesar Rp 59.601.466.459 dan Nihil.

Entitas Anak – WKR

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian No. 8 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi *hardcost* pembangunan SOHO dan apartemen 88 Avenue, proyek KSO Waskita – Darmo, di Surabaya. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini pada 31 Oktober 2018 adalah sebesar Rp 120.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian No. 28 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 340.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi pembangunan 610 unit apartemen di proyek The Reiz Condo PT Waskita Karya Realty, di Medan. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini sebesar Rp 340.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,0 % per tahun.

banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4.625% during construction and 4.375% during operation.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of CCT investment credit loan to PT Bank BRI Syariah Tbk amounted to Rp 59,601,466,459 and Nil, respectively.

Subsidiary – WKR

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

*On October 20, 2017, the Company entered contract agreement No. 8 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk related to loan facility amounting to Rp 300,000,000,000. This loan facility will be used specifically for the construction of *hardcost* development of SOHO and apartment 88, avenue, owned by KSO Waskita – Darmo, in Surabaya. The outstanding principal balance of loan facilities as of October 31, 2018 amounted to Rp 120,000,000,000 with term of withdrawal 60 months after signing contract with interest rate of 9.5% per annum. These facilities require the Company to maintain financial ratio.*

On December 18, 2017, the Company entered contract agreement No. 28 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk related to loan facility amounting to Rp 340,000,000,000. This loan facility will be used specifically for the construction of 610 units of apartment in The Reiz Condo Project owned PT Waskita Karya Realty, in Medan. The outstanding principal balance amounted Rp 340,000,000,000 with term of withdrawal 60 months after signing contract with interest rate of 9.0 % per annum.

Perjanjian kredit ini dijamin dengan: (i) tanah seluas 11.500 m² dan bangunan yang ada dan yang akan ada di atasnya yang merupakan hasil pecah sertifikat dari SHGB No. 1855/Sonokwijenan atas nama PT Darmo Permai seluas 21.370 m² dan SHGB No. 2376/Sonokwijenan atas nama PT Darmo Permai seluas 1.449 m², (ii) legalitas objek bangunan merupakan hasil penggabungan, balik nama PT Waskita Karya Realty dan PT Darmo Permai, serta pemecahan berdasarkan tahap pembangunan proyek (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman jangka panjang WKR ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. masing-masing sebesar Rp 551.805.650.017 dan Rp 460.000.000.000.

**Pihak Ketiga
Perusahaan**

1. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 18 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia sebesar maksimum Rp 5.000.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan *grace period* 2 tahun dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,77% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, proyek Bandara Achmad Yani Semarang, proyek Bendungan Temef NTT, Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan proyek Bendungan Marga Tiga (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;

- *Current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

This credit facilities is secured by: (i) land measuring 11,500 sqm and building upon the land which come from dividing the certificate from SHGB No. 1855/Sonokwijenan with name PT Darmo Permai measuring 21,370 sqm and SHGB No. 2376/Sonokwijenan with name PT Darmo Permai measuring 1,449 sqm, (ii) legality of object comes from merging land, and owned to PT Waskita Karya Realty and PT Darmo Permai, and also separated land based on project construction plan (Notes 16).

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of long-term loan WKR to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. amounted to Rp 551,805,650,017 and Rp 460,000,000,000, respectively.

**Third Parties
The Company**

1. Working Capital Syndication purposes of PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Based on Syndicated Credit Agreement dated September 18, 2017, the Company obtained a syndicated credit facility for the General Working Capital of PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia for a maximum of Rp 5,000,000,000,000. The facility has a term of 5 years from the agreement date, and a grace period of 2 years from agreement date, with an interest rate of 1M JIBOR + 2.77% per annum.

These loans are collateralized by amount due from customers of Kayu Agung - Palembang - Betung II Toll Road project Section 1, Achmad Yani Semarang Airports project, Temef NTT Dam project, Construction of the Rectorate Building, Faculty & Area Building 3 Campus Pillars of the Islam Internasional Indonesia University (UIII) Package I, and Marga Tiga Dam project (Note 5).

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Debt to equity ratio* maximum 3 times;
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 1 time;
- *Current ratio* is at least 100%.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah masing-masing sebesar Rp 1.000.457.500.000 dan Rp 1.102.500.000.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 1.000.457.500.000 dan Rp 1.102.500.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 408.350.000.000 dan Rp 450.000.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 408.350.000.000 dan Rp 450.000.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 405.999.080.710 dan Rp 450.000.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 326.680.000.000 dan Rp 360.000.000.000; PT Bank Chinatrust Indonesia sebesar Rp 245.010.000.000 dan Rp 270.000.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 163.340.000.000 dan Rp 180.000.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 122.505.000.000 dan Rp 135.000.000.000.

As of December 31, 2019 and 2018 the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 1,000,457,500,000 and Rp 1,102,500,000,000; PT Bank of China Ltd amounted to Rp 1,000,457,500,000 and Rp 1,102,500,000,000; PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 408,350,000,000 and Rp 450,000,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 408,350,000,000 and Rp 450,000,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to Rp 405,999,080,710 and Rp 450,000,000,000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk amounted to Rp 326,680,000,000 and Rp 360,000,000,000; PT Bank Chinatrust Indonesia amounted to Rp 245,010,000,000 and Rp 270,000,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia amounted to Rp 163,340,000,000 and Rp 180,000,000,000; PT Bank SBI Indonesia amounted to Rp 122,505,000,000 and Rp 135,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo pinjaman Perusahaan yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp 204.085.000.000; PT Bank of China Ltd Rp 204.085.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia Rp 83.300.000.000; PT Bank Permata Tbk Rp 83.300.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk Rp 83.300.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Rp 66.640.000.000; PT Bank Chinatrust Indonesia Rp 49.980.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia Rp 33.320.000.000; PT Bank SBI Indonesia Rp 24.990.000.000. Total seluruh saldo pinjaman adalah Rp 833.000.000.000.

As of December 31, 2019, the Company's current portion of long term loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 204,085,000,000; PT Bank of China Ltd Rp 204,085,000,000; PT Bank KEB Hana Indonesia Rp 83,300,000,000; PT Bank Permata Tbk Rp 83,300,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk Rp 83,300,000,000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Rp 66,640,000,000; PT Bank Chinatrust Indonesia Rp 49,980,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia Rp 33,320,000,000; PT Bank SBI Indonesia Rp 24,990,000,000. The total loan balance is Rp 833,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat saldo pinjaman Perusahaan yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp 102.042.500.000; PT Bank of China Ltd Rp 102.042.500.000; PT Bank KEB Hana Indonesia Rp 41.650.000.000; PT Bank Permata Tbk Rp 41.650.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk Rp 41.650.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Rp 33.320.000.000; PT Bank Chinatrust Indonesia Rp 24.990.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia Rp 16.660.000.000; PT Bank SBI Indonesia Rp 12.495.000.000. Total seluruh saldo pinjaman adalah Rp 416.500.000.000.

As of December 31, 2018, the Company's current portion of long term loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 102,042,500,000; PT Bank of China Ltd Rp 102,042,500,000; PT Bank KEB Hana Indonesia Rp 41,650,000,000; PT Bank Permata Tbk Rp 41,650,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk Rp 41,650,000,000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Rp 33,320,000,000; PT Bank Chinatrust Indonesia Rp 24,990,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia Rp 16,660,000,000; PT Bank SBI Indonesia Rp 12,495,000,000. The total loan balance is Rp 416,500,000,000.

2. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 27 Nopember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar maksimum Rp 2.350.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan

2. Working Capital Syndication purposes of PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)

Based on Syndicated Credit Agreement dated November 27, 2018, the Company obtained a syndicated credit facility for the General Working Capital of PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, and PT Bank Resona Perdania Indonesia for a maximum of Rp 2,350,000,000,000. The facility has a term

grace period 21 bulan dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,50 % per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi- Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;
- *Current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dan Rp 277.800.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 500.000.000.000 dan Rp 138.900.000.000; PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar Rp 200.000.000.000 dan Rp 55.500.000.000; PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 150.000.000.000 dan Rp 27.800.000.000; dan PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp 500.000.000.00 dan Nihil.

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah

Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000 sesuai Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. 038/OL/CBGII/II/19 tanggal 12 Pebruari 2019. Fasilitas tersebut dapat digunakan hingga 20 Desember 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 3B (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

of 5 years from the agreement date, and a *grace period* of 21 months from agreement date, with an interest rate of 1M JIBOR + 2.50% per annum.

These loans are collateralized by amount due from customer of the construction of the Tebing Tinggi – Parapat (Stage 1) Tebing Tinggi – Serbelawan include Simpang Susun Serbelawan Toll Road and Construction of Nines Plaza and Residence Project (Note 5).

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Debt to equity ratio* maximum 3 times;
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 1 time;
- *Current ratio* is at least 100%.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of December 31, 2019 and 2018 the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 1,000,000,000,000 and Rp 277,800,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 500,000,000,000 and Rp 138,900,000,000; PT Bank Resona Perdania Indonesia amounted to Rp 200,000,000,000 and Rp 55,500,000,000; PT Bank Shinhan Indonesia amounted to Rp 150,000,000,000 and Rp 27,800,000,000; and PT Bank QNB Indonesia amounted to Rp 500,000,000,000 and Nil.

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit

The Company obtained a Financing Facility of Musyarakah Special Transaction amounted to Rp 500,000,000,000 according to Extension Letter of Financing Facility No. 038/OL/CBGII/II/19 dated February 12, 2019. The facility can be used until December 20, 2020.

These loans are collateralized with all amount due from customer of Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Package IV Section 3B (Note 5).

The Company should maintain interest bearing *debt to equity ratio* maximum 3 times, *interest service coverage ratio* minimum 1.5 times and *current ratio* minimum 100%.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar Rp 500.000.000.000 dan Nihil.

As of December 31, 2019 and 2018 the balance of Company's loan to PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit amounted to Rp 500,000,000,000 and Nil, respectively.

Entitas Anak – WTR

Sindikasi Modal Kerja WBW

Berdasarkan keterangan Notaris Ariani L. Rachim, SH No 23/ALR/NOT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan keputusan Kredit Pembiayaan Sindikasi PT Waskita Bumi Wira No. SDK/2.2/3618 tanggal 21 Desember 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan No. S-1053/SMI/DPI/1218 tanggal 21 Desember 2018, PT Waskita Bumi Wira telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. PT Waskita Bumi Wira menerima Sindikasi Kredit, untuk keperluan pembiayaan pembangunan jalan tol dengan maksimum kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000.

Jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk Grace Period dengan suku bunga masa konstruksi adalah Reference Rate + Margin eqv. 10,50% untuk Tranche 1A dan 1B dan Reference Rate + Margin eqv.11,50% untuk Tranche 1C dan 1D.

Sindikasi Modal Kerja CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakshmiyati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,

Subsidiary – WTR

Working Capital Syndication purposes of WBW

Based on the statement of Notary Ariani L. Rachim, SH No. 23/ALR/NOT/XII/2018 dated December 21, 2018 and the Syndicated Financing Credit decision PT Waskita Bumi Wira No. SDK/2.2/3618 dated December 21, 2018, No. 1236/SJK/SDK/12/2018 dated December 21, 2018, No. O64/S/CSAD/XII/2018 dated December 10, 2018 and No. S-1053/SMI/DPI/1218 dated December 21, 2018, PT Waskita Bumi Wira has signed a Syndicated Credit agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Syariah, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah. PT Waskita Bumi Wira received Credit Syndication, for financing the construction of toll roads with a maximum investment credit of Rp 5,360,084,000,000.

With a term of 180 months and on the Signing of the Credit Agreement including the Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 10.50% for Tranche 1A and 1B and Reference Rate + Margin eqv. 11.50% for Tranche 1C and 1D.

Working Capital Syndication of CCT

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakshmiyati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT obtained a loan agreement syndication with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk unit usaha Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate* (ATD) ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Sindikasi Modal Kerja CTP

Berdasarkan perjanjian No. 45 tanggal 21 Desember 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., CTP telah menandatangani kredit sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. CTP mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal Rp 7.404.162.000.000 yang terdiri dari fasilitas *tranche A* dengan jatuh tempo 180 bulan dan *tranche B* dengan jatuh tempo 204 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi perusahaan jalan tol berdasarkan PPJT, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengoperasian proyek, gadai atas rekening, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, jaminan perusahaan dari WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia dan gadai atas saham yang dimiliki oleh WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia di CTP.

Pembatasan atas fasilitas kredit ini adalah CTP tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak/kewajiban CTP yang timbul berdasarkan dokumen transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha, mengajukan permohonan pernyataan pailit, memperoleh kredit/fasilitas baru ataupun pinjaman lainnya dari lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, mengubah susunan pemegang saham,

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara Business Unit Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Business Unit Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Business Unit Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Business Unit Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4,625% during construction and 4,375% during operation.

Working Capital Syndication of CTP

Based on agreement No. 45 dated December 21, 2018 from Notary Ariani L. Rachim, S.H., CTP has signed a syndication loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and

*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. CTP obtained investment credit for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum loan of Rp 7,404,162,000,000 consisting of *tranche A* facilities with a maturity of 180 months and *tranche B* with a maturity of 204 months. This loan is secured by toll road concession rights based on PPJT, all bills and operating income from project operations, liens on accounts, claims for income from insurance claims, corporate guarantees from WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia and pawns on shares owned by WTR and PT Akses Pelabuhan Indonesia in CTP.*

The limitation of this credit facility is that CTP is not permitted to surrender or transfer all or part of the rights/obligations of CTP arising based on transaction documents to other parties, make changes to business activities, apply for bankruptcy statements, obtain credit/new facilities or other loans from institutions finance or other third parties, binding themselves as a guarantor of debt or pledging company assets to other parties, changing the composition of shareholders, giving credit to any party, making changes to PPJT and

memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan perubahan PPJT dan atau rencana bisnis, melakukan pembagian dividen, melakukan pembayaran pokok hutang dan atau bunga atas pinjaman, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun, mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan lain, melakukan *go public*, mengadakan penggabungan usaha, akuisi atau konsolidasi, mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, mengalihkan hak konsesi atas PPJT kepada pihak lain, wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana CTP menjadi pihak didalamnya, mencabut, mengakhiri, dan atau menanggguhkan/menghentikan seluruh atau sebagian dari pelaksanaan dokumen proyek.

Sindikasi Modal Kerja PBTR

Berdasarkan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 37 tanggal 24 Mei 2017 dan akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PT PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Keduapuluh empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan Kredit Bunga masa Konstruksi (IDC) masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Jangka waktu kredit investasi dan IDC adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga adalah rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu Reference Rate (LPS) ditambah dengan Margin atau setara dengan 10,5% per tahun.

or business plans, making dividends, paying principal debts and or interest for loans, sell, transfer or transfer in any way, enter into a new investment in another company, go public, merge, acquire or consolidate, submit a moratorium, dissolve the company, liquidate or request a postponement of payments to the authority agencies, transfer concession rights to PPJT to other parties, default on other agreements in which the CTP is a party to it, revoke, terminate, or suspend / stop all or part of the implementation of project documents.

Working Capital Syndication of PBTR

Based on notarial deed No. 37 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated May 24, 2017 and Notarial deed No. 48 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated August 27, 2018, PT PBTR entered into a Syndicated Credit Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

These twenty four banks provided a credit facility with a maximum credit facility limit of Rp 5,248,541,000,000 which consists of Investment Credit and Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 4,919,070,000,000 and Rp 329,471,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pemalang - Batang Toll Road.

The investment credit and IDC have a credit term loan of 162 months or 14 years including a grace period of 24 months or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is weighted average interest rate based on the Reference Rate (LPS) plus Margin or equivalent to 10.5% per annum.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 372.236.723.405, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 473.899.980.196, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 79.468.621.944, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 483.478.565.412, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 19.867.155.486, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 428.617.220.709, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 73.293.668.934, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.855.381.910, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 60.775.253.658, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 118.717.641.005, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 263.833.567.454, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.729.601.441, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 81.552.254.749, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 83.749.444.825, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 39.774.873.082, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 199.400.594.374, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 40.776.127.378, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 274.161.863.049, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.812.500.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 372.353.468.791, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 362.650.097.647, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 641.517.333.173, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 140.391.796.492, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 247.664.957.453, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 807.903.100.025, PT Bank Nagari sebesar Rp 199.500.000.000, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.037.043.963.330, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 149.624.999.998, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 290.213.649.549, dan PT Bank DKI sebesar Rp 74.446.573.349.

As of December 31, 2019, the Company's loan balance to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Rp 372,236,723,405, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Business Unit Syariah amounted to Rp 473,899,980,196, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Business Unit Syariah amounted to Rp 79,468,621,944, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk amounted to Rp 483,478,565,412, PT Bank Sumsel Babel – Business Unit Syariah amounted to Rp 19,867,155,486, PT Bank Aceh - Business Unit Syariah amounted to Rp 428,617,220,709, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Business Unit Syariah amounted to Rp 73,293,668,934, PT Bank Pembangunan Daerah DIY - Business Unit Syariah amounted to Rp 48,855,381,910, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 60,775,253,658, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 118,717,641,005, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat amounted to Rp 263,833,567,454, PT Bank Kalimantan Selatan - Business Unit Syariah amounted to Rp 68,729,601,441, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara amounted to Rp 149,625,000,000, PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat amounted to Rp 81,552,254,749, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi amounted to Rp 149,625,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu amounted to Rp 83,749,444,825, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung amounted to Rp 39,774,873,082, PT Bank Pembangunan Daerah DIY amounted to Rp 49,875,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah amounted to Rp 49,875,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat amounted to Rp 74,812,500,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung amounted to Rp 372,353,468,791, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau amounted to Rp 362,650,097,647, PT Bank Pembangunan Daerah Papua amounted to Rp 641,517,333,173, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara amounted to Rp 140,391,796,492, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur amounted to Rp 247,664,957,453, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk amounted to Rp 807,903,100,025, PT Bank Nagari amounted to Rp 199,500,000,000, PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 1,037,043,963,330, PT Bank Artha Graha International Tbk amounted to Rp 149,624,999,998

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 171.699.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 171.699.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 128.774.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 85.849.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 55.802.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 42.925.000.000, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp 354.413.305.370.

Entitas Anak – WKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Penawaran Pemberian Kredit No. 115/KKO-KO2/2019 tanggal 30 Oktober 2019, PT Waskita Karya Infrastruktur memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berupa:

- a. Fasilitas Kredit Investasi I dengan maksimal pinjaman Rp 142.395.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- b. Fasilitas Kredit 2 – KI IDC dengan maksimal pinjaman Rp 2.123.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- c. Fasilitas Kredit KMK R/C Terbatas *Swicthable Non Cash Loan* dengan maksimal pinjaman Rp 50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,00% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Nopember 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan estimasi luas tanah 51.848 m² dan luas bangunan 8.000 m², mesin-mesin yang menjadi objek investasi dengan nilai sebesar Rp 58.300.000.000, piutang usaha baik yang telah dan akan ada kemudian sebesar Rp 95.000.000.000, dan *letter of undertaking notarill* dari pemegang saham.

Rp 149,624,999,998, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah amounted to Rp 290,213,649,549, and PT Bank DKI amounted to Rp 74,446,573,349.

As of December 31, 2018, the Company's loan balance to PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat amounted to Rp 171,699,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung amounted to Rp 171,699,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau amounted to Rp 128,774,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Papua amounted to Rp 85,849,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara amounted to Rp 55,802,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur amounted to Rp 42,925,000,000, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur amounted to Rp 354,413,305,370.

Subsidiary – WKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on Credit Offering No. 115/KKO-KO2/2019 dated October 30, 2019, PT Waskita Karya Infrastruktur obtained credit facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk in the form of:

- a. Investment Credit Facility I with a maximum loan of Rp 142,395,000,000 with an interest rate of 10.50% p.a effective floating rate. Duration of facility until August 12, 2025.
- b. Credit Facility 2 - KI IDC with a maximum loan of Rp 2,123,000,000 with an effective interest rate of 10.50% p.a effective floating rate. Duration of facility until August 12, 2025.
- c. KMK R/C Credit Facility Limited *Swicthable Non Cash Loan* with a maximum loan Rp 50,000,000,000 with an effective interest rate of 10.00% p.a floating rate. Facility period is up to November 12, 2020.

This loan is secured by a plot of land and a building with an estimated land area of 51,848 m² and a building area of 8,000 m², machines which are the object of investment with a value of Rp 58,300,000,000, both existing and future accounts receivable amounted to Rp 95,000,000,000, and a letter of undertaking notary from the shareholders.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pembatasan terhadap pinjaman ini antara lain:

- Memindahtangankan agunan
- Memperoleh fasilitas kredit untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai oleh bank
- Menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminkan kepada pihak lain
- Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang
- Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban WKI atas fasilitas kredit kepada pihak lain

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo pinjaman WKI kepada kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 96.448.714.759 dan Nihil.

31. UTANG VENTURA BERSAMA JANGKA PANJANG

Ventura Bersama/*Joint Ventures*

Jumlah/Total

Akun ini merupakan penerimaan termin dari ventura bersama yang diterima oleh Perusahaan dan akan diperhitungkan pada saat penutupan kerjasama operasi tersebut.

Pihak Berelasi/ Related Parties

BAP - Waskita
Waskita - Nindya
Waskita - PP - HK
Waskita - Wika
Lain-lain/ *Others* (di bawah/below Rp 30 Miliar/*Billion*)
Sub Jumlah/ Sub Total

Pihak Ketiga / Third Parties

Waskita - JPC
Waskita - Trinititi
Waskita - Arkonin
Waskita - Wika - Shanghai
Waskita - Yasa
Waskita - Citra Mandiri
Waskita - Abdi Mulia Berkah
Waskita - Gorip
Lain-lain/ *Others* (di bawah/below Rp 30 Miliar/*Billion*)
Sub Jumlah/ Sub Total
Jumlah/ Total

32. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

Entitas anak, WTR menandatangani Perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap untuk pembelian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Restrictions on this loan include:

- Transferring collateral*
- Obtain credit facilities for the same project that has been financed by the bank*
- Securing company assets pledged to other parties*
- Submit an application and or order another party to submit an application to the court to be declared bankrupt or postpone payment of debt*
- Give up part or all of the rights and or obligations of WKI for credit facilities to other parties*

As of December 31, 2019 and 2018, the balance of WKI's loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk amounted to Rp 96,448,714,759 and Nil, respectively.

31. NON-CURRENT JOINT VENTURES PAYABLES

2019 Rp	2018 Rp
773.433.781.621	671.607.440.338
773.433.781.621	671.607.440.338

This account represents the account receivables collection that is received by the Company and will be settled at the end of those joint operational.

2019 Rp	2018 Rp
133.731.554.160	94.294.913.908
35.720.344.182	35.731.986.582
28.594.636.816	21.792.951.598
13.483.058.451	86.239.245.921
26.642.988.074	46.825.650.367
238.172.581.683	284.884.748.376
177.912.588.242	--
73.731.154.226	73.731.154.226
51.906.264.275	70.871.644.750
48.054.632.998	11.829.446.176
38.356.117.600	39.896.509.415
33.466.449.408	--
28.694.180.614	39.519.957.065
24.759.447.418	71.940.206.775
58.380.365.157	78.933.773.555
535.261.199.938	386.722.691.962
773.433.781.621	671.607.440.338

32. DEBT PURCHASES OF FIXED ASSETS

A subsidiary, WTR entered into Loan for Purchase of Fixed Assets Agreement in order to purchase vehicles with detail as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
PT Toyota Astra Financial	8.710.487	204.705.835
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(8.710.487)	(198.479.272)
Bagian Jangka Panjang	--	6.226.563

PT Toyota Astra Financial
Less: current portion maturities
in one year
Long-Term Portion

Utang pembelian aset tetap dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dan jatuh tempo paling akhir 24 Januari 2020. Utang pembelian aset tetap dijamin dengan aset yang dibeli.

Debt purchases of fixed assets bears interest at 18% per annum with maturity date on January 24, 2020. Debt of fixed assets is secured by the purchased assets.

33. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG

Pihak Ketiga/ Third Parties

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
The Ministry of Public Works and Housing
PT Akses Pelabuhan Indonesia
Lain-lain/ Others
Jumlah/ Total

33. OTHER LONG-TERM PAYABLES

	2019 Rp	2018 Rp
	1.737.577.083.217	1.548.508.712.641
	111.539.610.000	--
	27.294.151.593	625.992.937
Jumlah/ Total	1.876.410.844.810	1.549.134.705.578

34. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG

Rincian saldo uang muka kontrak jangka panjang sebagai berikut:

Pihak Berelasi/ Related Parties

PT Hutama Karya
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)
Sub Jumlah/ Sub Total

Pihak Ketiga/ Third Parties

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/
The Ministry of Public Works and Housing
Kementrian Agama/ The Ministry of Religion
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)
Sub Jumlah/ Sub Total
Jumlah/ Total

34. ADVANCES ON LONG-TERM CONTRACT

The details of outstanding advances on long-term contract were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
	--	65.577.838.430
	2.710.233.423	11.183.137.520
Sub Jumlah/ Sub Total	2.710.233.423	76.760.975.950
	71.167.498.071	20.761.708.668
	44.916.052.020	49.447.140.764
	--	20.710.663.874
	47.111.484.046	95.220.272.978
Sub Jumlah/ Sub Total	163.195.034.137	186.139.786.284
Jumlah/ Total	165.905.267.560	262.900.762.234

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Rincian kewajiban imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya berdasarkan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Perusahaan/ the Company
Entitas Anak/ Subsidiaries
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Trans Jabar Tol
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Waskita Toll Road
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
PT Waskita Karya Realty
PT Cimanggis Cibitung Tollways
Jumlah/ Total

Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan.

35. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The details of post-employment benefits under Labor Law No 13/2003 and other long-term benefit based on its entities that is presented in consolidated statements of financial position are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
	127.517.431.518	56.466.776.675
	19.499.207.541	10.263.807.268
	2.183.976.444	2.327.916.133
	1.822.424.766	1.536.615.630
	1.567.150.313	742.646.791
	722.062.236	532.194.904
	897.915.536	471.422.904
	303.389.128	430.760.619
Jumlah/ Total	154.513.557.482	72.772.140.924

The Company

The Company provides a defined benefit and other long terms benefit covering all the qualified employees.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Nilai kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dari manfaat pasca-kerja di bawah UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The amount of liabilities included in the consolidated statements of financial position arising from post employment benefits under Labor Law No. 13/2003 and other long-term benefit are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No.13/2003	110.333.938.498	33.116.247.246	Post-employment benefits under Labor Law No. 13/2003
Manfaat jangka panjang lainnya	17.183.493.020	23.350.529.429	Other long-term benefit
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja - Akhir	127.517.431.518	56.466.776.675	Present Value Benefit Obligation - Ending

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973. Pada tahun 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama No. WK: L.20/P/WK/2006 dan No. AJS: 079.SJ.U.076 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

The pension plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter KEP-84/MK/IV/2/1973 dated February 28, 1973. In 2006, the Company signed a cooperation agreement No. WK:L.20/P/WK/2006 and No. AJS: 079.SJ.U.076 on July 28, 2006 concerning to Management of Severance Group Insurance Program and Addendum I to Cooperation Agreement No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 on April 25, 2008.

Imbalan kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Employee benefit typically exposes the Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Investment risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan *real estate*. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan *real estate* untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Interest Risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Longevity risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

a. Program Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti mencakup semua karyawan tetap lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai Kini Kewajiban	460.100.011.933	354.529.200.634	Present Value of Obligations
Nilai Wajar Aset Program	(349.766.073.435)	(321.412.953.388)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	<u>110.333.938.498</u>	<u>33.116.247.246</u>	Net Liability Arising from Defined Benefits Obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas	354.529.200.634	356.850.052.675	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	52.656.332.941	27.404.980.147	Current Service Cost
Biaya Bunga	29.273.251.254	24.490.177.647	Interest Cost
Kerugian Kurtailment	24.845.667.608	8.261.422	Loss from Curtailment
Imbalan yang Dibayarkan	(49.155.739.424)	(18.354.221.422)	Benefits Payment
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto:			Remeasurement on the Net Defined Benefit (Asset) Liability:
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Penyesuaian Pengalaman	47.951.298.920	(35.870.049.835)	Actuarial (Gains)/Losses Arising from Experience Adjustment
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas	<u>460.100.011.933</u>	<u>354.529.200.634</u>	Ending Balance of Present Value Obligation

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai wajar aset program- awal	321.412.953.388	274.519.197.981	Opening fair value of plan assets
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian):			Remeasurement gain (loss):
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto)	27.320.101.037	19.216.343.858	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest expense)
Kontribusi pemberi kerja	60.675.133.968	54.956.196.011	Contributions from the employer
(Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	(10.486.375.534)	(11.024.178.013)	Actuarial (Loss) on Assets Programs
Pembayaran manfaat	(49.155.739.424)	(16.254.606.449)	Benefits paid
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	<u>349.766.073.435</u>	<u>321.412.953.388</u>	Closing Fair Value of Plan Assets - Ending

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

a. Post-employment Benefit Plan

The Company established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees. The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with Law No. 13 Year 2003 regarding to pertaining to man power, using actuarial techniques, within the framework of the implementation of Indonesian PSAK No. 24 (Revised 2013) of Employee Benefits.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

Movements in the present value of the defined benefit liabilities were as follows:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rates expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Berikut adalah analisa sensitivitas atas asumsi signifikan yang mempengaruhi nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini:

The followings are the sensitivity analysis of significant assumptions that affect the present value of obligations and current service costs:

	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation Rp	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost Rp
2019:		
Perubahan Tingkat Diskonto/ Changes in Discounted Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9,0%	434.748.465.530	49.134.586.237
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 8,0%	460.100.011.933	52.656.332.941
Turun Menjadi/ Decrease to 7,0%	489.694.343.790	56.975.002.736
Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/ Changes in Wages Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9%	489.397.826.075	56.930.625.653
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	460.100.011.933	52.656.332.941
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	434.531.440.653	49.105.308.625
2018:		
Perubahan Tingkat Diskonto/ Changes in Discounted Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9,5%	334.261.036.218	24.579.939.777
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 8,5%	354.529.200.634	27.404.980.147
Turun Menjadi/ Decrease to 7,5%	377.909.227.668	30.871.083.564
Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/ Changes in Wages Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9%	377.791.351.333	30.852.980.410
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	354.529.200.634	27.404.980.147
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	333.998.461.164	24.544.616.876

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 19,49 tahun dan 17,03 tahun.

The average duration of the benefit obligation at December 31, 2019 and 2018 is 19.49 years and 17.03 years.

b. Manfaat Jangka Panjang Lainnya

b. Other Long-term Benefits

Perusahaan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk satu kali gaji.

The Company also provides long service leaves to the employee who have already rendered 6 years of service in the form of cash amounting one time salary.

Mutasi nilai kini manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Movements in the present value long-term benefits were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo Awal Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	23.350.529.429	24.028.183.322	Beginning Balance Long-Term Benefits Obligation
Biaya Jasa Kini	2.530.037.833	4.108.641.367	Current Service Cost
Biaya Bunga (Keuntungan) Kerugian Kurtailmen	1.973.023.994 (10.670.098.236)	1.681.972.832 (6.468.268.092)	Interest Cost (Gain) Loss from Curtailment
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	17.183.493.020	23.350.529.429	Ending Balance Long-Term Benefits Obligation

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Praptasentosa Gunajasa. Actuarial assumptions as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Tingkat Diskonto	8,00%	8,50%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%	8,00%	Annual Salary Increasing Rate
Tingkat Mortalitas	TMI 2011	TMI 2011	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5,00% TMI 2011	0,00% TMI 2011	Disability Rate
Umur Pensiun Normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)

36. MODAL SAHAM

a. Modal Saham

Sesuai daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

36. SHARE CAPITAL

a. Share Capital

According to the shareholders list from Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, the composition of the Company's capital were as follows:

	2019 dan/and 2018		
	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	
Modal Dasar	26.000.000.000		2.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00%	100
Saham Biasa (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600
Masyarakat (kepemilikan <0,5%)	4.610.204.713	33,96%	461.020.471.299
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.573.902.600	100,00%	1.357.390.259.999

Dibawah ini merupakan Akta Notaris terkait modal saham:

Below are the Notarial Deed related to share capital:

- Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 26 Mei 2015 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 186.471.154 lembar. Modal disetor semula 9.727.504.205 lembar atau setara dengan Rp 972.750.420.500 menjadi 9.913.975.359 lembar atau setara Rp 991.397.535.900. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03/0934821 tanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 30 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penambahan jumlah modal disetor sebanyak 3.653.498 lembar, semula 9.913.975.360 lembar atau setara Rp 991.397.536.000 menjadi 13.567.473.559 lembar atau setara dengan Rp 1.356.747.356.000. Perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-3536245.AH.01.11 tanggal 30 Juli 2015.
- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 6 tanggal 4 Pebruari 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan jumlah modal disetor sebanyak 5.019.750 lembar saham, semula
- Based on the Deed No. 46 dated May 26, 2015 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increase in the Company's to 186,471,154 shares. Paid up capital from 9,727,504,205 shares or Rp 972,750,420,500 to 9,913,975,359 shares or Rp 991,397,535,900. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03/0934821 dated May, 26, 2015. Based on the Deed No. 37 from dated July 30, 2015 Notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, there was an increasing number of paid-in capital as much as 3,653,498 shares, paid up capital from 9,913,975,360 shares or Rp 991,397,536,000 become 13,567,473,559 shares or Rp 1,356,747,356,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-3536245.AH.01.11 dated July 30, 2015.
- Based on the Deed No. 6 of General Shareholders Meeting dated February 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the Company's paid-in capital of 5,019,750 shares, from 13,567,473,559 shares (equal to

13.567.473.559 lembar saham atau setara Rp 1.356.747.356.000 menjadi 13.572.493.310 lembar saham atau setara Rp 1.357.249.331.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0016611-AH.01.03 tanggal 5 Pebruari 2016.

Rp 1,356,747,356,000 to 13,572,493,310 shares equal to Rp 1,357,249,331,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decree No. AHU-0016611-AH.01.03 dated February 5, 2016.

- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 50 tanggal 25 Nopember 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebanyak 842.439 lembar saham, semula 13.572.493.310 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.249.331.000 menjadi 13.573.335.750 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.333.575.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH. 01.03-0102149 tanggal 25 Nopember 2016.
- Sesuai dengan Akta No. 19 tahun 2018 tanggal 6 April 2018 tentang perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor pasal 4 ayat 3 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0137350 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018 menerangkan bahwa dengan adanya pelaksanaan MESOP sebanyak 24.200 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus) saham seri B masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) maka jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari 13.573.878.400 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus) saham menjadi 13.573.902.600 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus) saham.

- Based on the Deed No. 50 of General Shareholders Meeting dated November 25, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the Company's paid-in capital of 842,439 shares, from 13,572,493,310 shares or equal to Rp 1,357,249,331,000 to 13,573,335,750 shares or equal to Rp 1,357,333,575,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No. AHU-AH.01.03-0102149 dated November 25, 2016.

- Based on the Deed No. 19 of 2018 dated April 6, 2018 regarding the Amendment of the Issuance of Paid-up Capital of Article 4 paragraph 3 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0137350 Year 2018 date April 6, 2018 explains that with the implementation of MESOP 24,200 (Twenty Four Thousand Two Hundred) of Series B shares each with nominal value of Rp 100.00 (one hundred Rupiah) or with a total nominal value of Rp 2,420,000.00 (two million four hundred and twenty thousand Rupiah), the total issued and paid up capital of the Company increased from 13,573,878,400 (thirteen billion five hundred seventy three million eight hundred seventy eight thousand four hundred) shares to 13,573,902,600 (thirteen billion five hundred seventy three million nine hundred two thousand and six hundred) shares.

37. TAMBAHAN MODAL DISETOR

37. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	2019 Rp	2018 Rp	
Agio Saham			Premium on Share
Tambahan modal disetor dari penawaran umum saham			Additional paid-in capital of a public offering
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.082.315.000			of shares to the public at 3,082,315,000 shares
saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang			with a nominal value of Rp 100 per share,
ditawarkan Rp 380 per saham	863.048.200.000	863.048.200.000	which offered Rp 380 per share
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham karyawan	118.826.375.828	118.826.375.828	Additional paid-in capital from the exercise of employee stock options
Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)			Additional paid-in capital of a Limited Public Offering (LOP I)
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.653.498.200 saham dengan			of shares to the public at 3,653,498,200 shares with
nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 1.450 per saham	4.969.551.418.508	4.969.551.418.508	par value Rp 100 per share, offered Rp 1,450 per share
Dikurangi dengan biaya emisi saham	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)	Less: Share Issuance Cost
Dikurangi dengan biaya emisi saham penawaran umum terbatas	(37.328.848.507)	(37.328.848.507)	Less: Share Issuance Cost on Limited Public Offering
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan			Adjustment for Changes Ownership
atas Entitas Anak	(330.160.517.937)	(330.160.517.937)	in Subsidiaries
Saldo Tambahan modal disetor	5.552.026.262.437	5.552.026.262.437	Total Paid In Capital

Tambahan modal disetor - agio saham merupakan agio saham yang berasal dari penawaran umum saham Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya emisi saham.

Additional paid in capital – premium on share represent share premium resulting from public offering by the Company net off share issuance cost.

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 yang diubah dengan Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2012 sebesar Rp 31.910.365.455 dan penawaran umum terbatas I tahun 2015 sebesar Rp 37.328.848.507.

Share issuance costs are payments related to the issuance of Company's equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-97/PM/1996 dated May 28, 1996 as amended by Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000, regulation No. VIII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share issuance costs derived from the initial public offering in 2012 amounted to Rp 31,910,365,455 and limited public offer I year 2015 amounted to Rp 37,328,848,507.

38. SALDO LABA

	2019 Rp	2018 Rp	
Telah Ditentukan Penggunaannya			Appropriated
Saldo Awal	1.583.494.837.349	920.938.115.937	Beginning Balance
Penambahan Dana Cadangan	88.899.090.863	662.556.721.412	Addition on Reserved Fund
Saldo Akhir	1.672.393.928.212	1.583.494.837.349	Ending Balance
Belum Ditentukan Penggunaannya			Unappropriated
Saldo Awal Tahun	8.763.909.422.956	5.760.142.991.677	Beginning Balance
Dividen	(990.709.507.966)	(776.342.383.468)	Dividend
Pembentukan Cadangan Umum	(88.899.090.863)	(662.556.721.412)	Allocation to General Reserve
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	938.142.364.887	3.962.838.031.865	Profit Attributable to Owners of the Parent Entity
Pengukuran Kembali Program			Remeasurement of Defined
Imbalan Pasti	(61.427.295.899)	27.790.965.459	Benefit Plans
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	--	452.036.538.835	Adjustment for Ownership Changes in Subsidiaries
Saldo Akhir Tahun	8.561.015.893.115	8.763.909.422.956	Ending Balance

38. RETAINED EARNINGS

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 9 Mei 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 990.709.507.966 dan dana untuk PKBL tahun 2019 dihitung maksimal 2% dari laba bersih tahun buku 2018 dan menjadi beban ditahun berjalan.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGS) dated May 9, 2019, the shareholders of the Company approved the distribution of cash dividend amounted to Rp 990,709,507,966 and the fund of CSR in 2019 calculated maximum 2% of the net profit fiscal year 2018 and became expenses in current year.

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 24 April 2019 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., pemegang saham WBP menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WBP tahun 2018 sebesar Rp 55.173.639.409 dan pembagian dividen tunai sebesar Rp 551.607.222.015.

Based on Notarial Deed No. 46 dated April 24, 2019 of Notary Fathiah Helmi S.H., the shareholders of WBP approved to provide general reserve from WBP's profits in 2018 amounted to Rp 55,173,639,409 and distribution of cash dividend amounted to Rp 551,607,222,015.

Berdasarkan Akta Notaris No 59 tanggal 15 April 2019 dari Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., pemegang saham WKR menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WKR tahun 2018 sebesar Rp 33.725.451.454.

Based on the Notarial Deed No. 59 dated April 15, 2019 of Notary Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., the shareholders of WKR approved to provide general reserve from the WKR's profits in 2018 amounted to Rp 33,725,451,454.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 06 April 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp 662.556.721.412, pembagian dividen tunai sebesar Rp 776.342.383.468 dan dana untuk PKBL tahun 2018 dihitung maksimal 2% dari laba bersih tahun buku 2017 dan menjadi beban ditahun berjalan.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGS) dated April 6, 2018, the shareholders of the Company approved to provide general reserve from the Company's profits in 2017 amounted to Rp 662,556,721,412, distribution of cash dividend amounted to Rp 776,342,383,468 and the fund of CSR in 2018 calculated maximum 2% of the net profit fiscal year 2017 and became expenses in current year.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Berdasarkan Akta Penyertaan Keputusan RUPST No. 7 tanggal 5 April 2018 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham WBP menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WBP tahun 2017 sebesar Rp 50.016.507.525.

Based on the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGS) No. 7 dated April 5, 2018 of Notary Fathiah Helmi, S.H., shareholders of WBP approved to provide general reserve from the WBP's profits in 2017 amounted to Rp 50,016,507,525.

Berdasarkan Akta No 16 tanggal 21 Maret 2018 dari Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., pemegang saham WKR menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WKR tahun 2017 sebesar Rp 25.484.482.115.

Based on the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGS) No. 16 dated March 21, 2018 of Notary Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., shareholders of WKR approved to provide general reserve from the WKR's profits in 2017 amounted to Rp 25,484,482,115.

Perusahaan dan entitas anak membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. UU tersebut mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana cadangan diadakan untuk menutupi kerugian yang diderita dan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan tujuan lain menurut keputusan RUPS.

The Company and subsidiaries provided appropriation to general reserve in accordance with Law No. 40 year 2007 concerning Limited Company. The law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital. Reserve funds should be maintained to cover suffered losses and can be used as working capital and other purposes by the decision of the AGS.

39. PENDAPATAN USAHA

39. REVENUES

	2019	2018
	Rp	Rp
Jasa Konstruksi/ <i>Construction Services</i>	28.648.364.770.709	47.396.987.768.691
Penjualan Precast/ <i>Precast Sales</i>	1.938.933.560.503	960.981.230.050
Pendapatan Jalan Tol/ <i>Toll Road Revenue</i>	488.799.814.302	71.560.729.383
Pendapatan Property/ <i>Property Revenue</i>	215.553.474.036	247.372.534.913
Penjualan Infrastruktur Lainnya/ <i>Other Infrastructure Revenue</i>	51.970.923.260	71.331.800.583
Pendapatan Hotel/ <i>Hotel Revenue</i>	42.422.862.964	38.634.667.237
Sewa Gedung dan Peralatan/ <i>Buildings and Equipment Rental</i>	1.344.224.095	2.082.107.965
Jumlah/ Total	31.387.389.629.869	48.788.950.838.822

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

The details of the revenues are as follows:

	2019	2018
	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
PT Utama Karya (Persero)	2.559.295.752.479	9.554.474.040.967
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.001.417.836.786	1.472.934.995.206
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	1.737.664.359.140	1.947.745.706.279
PT Utama Marga Waskita	1.040.706.782.682	--
PT Angkasa Pura II (Persero)	626.960.890.639	331.163.952.918
PT Cinere Serpong Jaya	565.488.084.079	--
PT Jasamarga Japek Selatan	406.050.425.374	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	395.360.181.602	844.835.715.065
PT Jasamarga Semarang Batang	201.850.673.650	4.069.967.522.938
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	198.625.116.034	1.382.529.416.285
PT Jasamarga Solo Ngawi	155.776.364.549	2.530.841.163.332
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	55.139.338.186	--
KSO Waskita Trinita 2	49.532.037.817	117.370.502.799
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	48.124.225.468	507.008.879.986
PT Prima Multi Terminal	45.365.129.016	157.972.992.341
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	25.539.859.312	180.529.697.509
PT Pejagan Pemalang Tol Road	23.764.589.882	1.218.748.716.551
KSO/ JO RNI Waskita	5.537.390.093	179.890.014.907
Lain-lain/ <i>Others</i> (di bawah/ <i>below</i> Rp 50 Milyar/ <i>Billion</i>)	44.560.286.722	2.758.460.820
Sub Jumlah/ Sub Total	10.186.759.323.510	24.498.771.777.903

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties		
BPJT - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	3.369.464.944.926	2.490.448.726.220
BPJT - PT Waskita Sriwijaya Tol (dh/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	3.281.735.658.037	3.556.475.615.048
BPJT - PT Waskita Bumi Wira	2.995.486.712.503	3.080.558.806.176
BPJT - PT Cimanggis Cibitung Tollways	2.707.628.096.258	1.793.276.034.133
BPJT - PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.876.191.676.256	761.954.961.430
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>The Ministry of Public Works and Housing</i>	1.056.302.351.200	1.245.563.979.369
Kementerian Perhubungan/ <i>The Ministry of Transportation</i>	1.027.908.069.489	1.701.253.323.264
BPJT - PT Trans Jabar Tol	612.095.518.884	1.817.953.598.856
BPJT - PT Pemalang Batang Toll Road	421.331.392.776	3.515.414.085.208
PT Kukuh Mandiri Lestari	317.393.192.058	94.074.912.309
Pemerintah Daerah/ <i>District Governments</i>	302.568.051.504	180.052.150.244
PT Marga Trans Nusantara	249.962.166.269	976.645.944.908
PT Fajar Bekasi Industrial Estate	52.080.426.991	--
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Timor Leste/ <i>The Ministry of Public Work of Republica Democratica de Timor Leste</i>	12.706.307.736	80.016.708.045
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI/ <i>The Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic Indonesia</i>	--	201.093.409.170
PT Cinere Serpong Jaya	--	1.271.181.086.734
Lain-lain/ <i>Others</i> (di bawah/ <i>below</i> Rp 50 Milyar/ <i>Billion</i>)	2.917.775.741.472	1.524.215.719.805
Sub Jumlah/ Sub Total	21.200.630.306.359	24.290.179.060.919
Jumlah/ Total	31.387.389.629.869	48.788.950.838.822

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the Company revenues for December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
BPJT - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	3.369.464.944.926	--
BPJT - PT Waskita Sriwijaya Tol (dh/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	3.281.735.658.037	--
PT Utama Karya (Persero)	--	9.554.474.040.967
Jumlah/ Total	6.651.200.602.963	9.554.474.040.967

40. BEBAN POKOK PENDAPATAN

40. COST OF REVENUES

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa Konstruksi			<i>Construction Services</i>
Bahan Baku	5.608.251.024.734	10.626.329.854.233	<i>Raw Material</i>
Subkontraktor	7.528.979.493.171	12.239.614.700.291	<i>Subcontractor</i>
Upah	1.874.318.879.340	2.584.933.506.505	<i>Wages</i>
Beban Tidak Langsung	8.886.688.705.761	13.450.017.420.936	<i>Indirect Costs</i>
Jumlah Jasa Konstruksi	23.898.238.103.006	38.900.895.481.965	<i>Total Constructions Services</i>
Jalan Tol	228.732.400.024	42.004.625.813	<i>Toll Roads</i>
Properti dan Hotel	178.377.050.958	228.319.675.309	<i>Property and Hotel</i>
Infrastruktur Lainnya	12.168.610.232	21.780.891.587	<i>Others Infrastructure</i>
Produk Beton			<i>Concrete Products</i>
Persediaan Awal	267.639.347.018	268.754.368.540	<i>Beginning Balance</i>
Pembelian	627.200.148.446	1.902.080.840	<i>Purchases</i>
Barang tersedia untuk Dijual	894.839.495.464	270.656.449.380	<i>Goods Available for Sale</i>
Persediaan Akhir	398.970.311.841	267.639.347.018	<i>Ending Balance</i>
Beban Bahan Baku	495.869.183.623	3.017.102.362	<i>Raw Material Expenses</i>
Beban Upah	75.242.561.505	7.714.367.571	<i>Direct Labour Expenses</i>
Beban <i>Overhead</i>	894.118.957.116	722.599.945.317	<i>Overhead Expenses</i>
Jumlah Produk Beton	1.465.230.702.244	733.331.415.250	<i>Total Concrete Products</i>
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	25.782.746.866.464	39.926.332.089.924	<i>Total Cost of Revenues</i>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

41. BEBAN PENJUALAN DAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban Penjualan/ <i>Selling Expenses</i>	
Pemasaran/ <i>Marketing</i>	
Tender/ <i>Tender</i>	
Iklan/ <i>Advertising</i>	
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	
Beban Umum dan Administrasi/ <i>General and Administrative Expenses</i>	
Gaji Pegawai/ <i>Employee's Salaries</i>	
Umum/ <i>General</i>	
Penyusutan (Catatan 16)/ <i>Depreciation (Note 16)</i>	
Kantor/ <i>Office</i>	
Perjalanan Dinas/ <i>Travelling</i>	
Gedung/ <i>Building</i>	
Jamsostek/ <i>Jamsostek</i>	
Pesangon/ <i>Severance</i>	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ <i>Allowance For Impairment Losses of Receivable</i>	
Bonus/THR / <i>Bonus/ THR Allowance</i>	
DPLK/ <i>DPLK</i>	
Lain-lain/ <i>Others</i>	
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	
Jumlah/ <i>Total</i>	

41. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2019	2018
	Rp	Rp
	21.886.332.873	27.656.689.126
	20.976.861.506	18.483.650.135
	8.726.741.167	5.065.551.215
	51.589.935.546	51.205.890.476
	506.967.980.343	389.844.247.040
	170.422.679.693	110.307.301.269
	90.058.719.718	52.445.969.029
	53.108.730.932	45.919.976.068
	60.943.984.089	49.997.488.199
	35.295.568.522	34.040.568.509
	15.992.529.507	12.019.669.620
	46.535.904.829	54.326.792.451
	30.047.111.423	334.843.293.522
	297.847.072.750	525.710.217.979
	576.979.642	1.484.544.834
	12.160.086.669	5.600.010.539
	1.319.957.348.117	1.616.540.079.059
	1.371.547.283.663	1.667.745.969.535

42. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Lain-lain Proyek/ <i>Others Project</i>	
Pemulihan Piutang/ <i>Recovery of Receivables</i>	
Lain-lain KSO/ <i>Others JV</i>	
Klaim Asuransi/ <i>Insurance Claims</i>	
Lain-lain/ <i>Others</i>	
Jumlah/ <i>Total</i>	

Pendapatan lain-lain tahun 2019 terutama diperoleh dari keuntungan penjualan penyertaan pada PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri dan PT Jasamarga Solo Ngawi kepada Kings Key Limited pada tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp 286.428.719.302 (Catatan 13).

Pendapatan lain-lain tahun 2018 terutama diperoleh dari keuntungan penjualan sebagian penyertaan pada PT Waskita Transjawa Tol Road kepada Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp 1.651.094.347.539.

42. OTHER INCOME

	2019	2018
	Rp	Rp
	339.886.416.374	15.732.883.571
	109.128.010.423	115.729.094.947
	27.086.967.498	188.568.717.214
	532.993.960	3.237.832.887
	488.628.725.633	1.701.840.828.624
	965.263.113.888	2.025.109.357.243

Other incomes for year 2019 was derived primarily from gain on sale of ownership in PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri and PT Jasamarga Solo Ngawi to Kings Key Limited on December 18, 2019 amounted to Rp 286,428,719,302 (Note 13).

Other incomes for year 2018 was derived primarily from gain on sale of part of ownership in PT Waskita Transjawa Tol Road to Limited Investment Fund (RDPT) on April 10, 2018 amounted to Rp 1,651,094,347,539.

43. BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain KSO/ <i>Others JV Expenses</i>	
Beban dan Denda Pajak/ <i>Tax Expenses and Penalty</i>	
Beban Lain-lain Proyek/ <i>Others Project Expenses</i>	
Lain-lain/ <i>Others</i>	
Jumlah/ <i>Total</i>	

43. OTHER EXPENSES

	2019	2018
	Rp	Rp
	27.205.589.483	88.727.596.636
	93.517.896.117	259.750.123.554
	25.278.931.098	27.883.637.382
	51.800.063.672	47.114.218.615
	197.802.480.370	423.475.576.187

44. BEBAN KEUANGAN

Akun ini merupakan beban bunga atas utang bank/ non-bank, beban provisi, dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman Grup selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat dan beban bunga atas utang obligasi Perusahaan.

44. FINANCIAL CHARGES

This account represents group's interest expenses on bank loans/ non-banks, provision fees, and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest costs which are directly attributable to the cost of a qualifying project and the interest expense on debt Corporate bonds.

45. BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

45. EQUITY IN NET INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

	2019 Rp	2018 Rp	
Bagian Laba Bersih Ventura Bersama Konstruksi (Catatan 13)	143.347.111.323	220.179.167.829	<i>Equity in Net Income of Construction Joint Ventures (Note 13)</i>
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi (Catatan 13)	(433.634.795.662)	(191.396.766.625)	<i>Equity in Net Income (Loss) of Associates Entities (Note 13)</i>
Jumlah	(290.287.684.339)	28.782.401.204	Total

46. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

46. NON-CONTROLLING INTEREST

Kepemilikan/ Ownership %	Nilai Awal/ Beginning Balance Rp	2019		Nilai Akhir/ Ending Balance Rp	
		Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year Rp	Penambahan (Pengurangan/ Additional (Deduction) Rp		
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	4.871.879.999.188	322.459.452.619	(195.731.595.000)	4.998.607.856.807
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	12,46%	2.510.058.087.631	(84.215.740.734)	165.754.555.272	2.591.596.902.169
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	10,23%	2.045.632.252.472	(69.126.805.782)	--	1.976.505.446.690
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	809.759.717.909	(83.951.397.141)	--	725.808.320.768
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	417.360.969.654	1.913.553.536	133.447.860.000	552.722.383.190
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	34.287.298.623	2.183.010.462	154.688.000.000	191.158.309.085
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	160.581.870.537	34.888.988	--	160.616.759.525
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	15.862.734.475	(628.073.746)	--	15.234.660.729
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.478.360.767	1.562.818.854	50.989.763	5.092.169.384
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.478.360.767	1.562.818.854	50.989.763	5.092.169.384
Perusahaan Daerah Prodekim (Untuk/ for WST (dhl/ formerly SRIMP)	1,00%	5.380.318.695	7.918.714	(1.154.662.822)	4.233.574.587
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	2.856.196.707	2.260.282	--	2.858.456.989
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Untuk/ for KKDM)	0,46%	3.206.366.057	(1.138.171.334)	--	2.068.194.723
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	1.593.411.839	42.140.779	--	1.635.562.618
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	1.195.058.879	31.605.584	--	1.226.664.463
Perusahaan Daerah Bende Seguguk (Untuk/ for WST(dhl/ formerly SRIMP)	1,00%	--	7.918.714	1.180.691.023	1.188.609.737
Perusda Komaba (Untuk/ for TTB)	5,00%	398.352.960	10.535.195	--	408.888.155
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	3.231.178	426.145	--	3.657.323
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	1.132.587	102.717	--	1.235.304
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,01%	1.003.938	--	--	1.003.938
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKI (dhl/ formerly WKE)	0,01%	641.056	(32.800)	--	608.256
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJT)	0,00%	3.052.536	(3.226.902)	581.073	406.707
PT Bukaka Mega Investama (Untuk / for SMR)	0,00%	--	--	--	--
Kayson Company (Untuk/ for WST (dhl/ formerly SRIMP)	5,00%	945.603.312	--	(945.603.312)	--
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	153.701.404	--	(153.701.404)	--
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	0,00%	--	--	--	--
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for WST (dhl/ formerly SRIMP)	0,81%	(104.112.806)	--	104.112.806	--
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	(153.701.404)	--	153.701.404	--
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for WST (dhl/ formerly SRIMP)	1,00%	(1.856.590.368)	--	1.856.590.368	--
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	(633.103)	--	--	(633.103)
Jumlah/ Total		10.886.002.685.490	90.756.003.004	259.302.508.934	11.236.061.197.428

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	Kepemilikan/ Ownership %	2018			Nilai Akhir/ Ending Balance Rp
		Nilai Awal/ Beginning Balance Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year Rp	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction) Rp	
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	4.696.707.852.445	441.389.048.815	(266.216.902.072)	4.871.879.999.188
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	12,46%	1.700.117.589.640	119.286.732.519	690.653.765.472	2.510.058.087.631
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	10,23%	1.947.718.124.788	97.914.127.684	--	2.045.632.252.472
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	270.365.887.834	(3.683.813.829)	543.077.643.904	809.759.717.909
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	96.738.504.404	2.866.845.250	317.755.620.000	417.360.969.654
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	--	73.870.537	160.508.000.000	160.581.870.537
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	--	(238.701.377)	34.526.000.000	34.287.298.623
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	14.717.535.613	1.145.198.862	--	15.862.734.475
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Untuk/ for KKDM)	0,46%	4.829.368.268	44.939.964	1.150.000.000	6.024.308.232
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.384.531.747	93.829.020	--	3.478.360.767
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.384.531.747	93.829.020	--	3.478.360.767
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	2.854.508.513	1.688.194	--	2.856.196.707
Perusahaan Daerah Prodekim (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	1,00%	4.185.378.731	(1.623.002.211)	--	2.562.376.520
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	--	93.411.839	1.500.000.000	1.593.411.839
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	--	70.058.879	1.125.000.000	1.195.058.879
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	0,00%	678.680.755	23.352.960	375.000.000	1.077.033.715
Kayson Company (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	5,00%	945.603.312	--	--	945.603.312
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJJ)	10,14%	153.701.404	583.316	--	154.284.720
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	0,00%	143.830.631	82.873	500.000	144.413.504
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	2.647.862	73.188	--	2.721.050
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJJ)	0,00%	2.469.663	--	--	2.469.663
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	1.059.399	29.571	--	1.088.970
PT Energi Bumi Mining (Untuk/ for WBW)	0,00%	3.568.135.641	--	(3.568.135.641)	--
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	(633.103)	--	--	(633.103)
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	0,81%	(104.112.806)	--	--	(104.112.806)
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKE)	0,01%	611.485	(143.830.631)	--	(143.219.146)
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJJ)	8,21%	(153.701.404)	--	--	(153.701.404)
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,01%	1.003.938	(678.680.755)	--	(677.676.817)
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	1,00%	(1.856.590.368)	--	--	(1.856.590.368)
Jumlah/ Total		8.748.386.520.139	656.729.673.688	1.480.886.491.663	10.886.002.685.490

47. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	2019 Rp	2018 Rp
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	938.142.364.887	3.962.838.031.865
Rata - rata Bertimbang Saham	13.573.902.600	13.573.902.600
Laba Per Saham Dasar	69,11	291,95

47. EARNING PER SHARE

Following the details of the calculation of basic earning per share:

Net Income Attributable
to Parent Entity
Weighted Average of Shares
Basic Earning Per Shares

48. BANK GARANSI DAN LETTER OF CREDIT

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Perusahaan telah mendapatkan fasilitas bank garansi, L/C dan SKBDN sebagai berikut:

48. BANK GUARANTEE AND LETTER OF CREDIT

As of December 31, 2019 and 2018 the Company has obtained the bank guarantees, LC and SKBDN facility as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Perusahaan/ the Company		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.800.000.000.000	4.600.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.000.000.000.000	4.500.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	745.000.000.000	2.145.000.000.000
Indonesia Eximbank	500.000.000.000	500.000.000.000
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Perusahaan/ the Company		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	950.000.000.000	950.000.000.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000.000.000	500.000.000.000
MUFG Bank, Ltd.	300.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank HSBC Indonesia	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	175.000.000.000	175.000.000.000
Jumlah/ Total	16.420.000.000.000	19.120.000.000.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Perusahaan juga memiliki fasilitas bank garansi, L/C dan SKBDN yang telah digunakan sebagai berikut:

The Company also obtained bank guarantess, L/C and SKBDN facilities with the total usage as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Perusahaan/ the Company		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.881.681.203.601	2.642.923.446.482
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.470.413.903.494	2.453.957.965.478
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	713.808.645.315	1.405.621.957.329
Indonesia Eximbank	459.827.282.267	182.948.208.516
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Perusahaan/ the Company		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	27.205.219.472	--
Jumlah/ Total	6.552.936.254.149	6.685.451.577.805

49. SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

Perusahaan dan entitas anak memiliki fasilitas SCF yang digunakan untuk membayar tagihan mitra kerja sebagai berikut:

49. SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

The Company and a subsidiary obtained SCF facilities were used to pay working partners' bill as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	3.175.000.000.000	2.775.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF	2.006.000.000.000	2.006.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF	1.200.000.000.000	1.700.000.000.000
PT Bank Syariah Mandiri - SCF	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
PT Bank HSBC Indonesia	650.000.000.000	650.000.000.000
PT Bank BNI Syariah - SCF	500.000.000.000	500.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	300.622.872.400	1.000.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	287.673.478.710	864.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	250.000.000.000	--
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	500.000.000.000
MUFG Bank, Ltd.	--	300.000.000.000
Jumlah/ Total	11.119.296.351.110	13.045.000.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah penggunaan fasilitas tersebut sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018 the total amounts of facility utilized, were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	2.558.530.100.709	2.459.798.507.008
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF	1.884.555.029.850	1.517.498.410.650
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF	980.700.906.340	1.304.484.629.753
PT Bank Syariah Mandiri - SCF	762.098.418.511	838.678.664.339
PT Bank BNI Syariah - SCF	383.637.480.504	498.309.062.219
PT Bank Mizuho Indonesia	300.622.872.400	784.224.513.312
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	209.528.490.297	249.949.771.132
PT Bank OCBC NISP Tbk	111.785.693.650	1.261.158.787.788
PT Bank HSBC Indonesia	90.715.862.083	574.593.187.725
PT Bank DBS Indonesia	5.089.869.019	--
PT Bank UOB Indonesia	--	707.440.744.768
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	485.002.489.220
MUFG Bank, Ltd.	--	244.041.438.137
Jumlah/ Total	7.287.264.723.363	10.925.180.206.051

Pada tanggal pelaporan, penggunaan fasilitas SCF masih tercatat dalam utang usaha.

As of reporting date, the total amounts of SCF facility utilized are recognized in accounts payable.

50. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas

50. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below explains the changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows				Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2019	
	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance cost	Amortisasi/ Amortization	Utang Bank/ Bank Loan		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pinjaman Bank	49.128.001.155.353	101.597.843.065.552	(96.874.491.736.591)	--	--	(1.530.838.924.505)	52.320.513.559.809	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	554.403.429.023	1.292.187.578.508	--	--	--	--	1.846.591.007.531	Loan to Financial Institution Non-Bank
Utang Obligasi	13.848.654.171.754	3.845.750.000.000	(2.000.000.000.000)	(9.625.951.421)	2.635.699.664	--	15.687.413.919.997	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	1.112.204.218.768	700.000.000.000	(779.207.690.987)	(32.996.527.781)	32.996.527.781	--	1.032.996.527.781	Medium Term Notes
Jumlah	64.643.262.974.898	107.435.780.644.060	(99.653.699.427.578)	(42.622.479.202)	35.632.227.445	(1.530.838.924.505)	70.887.515.015.118	Total

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows				Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2018	
	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance cost	Amortisasi/ Amortization	Utang Bank/ Bank Loan		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pinjaman bank	32.962.373.775.042	92.883.247.775.045	(76.733.808.263.389)	--	16.187.868.655	--	49.128.001.155.353	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	1.893.071.319.024	879.341.822.975	(2.218.009.712.976)	--	--	--	554.403.429.023	Loan to Financial Institution Non-Bank
Utang obligasi	9.045.261.188.524	5.154.250.000.000	(350.000.000.000)	(9.754.522.481)	8.897.505.711	--	13.848.654.171.754	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	720.062.656.549	1.144.403.604.859	(786.371.433.625)	(32.199.386.091)	66.308.777.076	--	1.112.204.218.768	Medium Term Notes
Jumlah	44.620.768.939.139	100.061.243.202.879	(80.088.189.409.990)	(41.953.908.572)	91.394.151.442	--	64.643.262.974.898	Total

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi nonkas:

Supplemental disclosures on noncash investing activities:

	2019 Rp	2018 Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha	541.555.615.994	1.061.625.707.705	Acquisition of Fixed Asset Through Accounts Payable
Penambahan Aset Takberwujud Melalui Liabilitas dan Akuisisi	16.945.554.493.390	8.694.683.900.132	Acquisition of Intangible Asset Through Liabilities and Acquisition

51. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

51. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018 the Company have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were as follows:

		2019		2018	
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent Rp
Aset/ Assets					
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents	USD	6.379.380	88.679.799.772	22.692.374	328.608.262.844
	YEN	59.046.508	7.555.980.848	59.047.146	7.741.972.406
	EURO	3.590	55.956.200	558	9.235.372
	SAR	226.311	838.630.926	360.610	1.391.735.823
	MYR	3.629	12.328.016	66.465	232.173.987
Piutang Usaha/ Accounts Receivable	SAR	14.302.730	53.000.910.398	13.732.976	53.000.910.399
	USD	1.578.989	21.949.534.653	626.425	9.071.255.067
Piutang Retensi/ Retention Receivables	SAR	7.477.161	27.707.741.349	7.663.762	29.577.446.348
	USD	7.480.236	103.982.797.077	10.084.073	146.027.455.610
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa/ Due From Customers	USD	1.780.222	24.746.879.992	7.924.787	114.758.838.085
Jumlah/ Total			328.530.559.231		690.419.285.941

52. SEGMENT OPERASI

52. OPERATION SEGMENT

a. Informasi tentang Produk dan Jasa

a. Information Related to Products and Services

Segmen operasi Perusahaan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

The Company's operation segment is grouped based on the work performed.

Informasi Segmen berdasarkan jenis usaha/ produk adalah sebagai berikut:

Details of information of segment based on the type of business/ product were as follows:

	2019							
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Precetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	28.648.364.770.709	1.344.224.095	257.976.337.000	1.938.933.560.503	51.970.923.260	488.799.814.302	31.387.389.629.869	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	23.898.238.103.006	--	178.377.050.958	1.465.230.702.244	12.168.610.232	228.732.400.024	25.782.746.866.464	Cost of Revenues
Laba Bruto	4.750.126.667.703	1.344.224.095	79.599.286.042	473.702.858.259	39.802.313.028	260.067.414.278	5.604.642.763.405	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>								<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(1.371.547.283.663)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	1.923.147.244.308	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	(916.771.108.365)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	5.239.471.615.685	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	--	(3.620.533.969.507)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	--	(290.287.684.339)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	1.328.649.961.839	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(299.751.593.948)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan							<u>1.028.898.367.891</u>	<u>Net Income in Current Period</u>

	2018							
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Precetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	47.396.987.768.691	2.082.107.965	286.007.202.150	960.981.230.050	71.331.800.583	71.560.729.383	48.788.950.838.822	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	38.900.895.481.965	--	228.319.675.309	733.331.415.250	21.780.891.587	42.004.625.813	39.926.332.089.924	Cost of Revenues
Laba Bruto	8.496.092.286.726	2.082.107.965	57.687.526.841	227.649.814.800	49.550.908.996	29.556.103.570	8.862.618.748.898	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>								<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(1.667.745.969.535)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	2.685.019.940.048	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	(1.912.990.946.229)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	7.966.901.773.182	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	--	(2.459.241.670.378)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	--	28.782.401.204	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	5.536.442.504.008	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(916.874.738.455)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan							<u>4.619.567.765.553</u>	<u>Net Income in Current Period</u>

	2019							
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Precetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah / Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset								Assets
Piutang Usaha	1.102.221.474.336	695.923.299	--	2.452.977.085.092	--	--	3.555.894.482.727	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.783.127.156.677	--	--	--	--	--	1.783.127.156.677	Retention Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	14.171.175.559.016	--	--	--	--	--	14.171.175.559.016	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	485.366.618.276	--	3.255.853.876.756	729.625.054.391	--	--	4.470.845.549.423	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	98.608.216.602.728	Unallocated Assets
Jumlah Aset							<u>122.589.259.350.571</u>	Total Assets
Liabilitas								Liabilities
Utang Usaha	12.381.177.826.833	--	--	--	--	--	12.381.177.826.833	Accounts Payable
Utang Bruto Subkontraktor	3.949.694.381.680	--	--	100.278.737.817	--	--	4.049.973.119.497	Gross Amount Due to Subcontractors
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	77.039.639.215.242	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas							<u>93.470.790.161.572</u>	Total Liabilities

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2018						Jumlah / Total	
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Tol/ Toll		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Aset								Assets
Piutang Usaha	2.043.048.276.262	822.475.571	--	1.724.317.937.821	--	--	3.768.188.689.654	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.333.867.085.150	--	--	--	--	--	1.333.867.085.150	Retention Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	32.350.733.163.102	--	--	--	--	--	32.350.733.163.102	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	820.899.169.547	--	3.039.901.972.185	1.228.429.929.512	--	--	5.089.231.071.244	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	81.849.561.614.486	Unallocated Assets
Jumlah Aset							124.391.581.623.636	Total Assets
Liabilitas								Liabilities
Utang Usaha	14.905.832.998.966	--	--	--	--	--	14.905.832.998.966	Accounts Payable
Utang Bruto Subkontraktor	6.423.389.324.611	--	--	53.132.173.364	--	--	6.476.521.497.975	Gross Amount Due to Subcontractors
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	74.122.108.375.828	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas							95.504.462.872.769	Total Liabilities

b. Informasi tentang Wilayah Geografis

Grup beroperasi di lima wilayah geografis utama yang berlokasi di Jakarta (Catatan 1). Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut:

b. Information Related to the Geographic

The Group's operation are located in five principal geographical areas which located in Jakarta (Note 1). Information segment based on geographical area were as follows:

	2019 Rp	2018 Rp
Aset/Assets		
Konstruksi/Constructions		
Divisi Infrastruktur I/ Division Infrastructure I - Medan	12.347.983.145.199	--
Divisi Infrastruktur II/ Division Infrastructure II - Jakarta	14.599.611.344.530	--
Divisi Infrastruktur III/ Division Infrastructure III - Surabaya	7.634.458.547.452	--
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	4.187.666.123.310	--
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	5.937.698.099.868	--
Divisi I/ Division I - Jakarta	--	6.242.425.879.809
Divisi III/ Division III - Jakarta	--	9.828.216.917.791
Divisi V/ Division V - Jakarta	--	8.233.860.332.153
Divisi IV/ Division IV - Surabaya	--	5.124.813.927.010
Divisi II/ Division II - Jakarta	--	5.787.693.031.036
Divisi VI/ Division VI - Palembang	--	12.361.523.834.245
Divisi VII/ Division VII - Jakarta	--	7.265.062.706.279
Divisi VIII/ Division VIII - Jakarta	--	5.086.794.537.848
	44.707.417.260.359	59.930.391.166.171
Properti/ Property		
Divisi Realty/ Realty Division - Jakarta	--	452.539.279.883
WKR - Jakarta	5.163.127.456.656	4.292.836.496.196
	5.163.127.456.656	4.745.375.776.079
Kantor Pusat/ Head Office - Jakarta	35.109.938.537.479	41.589.068.835.143
	35.109.938.537.479	41.589.068.835.143
Beton Precast/ Precast		
Divisi Precast/ Precast Division - Jakarta	--	82.853.667.184
WBP - Jakarta	16.156.177.086.453	15.223.020.000.024
	16.156.177.086.453	15.305.873.667.208
Energi/ Energy		
WKI (dah/ formerly/ WKE) - Jakarta	663.521.030.725	425.851.327.474
	663.521.030.725	425.851.327.474
Jalan Tol/ Toll Road		
WTR - Jakarta	71.249.304.994.615	57.262.108.475.134
	71.249.304.994.615	57.262.108.475.134
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	173.049.486.366.287	179.258.669.247.209
Eliminasi/ Elimination	(50.460.227.015.716)	(54.867.087.623.573)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	122.589.259.350.571	124.391.581.623.636

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

	2019 Rp	2018 Rp
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equities		
Konstruksi/ Constructions		
Divisi Infrastruktur I/ Division Infrastructure I - Medan	12.347.983.145.199	--
Divisi Infrastruktur II/ Division Infrastructure II - Jakarta	14.599.611.344.530	--
Divisi Infrastruktur III/ Division Infrastructure III - Surabaya	7.634.458.547.452	--
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	4.187.666.123.310	--
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	5.937.698.099.868	6.242.425.879.809
Divisi III/ Division III - Jakarta	--	9.828.216.917.791
Divisi V/ Division V - Jakarta	--	8.233.860.332.153
Divisi IV/ Division IV - Surabaya	--	5.124.813.927.010
Divisi II/ Division II - Jakarta	--	5.787.693.031.036
Divisi VI/ Division VI - Palembang	--	12.361.523.834.245
Divisi VII/ Division VII - Jakarta	--	7.265.062.706.279
Divisi VIII/ Division VIII - Jakarta	--	5.086.794.537.848
	44.707.417.260.359	59.930.391.166.171
Properti/ Property		
Divisi Realty/ Realty Division - Jakarta	--	452.539.279.883
WKR - Jakarta	5.163.127.456.656	4.292.836.496.196
	5.163.127.456.656	4.745.375.776.079
Kantor Pusat - Jakarta	35.109.938.537.479	41.589.068.835.143
	35.109.938.537.479	41.589.068.835.143
Beton Precast/ Precast		
Divisi Precast/ Precast Division - Jakarta	--	82.853.667.184
WBP - Jakarta	16.156.177.086.453	15.223.020.000.024
	16.156.177.086.453	15.305.873.667.208
Energi/ Energy		
WKI (dh/ formerly WKE) - Jakarta	663.521.030.725	425.851.327.474
	663.521.030.725	425.851.327.474
Jalan Tol/ Toll Road		
WTR - Jakarta	71.249.304.994.615	57.262.108.475.134
	71.249.304.994.615	57.262.108.475.134
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	173.049.486.366.287	179.258.669.247.209
Eliminasi/ Elimination	(50.460.227.015.716)	(54.867.087.623.573)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	122.589.259.350.571	124.391.581.623.636
	2019 Rp	2018 Rp
Pendapatan Usaha/Sales		
Konstruksi/ Constructions		
Divisi Infrastruktur I/ Division Infrastructure I - Medan	6.718.631.952.459	--
Divisi Infrastruktur II/ Division Infrastructure II - Jakarta	8.340.514.544.023	--
Divisi Infrastruktur III/ Division Infrastructure III - Surabaya	2.547.313.711.220	--
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	2.005.132.981.666	--
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	3.667.218.994.065	--
WTR - Jakarta	15.258.776.819.696	17.016.081.827.070
Divisi I/ Division I - Jakarta	--	4.197.442.205.685
Divisi III/ Division III - Jakarta	--	9.657.958.932.692
Divisi V/ Division V - Jakarta	--	6.269.768.926.019
Divisi IV/ Division IV - Surabaya	--	3.951.469.789.439
Divisi II/ Division II - Jakarta	--	2.306.841.408.760
Divisi VI/ Division VI - Palembang	--	7.250.213.112.820
Divisi VII/ Division VII - Jakarta	--	6.612.935.047.937
Divisi VIII/ Division VIII - Jakarta	--	1.489.926.749.076
	38.537.589.003.129	58.752.637.999.498
Properti/ Property		
WKR - Jakarta	255.112.559.000	286.007.202.150
	255.112.559.000	286.007.202.150
Kantor Pusat - Jakarta	1.344.224.095	2.082.107.965
	1.344.224.095	2.082.107.965
Beton Precast/ Precast		
WBP - Jakarta	7.467.175.916.375	8.000.149.423.525
	7.467.175.916.375	8.000.149.423.525
Energi/ Energy		
WKI (dh/ formerly WKE) - Jakarta	51.970.923.260	71.331.800.583
	51.970.923.260	71.331.800.583
Jalan Tol/ Toll Road		
WTR - Jakarta	488.799.814.302	71.560.729.384
	488.799.814.302	71.560.729.384
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	46.801.992.440.161	67.183.769.263.105
Eliminasi/ Elimination	(15.414.602.810.292)	(18.394.818.424.283)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	31.387.389.629.869	48.788.950.838.822

53. PERKARA HUKUM

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horizontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VII Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara panitia pengadaan (terlapor I), Perusahaan (terlapor II) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (terlapor III) dalam register KPPU No.04/KPPU-L/2012.

Putusan KPPU pada tanggal 25 April 2013, menjatuhkan hukuman kepada terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000. Atas putusan tersebut terlapor II mengajukan upaya hukum pembatalan putusan KPPU pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

PN Jakarta Timur mengeluarkan putusan No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015 menyatakan batal demi hukum putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2012 dengan segala akibat hukumnya.

KPPU mengajukan upaya kasasi pada tanggal 15 September 2015 dimana memori kasasi telah diajukan oleh KPPU tertanggal 28 September 2015, dan kontra memori kasasi diajukan oleh Perusahaan pada 3 Desember 2015. Sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan masih menunggu hasil putusan kasasi.

2. Perkara Kepemilikan Lahan Pada Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu.

Para ahli waris Muhammad Ba'at mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah akibat pembangunan Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) di PN Jakarta Timur dengan register No. 468/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Nopember 2016, dimana para tergugat adalah:

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan & Fasilitas Jalan cq. PPK Proyek Tol Becakayu (Tergugat I);
- Pemprov DKI Jakarta cq. Pemkot Administrasi Jakarta Timur cq. Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (P2T) (Tergugat II);
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian PUPERA cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. Perum Jasa Tirta II (Tergugat III);

53. LEGAL CASES

1. Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) suspects a horizontal and vertical conspiracy in Building Project of Care and Service Class I and VII Building of Southeast Sulawesi Hospital between the procurement committee (Defendant I), the Company (Defendant II) and PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (Defendant III) in register of KPPU No. 04 /KPPU-L/2012.

The verdict of KPPU dated April 25, 2013, passed sentence to the Defendant II to pay a fine amounted to Rp 3,168,820,000. On the verdict, the Defendant II has filed an annulment of KPPU verdict at District Court (PN) of East Jakarta.

District Court of East Jakarta issued a verdict No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim dated May 21, 2015 declared void and null the verdict of KPPU No. 04/KPPU-L/2012 dated April 25, 2012 with all the legal consequences.

KPPU files cassation efforts on September 15, 2015 in which the memory of cassation has been proposed by KPPU dated September 28, 2015, and contra memory of cassation filed by the Company on December 3, 2015. As of the reporting date the Company is still waiting for the appeal results.

2. The Case of Land Ownership of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project.

The heirs of Muhammad Ba'at filed a lawsuit on land ownership due to the construction of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project (Becakayu) at District Court of East Jakarta with Register No. 468/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dated November 17, 2016, in which the defendants are:

- The Government of the Republic of Indonesia cq. Ministry of Public Works and Public Housing cq. Directorate General of Bina Marga cq. Directorate General of Urban Highways and Road Facilities cq. PPK of Becakayu Toll Road Project (Defendant I);
- Provincial Government of Jakarta cq. Municipality Administration of East Jakarta cq. the Land Procurement Committee for Public Interest (P2T) (Defendant II);
- The Government of the Republic of Indonesia cq. Ministry of Public Works and Public Housing cq. Directorate General of Water Resources cq. Perum Jasa Tirta II (Defendant III);

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kepala Agraria/BPN Jakarta Timur (Turut Tergugat I); dan
- Perusahaan (Turut Tergugat II).

Nilai Gugatan yang diajukan materil sebesar Rp 32.100.000.000.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 31 Oktober 2017 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Atas putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat pada 10 Nopember 2017. Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada 12 Desember 2017. Pada tanggal 5 Nopember 2019 telah diterima relaas pemberitahuan pencabutan permohonan banding yang berisi akta permohonan pencabutan banding No. 105/Tim/XI/2017-AP Jo No. 468/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei 2019. Dengan adanya akta pencabutan banding ini maka perkara dinyatakan telah *inkracht*.

3. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Jalan Tol Bocimi

Sahala H.S. Marpaung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi dengan para tergugat:

- Bupati Kabupaten Bogor (Tergugat I)
- Sekda Kabupaten Bogor (Tergugat II)
- Pelaksana Operasional Bocimi (Tergugat III)
- PT MNC Tol Investama (Tergugat IV)
- Satia M. Marpaung (Tergugat V)
- Camat Caringin (Tergugat VI)
- Kepala Desa Cimande Hilir (Tergugat VII)
- Perusahaan (Turut Tergugat I)
- Pemerintah Jawa Barat (Turut Tergugat II)
- BPN Cibinong (Turut Tergugat III)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 7.850.000.000.

Sidang pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan Agenda sidang pembacaan putusan PN yang isinya:

- Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat
- Menyatakan bahwa Tergugat I – VII terbukti bersalah melakukan Perbuatan melawan hukum
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Drs PHS Marpaung
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 71.453 M² yang merupakan harta warisan A. Drs PHS Marpaung

- The Government of the Republic of Indonesia cq. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency (BPN) cq. Head of Agrarian/BPN of East Jakarta (Co-Defendant I); and
- The Company (Co-Defendant II).

The value of the lawsuit filed by the material amounted to Rp 32,100,000,000.

The verdict of the East Jakarta District Court, dated October 31, 2017 stated that the plaintiff's claim cannot be accepted.

Upon the verdict, the Plaintiff appealed on November 10, 2017. The Company has submitted a counter memory appeal on December 12, 2017. On November 5, 2019, a notice of withdrawal of the appeal petition was accepted contains deed of revocation request appeal No. 105/Team/XI/2017-AP Jo No. 468/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dated May 18, 2019. With the deed of revocation of the appeal the case was declared to have been *inkracht*.

3. Lawsuit Against the Law on Land of Bocimi Toll Road Issues

Sahala H.S. Marpaung filed a lawsuit to the Cibinong District Court with Case number 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi with the defendants:

- Regent of Bogor District (Defendant I)
- District Secretary of Bogor (Defendant II)
- Bocimi Operational Executor (Defendant III)
- PT MNC Tol Investama (Defendant IV)
- Satia M. Marpaung (Defendant V)
- Camat Caringin (Defendant VI)
- Head of Cimande Hilir Village (Defendant VII)
- The Company (Co-Defendant I)
- West Java Government (Co-Defendant II)
- BPN Cibinong (Co-Defendant III)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 7,850,000,000.

Hearing on November 22, 2018 with the agenda of the PN verdict reading the following content:

- Accept and grant part of the Plaintiff's claim
- Stating that Defendants I - VII were found guilty of committing acts against the law
- Declare that the Plaintiff is the legal heir of Drs. PHS Marpaung
- Declare that the Plaintiff is the legal owner of a plot of land covering 71,453 sqm which is inherited property of A. Drs PHS Marpaung

- Menyatakan bahwa tanah seluas 20.000 M² yang terkena pembangunan tol merupakan bagian dari tanah seluas 71.453 M²
- Menghukum Tergugat I – VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 3,5 M
- Menghukum Tergugat I – VII secara tanggung renteng membayar biaya perkara
- Menghukum Turut Tergugat I – III untuk tunduk dan patuh atas putusan
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Tergugat III Pelaksana Operasional Bocimi (PPK) telah mengajukan banding atas Putusan PN ini:

- Memori banding dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII telah diserahkan di Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 Januari 2019.
- Relas Penyerahan Memori Banding diterima Kuasa Perusahaan tanggal 22 Januari 2019.
- Kontra Memori Banding sudah didaftarkan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019.

Pada tanggal 24 Juli 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan Putusan No. 197/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya berbunyi:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I, II, VI, VII serta Terbanding III semula Tergugat V
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Nopember 2018 No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 telah menyampaikan memori kasasi. Pada tanggal 22 Agustus 2019 Perusahaan telah menerima relas kasasi. Pada tanggal 5 September 2019 Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung.

4. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Jalan Tol CCT Seksi 1

Nelis mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Bks dengan tergugat:

- Sutisewan Kosasih (Tergugat I)
- Perusahaan (Tergugat II)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bekasi (Tergugat III)

- *Declare that the land area of 20,000 sqm affected by toll road construction is part of the land area of 71,453 sqm*
- *Penalize Defendants I - VII to pay the Plaintiff jointly in the amount of 3.5 M*
- *Punish Defendant I - VII jointly pay the court fees*
- *Punishing the Defendant I - III to submit and obey the decision*
- *Refuse the claim of the Plaintiff for other than the rest*

Defendant III Operational Executor Bocimi (PPK) has appealed on this PN Decision:

- *Appeal memories from Defendants I, II, III, V, VI, VII have been submitted to the Cibinong District Court on January 2, 2019.*
- *Relaas Submission of Memory of Appeals is received by the Company's Proxy on January 22, 2019.*
- *Counter Memory Appeal was registered on Monday on February 25, 2019.*

On July 24, 2019 the West Java High Court issued Decision No. 197/PDT/2019/PT.Bdg on June 26, 2019 the ruling reads:

- *Receive Appeals from Appellant I which was originally Defendant III and Appellant II which were originally Defendant I, II, VI, VII and Compared III originally Defendant V*
- *Canceling the Decision of the Cibinong District Court dated November 22, 2018 No. 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi.*

Judge for yourself:

- *Declares the Plaintiff's Lawsuit is not acceptable (Niet Onvankelijk Veerklaard).*

The plaintiff on July 29, 2019 had submitted a cassation memory. On August 22, 2019 the Company received an appeal in cassation. On September 5, 2019 the Company submitted a counter memory of cassation.

As of the reporting date, the company still monitors the Cassation Decision at the Supreme Court level.

4. *Lawsuit Against the Law on Land Issuer of CCT Section 1 Toll Road*

Nelis filed a lawsuit to the Bekasi District Court with Case number 223/Pdt.G/2018/PN.Bks with the defendant:

- *Sutisewan Kosasih (Defendant I)*
- *Company (Defendant II)*
- *Head of Public Works and Public Housing Office Bekasi City (Defendant III)*

- Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi (Tergugat IV)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi (Tergugat V)
- Kepala Kelurahan Jatikarya (Turut Tergugat I)
- Kepala Kecamatan Jatisampurna (Turut Tergugat II)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Turut Tergugat III)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 360.000.000.

Pada Tanggal 18 Desember 2018 Majelis Hakim menetapkan dan memutuskan bahwa perkara *a quo* telah selesai dengan adanya kesepakatan perdamaian dan pencabutan gugatan oleh Penggugat. Kuasa Perusahaan menerima salinan putusan tersebut pada Januari 2019.

Perkara ini untuk selanjutnya telah *incracht* karena telah ada Putusan mengenai Kesepakatan Perdamaian dan Pencabutan Gugatan.

5. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Jalan Tol CCT Seksi 1

Ahli Waris Sanip bin Neban mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No. 347/Pdt.G/2018/PN.Bks dengan tergugat:

- Perusahaan (Tergugat I)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi (Tergugat II)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bekasi (Tergugat III)
- Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi (Tergugat IV)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi (Tergugat V)
- Kepala Kelurahan Jatikarya (Turut Tergugat I)
- Kepala Kecamatan Jatisampurna (Turut Tergugat II)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Turut Tergugat III)

Gugatan yang diajukan adalah menyatakan Sita Jaminan tanah 621 m² pecahan girik C No. 1093, membongkar pagar seng dan menghukum Tergugat I - IV dengan nilai gugatan sebesar Rp 4.826.000.000.

Pada tanggal 4 April 2019 digelar sidang dengan agenda pembacaan putusan yang pada pokoknya bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim memutuskan dalam pokok perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Head of Agriculture Office Bekasi City (Defendant IV)
- Head of Public Works Office Bekasi City (Defendant V)
- Head of Jatikarya Village (Co-Defendant I)
- Head of Jatisampurna District (Co-Defendant II)
- Ministry of Public Works and Public Housing (Co-Defendant III)

The value of lawsuit filed as of Rp 360,000,000.

On December 18, 2018 the panel of judges has establish and decide that the *a quo* case was concluded, with the establishment of peace agreement and the Plaintiff revoked the lawsuit. The company power of attorney received the copy of decision on January 2019.

Hence, this case has received final and binding decision from the court ("*incracht*"), considering that there is no further legal effort by the Plaintiff.

5. Lawsuit Against the Law on Land Issues of CCT Section 1 Toll Road

The Heir Sanip bin Neban filed a lawsuit to the Bekasi District Court with Case No. 347/Pdt.G/2018/PN.Bks with the defendant:

- The Company (Defendant I)
- Head of Public Works Office Bekasi City (Defendant II)
- Head of Public Works and Public Housing Office Bekasi City (Defendant III)
- Head of Agriculture Office Bekasi City (Defendant IV)
- Head of Public Works Office Bekasi City (Defendant V)
- Head of Jatikarya Village (Co-Defendant I)
- Head of Jatisampurna District (Co-Defendant II)
- Ministry of Public Works and Public Housing (Co-defendant III)

The lawsuit filed was stated the security of seizing the land of 621 sqm fraction of Girik C No. 1093, dismantling the zinc fence and punishing Defendant I - IV with a claim amounted to Rp 4,826,000,000.

On April 4, 2019 a hearing was held with the agenda of reading the verdicts which in essence that with the receipt of Defendant I's Exception, the Panel of Judges decided in the principal case of the plaintiff's claim to be declared unacceptable.

Setelah melampaui 14 hari tidak ada pernyataan upaya hukum selanjutnya dari Penggugat, maka untuk selanjutnya perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dinyatakan telah *incrahct*.

6. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Subkontraktor Proyek Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi

CV Tunas Asli Mulia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 707/Pdt.G/2018/PN.Mdn dengan tergugat:

- PT Akbar Jaya Lestari (Tergugat I)
- Perusahaan (Tergugat II)
- Drs. Zulkarnaen (Tergugat III)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 9.297.500.000 dan moril Rp 1.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2019 Majelis Hakim telah membacakan pencoretan gugatan (menyatakan bahwa gugatan telah gugur). Dengan gugurnya gugatan ini maka tidak ada upaya hukum yang bisa diupayakan oleh penggugat dan untuk selanjutnya perkara ini dinyatakan telah *inkracht*.

7. Perkara Gugatan Melawan Hukum Proyek Tol Becakayu

Roswinawaty Sitompul mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara No. 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim dengan tergugat:

- Ahli Waris Alm H Asmawih (Tergugat I)
- Kementerian PUPR (Tergugat II)
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Tergugat III)
- Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Tergugat IV)
- Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat V)
- Pemprov Jakarta Cq Kecamatan Makasar (Tergugat VI)
- Pemprov Jakarta Cq Kelurahan Cipinang (Tergugat VII)
- Perusahaan (Tergugat VIII)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 6.428.796.000.

Pada tanggal 5 Nopember 2019 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

After more than 14 days there was no statement of the subsequent legal remedy from the Plaintiff, then the case will subsequently have permanent legal force or have been declared *incrahct*.

6. *Lawsuits Against the Law of the Subcontractor of Medan – Tebing Tinggi Toll Road Issues*

CV Tunas Asli Mulia filed a lawsuit to the Medan District Court with Case No. 707/Pdt.G/2018/PN.Mdn with the defendant:

- PT Akbar Jaya Lestari (Defendant I)
- The Company (Defendant II)
- Drs. Zulkarnaen (Defendant III)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 9,297,500,000 and moril Rp 1,000,000,000.

On October 16, 2019 the Panel of Judges read out the crossing of the lawsuit (stating that the lawsuit had been dropped). With the fall of this lawsuit, there is no remedy that can be sought by the plaintiff and henceforth the case is declared to have been *inkracht*.

7. *Lawsuits Against the Law of the Becakayu Toll Road Project*

Roswinawaty Sitompul filed a lawsuit with the East Jakarta District Court with Case No. 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim with the defendant:

- The Heir of Alm H Asmawih (Defendant I)
- Ministry of PUPR (Defendant II)
- DKI Jakarta Provincial Government Cq Land Procurement Committee for Public Interest (Defendant III)
- Jasa Tirta II Public Company (Defendant IV)
- Indonesian National Land Agency (Defendant V)
- Jakarta Provincial Government Cq Makasar District (Defendant VI)
- Jakarta Provincial Government Cq Cipinang Village (Defendant VII)
- The Company (Defendant VIII)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 6,428,796,000.

On November 5, 2019 a hearing was held with the agenda of reading the verdicts as follows:

- Refused the claim filed by the plaintiff for the whole
- Punish the plaintiff to pay the court fee.

Up to the date of reporting, the Company is still waiting for further legal action from the Plaintiff.

8. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Joshua Dolok Bona Tampubolon

Joshua Dolok Bona Tampubolon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara No. 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim dengan tergugat Perusahaan. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 781.546.735.

Putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi:

- a. Dalam Eksepsi : menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima
- b. Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Pada tanggal 4 September 2019, Penggugat telah menyatakan banding atas perkara ini. Pada tanggal 6 Nopember 2019 telah diterima relaas pemberitahuan penyerahan memori banding beserta memori banding atas perkara ini. Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan telah menyampaikan kontra memori banding atas perkara ini.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi.

9. Perkara Gugatan Melawan Hukum Sengketa Penyerobotan Jalan/Saluran Air Milik Desa, pada Proyek Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM).

H. Heru Sudomo, S.H., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN.Gsk dengan tergugat:

- Perusahaan (Tergugat I)
- Kepala Desa Lebani Waras (Tergugat II)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 1.820.000.000.

Pada tanggal 27 September 2019 digelar sidang dengan agenda Pemeriksaan setempat. Pada tanggal 6 Nopember 2019 diadakan sidang dengan agenda pembacaan sidang dengan amar putusan:

- a. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima
- b. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

8. Case of Lawsuit Against Law of the Heir Joshua Dolok Bona Tampubolon

Joshua Dolok Bona Tampubolon filed a lawsuit with the East Jakarta District Court with Case No. 511/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim with the Company defendants. The value of lawsuit filed as of Rp 781,546,735.

Decision of the District Court on August 21, 2019, where the ruling reads:

- a. In Exception: declare the defendant's exception as acceptable
- b. In Principal Case:
 - Declares Plaintiffs Lawsuit cannot be accepted (*Niet Ontvankelijke Verklard*)
 - Punish the Plaintiff to pay the court fee

On September 4, 2019, the Plaintiff had filed an appeal against this case. On November 6, 2019, a notice of submission of an appeal memorandum with the memorandum of appeal regarding this case was received. On December 2, 2019, the Company has submitted a counter memory of the appeal of this case.

Up to the reporting date, the company is still waiting for an appeal in the High Court.

9. Lawsuits Against the Law of Disputes over the Village's Road/Waterway Ownership, in the Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM) Toll Road Project.

H. Heru Sudomo, S.H., filed a lawsuit with the Gresik District Court with Case No. 14/Pdt.G/2019/PN.Gsk with the defendant are:

- the Company (Defendant I)
- Kepala Desa Lebani Waras (Defendant II)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 1,820,000,000.

On September 27, 2019 a hearing was held with a local Examination agenda. On November 6, 2019 a hearing was held with the agenda of reading the trial with the verdict:

- a. The exception stated that the defendant's exception was acceptable
- b. In the subject matter, the plaintiff's claim is unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklard*) and punishes the plaintiff to pay the court fee

Up to the date of reporting, the Company is still waiting for further legal action from the Plaintiff.

10. Perkara Gugatan Melawan Hukum Sengketa Penyerobotan Jalan/Saluran Air Milik Desa, pada Proyek Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM).

Supandi Dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN.Gsk dengan Perusahaan sebagai Tergugat I.

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 800.000.000.

Pada tanggal 6 Nopember 2019 diadakan sidang dengan agenda pembacaan sidang dengan amar putusan:

- a. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima
- b. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

11. Perkara Gugatan Melawan Hukum Subkon Proyek Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Seksi 2

PT Telaga Sari Utama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 276/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dengan tergugat:

- PT Bumiwarna Agung Perkasa (Tergugat)
- Perusahaan (Turut Tergugat)

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 448.000.000 dan Rp 840.213.000 dan kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000.

Pada tanggal 16 Desember 2019 diadakan sidang dengan agenda pembacaan Putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi ditolak
- b. Dalam Pokok Perkara:
Dalam konvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak
 - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi:
Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ditolak

10. *Lawsuits Against the Law of Disputes over the Village's Road/Waterway Ownership, in the Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM) Toll Road Project.*

Supandi Dkk filed a lawsuit with the Gresik District Court with Case No. 19/Pdt.G/2019/PN.Gsk with the Company as Defendant I.

The value of lawsuit filed amounted to Rp 800,000,000.

On November 6, 2019 a hearing was held with the agenda of reading the trial with the verdict:

- a. *The exception stated that the defendant's exception was acceptable*
- b. *In the subject matter, the plaintiff's claim is unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard) and punishes the plaintiff to pay the court fee*

Up to the date of reporting, the Company is still waiting for further legal action from the Plaintiff.

11. *Lawsuits Against the Law of the Subcontractor of Kayu Agung – Palembang – Betung Section 2 Toll Road Issues*

PT Telaga Sari Utama filed a lawsuit to the Jakarta Selatan District Court with Case No. 276/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel with the defendant:

- *PT Bumiwarna Agung Perkasa (Defendant)*
- *The Company (Co-Defendant)*

The value of the claim for material losses submitted is Rp 448,000,000 and Rp 840,213,000 and immaterial losses of Rp 2,000,000,000.

On December 16, 2019 a hearing was held with the agenda of reading the District Court's Decision which reads as follows:

- a. *In Exception:
Declares the Defendant's exception to the Convention and the Defendant's Convention is also rejected*
- b. *In Principal Case:
At the convention:
 - *Declare the plaintiff's claim for the Convention rejected*
 - *Punish the plaintiff to pay the court fee**

*In Reconvension:
Declare a Reconvension lawsuit filed by the Reconvension Plaintiff is rejected*

- Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.
12. Perkara Gugatan Melawan Hukum Perkara Lahan Proyek Tol Ruas Jalan Tol Kunciran - Serpong
- Komang Ani Susana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 296/Pdt.G/2019/PN.Tng dengan Perusahaan sebagai Tergugat II.
- Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 185.780.000.000 - Rp 31.512.470.925 dan kerugian imateriil sebesar Rp 20.000.000.000 ditambah bunga 6%.
- Pada tanggal 3 September 2019 Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut. Penggugat telah mengajukan gugatan baru dengan nomor perkara 929/Pdt.G/2019/PN.Tng. Dengan adanya gugatan baru, maka perkara ini dicabut.
13. Perkara Gugatan Melawan Hukum Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)
- Bob Goldman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara No. 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dengan Perusahaan sebagai Tergugat XVI.
- Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 30.000.000/m² x 8.598.988 m².
- Pada tanggal 18 Desember 2019 diadakan sidang dengan agenda Replik dari Penggugat. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan agenda duplik. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor pelaksanaan sidang selanjutnya.
14. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Pete Subur Proyek Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA)
- Kuasa Penggugat Pete Subur dan Anwar Sadat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Kag dengan Perusahaan sebagai Tergugat V.
- Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 4.650.000.000.
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 majelis hakim telah membacakan penetapan pencoretan gugatan (menyatakan bahwa gugatan telah gugur). Dengan gugurnya gugatan ini maka tidak ada upaya hukum yang bisa diupayakan oleh Penggugat dan untuk selanjutnya perkara ini dinyatakan telah *inkracht*.
- Up to the date of reporting, the Company is still waiting for further legal action from the Plaintiff.*
- 12. Lawsuit Against the Law on Land Issues of Kunciran – Serpong Toll Road Project*
- Komang Ani Susana filed a lawsuit to the Tangerang District Court with Case No. 296/Pdt.G/2019/PN.Tng with the Company as Defendant II.*
- The value of the claim for material losses submitted is Rp 185,780,000,000 – Rp 31,512,470,925 and and immaterial losses of Rp 20,000,000,000 add interest of 6%.*
- On September 3, 2019 the Tangerang District Court issued a decision whose ruling readily granted the request to revoke the case. The Plaintiff has filed a new lawsuit with case number 929/Pdt.G/2019/PN.Tng. With the new lawsuit, the case is revoked.*
- 13. Lawsuit Against the Law on Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Project*
- Bob Goldman filed a lawsuit to the Jakarta Timur District Court with Case No. 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim with the Company as Defendant XVI.*
- The value of lawsuit filed amounted to Rp 30,000,000/sqm x 8,598,988 sqm.*
- On December 18, 2019 a hearing was held with the Replik's agenda of the Plaintiff. The next session was held on January 8, 2020 with a duplicate agenda. Until the reporting date, the Company is still monitoring the implementation of the next hearing.*
- 14. Lawsuit Against the Law on Land Issues of Pete Subur Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA) Toll Road Project*
- Plaintiff Counsel Pete Subur and Anwar Sadat filed a lawsuit to the Kayu Agung District Court with Case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Kag with the Company as Defendant V.*
- The value of the claim for material losses submitted is Rp 4,650,000,000.*
- On October 18, 2019, the panel of judges read out the decision to write out the lawsuit (stating that the lawsuit had been dropped). With the fall of this lawsuit, there is no remedy that can be sought by the plaintiff and henceforth the case is declared to have been *inkracht*.*

15. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Pembagian Lahan Kalitjangan, Jatisampurna Bekasi Proyek CCT Seksi I

Timah Binti H. Kalitjangan, dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No. 176/Pdt.G/2019/PN.Bks dengan Perusahaan sebagai Tergugat III.

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 1.750.000.000.

Pada tanggal 13 Desember 2019 diadakan sidang dengan agenda sidang pemeriksaan setempat. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 7 Januari 2020 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor pelaksanaan sidang selanjutnya.

16. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Proyek Kunciran Serpong

Adiwikarta dan Sujiatmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 666/Pdt.G/2019/PN.Tng dengan Perusahaan sebagai Tergugat I.

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 9.585.250.000 dan imateriil sebesar Rp 5.000.000.000.

Pada tanggal 16 Desember 2019 diadakan sidang dengan agenda pemeriksaan barang bukti. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan bukti lanjutan. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor pelaksanaan sidang selanjutnya.

17. Perkara Gugatan Melawan Hukum Perkara Lahan Proyek Tol Ruas Jalan Tol Kunciran - Serpong

Komang Ani Susana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 929/Pdt.G/2019/PN.Tng dengan Perusahaan sebagai Tergugat IV.

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 199.578.708.000 dan imateriil sebesar Rp 50.000.000.000.

Pada tanggal 27 Nopember 2019 diadakan sidang dengan agenda Panggilan untuk para pihak. Sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan agenda Pembacaan Gugatan. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor pelaksanaan sidang selanjutnya.

15. Lawsuit Case Against the Law of the Problem of Land Distribution Kalitjangan, Jatisampurna Bekasi CCT Project Section I

Timah Binti Kalitjangan, et al filed a lawsuit with the Bekasi District Court with the Case No. 176/Pdt.G/2019/PN.Bks with the Company as Defendant III.

The value of the claim for material losses submitted is Rp 1,750,000,000.

On December 13, 2019 a hearing was held with the agenda of a local examination hearing. The next session was held on January 7, 2020 with the agenda of reading conclusions. Until the reporting date, the Company is still monitoring the implementation of the next hearing.

16. Lawsuit Against the Law on Land Problems in the Serpong Kunciran Project

Adiwikarta and Sujiatmi filed a lawsuit with the Tangerang District Court with a Case No. 666/Pdt.G/2019/PN.Tng with the Company as Defendant I.

The value of the claim for material loss amounted to Rp 9,585,250,000 and immaterial amount Rp 5,000,000,000.

On December 16, 2019 a hearing was held with the agenda of examining evidence. The next session was held on January 14, 2020 with the agenda of further evidence examination. Until the reporting date, the Company is still monitoring the implementation of the next hearing.

17. Lawsuit Against the Law on Land Problems in the Serpong - Kunciran Project

Komang Ani Susana filed a lawsuit with the Tangerang District Court with a Case No. 929/Pdt.G/2019/PN.Tng with the Company as Defendant IV.

The value of the claim for material loss amounted to Rp 199,578,708,000 and immaterial amount Rp 50,000,000,000.

On November 27, 2019 a hearing was held with the agenda of the Call for the parties. The next session will be held on January 8, 2020 with the lawsuit reading agenda. Until the reporting date, the Company is still monitoring the implementation of the next hearing.

**18. Perkara Wanprestasi Bank Jatim dengan Asuransi
Pan Pacific Insurance**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara No. 2048/Pdt.G/2019/PN.Sby dengan Perusahaan sebagai Turut Tergugat II.

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 109.254.590.243.

Pada tanggal 18 Desember 2019 digelar sidang dengan agenda pemeriksaan kedua. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan *legal standing* dari para pihak. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor pelaksanaan sidang selanjutnya.

18. Case of Default Bank Jatim with Pan Pacific Insurance Insurance

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk filed a lawsuit to Surabaya District Court with Case No. 2048/Pdt.G/2019/PN.Sby with the Company as Defendant II.

The value of the claim for material loss amounted to Rp 109,254,590,243.

On December 18, 2019 a hearing was held with a second examination agenda. The next session was held on January 15, 2020 with the agenda of examining the legal standing of the parties. Until the reporting date, the Company is still monitoring the implementation of the next hearing.

54. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
- Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Transaksi pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi dengan entitas berelasi:

54. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationship

- The Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Finance, is the Company's main shareholder.
- All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance Republic of Indonesia have significant influence: State-owned Enterprise (SOE).
- Related parties which main shareholder is the same with the Group.
- Related parties which are associates of the Company's subsidiaries.
- Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

Transactions with related parties

The following are transactions with related parties:

<u>Pihak-pihak Berelasi / Related Parties</u>	<u>Transaksi</u>	<u>Transactions</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Bank Garansi/LC/SKBDN, Utang Bank Jangka Panjang	Cash and Cash Equivalent, Short Term Investments, Short Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN, Long Term Bank Loan
PT Bank Syariah Mandiri	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan
PT Bank BNI Syariah	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Panjang	Cash and Cash Equivalent, Long Term Bank Loan
Indonesia Eximbank	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Bank Garansi/LC/SKBDN	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN
PT Bank BRISyariah Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasamarga Solo Ngawi	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Others Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Pejagan Pemalang Tol Road	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Others Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Hutama Karya (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Dagang, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan, Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	Accounts Receivable, Trade Receivable, Others Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Advances on Long-Term Contract
PT Kertas Lecees (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Continued)**

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi	Transactions
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain	Accounts Receivable, Others Receivable
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Pendapatan, Piutang Lain-lain	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Others Receivable, Retention Receivable, Revenues, Others Receivable
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto	Accounts Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Others Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasamarga Kualanamu Tol	Piutang Lain-lain	Others Receivable
KSO/JO Waskita - Gorip Nanda Guna	Piutang Dagang	Trade Receivable
KSO/JO Waskita - Acset	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - Adhi	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
Waskita - Wika - PP - HK - Adhi	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - Wika	Piutang Dagang, Piutang Ventura Bersama, Utang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama	Trade Receivable, Joint Ventures Payable, Investment in Joint Ventures, Joint Ventures Receivables
PT Pertamina (Persero)	Piutang Dagang	Trade Receivable
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Piutang Dagang	Trade Receivable
KSO/JO Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - Acset Indonusa	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables
PT Waskita Transjawa Toll Road	Piutang Lain-lain	Others Receivable
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	Piutang Lain-lain	Others Receivable
PT Jasamarga Semarang Batang	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto, Pendapatan	Others Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Ciner Serpong Jaya	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi	Others Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
KSO/JO WKR - Darmo Permai	Piutang Lain-lain	Others Receivable
PT Citra Washpphotowa	Piutang Lain-lain	Others Receivable
PT Prima Multi Terminal	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan, Investasi Jangka Panjang	Accounts Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
KSO/JO Waskita Karya - Trinita	Piutang Retensi, Uang Muka Jangka Panjang, Pendapatan	Retention Receivable, Advance on Long Term Contract, Revenues
PT PAL Indonesia (Persero)	Piutang Retensi	Retention Receivable
PT Hutama Marga Waskita	Tagihan Bruto, Pendapatan	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasamarga Japek Selatan	Tagihan Bruto, Pendapatan	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
PT Angkasa Pura I (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Lembaga Keuangan Non Bank, Pendapatan	Loan to Financial Institution Non Bank, Revenues
KSO/JO Waskita - HK - Wika	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures, Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - NK	Investasi pada Ventura Bersama, Utang Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures, Joint Ventures Payable
KSO/JO Waskita - Brantas	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - Brantas - Wika	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - HK	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Wika - Waskita - Nindya	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP - Wika	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP - HK	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Utang Usaha	Accounts Payable
KSO/JO BAP - Waskita	Utang Ventura Bersama	Joint Ventures Payable
KSO/JO Waskita - Nindya	Utang Ventura Bersama	Joint Ventures Payable
KSO/JO WKR - RNI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan, Investasi pada Ventura Bersama	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues, Investment in Joint Ventures
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable
KSO/JO Waskita - PAL	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivable
Waskita - Yodya Karya	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
Waskita - Wika - PP - HK	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Utang Bruto	Gross Amount due to Subcontractors

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak yang berelasi:

The detail of items associated with the related parties transaction:

Aset	2019	2018	2019	2018	Assets
	Rp	Rp	%	%	
Kas dan Setara kas	8.619.017.949.710	8.970.687.634.778	7,03%	7,21%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	1.085.899.931.009	2.242.057.577.361	0,89%	1,80%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.461.470.561.988	954.996.413.765	1,19%	0,77%	Retention Receivable
Piutang Lain-lain	4.000.685.585.475	3.667.877.542.828	3,26%	2,95%	Others Receivable
Tagihan Bruto	11.475.684.609.873	24.937.285.230.226	9,36%	20,05%	Gross Amount due to from Customer
Aset Ventura Bersama	579.708.851.562	819.604.236.921	0,47%	0,66%	Joint Ventures Assets

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan jumlah aset.

The percentage above is a comparison with the total of assets.

Liabilitas	2019	2018	2019	2018	Liabilities
	Rp	Rp	%	%	
Utang Bank	25.521.487.096.905	30.996.573.678.529	27,30%	32,46%	Bank Loan
Utang Ventura Bersama	238.172.581.683	284.884.748.376	0,25%	0,30%	Joint Ventures Payables
Utang Usaha	202.384.052.499	162.642.716.514	0,22%	0,17%	Account Payable
Utang Bruto Subkontraktor	71.292.255.619	28.608.708.105	0,08%	0,03%	Gross Amount Due to Subcontractors
Uang Muka Kontrak	51.075.347.024	86.841.759.501	0,05%	0,09%	Advance on Contract

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan jumlah liabilitas.

The percentage above is a comparison with the total of liabilities.

Pendapatan Usaha	2019	2018	2019	2018	Revenue
	Rp	Rp	%	%	
Pendapatan Usaha	10.186.759.323.510	24.498.771.777.903	32,45%	50,21%	Revenue

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan total pendapatan usaha.

The percentage above is a comparison with the total of revenue.

55. PERJANJIAN

55. AGREEMENTS

a. Kontrak Konstruksi

a. Construction Contract

Pada tanggal 31 Desember 2019, berikut perikatan dan perjanjian dalam rangka aktivitas konstruksi:

As of December 31, 2019, following the details of commitments and agreement related to construction activity:

No.	Nama Proyek/ Project Name	Nomor Kontrak/ Contract Number	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Jangka Waktu/ Time Period		Keterangan/ Remark
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish	
1	Jalan Tol Cibitung-Cilincing STA. -0+400 - STA. 30+200 dan STA. 32+800 - STA. 33+618	007/KONTRAK/WK-CTP/II/2017	6.665.967.025.720	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	07-Jul-17	29-Feb-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
2	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (General)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan Nomor : 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	6.179.991.844.958	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
3	Paket 1 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, New Aur Duri - Peranap	0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	4.026.285.529.669	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	23-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
4	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II Seksi 1	17/ADD/Kontrak.S1.S2.S3-WK/2019	3.819.079.633.000	PT Waskita Sriwijaya Tol (dih/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	08-Jun-16	31-Jan-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
5	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	07/ADD/SPPJK/WBW/2017	3.724.136.777.273	PT Waskita Bumi Wira	13-Des-16	30-Apr-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
6	Jalan Bebas Hambatan & Tol Trans Sumatera 3 Section Bakauheni - Terbanggi Besar	DPBJT/FE.2970B/S.Perj.75A/X/2018	2.812.380.780.000	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-15	30-Nov-18	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
7	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	2.678.957.208.310	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	23-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
8	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III - Induk	11/BA.JJS/2019	2.634.858.146.150	PT Jasamarga Japek Selatan	07-Feb-19	07-Sep-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
9	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket I	21/ADD/KONTRAK.S1-WK/2019	2.332.209.750.750	PT Waskita Sriwijaya Tol (dih/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	02-Jun-17	15-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
10	Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan	002/KONTRAK-HMW/VI/2018	2.197.007.509.090	PT Hutama Marga Waskita	29-Jun-18	29-Jun-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
11	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 3)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	2.105.066.823.305	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
12	Paket 3 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim - New Aur Duri (Struktur Atas)	0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017	1.995.928.346.960	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	07-Jul-17	06-Jul-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
13	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	1.827.814.190.904	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
14	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-2)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	1.778.742.359.383	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
15	Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Seksi I	ADDENDUM V 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017	1.711.445.192.974	PT Cinere Serpong Jaya	01-Agu-17	29-Feb-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
16	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 4)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	1.388.581.735.869	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
17	Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 2A	300/AA-JSN/ADD.XII.KONTRAKTOR/XII/2018	1.269.049.939.859	PT Jasamarga Solo Ngawi	30-Jun-15	30-Sep-18	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
18	Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 1A	189/AA-JSN/ADD.XI.WSKT/VIII/2019	1.197.797.144.580	PT Jasamarga Solo Ngawi	30-Jun-15	31-Des-18	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
19	Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 1B	189/AA-JSN/ADD.XI.WSKT/VIII/2019	1.179.056.058.697	PT Jasamarga Solo Ngawi	30-Jun-15	31-Des-18	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
20	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (Zona V)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	1.151.354.245.981	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
21	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (Zona III)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	1.130.899.979.367	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
22	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (Zona II)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	1.055.589.216.315	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
23	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2A)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	1.020.944.279.465	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
24	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2D. 1	125/ADD-WSP/KKDM/X/2019	996.645.639.090	PT Kresma Kusuma Dyandra Marga	30-Okt-17	31-Des-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
25	Jalan Tol Solo - Ngawi Seksi SN. 2B	300/AA-JSN/ADD.XII.KONTRAKTOR/XII/2018	889.233.365.965	PT Jasamarga Solo Ngawi	30-Jun-15	30-Nov-18	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Lanjutan)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 AND FOR THE YEARS
 THEN ENDED
 (Continued)**

No.	Nama Proyek/ Project Name	Nomor Kontrak/ Contract Number	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Jangka Waktu/ Time Period		Keterangan/ Remark
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish	
26	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-3)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	856.654.890.679	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
27	Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi I : STA. 23+900 - STA. 27+070	13/ADD-XIII/JKP/CCT/2019	818.561.982.727	PT Cimanggis Cibitung Tollways	09-Okt-15	02-Mar-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
28	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A Ujung	108/ADD-IVS.Per/KKDM/III/2019	772.934.636.364	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	08-Feb-19	06-Sep-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
29	Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Seksi II	ADDENDUM V 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017	742.955.867.907	PT Cinere Serpong Jaya	01-Agu-17	31-Mar-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
30	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (Zona IV)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	720.466.618.068	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
31	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wado di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	01/PLTA/WWE-WSKT/2017	716.732.000.000	PT Waskita Wado Energi	15-Des-17	15-Des-19	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
32	Pembangunan Bendungan Raknomo di Kabupaten Kupang	HK.02.03/SNVT-PJSA-NTT.II/PKSDA-I/223/XI/2014	646.009.581.818	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	04-Des-14	11-Feb-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
33	Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda	PJKP-19003930	623.181.818.182	PT Angkasa Pura I (Persero)	04-Jul-19	26-Agu-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
34	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 1)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	622.512.151.413	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
35	Paket 3 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim - New Aur Duri (Struktur Bawah)	0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017	614.044.653.040	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	07-Jul-17	06-Jul-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
36	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 2A	05/KONTRAKS2.S3-WK/2016	561.889.381.000	PT Waskita Sriwijaya Tol (d/h/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	20-Des-16	30-Apr-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
37	Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket II	HK.02.03/PKK.BEND.II/2018/01	557.877.638.182	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	17-Sep-18	08-Jun-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
38	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 4A)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	517.365.548.368	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
39	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2B)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	506.693.608.324	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
40	Jembatan Penghubung Pulau 2B Kosambi	KML/POI04/17/00025	454.410.000.000	PT Kukuh Mandiri Lestari	27-Jul-17	28-Feb-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
41	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-1)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	442.499.784.161	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
42	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 1a)	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	434.890.726.064	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
43	Apron Bandara Sultan Hasanuddin	PJKP-19003592	422.000.000.000	PT Angkasa Pura I (Persero)	18-Feb-19	31-Jan-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
44	Pekerjaan Pembangunan Koneksi Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan Jalan Tol Wiyoto Wiyono	147/ADD-VI/SPIKKDM/XII/2019	383.324.235.111	PT Kresma Kusuma Dyandra Marga	05-Des-17	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
45	Pekerjaan Arena Aquatic Papua	HK.02.03/PPBLS/PPK.3/442	346.393.407.273	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	07-Des-18	28-Jul-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
46	Pekerjaan Terminal Bandara Internasional Minangkabau	PJJ.14.10/00/09/2018/0790	330.866.780.000	PT Angkasa Pura II (Persero)	17-Sep-18	09-Mar-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
47	Gedung Kampus UIII (Paket I)	5152/DJ.II/KS.01.7/11/2018	329.647.605.091	Kementerian Agama/ The Ministry of Religion	29-Nov-18	21-Feb-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
48	Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan (Zona I)	01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 1/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016	322.198.307.980	Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	21-Okt-15	31-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
49	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 3B	05/KONTRAKS2.S3-WK/2016	318.854.770.000	PT Waskita Sriwijaya Tol (d/h/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada)	20-Des-16	30-Apr-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
50	Pekerjaan Bandara Depati Amir	PJJ.14.10/00/11/2018/1028	284.614.862.000	PT Angkasa Pura II (Persero)	08-Nov-18	25-Sep-20	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
51	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-4) Jembatan Sodong	PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019	185.741.098.521	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process

b. Kontrak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol

b. Concession Toll Road Right Contract

No	Perusahaan/ The Company	Ruas Tol/ Toll Section	Mitra Kerja/ Partners	Isi Perjanjian/ Content of the Agreement	Jangka Waktu/ Period	
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish
1	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	Cimanggis - Cibitung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 35 tahun/ Toll road concession rights for 35 years	2016	2051
2	PT Trans Jabar Tol (TJT)	Ciawi - Sukabumi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2015	2060
3	PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	Pemalang - Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2017	2057
4	PT Waskita Sriwijaya Tol (WST) d/h/ formerly PT Sriwijaya Markmore Persada (SRIMP)	Kayu Agung - Palembang - Betung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2017	2062
5	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2016	2061
6	PT Cibitung Tanjung Priok (CTP)	Cibitung - Cilincing	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2011	2051
7	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	Bekasi - Cawang - Kp Melayu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2011	2056
8	PT Tol Teluk Balikpapan	Penajam - Balikpapan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2011	2051

c. Kontrak Lain-lain

c. Others Contract

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

Berdasarkan Akta notaris No. 23 tanggal 10 April 2018 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0141910 menyatakan bahwa WTR telah mengalihkan atau menjual kepemilikan sahamnya di WTR sebanyak 1.206.049 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.206.049.000.000 yang mewakili 57,14% dari total saham yang telah dikeluarkan WTR kepada Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang selanjutnya di atasnamakan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian dari RDPT. Dengan demikian porsi kepemilikan WTR di WTR menjadi 42,86%.

Based on Notarial deed No. 23 dated April 10, 2018 endorsed by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0141910 states that WTR has transferred or sold its ownership in WTR of 1,206,049 shares with par value of Rp 1,206,049,000,000 which represents 57.14% of the total shares issued by WTR to the Limited Ownership Mutual Fund (RDPT), hereinafter referred to as PT Bank Mega Tbk as Custodian Bank of RDPT. Thus the share of WTR ownership in WTR becomes 42.86%

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 11 April 2018 mengenai Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0144385 menerangkan bahwa WTR melalui surat No. 568/WTR/DIR/2018 tanggal 11 April 2018 menyatakan tidak mengambil bagian atas saham secara proporsional terkait dengan penerbitan saham baru di perseroan. Sesuai dengan akta tersebut maka terdapat perubahan kepemilikan saham WTR yakni menjadi 904.536 lembar saham atau setara dengan Rp 904.536.000.000 atau sebesar 29,99%.

Based on notarial deed No. 26 dated April 11, 2018 regarding Amendments to Capital Upgrades issued by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0144385 states that WTR through letter No. 568/ WTR/DIR/2018 dated April 11, 2018 said that it does not take part in the proportion of shares related to the issuance of new shares in the Company. In accordance with the deed then there is a change of ownership of WTR shares into 904,536 shares or equivalent to Rp 904,536,000,000 or 29.99%

56. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

56. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

Dalam pengelolaan keuangan, Grup telah melakukan analisa risiko terhadap persaingan dan ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut:

In financial management, the Group has conducted a risk analysis on competition and uncertainties that could affect the financial assets and financial liabilities as follows:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perbedaan nilai wajar dengan nilai tercatat pada 31 Desember 2019 dan 2018 tidak signifikan.

	2019 Rp	2018 Rp
Aset Keuangan - Pinjaman yang diberikan dan Piutang		
Kas dan Setara Kas	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201
Investasi Jangka Pendek	8.448.200.000	8.448.200.000
Piutang Usaha dan Retensi	5.339.021.639.404	5.102.055.774.804
Piutang Lain-lain	8.508.313.945.452	8.844.805.010.582
Piutang Ventura Bersama	3.302.632.305.354	659.662.426.115
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	14.171.175.559.016	32.350.733.163.102
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	352.149.130.444	394.751.454.649
Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Investasi Jangka Panjang Lainnya	446.756.923.000	347.822.000.000
Jumlah	41.386.807.731.062	58.553.956.246.453
Liabilitas Keuangan -		
Biaya perolehan diamortisasi		
Utang Usaha	12.381.177.826.833	14.905.832.998.966
Utang Bruto Subkontraktor	4.049.973.119.497	8.701.662.168.774
Utang Bank	51.487.513.559.809	48.711.501.155.353
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	1.846.591.007.531	554.403.429.023
Biaya yang Masih Harus Dibayar	720.628.410.360	695.785.978.311
Utang Lain-lain - Jangka Panjang	1.876.410.844.810	1.549.134.705.578
Jumlah	72.362.294.768.840	75.118.320.436.005

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The difference between the fair value and the carrying value at December 31, 2019 and 2018 was not significant.

	2019 Rp	2018 Rp
Financial Assets-		
Loan and Receivables		
Cash and Equivalents Cash	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201
Short-Term Investments	8.448.200.000	8.448.200.000
Trade Receivable and Retention	5.339.021.639.404	5.102.055.774.804
Other Receivables	8.508.313.945.452	8.844.805.010.582
Joint Ventures Receivables	3.302.632.305.354	659.662.426.115
Gross Amount Due from Customers	14.171.175.559.016	32.350.733.163.102
Financial Assets from Concession Project	352.149.130.444	394.751.454.649
Held to Maturity Financial Assets		
Other Long-Term Investments	446.756.923.000	347.822.000.000
Total	41.386.807.731.062	58.553.956.246.453
Financial Liabilities-		
Amortized cost		
Accounts Payables	12.381.177.826.833	14.905.832.998.966
Gross Amount Due to Third Parties	4.049.973.119.497	8.701.662.168.774
Bank Loan	51.487.513.559.809	48.711.501.155.353
Loan to Financial Institution Non-Bank	1.846.591.007.531	554.403.429.023
Accrued Expenses	720.628.410.360	695.785.978.311
Other Payables - Long Term	1.876.410.844.810	1.549.134.705.578
Total	72.362.294.768.840	75.118.320.436.005

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's business includes risk-taking activities with specific objectives with professional management. The main function of the Group's risk management is to identify all key risks, measure these risks and manage risk positions. The Group regularly reviews policies and risk management system to adjust to changes in markets, products and best market practices.

The Group defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by both internal and external factors that potentially have a negative impact on the achievement of Group goals.

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and returns and minimize potential adverse effects of the Group's financial performance.

The main financial risks facing the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio-economic and political conditions. Attention to risk management has increased significantly and considered changer and volatility of financial markets in Indonesia and internationally.

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2019 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

(ii) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Grup.

Berikut ini merupakan rincian dari liabilitas keuangan berdasarkan jenis tingkat suku bunga:

	2019	2018
	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan		
Suku bunga mengambang	22.162.363.192.880	27.959.247.278.215

*Financial Liabilities
Floating Interest Rate*

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 0,5 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

(i) Credit Risk

Credit risk is the loss arising from customers who fail to meet their contractual obligations.

The Group's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention, gross amount due from customers and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts. The aging of trade receivables can be seen on notes to consolidated financial statements. On December 31, 2019 accounts receivable of the Group is not concentrated on a particular customer.

The Group manages credit risk by setting limits of acceptable risk for each customer and be more selective in the choice of banks and financial institutions, that is, only banks and financial institutions are predicated famous and well chosen.

(ii) Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Group has short-term loans with floating interest. The interest rate that are quite high and occurs suddenly can effect the decline in the Group's income.

The following is a breakdown of financial liabilities based on the type of interest rate:

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the payable liability at the end of the reporting period will remain for the whole year. A 0.5 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 354.437.575.076 dan Rp 322.728.426.040. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga mengambang.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, profit as of December 31, 2019 and 2018 would decrease/increase by Rp 354,437,575,076 and Rp 322,728,426,040, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its floating rate borrowings.

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

(iii) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the positions of cash flows show short-term revenues are not sufficient to cover short-term expenses.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Liquidity risk is an exposure of the Group difficulties in meeting financial obligations that must be paid with cash or other financial assets. The Group is expected to pay all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, the Group must generate sufficient cash inflows.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:

These are non-derivative financial liabilities based on residual maturity value which was not discounted:

2019								
Jatuh Tempo/ Due Date								
< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years	Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Usaha	11.315.747.030.903	1.065.430.795.930	--	--	12.381.177.826.833	--	12.381.177.826.833	Accounts Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	493.295.932.778	--	--	--	493.295.932.778	--	493.295.932.778	Other Short-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	11.809.042.963.681	1.065.430.795.930	--	--	12.874.473.759.611	--	12.874.473.759.611	Total Financial Liabilities
2018								
Jatuh Tempo/ Due Date								
< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years	Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Utang Usaha	14.119.798.348.256	786.034.650.710	--	--	14.905.832.998.966	--	14.905.832.998.966	Accounts Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	825.239.033.758	--	--	--	825.239.033.758	--	825.239.033.758	Other Short-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	14.945.037.382.014	786.034.650.710	--	--	15.731.072.032.724	--	15.731.072.032.724	Total Financial Liabilities

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan Liabilitas keuangan.

The Group manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents sufficient to meet the commitments of the Group for normal operation and regularly evaluates cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

(iv) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri.

(iv) Foreign Exchange Risk Foreign Currency

Risk exposure of foreign currency exchange rate is part of normal operations of the Company and the Foreign branches.

Pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

The effect of foreign exchange currency differences is not significant.

**(v) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah,
Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.**

Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup.

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Grup menurun. Diversifikasi risiko ini pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

c. Manajemen Risiko Modal

Tujuan dari Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Grup dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Strategi Grup untuk mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 2 Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas Keuangan			<i>Financial Liabilities</i>
Suku bunga mengambang	22.162.363.192.880	27.959.247.278.215	<i>Floating Interest Rate</i>
Total Liabilitas	93.470.790.161.572	95.504.462.872.769	<i>Total Liabilities</i>
Dikurang: Kas dan Setara Kas	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201	<i>Deduct: Cash and Cash Equivalents</i>
Liabilitas Bersih	<u>84.212.480.133.180</u>	<u>84.658.784.655.568</u>	<i>Net Liabilities</i>
Total Ekuitas	<u>29.118.469.188.999</u>	<u>28.887.118.750.867</u>	<i>Total Equity</i>
Rasio Utang terhadap Modal	2,89	2,93	<i>Net Debt to Equity Ratio</i>

**(v) Risk of Changes in Government Policy,
Economic and Social Politics.**

Government policies concerning economic and monetary, and social and political conditions that are less conducive will result in the decreasing of investment and development. This can lead to delays in projects that have been or will be acquired by the Group.

This risk is a systemic risk whereby if this happens then the risk will negatively affect all the variables involved, this make the performance of the Group decrease. Even risk diversification is not able to eliminate this risk.

c. Capital Risk Management Policy

The purpose of the Group in managing capital is to protect the ability of the Group in maintaining business continuity, so the Group can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital in proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

Consistent with other companies in the industry, the Group monitors capital on the basis of the debt ratio of to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) minus cash and cash equivalents.

The Group's strategy is to maintain ratio of the debt to adjusted capital at the lower limit with the range of 2 Debt to capital ratio as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

57. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perusahaan

Berdasarkan akta notaris Euis Budiarti Afandi, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris No. 02/WASKITA-ACSET/KSO/2017, tanggal 19 Januari 2017 telah dibentuk Kerjasama Operasi (KSO) antara Perusahaan dengan PT Acset Indonusa Tbk dengan nama Waskita – Acset KSO untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500).

Perusahaan mempunyai porsi yang dikerjakan secara porsi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat sta 9+500 - sta 28+480 berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (KSO) No: 01/WASKITA-ACSET/JOA/2017. Sisa pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500) dilaksanakan secara ventura bersama (Catatan 13).

Entitas Anak dari PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WSE menandatangani *Power Purchase Agreement (PPA)* pada tanggal 23 Maret 2015 dengan PLN. Berdasarkan ketentuan PPA, PLN telah berkomitmen untuk membeli kapasitas pembangkit listrik WSE dan seluruh hasil listrik selama dua puluh tahun sampai 2036.

WSE telah membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pabrik yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah beroperasi secara komersial dalam proyek, WSE berkewajiban menyediakan kepada PLN keluaran listrik bersih dari fasilitas proyek, yang akan dibeli oleh PLN pada jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBL. Jumlah yang harus dibayar oleh PLN adalah jumlah keluaran listrik bersih yang dihasilkan. Jangka waktu PPA dimulai pada tanggal 9 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2036, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PPA, sebagaimana telah diubah.

Seluruh pihak sepakat harga energi listrik terukur pada titik transaksi, yaitu:

- i. Rp 1.182,50 per kWh untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sejak tanggal operasi komersial pembangkit; dan
- ii. Rp 825 per kWh untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sejak tanggal operasi komersial pembangkit.

PLN memiliki opsi untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan WSE dalam proyek dengan nilai terminasi berdasarkan formula tertentu yang tercantum dalam PPA. Harga beli yang harus dibayar oleh PLN, dalam hal PLN melakukan opsi pembelian, mengalami penurunan seiring menjelang berakhirnya PPA.

57. COMMITMENT AND CONTINGENCY

The Company

Based on notarial deed of Euis Budiarti Afandi, Bachelor of Law, Notary Specialist No. 02/WASKITA-ACSET/KSO/2017, dated January 19, 2017 has been established Joint Operation (JO) between the Company with PT Acset Indonusa Tbk under the name of JO Waskita - Acset for the engagement of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang (sta 9 + 500 s.d sta 47 + 500).

The Company has a portion of joint operation for the engagement of the construction work of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang sta 9 + 500 - sta 28 + 480 based on cooperation agreement (KSO) No: 01/WASKITA-ACSET/JOA/2017. The rest of the construction work of the Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang segment (sta 9 + 500 s.d sta 47 + 500) is worked by joint venture (Note 13)

Subsidiary of PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WSE entered into Power Purchase Agreement (PPA) on March 23, 2015 with PLN. Under the terms of the PPA, PLN has committed to purchase the available capacity of the WSE's power stations and all generated of electricity for a period of twenty years until 2036.

WSE has build, owned and operated the plant facilities at site which is located at South Solok, West Sumatera.

Upon commercial operation of the Project, WSE is obligated to make available to PLN the net electrical output of the project's plant facilities, which will be purchased by PLN at amounts determined under formula set forth in the PJBL. The amount to be paid by PLN is the amount of net electrical output produced. The term of the PPA commenced on December 9, 2016 and will expire on December 9, 2036, unless terminated earlier in accordance with the terms of the PPA, as amended.

All parties agreed electricity price estimated on transaction points as stated:

- i. *Rp 1,182.50 per kWh for year-1 through year-8 since the date of plant's commercial operation; and*
- ii. *Rp 825 per kWh for year-9 through year-20 since the date of plant's commercial operation.*

PLN has an option to purchase the WSE's right, title and interest in the project for a termination value based on a certain formula set forth in the PPA. The purchase price to be paid by PLN, in case PLN exercises the purchase option, decreases as the end of the PPA approaches.

Pada tanggal 1 Juni 2016, WSE dan PLN menandatangani amandemen PPA terkait kewajiban dan tanggung jawab para pihak, pembangunan pembangkit dan pembayaran yang diizinkan berdasarkan PPA awal, jika disetujui kedua belah pihak. Di bawah PPA, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah hal-hal tertentu dari PPA awal.

Entitas Anak, PT Waskita Karya Realty (WKR)

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha, WKR memiliki perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian dan ikatan penting yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perjanjian dengan KSO Waskita Trinita

Pada tanggal 15 Nopember 2016, WKR menandatangani perjanjian perikatan No. 001/KB/WKR-KSO/XI/2016 dengan KSO Waskita Trinita terkait pembelian lima unit ruang kantor unit Brooklyn milik KSO Waskita Trinita dengan nilai perikatan sebesar Rp 20.816.327.272. Jatuh tempo pinjaman ini sampai dengan 28 Desember 2019 yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Perjanjian dengan PT Dafam Hotel Management

Pada tanggal 24 Maret 2016, WKR menandatangani perjanjian No. 2 dengan PT Dafam Hotel Management (Operator). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Dafam Hotel Management bertanggungjawab sebagai operator atas Hotel Dafam Teraskita milik WKR.

Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang jika disetujui oleh kedua belah pihak paling lambat 90 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak menyetujui bahwa PT Dafam Hotel Management sebagai Operator berhak menerima:

1. *Technical Assistant Fee* sebesar Rp 600.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2015.
2. *Base fee* sebesar 2% pada tahun pertama dan 2,5% di tahun-tahun berikutnya dari Total Pendapatan Operasional.
3. *Incentive Fee* berdasarkan tinggi rendahnya *Gross Operating Profit (GOP)* :
 - a. 0% dari GOP apabila GOP kurang dari 35% dari Pendapatan Hotel Total;
 - b. 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 45% dari Pendapatan Hotel Total; dan
 - c. 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 45% dari Pendapatan Hotel Total.

On June 1, 2016, WSE and PLN entered into the amendment to the PPA regarding obligation and responsibilities of both parties, construction of power plants and payment, which is allowed under the original PPA, if agreed by both parties. Under the PPA, both parties agreed to amend certain matters of the original PPA.

Subsidiary, PT Waskita Karya Realty (WKR)

In connection with its operations, WKR entered into significant agreements. The significant agreements and commitments applied until December 31, 2019 are as follows:

Agreement with KSO Waskita Trinita

On November 15, 2016, the Company entered into agreement No. 001/KB/WKR-KSO/XI/2016 with KSO Waskita Trinita related to the acquisition of five units' office space unit Brooklyn from KSO Waskita Trinita amounted to Rp 20,816,327,272. The maturity date of debt is on December 28, 2019 with installment payment method.

Agreement with PT Dafam Hotel Management

Based on the Deed No. 2 dated March 24, 2016, WKR entered into management agreement with PT Dafam Hotel Management (the Operator). Based on the agreement, PT Dafam Hotel Management is responsible as the operator of Hotel Dafam Teraskita owned by WKR.

The period of the agreement is 10 (ten) years since the signing date of this agreement and could be renewed if agreed upon by both parties at least 90 working days before the expiration date.

Based on those agreements, all parties agreed that PT Dafam Hotel Management as Operator entitled to receive:

1. *Technical Assistant Fee* amounted to Rp 600,000,000 which has been paid on May 26, 2015.
2. *Base fee* of 2% for the first year and 2,5% for following years from of Total Operating Revenue.
3. *Incentive Fee* based on high and low of *Gross Operating Profit ("GOP")* :
 - a. 0% of GOP if GOP is less than 35% of Total Revenue Hotel;
 - b. 5% of GOP if GOP is more than 35% and less than or equivalent with 45% of Total Revenue Hotel;
 - c. 7% of GOP if GOP is more than 45% of Total Revenue Hotel.

4. *Sales and marketing fee* adalah 1% dari pendapatan kotor kamar per bulan.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Asiana Senopati

Pada tanggal 25 Juni 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453 m² yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp 603.345.343.137.

Perjanjian KSO dengan PT Asiana Senopati sudah berakhir sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 12 Desember 2019 tentang pengakhiran kerja sama operasi antara WKR dengan PT Asiana Senopati.

Perjanjian KSO dengan PT Sirius Terang Cemerlang

Pada tanggal 26 Mei 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 166 dengan PT Perintis Trinitis Properti dan PT Perintis Trusmi Properti dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikannya telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 40,8%, PT Perintis Trinitis Properti sebesar 39,2%, dan PT Perintis Trusmi Properti sebesar 20% dengan modal awal sebesar Rp 125.000.000.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, terdapat pembaharuan perjanjian KSO Waskita Trinitis II. Disepakati bahwa posisi PT Perintis Trinitis Properti digantikan oleh PT Sirius Terang Cemerlang. Seluruh hak dan kewajiban PT Perintis Trinitis Properti dialihkan kepada PT Sirius Terang Cemerlang.

4. *Sales and marketing fee* are 1% of the gross revenue room per month.

Joint Venture agreement with PT Asiana Senopati

On June 25, 2015, WKR entered into joint venture agreement No. 40 with PT Asiana Senopati in order to develop 5,453 sqm land areas at Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Senayan, Kebayoran Baru. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been complete, demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations .

The composition of shareholders consists of WKR at 51% and PT Asiana Senopati at 49%, with an initial capital of Rp 603,345,343,137.

The KSO agreement with PT Asiana Senopati has ended in accordance with Deed No. 02 dated December 12, 2019 concerning the termination of cooperation operation between WKR and PT Asiana Senopati.

Joint Venture Agreement with PT Sirius Terang Cemerlang

As of May 26, 2015, WKR entered into joint venture agreement No. 166 with PT Perintis Trinitis Properti and PT Perintis Trusmi Properti in order to develop 5,000 sqm land areas at Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of shareholders consists of WKR at 40.8%, PT Perintis Properti Trinitis at 39.2%, and PT Perintis Trusmi Properti at 20% with an initial capital of Rp 125,000,000,000.

In October 30, 2015, there is a renewal of the KSO Waskita Trinitis II agreement. It was agreed that the position PT Perintis Trinitis Properti is replaced by PT Sirius Terang Cemerlang. All rights and obligations of PT Perintis Trinitis Properti is transferred to PT Sirius Terang Cemerlang.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2016, terdapat perubahan perjanjian KSO Waskita Trinitii II yang berisi komposisi penyertaan saham yang baru, yaitu WKR sebesar 50,8% atau senilai Rp 69.646.800.000 dan PT Sirius Terang Cemerlang sebesar 49,2% atau senilai Rp 67.453.200.000.

Perjanjian KSO dengan PT Darmo Permai

Pada tanggal 21 Mei 2014, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 6 dengan PT Darmo Permai dalam rangka pengembangan tanah seluas 34.089 m² yang terletak di Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51%, PT Darmo Permai sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp 426.112.500.000.

Perjanjian KSO dengan PT Graha Jasa Ekatama

Pada tanggal 6 Juni 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 17 dengan PT Graha Jasa Ekatama dalam rangka pengembangan tanah seluas 11.090 m² di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban. Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Ekatama terdiri dari WKR sebesar 60%, PT Graha Jasa Ekatama sebesar 40% dengan modal awal sebesar Rp 331.000.000.000.

Perjanjian KSO dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2079 dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka pengembangan tanah seluas 7.025 m² di Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. Jangka waktu operasi berlaku selama 48 bulan dan perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait

Based on the Deed No. 9 dated October 3, 2016, there is a change of the KSO Waskita Trinitii II agreement which contains the composition of investments in new shares, namely WKR of 50.8% or equivalent to Rp 69,646,800,000 and PT Sirius Terang Cemerlang by 49.2% or equivalent to Rp 67,453,200,000.

Joint Venture Agreement with PT Darmo Permai

As of May 21, 2014, WKR entered into KSO agreement No. 6 with PT Darmo Permai in order to develop 34,089 sqm land areas at Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of shareholders consists of WKR at 51%, PT Darmo Permai at 49% with an initial capital of Rp 426,112,500,000.

Joint Venture Agreement with PT Graha Jasa Ekatama

As of June 6, 2016, WKR entered into KSO agreement No. 17 with PT Graha Jasa Ekatama in order to develop 11,090 sqm at Pejaten Barat, Jakarta Selatan. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations. The composition of the shareholder in the Waskita Ekatama joint venture consists of WKR at 60%, PT Graha Jasa Ekatama at 40% with initial capital of Rp 331,000,000,000.

Joint Venture Agreement with PT Rajawali Nusantara Indonesia

As of October 10, 2016, WKR entered into KSO agreement No. 2079 with PT Rajawali Nusantara Indonesia in order to develop 7,025 sqm of land at Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. The operating periods is valid for 48 months and the agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed, demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third

dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan modal di dalam KSO RNI – Waskita terdiri dari RNI berupa tanah seluas 7.052 m², dan WKR berupa modal kerja sebesar Rp 361.912.928.457.

Pada akhir periode perjanjian KSO, RNI akan menerima bagi hasil senilai Rp 367.544.705.882.

Perjanjian Dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Nopember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 007/P.WKR/2017 terkait dengan *Transit Development Orientation Project* di Bogor. Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan stasiun Bogor. Perjanjian ini berakhir pada Nopember 2070.

Perjanjian KSO RNI – WSKT

Pada tanggal 20 Nopember 2017, KSO RNI – Waskita membuat perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan WSKT No. 04 tentang penjualan ruang perkantoran pada proyek KSO RNI Waskita dengan nilai jual Rp 563.310.000.000 sebelum PPN. Pembayaran atas penjualan ini dilakukan secara bertahap sampai dengan penyelesaian pembangunan pada Triwulan IV tahun 2018.

58. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, telah terjadi pandemik virus COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Grup pada beberapa bulan mendatang.

Dampak pandemik virus COVID-19 pada akhir Maret 2020 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi adalah tidak material bagi Grup.

Dampak pandemik setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi belum dapat diestimasi saat ini.

party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of the capital investment in the KSO RNI - Waskita consists of RNI with land areas of 7,052sqm and WKR with initial capital of Rp 361,912,928,457.

At the end of joint venture agreement, RNI will receive profit sharing amounting to Rp 367,544,705,882.

Agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero)

On November 30, 2017, the Company entered into agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 007/P.WKR/2017 related to Transit Development Orientation Project in Bogor. Both parties agreed to develop the utilization of land owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero) in Bogor station area. This agreement will be due on November 2070.

Agreement KSO RNI - WSKT

On November 20, 2017, KSO RNI - Waskita entered into agreement with WSKT No. 04 on sale of office space owned by KSO RNI Waskita project amounted to Rp 563,310,000,000 before VAT. The payment made by installment basis until the completion of development in the fourth quarter in 2018.

58. Event After Reporting Period

As of the authorization date of the issuance of the consolidated financial statement, the COVID-19 virus pandemic has occurred, which has resulted in an increase in foreign exchange rates and declining economic activity.

Directly and indirectly, this impact will certainly also affect the Group's operations in the coming months.

The impact of the COVID-19 virus pandemic from on March ended 2020 to the date of issuance of the consolidated financial statements is immaterial for the Group.

The impact of a pandemic after the issuance date of the consolidated financial statements cannot be estimated at this time.

59. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk mengeluarkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada Catatan 2.n, 5, 11.d, 16, 17, 22, 30, 58 dan 59 atas laporan keuangan konsolidasian.

60. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 236 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 21 April 2020.

59. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with PT Waskita Karya (Persero) Tbk plan to issue a Shelf Registration Bonds Public Offering IV Waskita Karya Phase I Year 2020, PT Waskita Karya (Persero) Tbk has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 to conform with prevailing capital markets regulations. These reissued consolidated financial statements include additional information in the Notes 2.n, 5, 11.d, 16, 17, 22, 30, 58 and 59 to the consolidated financial statements.

60. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 236 were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issue on April 21, 2020.
